



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 14 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 14 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024**

DAFTAR - ISI

- I. PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024**
- II. LAMPIRAN I : RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
- III. LAMPIRAN II : RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**
- IV. LAMPIRAN III : RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
 - 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - 2. Dinas Kesehatan
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 4. Satuan Polisi Pamong
 - 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
 - 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 9. Dinas Perhubungan
 - 10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 - 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 13. Dinas Kebudayaan
 - 14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
 - 15. Dinas Kelautan dan Perikanan
 - 16. Dinas Pariwisata
 - 17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - 18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - 19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 20. Sekretariat Daerah
 - 21. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

V. LAMPIRAN IV : REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN

VI. LAMPIRAN V : REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

VII. LAMPIRAN VI : REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

VIII. LAMPIRAN VII : SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

IX. LAMPIRAN VIII : SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DENGAN PPAS DENGAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

X. LAMPIRAN IX : SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

XI. LAMPIRAN X : DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

XII. LAMPIRAN XI : DAFTAR PIUTANG DAERAH

XIII. LAMPIRAN XII : DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA

- XIV. LAMPIRAN XIII : DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN- LAIN**
- XV. LAMPIRAN XIV : DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN**
- XVI. LAMPIRAN XV : DAFTAR DANA CADANGAN**
- XVII. LAMPIRAN XVI : DAFTAR PINJAMAN DAERAH**

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI**

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024**



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 4 Tahun 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-6664 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD T.A 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD T.A 2024;
 - b. Bahwa sesuai hasil rapat antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Bali dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali terhadap beberapa ketentuan dalam Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024, telah mendapat persetujuan bersama untuk penyempurnaan dan penyesuaian;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Bali tentang Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tetang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penulisan Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodelikasi, dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah dan Rancangan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10);
21. Peraturan DPRD Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 46);
22. Peraturan DPRD Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 47)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KEEMPAT : Memberikan Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Uraian lebih lanjut penyempurnaan Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 dimaksud Diktum Kesatu, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan ini.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Bali sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Kedua dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada Tanggal 27 Desember 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROVINSI BALI,



I NYOMANADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si

Wakil Ketua,

Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY,
SE.,M.M.,Ak.,CA

Wakil Ketua,

I NYOMAN SUYASA, ST

Wakil Ketua,

TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI,
S.IP., M.A.P

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Bali di Denpasar;
3. Yth. Pimpinan DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
4. Bupati/Walikota Se- Bali;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se- Bali;
6. Arsip;

MATRIK PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RANCANGAN APBD 2024
I.	TUJUAN EVALUASI	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan: A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; B. Kepentingan umum; C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).	
II.	KEBIJAKAN UMUM	
	Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan Gubernur, meliputi:	

A. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

Urutan	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
	Nomor	Tanggal	
1	2	3	4
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah yang telah direvisi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) daerah	B.13.900/5380/PADFE/BPKAD	12 Juli 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B.13.027/5454/PADFE/BPKAD	14 Juli 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA	B.13/900/6591/PADFE/BPKAD B.09/910/26144/Kes/DPRD	25 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan PPAS	B.13/900/6592/PADFE/BPKAD B.09/910/26745/Kes/DPRD	25 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	T.00.188.34/41548/Setda	2 Oktober 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	B.00/910/47192/Setda B.08/910/36034/Kes/Setwan	16 November 2023	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk direvisi	B.00.910/47447/Setda	17 November 2023, disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri tanggal 20 November 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan

Pemerintah Provinsi Bali pada tahun-tahun mendatang akan lebih tertib dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

	dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud butir D.1.a.7).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk: 1. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik; 2. mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan 3. mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sebagaimana maksud Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan	

	berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan 1 (satu) kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Klasifikasi APBD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Klasifikasi APBD dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah di bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan	

	Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya. Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan: 1. Kebijakan Pendapatan Daerah a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.1.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. c. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Provinsi Bali berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir	

	C.2.a.1).u) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. d. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Bali kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (<i>performance based</i>), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan	

	dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. e. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi. f. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. h. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

	2. Kebijakan Belanja Daerah a. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menganggarkan belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik, sebagaimana maksud butir C.m.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, antara lain dalam rangka pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian, penurunan <i>stunting</i> dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. b. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja <i>Mandatory Spending</i> serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan	Pemerintah Provinsi Bali dalam merancang arah kebijakan belanja daerah telah mengutamakan dukungan untuk pencapaian target Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik, mulai dari proses perencanaan (RKPD) sampai dengan penganggaran (KUA-PPAS dan RAPBD).

	seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. c. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak <i>absurd</i> untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir C.1.m.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. d. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah Provinsi Bali memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. e. Belanja Daerah diuraikan menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. f. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sebagaimana maksud butir C.1.m.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	

	3. Kebijakan Pembiayaan Daerah a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.n.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. b. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir C.1.n.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir C.1.n.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	
III.	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM	
	A. Kebijakan Pendapatan Daerah Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp6.354. 200. 071.179,00, sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:	

Tabel. 2 Pendapatan Daerah				
Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Persentase dari Selisih Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Target		
1	2	3	4=3-2	5=4:2
PENDAPATAN DAERAH	7.248.953.175.947,00	6.354.200.071.179,00	(894.753.104.768,00)	(12,34)
Pendapatan Asli Daerah	5.041.446.320.153,00	4.074.449.341.179,00	(966.996.978.974,00)	(19,18)
Pajak Daerah	3.238.968.237.629,00	3.239.223.722.629,00	255.485.000,00	0,01
Retribusi Daerah	53.416.681.500,00	59.213.399.000,00	5.796.717.500,00	10,85
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	808.120.019.322,00	143.435.645.800,00	(664.684.373.522,00)	(82,25)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	940.941.381.702,00	632.576.573.750,00	(308.364.807.952,00)	(32,77)
Pendapatan Transfer	2.152.312.055.794,00	2.274.042.730.000,00	121.730.674.206,00	5,66
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.152.312.055.794,00	2.274.042.730.000,00	121.730.674.206,00	5,66
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	55.194.800.000,00	5.708.000.000,00	(49.486.800.000,00)	(89,66)
Pendapatan Hibah	55.194.800.000,00	5.708.000.000,00	(49.486.800.000,00)	(89,66)

Tabel. 3 Rincian Pendapatan Asli Daerah												
Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021			APBD Tahun Anggaran 2022			APBD Tahun Anggaran 2023 *) Realisasi Per 8 Desember 2023			Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4 = 3:2	5	6	7 = 6:5	8	9	10 = 9:8	11	12	13 = 12:11
Pendapatan Asli Daerah	3.178.019.463.737	3.117.070.008.673	98,08	3.494.115.418.573	3.863.191.406.848	110,56	5.041.446.320.153	4.232.654.353.320	83,96	4.074.449.341.179	0,00	0,00
Pajak Daerah	2.640.212.076.975	2.458.330.858.709	93,12	2.879.557.806.488	3.230.839.487.191	112,20	3.238.968.237.629	3.702.556.706.094	114,31	3.239.223.722.629	0,00	0,00
Retribusi Daerah	12.602.157.400	14.298.569.091	113,46	10.738.252.500	14.348.341.509	133,62	53.416.681.500	14.182.547.938	26,40	59.213.399.000	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	160.711.862.041	160.711.862.041	100,00	220.323.068.190	220.323.068.247	100,00	808.120.019.322	158.126.019.322	19,57	143.435.645.800	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	364.493.387.321	483.528.718.841	132,66	383.496.351.484	397.680.649.900	103,70	940.941.381.702	357.873.279.256	38,03	632.576.573.750	0,00	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp4.074.449.341.179,00 atau 64,12% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan

	Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.041.446.320.153,00 atau 69,55% dari total Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.248.953.175.947,00, mengalami peningkatan dibandingkan dengan target PAD dalam peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp3.494.115.418.572,00 atau 62,43% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp5.596.479.850.692,00, dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp3.178.019.403.737,00 atau 53,01% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp5.995.467.392.837,00. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menetapkan target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut: a. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 Rp4.232.654.552.520,00 atau 83,96% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.041.345.820.153,00; b. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 Rp3.863.191.406.848,23 atau 110,56% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp3.494.115.418.572,00;	

	c. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2021 Rp3.117.070.008.673,76 atau 98,08% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp3.178.019.403.737,00. Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut khususnya Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Bali harus melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, druraikan ke dalam jenis pendapatan sebagai berikut: a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp3.239.223.722.629,00 atau 50,98% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut: a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp1.495.975.827.460,00 b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp974.148.848.420,00; c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp414.313.697.546,00; d) Pajak Air Permukaan Rp1.150.485.000,00; dan e) Pajak Rokok Rp353.634.864.203,00	Target PAD yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 selain dihitung berdasarkan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi perekonomian Bali yang sebagian besar dikontribusi dari sektor Pariwisata yang sangat rentan terhadap isu keamanan dan kesehatan dengan memperhatikan ketidakpastian Geopolitik, ancaman pandemi dan kesehatan global, target PAD Tahun 2024 juga telah dihitung memperhatikan perkiraan realisasi masing-masing komponen PAD Tahun 2023.

	2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp59.213.399.000,00 atau 0,93% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut: a) Retribusi Jasa Umum Rp120.000.000,00; b) Retribusi Jasa Usaha Rp55.093.399.000,00; dan c) Retribusi Perizinan Tertentu Rp4.000.000.000,00. Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Bali serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar menetapkan: PBBKB untuk Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (<i>Gas Oil</i>) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5% (lima persen), serta PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10% (sepuluh persen), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sebagaimana maksud butir C.2.a.1).s) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dalam Raperda dan Rapergub tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah didasarkan pada data potensi pajak daerah di Provinsi Bali dan juga memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

	Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan: 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk target penerimaan paling lama sampai dengan 4 Januari 2024; dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024; sebagaimana maksud butir C.2.a.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir C.2.a.1).r) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan: 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana maksud pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;	Penganggaran jenis pajak daerah masih didasarkan atas peraturan daerah dan berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud Pasal 94 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sambil menunggu hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah oleh Kementerian Dalam

	3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan 4) pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen). Berkaitan dengan hal tersebut, untuk penggunaan PKB sebagaimana tercantum pada butir 1)a) harus berpedoman pada ketentuan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hak Provinsi, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target PKB dimaksud harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir C.2.a.1).p).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor sudah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hak provinsi, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sesuai Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir C.2.a. 1).p).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

	Sedangkan, untuk penggunaan Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari hak Provinsi, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari target Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana maksud Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah Provinsi Bali menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian Provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dan butir C.2.a.1).p).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan penggunaan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan Kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Penganggaran target pendapatan pajak rokok telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-58/PK/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp353.634.864.203,00.

	Penganggaran target pendapatan pajak rokok sebagaimana tercantum pada butir 1)e) harus menyesuaikan dengan alokasi pajak rokok yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2024. b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp143.435.645.800,00 atau 2,26% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menetapkan Hasil Penyertaan Modal antara lain dari: 1) PT. BPD Bali Rp141.503.624.600,00 atau 23,01% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2004 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 Rp614.912.000.000,00; 2) Puri Raharja Rp823.182.000,00 atau 9,42% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 Rp8.736.000.000,00; 3) PT. Asuransi Bangun Askrida Rp184.259.300,00 atau 16,02% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 1990 sampai dengan Tahun Anggaran 2023	

	Rp1.150.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Bali sampai dengan Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, terhadap BUMD: 1) yang kinerjanya belum memadai (<i>performance based</i>) dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Rp924.579.900,00 atau 0,77% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 Rp120.000.000.000,00 2) yang belum memberikan bagian laba dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024: a) Perusahaan Daerah Provinsi Bali mulai dari Tahun Anggaran 1974 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 Rp5.282.769.658,00 b) PT. Jasamarga Bali Tol mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 Rp100.000.000.000,00 agar melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.	Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan upaya peningkatan kinerja PT. Jasamarga Bali Tol, yang masih difokuskan pada percepatan pengembalian Break Even Poin (BEP) selama 37 Tahun, sehingga sampai dengan saat ini semua pemegang saham belum mendapatkan bagian laba atas penyertaan modal tersebut Terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bali yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (<i>performance based</i>), akan dilakukan upaya-upaya pembenahan dengan harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

	Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain: 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah; 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah; dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, dan butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi pemerintah Daerah Provinsi Bali sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.	

	c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penganggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp632.576.573.750,00 atau 9,96% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menetapkan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan tren realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut: 1) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 Rp357.875.279.256,00 atau 38,03% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp940.941.381.702,00 2) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 Rp397.680.649.900,76 atau 103,70% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp383.496.351.484,00; 3) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 Rp483.528.718.841,03 atau 132,66% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp364.493.307.321,00	

	Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut: 1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp390.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.2.a.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp7.259.400.000,00 atau 0,11% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam	Target Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah dihitung berdasarkan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, target PAD Tahun 2024, antara lain bersumber dari potensi pendapatan pungutan kepada wisatawan asing sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, serta pendapatan yang bersumber dari pendapatan BLUD. Selain itu target Lain-lain PAD yang Sah juga telah dihitung memperhatikan perkiraan realisasi masing-masing komponen Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 sehingga dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatannya.

	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.2.a.3).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 3) Hasil Kerja Sama Daerah Rp253.045.440.000,00 atau 3,98% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Bali harus melakukan perhitungan kembali atas Hasil Kerja Sama Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi serta realisasi atas target penerimaan atas Hasil Kerja Sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Jasa Giro Rp10.000.000.000,00 atau 0,16% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4)	

	huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 5) Pendapatan Bunga Rp1.000.000,00 atau 0,00002% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp1.000.000,00 atau 0,00002% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan pekerjaan Rp1.000.000,00 atau 0,00002% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	

	8) Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp50.500.050.000,00 atau 0,79% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3)j) Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp200.000,00 atau 0,000003% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 10) Pendapatan dari Pengembalian Rp600.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 11) Pendapatan BLUD Rp310.778.483.750,00 atau 4,89% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan	

	berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir C.2.a.3).n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 2. Pendapatan Transfer Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp2.274.042.730.000,00 atau 35,79% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp2.274.042.730.000,00 atau 35,79% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan: a. Transfer Ke Daerah (TKD) Rp2.257.170.570.000,00 atau 35,52% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan: 1) Dana Bagi Hasil (DBH) Rp163.280.624.000,00 lebih kecil Rp1.886.491.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) khususnya untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 hanya yang menjadi bagian Provinsi Bali yaitu sebesar Rp808.497.000,00.

	yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Rp165.167.115.000,00; 2) Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.366.655.991.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023; 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp108.245.814.000,00 lebih kecil Rp42.494.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Rp108.288.308.000,00; 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp618.988.141.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023; b. Insentif Fiskal Rp16.872.160.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023. Disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dan butir C.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sebagaimana maksud butir C.2.b.2), butir C.2.b.5).a).(1), butir C.2.b.5).a).(2), butir C.2.b.5).a).(3) dan butir C.2.b.5).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp108.245.814.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.12 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp108.245.814.000,00.

	Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp5.708.000.000,00 atau 0,09% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan pada Pendapatan Hibah Rp5.708.000.000,00 atau 0,09% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Rp5.708.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 47 Peraturan pemerintah	

	Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.2.c.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, pendapatan hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero) dalam rangka biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masing-masing Provinsi diprioritaskan untuk: a. biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan PKB dan SWDKLLJ; b. kebutuhan tim pembina samsat tingkat Provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta SWDKLLJ; dan c. biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran PKB, pengadaan kios layanan mandiri, dan sosialisasi; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

B. Kebijakan Belanja Daerah
Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp6.917.629.629.079,00, sebagaimana Tabel. 4 sebagai berikut:

Tabel. 4
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dan APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
1	2	3	4=3-2	5=4:2
BELANJA DAERAH	7.932.886.363.138,00	6.917.629.629.079,00	(1.015.256.734.059,00)	(12,80)
Belanja Operasi	4.474.769.277.170,00	4.459.392.100.429,00	(15.377.176.741,00)	(0,34)
Belanja Pegawai	2.002.593.764.620,00	2.214.045.845.733,00	211.452.081.113,00	10,56
Belanja Barang dan Jasa	1.393.304.098.830,00	1.234.841.187.760,00	(158.462.911.070,00)	(11,37)
Belanja Subsidi	10.025.000.000,00	2.525.000.000,00	(7.500.000.000,00)	(74,81)
Belanja Hibah	1.068.846.413.720,00	997.830.066.936,00	(71.016.346.784,00)	(6,64)
Belanja Bantuan Sosial	0,00	10.150.000.000,00	10.150.000.000,00	0,00
Belanja Modal	1.409.820.872.741,00	766.532.572.871,00	(643.288.299.870,00)	(45,63)
Belanja Modal Tanah	177.579.673.369,00	3.460.000.000,00	(174.119.673.369,00)	(98,05)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.939.759.226,00	159.175.985.182,00	(48.763.774.044,00)	(23,45)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	693.957.200.084,00	453.692.159.222,00	(240.265.040.862,00)	(34,62)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	273.674.962.322,00	96.417.792.467,00	(177.257.169.855,00)	(64,77)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	55.769.277.740,00	52.901.636.000,00	(2.867.641.740,00)	(5,14)
Belanja Modal Aset Lainnya	900.000.000,00	885.000.000,00	(15.000.000,00)	(1,67)
Belanja Tidak Terduga	15.828.456.983,00	62.772.177.068,00	46.943.720.085,00	296,58
Belanja Tidak Terduga	15.828.456.983,00	62.772.177.068,00	46.943.720.085,00	296,58
Belanja Transfer	2.032.467.756.244,00	1.628.932.778.711,00	(403.534.977.533,00)	(19,85)
Belanja Bagi Hasil	1.510.092.952.736,00	1.279.176.638.488,00	(230.916.314.248,00)	(15,29)
Belanja Bantuan Keuangan	522.374.803.508,00	349.756.140.223,00	(172.618.663.285,00)	(33,04)

Tabel. 5
Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.381.841.801.598,00	622.453.851.762,00	0,00	0,00	3.004.295.653.360,00	43,43
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.397.840.234.282,00	436.699.101.981,00	0,00	0,00	1.834.539.336.263,00	26,52
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	596.059.153.256,00	63.339.799.244,00	0,00	0,00	659.398.952.500,00	9,53
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	271.407.579.634,00	111.618.234.837,00	0,00	0,00	383.025.814.471,00	5,54
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.923.963.800,00	0,00	0,00	0,00	8.923.963.800,00	0,13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	78.794.227.210,00	4.190.446.100,00	0,00	0,00	82.984.673.310,00	1,20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	28.816.643.416,00	6.606.269.600,00	0,00	0,00	35.422.913.016,00	0,51
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	855.290.778.665,00	115.636.753.020,00	0,00	0,00	970.927.531.685,00	14,04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	33.526.956.744,00	706.352.300,00	0,00	0,00	34.233.509.044,00	0,49
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.922.183.884,00	19.052.000,00	0,00	0,00	1.941.235.884,00	0,03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	8.469.382.326,00	0,00	0,00	0,00	8.469.382.326,00	0,12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	10.795.544.000,00	0,00	0,00	0,00	10.795.544.000,00	0,16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	6.138.498.153,00	243.782.950,00	0,00	0,00	6.382.281.103,00	0,09
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	910.364.476,00	0,00	0,00	0,00	910.364.476,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20.533.667.460,00	814.874.400,00	0,00	0,00	21.348.541.860,00	0,31

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	331.424.076,00	0,00	0,00	0,00	331.424.076,00	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	35.830.062.245,00	1.775.721.300,00	0,00	0,00	37.605.783.545,00	0,54
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	56.332.476.304,00	111.743.461.170,00	0,00	0,00	168.075.937.374,00	2,43
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	25.607.014.029,00	133.808.900,00	0,00	0,00	25.740.822.929,00	0,37
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	17.332.252.684,00	0,00	0,00	0,00	17.332.252.684,00	0,25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	59.736.664.400,00	0,00	0,00	0,00	59.736.664.400,00	0,86
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	440.715.980,00	0,00	0,00	0,00	440.715.980,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	469.324.892,00	44.500.000,00	0,00	0,00	513.824.892,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	575.745.191.392,00	55.000.000,00	0,00	0,00	575.800.191.392,00	8,32
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	526.427.164,00	100.000.000,00	0,00	0,00	626.427.164,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	642.628.356,00	0,00	0,00	0,00	642.628.356,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN PERTANIAN	177.018.330.177,00	7.900.603.810,00	0,00	0,00	184.918.933.987,00	2,67
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	29.812.208.179,00	1.948.960.650,00	0,00	0,00	31.761.168.829,00	0,46
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARAWISATA	14.913.169.149,00	347.957.700,00	0,00	0,00	15.261.126.849,00	0,22
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	68.537.829.323,00	2.575.670.300,00	0,00	0,00	71.113.499.623,00	1,03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	41.583.605.578,00	2.973.119.060,00	0,00	0,00	44.556.724.638,00	0,64
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	190.499.500,00	0,00	0,00	0,00	190.499.500,00	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	19.274.006.412,00	44.223.000,00	0,00	0,00	19.318.229.412,00	0,28

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.682.127.236,00	10.673.100,00	0,00	0,00	2.692.800.336,00	0,04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	24.884.800,00	0,00	0,00	0,00	24.884.800,00	0,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	379.547.277.945,00	9.716.260.136,00	0,00	0,00	389.263.538.081,00	5,63
SEKRETARIAT DAERAH	170.201.124.412,00	3.850.461.936,00	0,00	0,00	174.051.586.348,00	2,52
SEKRETARIAT DPRD	209.346.153.533,00	5.865.798.200,00	0,00	0,00	215.211.951.733,00	3,11
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	433.181.281.688,00	8.672.403.355,00	62.772.177.068,00	1.628.932.778.711,00	2.133.538.640.822,00	30,84
PERENCANAAN	21.690.565.504,00	2.931.701.856,00	0,00	0,00	24.622.267.360,00	0,36
KEUANGAN	203.076.789.328,00	4.142.546.299,00	62.772.177.068,00	1.628.932.778.711,00	1.898.924.291.406,00	27,45
KEPEGAWAIAN	183.628.192.564,00	760.737.000,00	0,00	0,00	184.388.929.564,00	2,67
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.089.141.584,00	0,00	0,00	0,00	1.089.141.584,00	0,02
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	15.295.451.964,00	520.005.200,00	0,00	0,00	15.815.457.164,00	0,23
PENGLOLAAN PENGHUBUNG	8.401.140.744,00	317.413.000,00	0,00	0,00	8.718.553.744,00	0,13
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	34.166.008.604,00	1.851.636.188,00	0,00	0,00	36.017.644.792,00	0,52
INSPEKTORAT DAERAH	34.166.008.604,00	1.851.636.188,00	0,00	0,00	36.017.644.792,00	0,52
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	198.346.621.752,00	301.064.600,00	0,00	0,00	198.647.686.352,00	2,87
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	198.346.621.752,00	301.064.600,00	0,00	0,00	198.647.686.352,00	2,87
Total	4.459.392.100.429,00	766.532.572.871,00	62.772.177.068,00	1.628.932.778.711,00	6.917.629.629.079,00	100,00
Total Belanja Daerah	6.917.629.629.079,00					

	1. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut: a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. 2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut: a. SPM Pendidikan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan Rp378.326.081.359,00 atau 20,62% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp1.834.539.336.263,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar antara lain sebagai berikut: 1) Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Rp39.999.200,00; 2) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Rp34.981.800,00; 3) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau

	Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rp124.999.800,00; 4) Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Rp44.059.000,00; 5) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp9.865.020.962,00; 6) Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Rp151.387.652.224,00; 7) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Rp3.560.319.200,00; 8) Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Rp101.430.000,00; 9) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Rp393.150.000,00; dan 10) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp336.645.300,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta butir E.2.a.1) dan Tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.a.1) dan Tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. SPM Kesehatan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp2.923.712.400,00 atau 0,44% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp659.398.952.500,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Rp517.042.500,00; dan 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Rp2.406.669.900,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir E.2.a.2) dan Tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp57.885.427.820,00 atau 15,11% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp383.025.814.471,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: 1) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rp29.018.411.568,00;	Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Butir E.2.a.21 dan Tabel E.6 Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

	2) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Rp15.050.009.100,00; 3) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rp1.461.182.552,00; 4) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Rp11.064.918.400,00; 5) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Rp1.028.074.300,00; dan 6) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Rp262.831.900,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat Rp791.384.356,00 atau 8,87% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp8.923.963.800,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: 1) Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi Rp498.925.176,00; 2) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang	Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

	Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi Rp20.822.600,00; dan 3) Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Rp271.636.580,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir E.2.a.4) dan Tabel E.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. e. SPM Trantibumlinmas Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp18.887.137.547,00 atau 22,76% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp82.984.673.310,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: 1) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Rp18.614.874.259,00; 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia Rp242.363.688,00; dan 3) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Rp29.899.600,00;	Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Butir E.2.a.4) dan Tabel E.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

	harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Trantibumlinmas untuk Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.6) dan Tabel E.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. f. SPM Sosial Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp5.093.972.668,00 atau 14,38% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp35.422.913.016,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar antara lain sebagai berikut: 1) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Rp289.939.600,00; 2) Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam panti Rp2.000.000.000,00; 3) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Rp28.624.600,00; 4) Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Rp158.840.668,00; 5) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Rp47.912.100,00; 6) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Rp236.941.200,00; 7) Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan penelusuran Keluarga	Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Trantibumlinmas, sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.a.6) dan Tabel E.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

	Rp50.318.000,00; 8) Sub Kegiatan Pengasuhan Rp59.546.000,00; 9) Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Rp3.240.000,00; dan 10) Sub Kegiatan Penyediaan Tempat penampungan pengungsi Rp3.240.000,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi. Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah: a. mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator: 1) pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,7%; 2) tingkat pengangguran terbuka 5,0%-5,7%; 3) rasio gini 0,374-0,377; dan 4) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,27%. b. peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:	Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

	1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02; dan 2) tingkat kemiskinan 6,5%-7,5%. Berkaitan dengan hal tersebut, dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, prioritas Nasional Tahun 2024 meliputi: a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp55.701.597.189,00 atau 0,81% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, digitalisasi, dan ekonomi hijau. Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan yaitu: 1) Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan; dan 2) Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan	

	penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) sebagai berikut: 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp31.742.277.369,00; 4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 5) Penguatan Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi (PP5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp218.863.584,00; 6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp15.756.561.368,00; 7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp49.991.800,00; dan	

	8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp7.933.903.068,00. b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan yaitu terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Jawa-Bali. c. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp953.161.086.404,00 atau 13,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2024 difokuskan pada percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu	

	dan <i>stunting</i>, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial. Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing, yaitu: 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan; 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan; 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda; dan 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan. Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN3 akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, sebagai berikut: 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp356.308.876,00; 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp17.039.604.216,00;	

	3) Peningkatan Akses dan Mutu pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp643.912.302.428,00; 4) Peningkatan Pemerataan Layanan pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dianggarkan dalam Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp278.845.056.664,00; 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha dan pencegahan perilaku berisiko, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp9.452.571.284,00; 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp55.523.800,00; dan 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp3.499.719.136,00.	

	d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD tahun Anggaran 2024 Rp561.983.702.936,00 atau 8,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan diarahkan melalui pendayagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan yaitu: 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memaltapkan ketahanan budaya; 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan; 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial; 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat; 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa; dan 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif. Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN4 akan dilakukan melalui 4 (empat) PP, sebagai	

	berikut: 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modem, dan Berkarakter (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp6.993.164.760,00; 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp79.114.939.608,00; 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp472.015.222.836,00; dan 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp3.860.375.732,00. e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp250.678.973.594,00 atau 3,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur tahun 2024, sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas memiliki peran penting	

	dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut. Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yaitu: 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar; 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar; 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan; 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK. Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PNS, akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, sebagai berikut: 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp82.882.372.844,00; 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp9.387.891.700,00; 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp4.454.308.720,00; 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp16.000.000,00; dan 5) Transformasi <i>Digital</i> (PP5) dianggarkan dalam Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp153.938.400.330,00.	

	f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp25.304.866.776,00 atau 0,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim yaitu: 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim; dan 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap <i>baseline</i>. Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN6 akan dilakukan melalui 3 (tiga) PP, sebagai berikut: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp8.524.641.794,00; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian	

	informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp11.966.769.102,00; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp4.813.455.880,00. g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp380.342.593.676,00 atau 5,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerjasama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN), serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak. Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas Politik, Hukum pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik yaitu: 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-lembaga Demokrasi	

	dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal; 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri; 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap; 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik; dan 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, sebagai berikut: 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerjasama pembangunan internasional, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan Tata Kelola dan Birokrasi, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp380.342.593.676,00; dan 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PPS) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Provinsi	

Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 tersebut, sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

No.	Prioritas Nasional	Rancangan APBD TA 2024 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	55.701.597.189,00	0,81
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	0,00	0,00
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	953.161.086.404,00	13,78
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	561.983.702.936,00	8,12
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	250.678.973.594,00	3,62
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	25.304.866.776,00	0,37
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	380.342.593.676,00	5,50
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	2.227.172.820.575,00	32,20
	Total Belanja Daerah	6.917.629.629.079,00	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Provinsi Bali pada tahun 2024

	sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 meliputi: a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Bali sebesar 6,5% s.d 6,9%; b. Menurunnya tingkat kemiskinan wilayah Bali sebesar 2,50% s.d 3,00%; dan c. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka wilayah Bali sebesar 2,10% s.d. 2,83%. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendukung tercapainya IPM Provinsi di wilayah Jawa-Bali sebesar 73,65 s.d 82,57. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu: a. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global; b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan <i>Omnibus Law</i>, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai pemberdayaan UMKM; d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk	

	penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, alokasi anggaran Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam Tabel. 6 dimaksud tidak sesuai dengan rekap Prioritas Nasional yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyelaraskan tabel sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 tersebut dengan rekap prioritas Nasional yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI. 4. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2024. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2024 sebagaimana Tabel 7 sebagai berikut:	Tabel sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 tersebut akan diselaraskan dan disesuaikan kembali dengan rekap prioritas Nasional yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI.

Tabel. 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024

No.	Prioritas Daerah	Rancangan APBD TA 2024 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata	174.357.030.304,00	2,52
2.	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	2.569.490.410.327,00	37,14
3.	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	94.403.372.656,00	1,36
4.	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	575.800.191.592,00	8,32
5.	Lingkungan Hidup	50.939.005.741,00	0,74
6.	Infrastruktur	644.093.720.097,00	9,31
7.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	2.808.545.898.362,00	40,60
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	6.917.629.629.079,00	100,00
	Total Belanja Daerah	6.917.629.629.079,00	

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyelaraskan tabel Prioritas Daerah Tahun 2024 tersebut dengan tabel prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI.

Tabel sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024 tersebut akan diselaraskan dan disesuaikan kembali dengan tabel prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI.

	5. Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi di daerah secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah Rp124.722.244.132 atau 1,80% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang tercantum pada: a. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Rp365.533.980,00; b. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi permukaan Rp3.219.755.292,00; c. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Rp1.252.685.068,00; d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rp11.212.946.576,00; e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rp6.409.829.868,00; f. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Rp666.599.732,00; g. Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan	

	Kesehatan Hewan Rp402.169.360,00; h. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Rp2.210.653.040,00; i. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Rp2.199.802.305,00; j. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Rp542.237.052,00; k. Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Rp1.132.390.284,00; l. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penataan prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Rp247.577.680,00; m.sub Kegiatan Pemberian Bimbingan peningkatan produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan pakan, serta pakan Kewenangan Provinsi Rp2.706.817.960,00; n. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan peredaran Benih Hortikultura Tanaman Pangan, dan Perkebunan Rp2.160.180.412,00; o. Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Rp2.878.599.084,00; p. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Rp349.452.600,00; q. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Rp82.514.600,00; r. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Rp574.806.000,00; s. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan perikanan Rp35.220.000,00; t. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Rp6.001.125.000,00;	

	u. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Rp24.335.050.640,00; v. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Rp4.504.895.236,00; w. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Rp14.633.875.200,00; x. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rp133.000.000,00. Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah yang dianggarkan pada: a. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi permukaan Rp3.219.755.292,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp936.889.200,00; 2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp38.810.664,00; 3) Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp33.665.868,00; 4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp2.729.700,00; dan 5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp2.183.760,00; b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rp11.212.946.576,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp208.197.600,00; 2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp8.624.592,00; 3) Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp8.087.904,00; dan 4) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	

	Rp485.280,00; c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rp6.409.829.868,00 pada SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp277.596.800,00; 2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp11.499.456,00; 3) Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp9.975.072,00; 4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp808.800,00; dan 5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp647.040,00; d. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Rp666.599.732,00 pada SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp589.893.200,00; 2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp24.436.344,00; 3) Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp21.197.028,00; 4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp1.718.700,00; dan 5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp1.374.960,00;	

	e. Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp402.169.360,00 pada SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp346.996.000,00 2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp14.374.320,00; 3) Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp12.468.840,00; 4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp1.011.000,00; dan 5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp808.800,00; f. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Rp4.370.833.452,00 pada SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp3.018.865.200,00; 2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp125.056.584,00; 3) Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp108.478.908,00; 4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp8.795.700,00; dan 5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp7.036.560,00; g. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Rp574.806.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp317.776.000,00; dan	

2) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp172.480.000,00. h. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi Rp7.412.859.184,00 pada SKPD Dinas Perhubungan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp1.006.288.400,00; 2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp41.685.528,00; 3) Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp39.091.536,00; dan 4) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp2.345.520,00; untuk diformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir c.1.m.4) Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah. 6. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi	Penyediaan anggaran pada masing-masing belanja sudah disesuaikan dengan kebutuhan riil yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi, seperti: 1. Penyediaan anggaran perjalanan dinas dan belanja sewa alat kantor pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro digunakan untuk penyelenggaraan pasar murah di seluruh Kabupaten/Kota dan sewa stand pameran, (60 kali penyelenggaraan). 2. Sedangkan penyediaan belanja jasa tenaga administrasi digunakan untuk membiayai tenaga non ASN yang memang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, karena terbatasnya tenaga ASN yang ada. Namun demikian, kedepan Pemerintah Provinsi Bali akan lebih cermat dalam memformulasikan uraian belanja pada sub kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

	Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.982.942.044.399, 00 atau 28,67% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dengan uraian perhitungan Tabel. 8 sebagai berikut:	

Tabel. 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2024 Jumlah (Rp)		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan (%)
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan		1.894.276.000.663,00	95,53
	1) Belanja Operasi:	1.457.576.898.682,00		73,51
	a) belanja pegawai	1.050.389.690.000,00		52,97
	b) belanja barang dan jasa	254.556.458.682,00		12,84
	c) belanja hibah	142.730.750.000,00		7,20
	d) Belanja bantuan sosial	9.900.000.000,00		0,50
	2) Belanja Modal	436.699.101.981,00		22,02
	b. Urusan Bidang Kebudayaan		27.774.388.988,00	1,40
	1) Belanja Operasi:	27.719.388.988,00		1,40
	a) belanja pegawai	0,00		0,00
	b) belanja barang dan jasa	27.719.388.988,00		1,40
	c) belanja hibah	0,00		0,00
	d) Belanja bantuan sosial	0,00		0,00
	2) Belanja Modal	55.000.000,00		0,003
	c. Urusan Bidang Perpustakaan		626.427.164,00	0,03
	1) Belanja Operasi:	526.427.164,00		0,03
	a) belanja pegawai	0,00		0,00
	b) belanja barang dan jasa	526.427.164,00		0,03
	c) belanja hibah	0,00		0,00
	d) Belanja bantuan sosial	0,00		0,00
	2) Belanja Modal	100.000.000,00		0,01
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga		59.736.664.400,00	3,01
	1) Belanja Operasi:	59.736.664.400,00		3,01
	a) belanja pegawai	0,00		0,00
	b) belanja barang dan jasa	8.586.664.400,00		0,43
	c) belanja hibah	51.150.000.000,00		2,58
	d) Belanja bantuan sosial	0,00		0,00
	2) Belanja Modal	0,00		0,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		528.563.184,00	9,23
	1) Belanja Transfer:			
	Belanja bantuan	0,00		0,00
	keuangan	0,00		0,00
	2) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	336.350.000,00		0,02
	3) Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan pada Dinas Pariwisata	192.213.184,00		0,01
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)		1.982.942.044.399,00	
3.	Total Belanja Daerah		6.917.629.629.079,00	
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%			28,67%

	Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir E.1.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 dan butir E.1.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Provinsi Bali. Penyediaan anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk: 1) Program pada urusan bidang pendidikan Rp1.894.276.000.663,00 atau 95,53% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam: a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp1.070.317.686.232,00 atau 53,98% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;	

	b) Program Pengelolaan Pendidikan Rp763.749.962.531,00 atau 38,52% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp74.981.000,00 atau 0,004% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan. 2) Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan Rp528.563.184,00 atau 0,03% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang diuraikan dalam: a) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Rp336.350.000,00 atau 0,02% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan b) Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan pada Dinas Pariwisata Rp192.213.184,00 atau 0,01% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan. Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.	

	b. Alokasi Anggaran Kesehatan Penyediaan anggaran Kesehatan yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp659.398.952.500,00 atau 9,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain tercantum pada: 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp72.618.700.036,00; 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp576.703.400,00; 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Rp149.730.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain: 1) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit; 2) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan <i>stunting</i>: a) peningkatan skrining anemia remaja putri; b) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri; c) pemeriksaan kehamilan (<i>Antenatal Care</i>); d) konsumsi TTD ibu hamil; e) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);	

	f) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set; g) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan; h) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta); i) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (<i>weight faltering, wasting, dan stunting</i>); j) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; k) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita; 3) pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: a) Tuberkulosis (TBC); b) <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) c) Malaria; d) Penyakit menular lainnya; 4) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama: a) Diabetes Melitus; b) Hipertensi; c) Penyakit tidak menular lainnya; 5) penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan: a) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); b) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) prima dan Posyandu; c) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP); d) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat)	

	jenis penyakit tidak menular (kanker, <i>stroke</i>, jantung, dan uronefrology) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); e) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda); 6) penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan: a) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi; b) perawat dan bidan pada entitas Puskesmas pembantu; c) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, <i>stroke</i>, jantung, dan uronefrology); d) tenaga kesehatan di Labkesda; e) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas; f) peningkatan kapasitas dan insentif kader Posyandu. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai, sebagaimana maksud butir E.1.b. Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	

	Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (<i>under weight</i>) pada anak balita dan menurunnya prevalensi <i>wasting</i> (kurus) pada anak balita Rp158.740.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengat berpedoman butir E.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Daerah, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp158.740.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp116.800.000,00 2) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp21.240.000,00; dan 3) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp20.700.000,00; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat merupakan kegiatan bersumber dari DAK NonFisik Tahun 2024. Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas, makanan dan minuman, dan honorarium narasumber diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan di Kabupaten/Kota, antara lain berupa: 1. Pertemuan Koordinasi Program Gizi di 9 Kabupaten/Kota. 2. Pertemuan Evaluasi Penanganan Stunting di Provinsi. 3. Monitoring evaluasi Surveilans Gizi dan pelaksanaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) berbasis Pangan Lokal ke 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

	Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Selanjutnya, penyediaan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Rp3.219.755.292,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp936.889.200,00; 2) Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Rp1.132.390.284,00 pada SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp1.006.288.400,00; 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp5.391.800,00 pada SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp4.800.000,00; 4) Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat	

	Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Rp938.290.302,00 pada SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp416.395.200,00; 5) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Rp365.533.980,00 pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp173.498.000,00; dan 6) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Rp542.237.052,00 pada SKPD UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp416.395.200,00; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem Tahun 2024 di daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97	Penyediaan anggaran pada masing-masing belanja sudah disesuaikan dengan kebutuhan riil yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem, antara lain digunakan untuk: a. membiayai tenaga pendamping PLUT KUMKM dan tenaga pendamping Inkubasi Usaha yang melakukan pendampingan dan inkubasi kepada Pelaku KUMKM secara terus menerus dan berkesinambungan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrim di daerah b. membiayai tenaga non ASN yang memang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, karena terbatasnya tenaga ASN yang ada. Namun demikian, kedepan Pemerintah Provinsi Bali akan lebih cermat dalam memformulasikan uraian belanja pada sub kegiatan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- c. Alokasi Anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
- Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dialokasikan paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No.	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2024
		Jumlah (Rp)
1.	Total Belanja Daerah	6.917.629.629.079,00
2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa:	
	a. belanja bagi hasil	1.279.176.638.488,00
	b. belanja bantuan keuangan	349.756.140.223,00
	Jumlah (a+b)	1.628.932.778.711,00
3.	Selisih (1-2)	5.288.696.850.368,00
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	2.115.478.740.147,20

Tabel. 10
Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2024	
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	a. Belanja Modal		766.532.572.871,00
	1) Tanah	3.460.000.000,00	
	2) Peralatan dan Mesin	159.175.985.182,00	
	3) Bangunan dan Gedung	453.692.159.222,00	
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	96.417.792.467,00	
	5) Aset tetap lainnya	52.901.636.000,00	
	6) Aset lainnya	885.000.000,00	
	b. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)		0,00
	c. Belanja pemeliharaan		39.783.073.084,00
2.	a. Belanja Hibah		162.104.820.312,00
	b. Belanja Bantuan Sosial		0,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		968.420.466.267,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengupayakan pengalokasian anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Provinsi Bali akan tetap berupaya untuk memenuhi alokasi belanja infrastuktur pelayanan publik dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan Penyediaan anggaran pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Rp36.017.644.792,00 atau 0,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut: 1) Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat Rp8.309.260.492,00 atau 0,12% dari total belanja daerah; dan 2) Alokasi belanja pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan Rp27.708.384.300,00 atau 0,40% dari total belanja daerah; antara lain tercantum pada: 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp3.005.742.556,00; 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp1.413.879.080,00; 3) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Rp1.589.787.964,00; 4) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Rp1.699.982.088,00; belum memenuhi alokasi anggaran pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat sebagaimana maksud butir E.2.d.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengalokasikan anggaran pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk belanja gaji ASN dan tunjangan pada SKPD	Pengalokasian anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan tersebut sudah sangat mencukupi dan telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan riil SKPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dan apabila dialokasikan secara berlebihan akan berdampak pada kurang efektifnya penyerapan anggaran.

	Inspektorat, sebagaimana maksud butir E.2.d.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi: 1) kegiatan pengawasan, yaitu: a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksaan kinerja; b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD; c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah; d) Reviu Laporan Keuangan; e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi <i>Probity Audit</i>, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis <i>gender</i>, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; f) Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Tahun 2024, Pemeintah Daerah Provinsi Bali perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat	

	sasaran dan berbasis output sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan g) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, <i>monitoring</i> dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.	

	2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP. 3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain. e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Penyediaan anggaran untuk pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp185.478.071.148,00 atau 2,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut: 1) Alokasi belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp168.812.344.612,00 atau 2,44% dari total belanja daerah; dan 2) Alokasi belanja pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan Rp16.665.726.536,00 atau 0,24% dari total belanja daerah; antara lain tercantum pada: 1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Rp2.972.846.980,00; 2) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Rp1.089.141.584,00; belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan	

	Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 serta alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana maksud butir E.2.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagaimana maksud butir E.2.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 7. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Penyediaan anggaran untuk TP-PKK Rp3.578.136.864,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp3.578.136.864,00, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi melalui: 1) Upaya percepatan penurunan <i>stunting</i> melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan	Pemerintah Provinsi Bali akan tetap berupaya untuk memenuhi alokasi belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

	Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar. 2) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era <i>Digital</i> yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti <i>trafficking</i>, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual. 3) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian. 4) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka <i>stunting</i>, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga. 5) Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan <i>digital</i> untuk ibu/anak, Antropometri, <i>Thermometer</i>, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil),	

	melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tangguh dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat. 6) Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi: a) penghayatan dan pengamalan pancasila; b) gotong royong; c) pangan; d) sandang; e) perumahan dan tata laksana rumah tangga; f) pendidikan dan keterampilan; g) kesehatan; h) pengembangan kehidupan berkooperasi; i) kelestarian lingkungan hidup; dan j) perencanaan sehat. 7) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas	

	penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan <i>stunting</i>, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya. 9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah. Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir E.2.ae. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selain itu, dalam penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp3.578.136.864,00 pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp761.974.000,00; 2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp1.391.400.000,00; 3) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp312.296.400,00; 4) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp12.936.888,00;	

	5) Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp11.221.956,00; 6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp909.900,00; dan 7) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp727.920,00; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada sub kegiatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Penyediaan anggaran untuk Pelaksanaan FORKOPIMDA Rp999.954.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Rp999.954.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Biaya Penunjang kegiatan berupa perjalanan dinas biasa sesuai point 1), diperuntukkan mendukung kegiatan verifikasi, evaluasi dan monitoring bagi 20 penerima kelompok Hibah, pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan stunting diseluruh Kabupaten/Kota Se Bali serta mengikuti Lomba-lomba PKK pada Pelaksanaan Jambore PKK Tahun 2024, sesuai surat Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor: 385/Skr/PKK.Pst/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023.

	yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dan butir E.3.ai.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Penyediaan anggaran untuk FKUB Rp350.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan penghayat Kepercayaan di Daerah Rp350.000.000,00, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Provinsi Bali. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik	Penyediaan alokasi anggaran hibah kepada FKUB sebesar Rp350.000.000,00 telah melalui koordinasi antara SKPD leading dengan FKUB. Pada tahun-tahun mendatang akan terus mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah.

	melalui hibah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir E.3.ai.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. d. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial Penyediaan anggaran untuk Perhutanan Sosial Rp123.207.496,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yalrg tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Rp70.845.496,00,00; dan 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan Rp52.362.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi <i>deforestasi</i> dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan serta pengelolaan perhutanan sosial dan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan, berdasarkan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan butir E.2.ap.72).d). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. e. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan	

	Menengah Penyediaan anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Rp1.378.598.518.895,00 atau 68,91% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah Rp2.000.653.580.943,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, dan butir E.2.n.5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	

	f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Penyediaan anggaran untuk pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Rp573.451.380,00; 2) Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rp127.557.000,00; 3) Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Rp569.404.688,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada butir E.2.aa.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. g. Alokasi Anggaran untuk Memajukan Kebudayaan Indonesia Penyediaan anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia yang antara lain tercantum pada: 1) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi Rp30.269.274.056,00; 2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Rp263.850.488,00; 3) Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Rp9.719.483.248,00; 4) Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi Rp4.000.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada butir E.2.ap.60) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	

	h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum Penyediaan anggaran untuk Bantuan Hukum yang tercantum pada Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum Rp2.061.283.364,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, termasuk diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana maksud butir E.3.ad Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. i. Alokasi Anggaran yang bersumber dari BLUD Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada: 1) Belanja Pegawai BLUD Rp104.589.220.700,00; 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp177.084.073.206,00; 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp25.198.158.244,00; 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp2.592.031.600,00; 5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp1.290.000.000,00; 6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp25.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir E.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. j. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana BOS, antara lain tercantum pada:	

	1) Belanja Barang dan Jasa BOS Rp131.941.590.000,00; 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp79.164.954.000,00; 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp52.776.636.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.5).a).(5).(e).ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. k. Pendanaan sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran sub kegiatan. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp4.994.267.692,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana" Rp3.006.192.800,00 pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Rp859.981.172,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Modal Asrama" Rp554.442.000,00 pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp610.264.860,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Jasa Tenaga Administrasi" Rp346.996.000,00 pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	

	4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp74.549.144.412,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Jasa Tenaga Kesehatan" Rp45.709.900.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan; 5) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp735.508.844,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Jasa Tenaga Administrasi" Rp138.798.400,00 pada SKPD Sekretariat Daerah; tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. 1. Pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp720.616.684,00 pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp228.098.000,00; b) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp138.798.400,00;	Penyediaan anggaran belanja jasa tenaga administrasi pada sub kegiatan dimaksud dialokasikan untuk membiayai kebutuhan akan jasa tenaga Non ASN yang akan membantu pelaksanaan sub kegiatan mengingat ketersediaan tenaga ASN yang sangat terbatas. Dan alokasi anggaran jasa tenaga Non ASN tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan riil dari masing-masing sub kegiatan.

	c) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp107.730.000,00; d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp5.749.728,00; dan e) Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp4.987.536,00; 2) Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Rp782.372.484,00 pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp415.016.000,00; dan b) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp138.798.400,00 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp610.264.860,00 pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp346.996.000,00; 4) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Rp349.999.400,00 pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp323.072.000,00; 5) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Rp2.415.996.700,00 pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp525.000.000,00; dan b) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp361.316.000,00; 6) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda Rp14.805.155.488,00 pada SKPD Sekretariat DPRD, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp14.519.634.000,00;	

	dan b) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp104.098.800,00; 7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Rp9.660.835.488,00 pada SKPD Sekretariat DPRD, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp9.522.421.000,00; dan b) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp104.098.800,00; 8) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Rp8.315.901.584,00 pada SKPD Sekretariat DPRD, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp4.314.525.000,00; b) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp3.679.101.000,00; dan c) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp138.798.400,00; 9) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Rp8.128.406.792,00 pada SKPD Sekretariat DPRD, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp4.386.900.000,00; b) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp3.499.413.000,00; dan c) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp102.000.000,00; d) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp69.399.200,00; 10) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Rp7.674.141.188,00 pada SKPD Sekretariat DPRD, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp3.827.415.000,00; dan	

	b) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp3.557.600.000,00; c) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp108.000.000,00; dan d) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp104.098.800,00; 11) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Rp7.365.501.500,00 pada SKPD Sekretariat DPRD, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp3.730.650.000,00; dan b) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp3.461.195.000,00; dan c) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp102.000.000,00; 12) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD Rp3.636.644.972,00 pada SKPD Sekretariat DPRD, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja; a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.478.817.000,00; dan b) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp242.897.200,00; 13) Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Rp2.376.673.400,00 pada SKPD Sekretariat DPRD, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp2.345.352.000,00; 14) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Rp1.819.611.192,00 pada SKPD Sekretariat DPRD, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja; a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.680.086.000,00; dan b) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp69.399.200,00; 15) Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Rp1.662.379.796,00 SKPD Sekretariat DPRD, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja; a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.602.404.00,00; dan	

	b) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp34.699.600,00; 16) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Rp1.655.855.496,00 pada SKPD Sekretariat DPRD, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja; a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.587.372.000,00; dan b) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp34.699.600,00; 17) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Rp1.655.839.796,00 pada SKPD Sekretariat DPRD, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja; a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.595.864.000,00; dan b) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp34.699.600,00; 18) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Rp1.654.087.796,00,00 pada SKPD Sekretariat DPRD, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja; a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.595.864.000,00; dan b) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp34.699.600,00; 19) Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS Rp1.649.215.096,00 pada SKPD Sekretariat DPRD, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja; a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.588.612.000,00; dan b) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp34.699.600,00; 20) Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Rp1.617.936.000,00 pada SKPD Sekretariat DPRD, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.595.436.000,00; 21) Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD Rp816.908.592,00 SKPD Sekretariat DPRD, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp730.491.000,00; 22) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp482.285.396,00 SKPD Sekretariat DPRD, yang	

	antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp400.488.000,00; 23) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Rp450.263.392,00 pada SKPD Sekretariat DPRD, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp332.688.000,00; 24) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp1.364.464.988,00 pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.182.240.000,00; 25) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp6.320.674.326,00 pada SKPD Sekretariat Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp1.943.177.600,00; 26) Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Rp1.132.390.284,00 pada SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp1.006.288.400,00; 27) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Rp10.670.676.708,00 pada SKPD Badan Pendapatan Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp8.605.500.800,00; 28) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Rp6.361.544.024,00 pada SKPD Badan Pendapatan Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp4.986.742.400,00; dan	

	b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp767.940.000,00; 29) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp5.130.882.410,00 pada SKPD Badan Pendapatan Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp2.394.272.400,00; 30) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp1.497.777.173,00 pada SKPD Badan Pendapatan Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp763.391.200,00; 31) Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp1.263.879.088,00 pada SKPD Inspektorat, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.055.756.000,00; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Penyediaan anggaran pada masing-masing belanja tersebutlah disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara selektif. Namun demikian, kedepan Pemerintah Provinsi Bali akan lebih cermat dalam memformulasikan uraian belanja pada sub kegiatan dimaksud guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

	8. Belanja Operasi Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp4.459.392.100.429,00 atau 64,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja: a. Belanja Pegawai Penyediaan anggaran Belanja Pegawai Rp2.214.045.845.733,00 atau 32,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya jumlah alokasi Belanja Pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya Rp1.970.487.616.733,00 atau 28,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, telah memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh	

	persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir C.3.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada: 1) Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.063.424.465.119,00 atau 15,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan <i>acress</i> yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(1), butir C.3.a.1).h).(2), dan butir C.3.a.1).h).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	

2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian

a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp64.496.334.554,00 yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 11 sebagai berikut:

Tabel.11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2024 (Rp)
1	Penerimaan	
	a) Belanja Gaji Pokok ASN	768.523.092.563,00
	b) Belanja Tunjangan Keluarga ASN	75.657.551.421,00
	c) Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.805.048.650,00
	d) Belanja Tunjangan Fungsional ASN	70.064.792.855,00
	e) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.716.556.322,00
	f) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	648.933.048.309,00
	g) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	240.232.542.000,00
	h) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00

No	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2024 (Rp)
	ii Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.325.687.000,00
2	Jumlah Penerimaan	1.824.258.319.120,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	72.970.332.764,80
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	64.496.334.554,00
	Selisih	(8.473.998.210,80)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp72.970.332.764,80 atau terdapat selisih kurang Rp8.473.998.210,80.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp187.810.203,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel. 12

Alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan untuk ASN dihitung berdasarkan batas paling tinggi Gaji atau Upah (Gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan) ASN per bulan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, yaitu sebesar Rp12.000.000,00 sehingga perhitungan alokasi anggaran iuran Jaminan Kesehatan untuk ASN telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dalam Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.063.424.465.119,00 termasuk gaji dan tunjangan bagi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 yang saat ini dalam proses seleksi, serta gaji dan tunjangan bagi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024, sehingga belum dapat dialokasikan belanja iuran jaminan kesehatannya.

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

No.	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2024 (Rp)
1	Belanja	
	a. Belanja Uang Representasi DPRD	1.749.300.000,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	182.876.400,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.536.485.000,00
	d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	226.593.684,00
	e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00
2	Jumlah Belanja	4.695.255.084,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	187.810.203,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	187.810.203,00
	Selisih	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp9.075.394,00, yang diperuntukan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali

tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 13 sebagai berikut:

Tabel. 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

No.	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2024 (Rp)
1	Belanja	
	a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	77.641.200,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.489.480,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	139.754.160,00
2	Jumlah Belanja	226.884.840,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	9.075.394,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	9.075.394,00
	Selisih	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus

	menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir C.3.a.1).h).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut: (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.760.195.912,00; dan (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp5.477.902.477,00; belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN,	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dalam Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.063.424.465.119,00 termasuk gaji dan tunjangan bagi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 yang saat ini dalam proses seleksi serta gaji dan tunjangan bagi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024, sehingga belum dapat dialokasikan belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

	yaitu 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok Rp1.844.455.422,15, atau terdapat selisih kurang Rp84.259.510,15; dan (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, yaitu 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok Rp5.533.366.266,45 atau terdapat selisih kurang Rp55.463.789,45. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan pada: (a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp3.598.560,00; dan (b) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp10.795.680,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024	

	sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 , dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan pada: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp155.520,00; dan (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp466.560,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden	

	Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD Rp287.644.796,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan butir C.3.a.2).c).(2).(c) Lampiran	

	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, untuk penyediaan anggaran belanja <i>Medical Check Up</i> kepada KDH/WKDH belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyediakan alokasi anggaran belanja <i>Medical Check Up</i> tersebut dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp58.289.304.663,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diuraikan pada: (1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.749.300.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 14 sebagai berikut:	

Tabel. 14
Belanja Uang Representasi DPRD

No.	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2024		
		Jumlah Pimpinan dan Anggota (Orang)	Jumlah Gaji Pokok dan Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	3.000.000,00	3.000.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	3	2.400.000,00	7.200.000,00
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	51	2.250.000,00	114.750.000,00
4	Jumlah uang representasi Pimpinan dan Anggota	55		124.950.000,00
5	Uang representasi x 14 Bulan			1.749.300.000,00
Alokasi uang representasi pada APBD				1.749.300.000,00
Selisih				0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memenuhi amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Uang Representasi DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp2.536.485.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, telah memenuhi

	amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp226.593.684,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp9.900.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 15 sebagai berikut:	

Tabel. 15
 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan
 dan Anggota DPRD

No	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2024		
		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD (Orang)	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	55	3.000.000,00	9.900.000.000,00
	Jumlah Pagu			9.900.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada APBD			9.900.000.000,00
	Selisih			0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp2.475.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 16 sebagai berikut:

Tabel. 16
Belanja Tunjangan Reses DPRD

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD Sedang)	55	3.000.000,00	2.475.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD			2.475.000.000,00
	Selisih			0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

	2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. (6) Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD yang tercantum dalam rincian objek belanja: (a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp25.236.000.000,00; dan (b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp14.688.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, alokasi anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah	

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp360.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 17 sebagai berikut:

Tabel. 17
Dana Operasional Pimpinan DPRD

No.	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2024 Jumlah (Rp)
1	Ketua DPRD	4 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	144.000.000,00
2	Wakil Ketua DPRD	2,5 x 3 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	216.000.000,00
3	Jumlah Dana Operasional		360.000.000,00
4	Alokasi Dana Operasional pada APBD		360.000.000,00
	Selisih		0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memenuhi amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran

	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp6.111.674.012,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp1.250.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp4.074.449.341.179,00 yaitu Rp6.111.674.011,77. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.	

	5) Tambahan Penghasilan (TPP) ASN Penyediaan anggaran Belanja TPP ASN Rp648.933.048.309,00 atau 9,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp476.012.458.950,00; b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp50.583.623.955,00; c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp28.508.727,00; dan d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp122.308.456.677,00; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, terkait kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Provinsi Bali tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2024 dalam hal: a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2023; b) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN; sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(7).(d) Lampiran	

	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir C.3.a.1).h).(7).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp332.090.796.188,00 atau 4,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp82.117.416.676,00; b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp195.870.512,00; c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp240.232.542.000,00; d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp3.325.687.000,00; e) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp4.350.000,00; f) Belanja Honorarium Rp4.617.730.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp4.498.370.000,00; (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp74.630.000,00; dan (3) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan	

	Barang dan Jasa (UKPBJ) Rp44.730.000,00. g) Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp1.597.200.000,00; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada: a) Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(7).(c).ii.(vii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah. Selanjutnya,	

	husus untuk Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah yang semula dianggarkan dalam rincian objek Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah pada SKPD Badan Pendapatan Daerah agar dialihkan penganggarannya dalam rincian objek Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. b) Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan. c) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. d) Butir C.3.a.1).h).(7).(c).ii.vii).(vi) Lampiran Peraturan	

	Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 untuk Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang melaksanakan pemanfaatan BMD sebagai salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. b. Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp1.234.841.187.760,00 atau 17,85% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja: 1) Belanja Barang Penyediaan anggaran Belanja Barang Rp158.109.761.618,00 atau 2,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Barang Pakai Habis Rp156.388.585.868,00 atau 2,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan	

	Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Rp5.806.074.200,00; (2) Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp1.096.208.003,00; (3) Belanja Bahan-Bahan Rp24.671.997.916,00; (4) Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp1.421.905.300,00; (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp4.357.529.028,00; (6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp2.289.636.810,00; (7) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp2.026.864.920,00; (8) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp4.841.627.364,00; (9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp1.334.650.400,00; (10) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp1.637.168.512,00; (11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata Rp1.226.100.000,00; (12) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp17.957.452.340,00; (13) Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp5.544.906.850,00; (14) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp27.138.645.000,00; (15) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp6.665.820.876,00; (16) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp4.329.875.000,00 (17) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan	

	Anggota DPRD Rp2.248.777.500,00; dan (18) Belanja Pakaian Olahraga Rp1.608.285.200,00; b) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp1.721.175.750,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp204.250.000,00; (2) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum Rp171.635.000,00; (3) Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar Rp932.400.000,00; (4) Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Rp152.000.000,00; dan (5) Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya Rp134.450.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekedaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya	

	sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. c) Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali memperhatikan jumlah alokasi belanja barang terbesar yang antara lain tercantum dalam belanja: (1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp27.424.770.000,00 yang antara lain diuraikan pada: (a) SKPD Sekretariat DPRD Rp18.462.725.000,00 atau 67,32% dari total belanja makanan dan minuman rapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; (b) SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Rp1.088.940.000,00 atau 3,97% dari total belanja makanan dan minuman rapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; (c) SKPD Sekretariat Daerah Rp1.014.015.000,00 atau 3,70% dari total belanja makanan dan minuman rapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; (2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp17.990.682.240,00 yang antara lain diuraikan pada: (a) SKPD Sekretariat Daerah Rp6.726.817.500,00 atau 37,39% dari total belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	

	dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; (b) SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Rp3.586.422.700,00 atau 19,93% dari total belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan (c) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp1.362.700.000,00 atau 7,57% dari total belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; (3) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp6.665.820.876,00 yang antara lain diuraikan pada SKPD Sekretariat Daerah Rp5.824.595.876,00 atau 87,38% dari total belanja makanan dan minuman jamuan tamu dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; (4) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp4.417.205.000,00 yang antara lain diuraikan pada Sekretariat Daerah Rp1.468.350.000,00 atau 33,24% dari total belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp2.047.921.320,00 yang antara lain diuraikan pada SKPD Badan Pendapatan Daerah Rp1.275.705.600,00 atau 62,29% dari total belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak tamu dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024;	Penyediaan alokasi anggaran Belanja Makanan dan Minuman, dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara selektif. Penyediaan anggaran belanja dimaksud, antara lain dipergunakan untuk: 1. Penyediaan makanan dan minuman dalam rangka pelaksanaan kegiatan Reses Anggota DPRD; 2. Penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan lomba-lomba antara lain: Porsenijar, Peparpeprov, Pra POPNAS, Olahraga Tradisional, OSN, O2SN, FL2SN, LKS, rapat koordinasi dengan seluruh satuan pendidikan; 3. mendukung pembiayaan lomba-lomba seperti peralatan dan perlengkapan kegiatan perlombaan cabang olahraga, piala dan piagam untuk pemenang antara lain kegiatan Porsenijar, pra POPNAS, Peparpeprov, Olahraga Tradisional, OSN, O2SN, FLS2N dan LKS tingkat Provinsi dan tingkat nasional; 4. Pencetakan blanko WP di Badan Pendapatan daerah; dan 5. Penyediaan Suvernir untuk tamu tamu Pemerintah Provinsi Bali

	(6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Rp1.226.100.000,00 yang antara lain diuraikan pada SKPD Sekretariat Daerah Rp1.119.000.000,00 atau 91,26% dari belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; untuk dirasionalkan besaran alokasi anggarannya dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, berpedoman pada standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dan butir C.3.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (1) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Pihak Ketiga/Pihak Lain	

	(a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Rp15.497.651.064,00; (b) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp10.322.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan dijabarkan dalam RKPD sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(b) dan butir C.3.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi, serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan siap diserahkan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	

	(2) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp14.342.382.668,00 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (a) Belanja Uang yang Diberikan kepada pihak Ketiga/pihak Lainl Masyarakat Rp5.604.300.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: i. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp2.241.500.000,00; dan ii. Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp3.362.800.000,00; (b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp8.738.082.668,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: i. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp6.296.492.000,00; dan ii. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp2.441.590.668,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang	

	yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan serta Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain agar memperhatikan: (1) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD; (2) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait bagi Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain; (3) memiliki data dan informasi yang telah tervalidasi	

	yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bagi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ pihak Ketiga/Pihak Lain; dan (4) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima; sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(l).(c) dan butir C.3.a.2).c).(5).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 2) Belanja Jasa Penganggaran Belanja Jasa Rp562.137.842.884,00 atau 8,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Jasa Kantor Rp467.724.089.386,00 atau 6,76% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp23.175.833.200,00; (2) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp31.222.025.200,00; (3) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp46.791.572.672,00; (4) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp11.759.621.152,00; (5) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp3.626.202.800,00; (6) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Rp2.428.800.000,00;	

	(7) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp5.845.500.000,00; (8) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp167.218.311.220,00; (9) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp8.312.185.200,00; (10) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp11.823.360.344,00; (11) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp27.148.506.798,00; (12) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp26.863.014.615,00; (13) Belanja Jasa Tenaga Supir Rp11.212.749.008,00; (14) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Rp2.041.200.000,00; (15) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Rp6.477.000.000,00; (16) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Rp2.506.737.057,00; (17) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp4.444.454.646,00; (18) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp6.801.550.000,00; (19) Belanja Tagihan Telepon Rp1.972.043.742,00; (20) Belanja Tagihan Air Rp2.016.379.000,00; (21) Belanja Tagihan Listrik Rp28.954.649.422,00; (22) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp1.714.449.650,00; (23) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp13.509.173.224,00; (24) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp2.368.632.228,00; dan (25) Belanja Pengolahan Air Limbah Rp2.849.680.000,00;	

	dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penyediaan anggaran Belanja Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp53.514.051.420,00 atau 0,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub	Penyediaan alokasi anggaran Belanja Jasa berdasarkan kebutuhan nyata dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

	rincian objek belanja: (1) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) yang tercantum pada Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp26.481.716.100,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan Kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah dan sebesar kebutuhan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan menganggarkan pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.i), butir c.3.a.2).c).(2).(b).v.ii), butir c.3.a.2).c).(2).(b).v.iii), butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.iv) dan butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.v) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk pada tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk menganggarkan sebagian atau seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah	

	(PPU) dan PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN dan menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, dan butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.vii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).vi dan butir C.3.a.2).c).(2).(b).vii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi	

	peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran bantuan PBPU mandiri tahun anggaran sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk menganggarkan kewajiban tunggakan atas IW bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran KP Desa, kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran bantuan PBPU mandiri dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.vi) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. (2) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp12.698.783.784,00; (b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp729.767.112,00; (c) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp4.772.196.792,00; dan (d) Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp7.346.587.632,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas	

	risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b), butir C.3.a.2).c).(2).(d) dan butir C.3.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. (3) Penyediaan anggaran Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp1.485.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (1) Belanja Sewa Tanah Rp49.250.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Lapangan Lainnya Rp42.250.000,00; (2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp13.583.406.878,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	

	Rp462.286.300,00; (b) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp7.050.069.000,00; (c) Belanja Sewa Mebel Rp500.000.000,00; (d) Belanja Sewa Peralatan <i>Studio Audio</i> Rp1.913.076.564,00; (e) Belanja Sewa <i>Personal Computer</i> Rp819.500.000,00; dan (f) Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya Rp1.300.000.000,00. (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp9.582.820.000,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp835.000.000,00; (b) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp5.434.400.000,00; dan (c) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp1.248.740.000,00; (4) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp510.200.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Sewa <i>Audio Visual</i> Rp114.000.000,00; dan (b) Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian Rp345.700.000,00; (5) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud Rp50.000.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang	

	APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan <i>Franchise</i> Rp50.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan BMD. Selanjutnya, apabila tidak terdapat BMD terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan BMD yang ada. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan butir C.3.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Penyediaan alokasi anggaran Belanja Sewa berdasarkan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana

	d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp5.095.770.700,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp1.015.867.825,00; (b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Rp600.000.000,00; dan (c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan Rp2.920.000.000,00. (2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp6.300.260.500,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa <i>Survei</i> Rp2.003.456.000,00; dan (b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp3.603.054.500,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan	

	aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep <i>full costing</i> atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP), sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp5.727.994.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp3.483.511.000,00 (2) Belanja Bimbingan Teknis Rp509.950.000,00; (3) Belanja Diklat Kepemimpinan Rp1.734.533.000,00;	

	dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).iii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rp15.726.606.680,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	

	Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan butir C.3.a.2).c).(2).(i).ix. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah. Selanjutnya, dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur (seminar/ <i>workshop</i>/kursus/lokakarya/sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan) atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara <i>virtual</i> maupun <i>hybrid</i>, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).iv. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 3) Belanja Pemeliharaan Rp39.783.073.084,00 atau 0,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp20.251.466.767,00 atau 0,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:	

	(1) Belanja Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya Rp1.475.000.000,00; (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp10.085.850.000,00; (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp875.000.000,00; (4) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp860.987.000,00; (5) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp1.345.465.000,00; (6) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>) Rp555.990.000,00; (7) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus Rp618.000.000,00; (8) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-<i>Personal Computer</i> Rp1.327.850.000,00; (9) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Personal Computer</i> Rp735.390.000,00; (10) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Rp451.175.000,00; dan (11) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp683.004.461,00; b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp13.307.227.117,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain	

	diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp8.561.887.194,00; (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp660.000.000,00; (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/ Perikanan Rp1.075.416.000,00;. (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Rp 1.814.573.923,00; dan (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I Rp408.500.000,00; c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp6.069.342.200,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi Rp4.200.000.000,00; (2) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp194.137.000,00; (3) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas Rp194.474.200,00; (4) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain Rp122.500.000,00; dan (5) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Rp759.540.000,00;	

	d) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp90.000.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik Rp10.000.000,00; dan (2) Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah Rp80.000.000,00; e) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp65.037.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software Rp60.037.000,00; dan (2) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya Rp5.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, elisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masingmasing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	Belanja Pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk melakukan pemeliharaan terhadap aset/barang yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, elisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

	Selanjutnya, penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada: a) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 4) Belanja Perjalanan Dinas Rp151.442.464.300,00 atau 2,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp135.178.804.300,00 atau 1,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp124.056.805.300,00 yang antara lain tercantum pada: (a) SKPD Sekretariat DPRD Rp74.623.222.000,00 atau 58,78% dari total belanja perjalanan dinas biasa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali

	tentang APBD Tahun Anggaran 2024; (b) SKPD Sekretariat Daerah Rp9.634.495.500,00 atau 7,59% dari total belanja perjalanan dinas biasa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; (c) SKPD Inspektorat Rp6.259.684.800,00 atau 4,93% dari total belanja perjalanan dinas biasa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; (d) SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Rp5.530.851.000,00 atau 4,36% dari total belanja perjalanan dinas biasa dalam Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Angaran 2024; (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp7.592.685.000,00 yang antara lain tercantum pada: (a) SKPD Sekretariat Daerah Rp1.422.238.000,00 atau 27,13% dari total belanja perjalanan dinas dalam kota dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; (b) SKPD Badan Pendapatan Daerah Rp1.120.730.000,00 atau 21,38% dari total belanja perjalanan dinas dalam kota dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; (c) SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Rp1.120.730.000,00 atau 13,05% Pada atau dari total belanja pedalanan dinas dalam kota dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggpran 2024;	

	(d) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Rp1.120.730.000,00 atau 8,06% dari total belanja perjalanan dinas dalam kota dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp16.263.660.000,00 atau 0,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang antara lain tercantum pada SKPD Sekretariat DPRD Rp16.259.490.000,00 atau 100,00% dari total perjalanan dinas biasa luar negeri dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024; harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan dengan berpedoman pada Feraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir C.3.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Alokasi belanja perjalanan dinas telah dilakukan penyesuaian kembali serta sudah dialokasikan berdasarkan kebutuhan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

	Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas paket <i>meeting</i> dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(4).(a).vi. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket <i>meeting</i> luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(4).(a).vii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	

	59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan butir C.3.a.2).c).(4).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada: a) Sekretariat Daerah Rp9.276.505.000,00 atau 6,46% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp143.665.790.581; dan b) Sekretariat DPRD Rp37.183.396.000,00 atau 21,18% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp175.542.270.119; dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, alokasi anggaran guna mendukung pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, alokasi anggaran pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan	Alokasi belanja perjalanan dinas telah dilakukan penyesuaian kembali serta sudah dialokasikan berdasarkan kebutuhan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

	sekurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, dan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Belanja Subsidi Penyediaan anggaran Belanja Subsidi Rp2.525.000.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat agar hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas, sebagaimana maksud Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan	

	peraturan perundang-undangan. Dalam hal belanja subsidi ditujukan kepada BUMD penyelenggara Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dianggarkan dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apabila Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (<i>full cost recovery</i>), Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sebagaimana maksud butir C.3.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. d. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Penyediaan anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Rp6.420.815.957.388,00 atau 8,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang tercantum pada: 1) Belanja Hibah Rp997.830.066.936,00 atau 14,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel 18, sebagai berikut:	

Tabel. 18
Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Hibah (Rp)	Realisasi Belanja Hibah (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD TA 2021	1.012.218.129.880,00	982.678.445.090,63	97,08	7.903.323.253.052,00	12,81
APBD TA 2022	403.159.161.920,00	355.343.676.845,00	88,14	7.541.821.522.461,00	5,35
APBD TA 2023	1.068.846.413.720,00	776.103.602.202,00	72,61	7.932.886.363.138,00	13,47
R-APBD TA 2024	997.830.066.936,00	0,00	0,00	6.484.806.591.825,00	15,39

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mengalokasikan Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.068.846.413.720,00 atau 13,47% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.932.886.363.138,00, dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp403.159.161.920,00 atau 5,36% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp7.541.821.522.461,00, dan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp1.012.218.129.880,00 atau 12,81% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp7.903.323.253.052,00.

	Selain itu, untuk penyediaan alokasi belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga memperhatikan tren realisasi Belanja Hibah tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut: a) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 Rp776.103.602.202,00 atau 72,61% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.068.846.413.720,00; b) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 Rp355.343.676.845,00 atau 88,14% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp403.159.161.920,00; dan c) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 Rp982.678.445.090,63 atau 97,08% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp1.012.218.129.880,00. Selanjutnya, penganggaran Belanja Hibah yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja: a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp157.398.155.732,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp157.398.155.732,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp157.398.155.732,00; b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp726.894.021.204,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk	

	Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp519.305.710.756,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang eersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Beidasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp519.305.710.756,00; (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp206.615.975.312,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukareja Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp203.876.155.000,00; dan (3) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp972.335.136,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp972.335.136,00; 2) Belanja Bantuan Sosial Rp10.150.000.000,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel 19, sebagai berikut:	

Tabel. 19
Tren Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD TA 2021	0,00	0,00	0,00	7.903.323.253.052,00	0,00
APBD TA 2022	140.000.000,00	139.016.000,00	99,30	7.541.821.522.461,00	0,002
APBD TA 2023	0,00	0,00	0,00	7.932.886.363.138,00	0,00
R-APBD TA 2024	10.150.000.000,00	0,00	0,00	6.484.806.591.825,00	0,16

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.932.886.363.138,00, dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp140.000.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp7.541.821.522.461,00, dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.903.323.253.052,00. Selain itu, untuk penyediaan alokasi belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD

	Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga memperhatikan tren realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 Rp139.016.000,00 atau 99,30% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp140.000.000,00. Selanjutnya, penganggaran Belanja Bantuan Sosial yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja: a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp9.900.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp9.900.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp9.900.000.000,00; b) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp250.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp250.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp250.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2072 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan	Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial telah mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2072 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan serta telah dilakukan penyesuaian kembali terhadap alokasi belanja hibah dan bantuan sosial tersebut.

	peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan pemndang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dialihkan untuk mendanai kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, alokasi anggaran guna mendukung pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, alokasi anggaran pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, dan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan sesuai	

	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan anggaran belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah	

	yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menganggarkan Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat harus mencantumkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Khusus untuk pagu anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Beianja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp21.957.140.000,00 atau 0,32% dari total belanja daerah dalarn Rancangan Peratr.ran Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, d,an butir C.3.a.5).d).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	

	15 Tahun 2023. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada Tahun 2024, Pernerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibih yang disepakati bersama, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakit Wali Kota Tahun 2024. 9. Belanja Modal Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp766.532.572.871,00 atau 11,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah,	Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibih yang disepakati bersama, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakit Wali Kota Tahun 2024

	melewati batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penganggaran pengadaan BMD harus didasarkan pada: a. perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada; dan b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga; sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan butir C.3.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada: a. Belanja Modal Tanah Rp3.460.000.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah Rp3.460.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tanah persil Rp3.460.000.000,00 untuk yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempal Kerja Rp3.460.000.000,00,dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali rentang APBD Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi	

	Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, dan butir C.3.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp159.175.985.182,00 atau 2,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Alat Besar Rp872.250.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Bantu Rp594.250.000,00 yang antara lain diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal <i>Electric Generating Set</i> Rp407.000.000,00; 2) Belanja Modal Alat Angkutan Rp6.950.491.100,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp6.950.491.100,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp4.922.361.600,00; dan b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Rp2.000.000.000,00; 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp9.226.767.188,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Kantor Rp1.715.477.900,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja	

	Modal Alat Kantor Lainnya Rp1.519.067.900,00; b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp6.958.374.288,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Mebel Rp4.226.290.888,00; (2) Belanja Modal Alat Pendingin Rp1.145.629.800,00; dan (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>) Rp1.475.668.900,00; c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat Rp552.915.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp363.415.000,00; 4) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp3.174.113.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Studio Rp1.701.001.600,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rp587.815.800,00; dan (2) Belanja Modal Alat Studio Lainnya Rp720.000.000,00; b) Belanja Modal Alat Komunikasi Rp1.459.500.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF Rp574.000.000,00; dan (2) Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus Rp870.000.000,00;	

	5) Belanja Modal Komputer Rp8.088.548.400,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Komputer Unit Rp5.073.206.100,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal <i>Personal Computer</i> Rp5.073.206.100,00; dan b) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp3.015.342.300,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Peralatan <i>Personal Computer</i> Rp1.743.508.300,00; dan (2) Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp1.205.286.000,00; 6) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Rp1.201.424.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian Belanja Modal Alat Bantu Produksi Rp1.163.924.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Perawatan Sumur Rp1.163.924.000,00; c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp453.692.159.222,00 atau 6,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Rp444.376.489.702,00 atau 6,42% dai total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:	

	a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp443.822.047.702,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp44.585.684.809,00; (2) Belanja Modal Bangunan Gudang Rp1.164.299.000,00; (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp2.400.086.000,00; (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp278.671.725.971,00; (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp3.700.000.000,00; (6) Belanja Modal Bangunan Terbuka Rp1.363.110.752,00; dan (7) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Rp111.285.631.170,00; b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp554.442.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Asrama Rp554.442.000,00; 2) Belanja Modal Monumen Rp6.708.637.920,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Rp6.708.637.920,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Peninggalan Rp6.708.637.920,00; d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp96.417.792.467,00 atau 1,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:	

	1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp66.571.533.617,00 atau 0,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Jalan Rp66.571.533.617,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Jalan Provinsi Rp64.961.533.617,00; dan b) Belanja Modal Jalan Lainnya Rp1.610.000.000,00; 2) Belanja Modal Bangunan Air Rp12.078.345.000,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada rincian objek belanja: a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp11.530.525.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi Rp11.530.525.000,00; dan b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp547.820.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp547.820.000,00; 3) Belanja Modal Instalasi Rp1.428.108.850,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp1.200.000.000,00 yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik Rp1.200.000.000,00; 4) Belanja Modal Jaringan Rp15.049.805.000,00 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Jaringan	

	Air Minum Rp15.000.000.000,00 yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya Rp 15.000.000.000,00; e. Belanja Modal Aset Lainnya Rp885.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp885.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp885.000.000,00 yang antara lain diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian Rp800.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai dengan kewenangan pemerintah Daerah Provinsi Bali, sebagaimana maksud Pasal 64 peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Pengadaan BMD dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir C.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:	

	a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp12.582.070.000,00 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran Rp12.582.070.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp815.480.000,00; 2) Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rp2.280.500.000,00; 3) Belanja Modal Alat Kedokteran Mata Rp4.425.000.000,00; 4) Belanja Modal Alat Kedokteran Anak Rp3.026.570.000,00; 5) Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa Rp609.520.000,00; dan 6) Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi Rp653.200.000,00; b. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp12.500.809.250,00 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: 1) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp11.885.973.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp11.885.973.000,00; dan 2) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp595.636.250,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara Rp412.920.000,00; Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian	

dalam pelayanan kepada masyarakat. 10. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurht termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyediaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Rp62.772.177.068,00 atau 0,91% dari total belanja daerah dalam Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemunskinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 dan butir C.3.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 11. Belanja Transfer Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp1.628.932.778.711,00 atau 23,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada: a. Belanja Bagi Hasil Rp1.279.176.638.488,00 atau 18,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut: 1) Belanja Bagi Hasil PKB $\text{Rp1.495.975.827.460,00} \times 30\% = \text{Rp448.792.748.238,00}$;	Penyediaan anggaran belanja Tidak Terduga dalam Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah diperhitungkan dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 serta kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang- undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 dan butir C.3.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

	2) Belanja Bagi Hasil BBNKB Rp974.148.848.420,00 x 30% = Rp292.244.654.526,00; 3) Belanja Bagi Hasil PBBKB Rp414.313.697.546,00 x 70% = Rp290.019.588.282,00; 4) Belanja Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp1.150.485.000,00 x 50% = Rp575.242.500,00; dan 5) Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok Rp353.634.864.203,00 x 70% = Rp247.544.404.942,00. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota dimaksud sesuai dengan target pajak daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2024 dan memiliki kewajiban atas penyaluran bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya, untuk menganggarkan kembali kewajiban tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan butir C.3.d.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana maksud Pasal 24	Penyediaan anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota telah sesuai dengan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan butir C.3.d.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp349.756.140.223,00 atau 5,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel 20, sebagai berikut:

Tabel. 20
Tren Belanja Bantuan Keuangan terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD TA 2021	372.476.037.244,00	354.152.504.342,48	95,08	7.903.323.253.052,00	4,71
APBD TA 2022	303.313.478.733,00	269.544.177.473,00	88,87	7.541.821.522.461,00	4,02
APBD TA 2023	522.374.803.508,00	262.020.258.076,00	50,16	7.932.886.363.138,00	6,58
R-APBD TA 2024	349.756.140.223,00	0,00	0,00	6.484.806.591.825,00	5,39

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp522.374.803.508,00 atau 6,58% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.932.886.363.138,00, mengalami peningkatan dibandingkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp303.313.478.733,00 atau 4,02% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali

	tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp7.541.821.522.461,00, dan dengan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp372.476.037.244,00 atau 4,71% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp7.903.323.253.052,00. Selain itu, untuk penyediaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga memperhatikan tren realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut: 1) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 Rp262.020.258.076,00 atau 50,16% dari total Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp522.374.803.508,00; 2) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Rp269.544.177.473,00 atau 88,87% dari total Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp303.313.478.733,00; 3) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Rp354.152.504.342,48 atau 95,08% dari total Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp372.476.037.244,00. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Kabupaten/Kota Rp273.434.940.223,00; dan 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp76.321.200.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka kerja sama	

	daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, untuk diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek masing-masing Kabupaten/Kota penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Provinsi Bali tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Hasil dari penghematan penggunaan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, alokasi anggaran guna mendukung	Penyediaan anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota/Desa dalam telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

	pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, alokasi anggaran pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, dan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggunglawaban Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana maksud butir C.3.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Kebijakan Pembiayaan Daerah Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp563.429.557.900,00 sebagaimana Tabel. 21 sebagai berikut:	

Tabel. 21
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dan APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
1	2	3	4=3-2	5=4.2
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.079.721.253.120,00	812.346.571.252,00	(267.374.681.868,00)	(24,76)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	330.133.723.425,00	641.176.238.452,00	311.042.515.027,00	94,22
Pencairan Dana Cadangan	78.829.667.200,00	171.170.332.800,00	92.340.665.600,00	117,14
Penerimaan Pinjaman Daerah	670.757.862.495,00	0,00	(670.757.862.495,00)	(100,00)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	395.788.065.929,00	248.917.013.352,00	(146.871.052.577,00)	(37,11)
Pembentukan Dana Cadangan	150.000.000.000,00	0,00	(150.000.000.000,00)	(100,00)
Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000,00	0,00	(100.000.000.000,00)	(100,00)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	145.788.065.929,00	248.917.013.352,00	103.128.947.423,00	70,74

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah daiam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan
Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan penerimaan pembiayaan Rp812.346.571.252,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri

dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Sisa kbih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp641.176.238.452,00 atau 9,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp6.917.629.629.079,00.

Tabel.22

Tren SiLPA terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	SiLPA (Rp)	Realisasi SiLPA (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD TA 2021	192.855.860.215,00	192.855.592.021,00	100,00	7.903.323.253.052,00	2,44
APBD TA 2022	850.341.671.769,00	850.296.343.468,62	99,99	7.541.821.522.461,00	11,28
APBD TA 2023	330.133.723.425,00	330.133.723.425,00	100,00	7.932.886.363.138,00	4,16
R-APBD TA 2024	641.176.238.452,00	0,00	0,00	6.484.806.591.825,00	9,89

Berdasarkan tabel di atas, SiLPA dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp330.133.723.425,00 atau 4,16% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.932.886.363.138,00, mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp850.341.671.769,00 atau 11,28% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp7.541.821.522.461,00, dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran

	2021 Rp192.855.860.215,00 atau 2,44% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp7.903.323.253.052,00. Selain itu, tren realisasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut: 1) Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 per tanggal 8 Desember 2023 Rp330.133.723.425,00 atau 100,00% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp330.133.723.425,00; 2) Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2022 Rp850.296.343.468,62 atau 99,99% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp850.341.621.269,00; 3) Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2021 Rp192.855.592.021,00 atau 100,00% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp192.855.860.215,00. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi SiLPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pencairan Dana Cadangan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Pencairan Dana Cadangan Rp171.170.332.800,00 atau 2,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan	Besaran alokasi SiLPA yang dirancang dalam Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, telah diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi SiLPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengalokasian Pencairan Dana Cadangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah mempedomani Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.4.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

	dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.4.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, Dana Cadangan tersebut penggunaannya diprioritaskan untuk kebutuhan pembangunan prasarana dan Sarala daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya, sebagaimana maksud Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Untuk pencairan dana cadangan, dapat dicairkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan bersangkutan yang menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal Dana Cadangan dimaksud belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Selanjutnya, penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal pencairan dana cadangan akan digunakan guna mendanai pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat menggunakan	

	pencairan dana cadangan dimaksud sesuai dengan tahapan dan jadwal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pengeluaran pembiayaan Rp248.917.013.352,00, Pengeluaran pembiayaan tersebut terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp248.917.013.352,00 atau 3,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sebagaimana maksud pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, sebagaimana maksud butir C.4.b.2).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang telah disepakati dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI).
IV	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS	

Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel. 23 sebagai berikut:

Tabel. 23

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS

No	Keterangan	RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-APBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	172 program	5.983.126.384.360,00	172 program	5.983.126.541.834,00	172 program	6.917.629.629.079,00
2.	Jumlah Kegiatan	431 kegiatan		431 kegiatan		431 kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	1116 sub kegiatan		1116 sub kegiatan		1124 sub kegiatan	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RKPD serta KUA dan PPAS yang diuraikan pada kegiatan/sub kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, tetapi tidak terdapat dalam RKPD, KUA dan PPAS antara lain tercantum pada:

1. SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang antara lain tercantum pada:
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp1.292.629.000,00;
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp3.748.662.000,00;
 - c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

	Rp4.863.588.116,00; d. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Rp2.310.000.000,00; e. Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Rp393.150.000,00; f. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Rp172.715.470.000,00; g. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Rp1.963.944.000,00; h. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp9.865.020.962,00; dan i. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Rp11.885.973.000,00; 2. SKPD Dinas Kesehatan yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp273.690.000,00; b. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Rp8.732.070.000,00; dan c. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang diuraikan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang diuraikan pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Rp1.425.000.000,00; 3. SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai Rp547.820.000,00; b. Program Pengembangan Permukiman yang diuraikan pada Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang diuraikan pada Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	

	Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi Rp248.681.272,00; dan c. Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar Rp11.877.780.534,00; Selanjutnya, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 belum berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dialihkan untuk mendanai kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, alokasi anggaran guna mendukung pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, alokasi anggaran pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, dan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa, dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan	Penambahan sub kegiatan dimaksud antara lain merupakan sub kegiatan pada Dinas Kesehatan yang bersumber dari Dana DAK serta untuk keperluan mendesak berupa kekurangan pembayaran atas pekerjaan yang tidak dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024 yang telah mendapatkan persetujuan Bersama antara eksekutif dan legislatif.

	Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
V	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD	
	Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD/RPD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut: 1. Jumlah anggaran, yang tercantum dalam RPJMD/RPD Tahun 2024 Rp6.460.466.448.757,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp6.917.629.629.079,00; dan 2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD/RPD Tahun 2024 sejumlah 178 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 172 program. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali memperhatikan: 1. Jumlah anggaran dalam RPJMD/RPD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas Daerah dan dukungan terhadap Prioritas Nasional Tahun 2024; dan	

	2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2024. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.	
VI.	REKOMENDASI	
	Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut: A. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir D.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

	B. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan anggaran untuk: 1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan 2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan; sebagaimana maksud butir E.2.ab.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 C. Sasaran utama pengembangan Wilayah Provinsi Bali pada tahun 2024 adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Bali sebesar 6,5% s.d 6,9%, menurunnya kemiskinan wilayah Bali sebesar 2,50% s.d 3,00%, serta menurunnya tingkat pengangguran terbuka wilayah Bali sebesar 2,10% s.d. 2,83%. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendukung tercapainya IPM Provinsi di wilayah Jawa-Bali sebesar 73,65% s.d 82,57%. Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2024 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem	

	graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. D. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. F. Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (delisit anggaran) di Tahun Anggaran 2023, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2024, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024.	

G. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. H. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, alokasi anggaran guna mendukung pemenuhan alokasi belanja infrastruktur. pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, alokasi anggaran pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, dan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengerntangan kornpeterrsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang	

	menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. I. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menganggarkan TPP-ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bati tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan: 1. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan pegawai Negeri Sipil (PNS); 2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN; 3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan 4. mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar pemerintah Daerah Provinsi Bali memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu pada hasil evaluasi jabatan. J. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar besarnya (<i>value for money</i>), Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan	

	melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2027 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. K. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Berkaitan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana maksud butir E.2.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. L. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain: 1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;	

	2. Menyusun rencana kegiatan/ sub kegiatan (roadmap) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur; 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan 4. Untuk melakukan asistensi dan monitoing terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya; dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. M. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu; 1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah; 2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>); 3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah di Daerah masing-masing; dan	

	4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. N. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Keadaan darurat meliputi: 1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; Keperluan Mendesak meliputi: 1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau 4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan	

	menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau masyarakat. O. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain untuk: 1. FKUB sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 dan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sebagaimana maksud butir E.3.ai.3).d) Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai kewenangannya yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. 3. Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana maksud butir E.3.ai.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 4. Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (<i>under weight</i>) pada anak balita dan menurunnya prevalensi <i>wasting</i> (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor	Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, telah mengalokasikan anggaran untuk FKUB, FORKOPIMDA, penurunan prevalensi <i>stunting</i>, Program Perhutanan Sosial, pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta kegiatan kegiatan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional

	050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 dan butir E.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 5. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan butir 8.2.ap.72).d1.Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 6. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/ Kabupaten/Kota melalui: a. upaya percepatan penurunan <i>stunting</i> melalui pendampingan keluarga dengan PMT yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; b. dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era <i>Digital</i> yang meliputi peningkatan kualitas Keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti <i>trafficking</i>, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; c. mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian; d. mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal	

	sebagai ulaya mengurangi angka <i>stunting</i>, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga; e. dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada posyandu ditingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan <i>digital</i> untuk ibu/anak, Antropometri, <i>Thermometer</i>, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan AKB, angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan NKKBS, peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh rumah tangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang sehat; f. dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/ Kabupaten/ Kota dianggarkan dalam Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK, kegiatan bakti sosial,	

	peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta kegiatan lainnya; dan h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah. 7. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Posyandu sesuai kewenangannya dan dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.6.4/76779/Keuda tanggal 30 Oktober 2023. 8. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar mengambil Langkah-langkah sebagai berikut: a. mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi melalui kegiatan/ sub kegiatan antara lain: 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti; 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti; 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti; 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan pengemis di dalam Panti; 5) Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah	

	Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAIZA di dalam panti; 6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi; 7) Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota; dan 8) Penyediaan dan Penyaluran pangan pokok atau pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah provinsi, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. b. mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah provinsi; 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten / Kota; 3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan; 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti; 5) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti; 6) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti; 7) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di luar Panti; 8) Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti; 9) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi; 10) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten/ Kota; dan	

	11) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. c. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (<i>by name by address</i>) melalui kegiatan/ sub kegiatan antara lain: 1) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan; dan 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: 1) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan 2) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha. e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali. 9. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain untuk Madrasah, pondok pesantren serta Pendidikan agama dan keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan Budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud	

	butir E.2.w.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 10. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), pen5rusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud butir E.2.ag Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. P. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit: 1) Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau 2) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat: 1) nama kegiatan; 2) jangka waktu pelaksanaan kegiatan; 3) jumlah anggaran; dan 4) alokasi anggaran per tahun. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	

Q. Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pernerintahan umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1.9.1./5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 R. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melaksanakan sekurang-kurangnya meliputi: 1) menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON; 2) mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON; 3) membentuk tim koordinasi tingkat daerah Provinsi dan	Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

Kabupaten Kotadalam menyelenggarakan DBON di daerah; 4) menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; 5) menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran Sport Deuelopment Index (SDI) di daerah; 6) menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan sport science yang bekerjasama dengan Universitas; dan 7) menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON. S. Dalam rangka melaksanakan Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar menyediakan alokasi anggaran untuk akomodasi dan konsumsi atlet dan official kontingen provinsi yang akan mengikuti pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, dengan berkoordinasi dengan KONI Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0521/Seskab/Polhukam/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Penyampaian Arahkan Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.11/6712/SJ tanggal 12 Desember 2023 tentang Dukungan Anggaran Biaya Akomodasi Atlet dan Official Peserta Daerah untuk Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024. T. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. U. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam	Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, telah menyediakan alokasi anggaran untuk akomodasi dan konsumsi atlet dan official kontingen provinsi yang akan mengikuti pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, dengan berkoordinasi dengan KONI Provinsi.

	Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. V. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh pemerintah Daerah Provinsi Bali dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah Provinsi Bali.	

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 27 Desember 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI BALI

KETUA,



I NYOMAN ADI MIRYATAMA, S.Sos., M.Si.

WAKIL KETUA

Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E., MM., Ak., C.A.

WAKIL KETUA

I NYOMAN SUYASA, ST

WAKIL KETUA

TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP., MAP.

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024**



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Provinsi Bali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Bali.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp7.165.925.151.252,00 (tujuh triliun seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp 6.354.200.071.179,00
b. belanja daerah	<u>Rp 6.917.008.137.900,00</u>
defisit	Rp (562.808.066.721,00)
c. pembiayaan daerah	
1. penerimaan	Rp 811.725.080.073,00
2. pengeluaran	<u>Rp 248.917.013.352,00</u>
pembiayaan netto	Rp 562.808.066.721,00
sisa lebih pembiayaan anggaran	
tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp6.354.200.071.179,00 (enam triliun tiga ratus lima puluh empat miliar dua ratus juta tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.074.449.341.179,00 (empat triliun tujuh puluh empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.239.223.722.629,00 (tiga triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp59.213.399.000,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp143.435.645.800,00 (seratus empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp632.576.573.750,00 (enam ratus tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.274.042.730.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat.

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp5.708.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan juta rupiah), yaitu pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp6.917.008.137.900,00 (enam triliun sembilan ratus tujuh belas miliar delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.465.641.178.703,00 (empat triliun empat ratus enam puluh lima miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.212.204.560.369,00 (dua triliun dua ratus dua belas miliar dua ratus empat juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.260.916.551.398,00 (satu triliun dua ratus enam puluh miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- 4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp2.525.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp989.745.066.936,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp753.187.821.368,00 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.460.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp150.769.998.092,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp448.868.398.959,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp96.302.788.317,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp52.901.636.000,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp62.772.177.068,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah), yaitu belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp1.635.406.960.761,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh lima miliar empat ratus enam juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.279.176.638.488,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp356.230.322.273,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp562.808.066.721,00 (lima ratus enam puluh dua miliar delapan ratus delapan juta enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp811.725.080.073,00 (delapan ratus sebelas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. pencairan dana cadangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp640.554.747.273,00 (enam ratus empat puluh miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp171.170.332.800,00 (seratus tujuh puluh satu miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp248.917.013.352,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yaitu pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp562.808.066.721,00 (lima ratus enam puluh dua miliar delapan ratus delapan juta enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp562.808.066.721,00 (lima ratus enam puluh dua miliar delapan ratus delapan juta enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

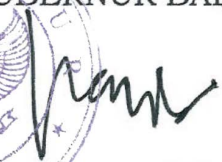
Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Bali
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,


DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (14-283/2023)

LAMPIRAN I

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN



PROVINSI BALI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.074.449.341.179,00
4.1.01	Pajak Daerah	3.239.223.722.629,00
4.1.02	Retribusi Daerah	59.213.399.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	143.435.645.800,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	632.576.573.750,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.274.042.730.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.274.042.730.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.708.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.708.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	6.354.200.071.179,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	4.465.641.178.703,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.212.204.560.369,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.260.916.551.398,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.525.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	989.745.066.936,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	250.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	753.187.821.368,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.460.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.769.998.092,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	448.868.398.959,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	96.302.788.317,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	52.901.636.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	885.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	62.772.177.068,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	62.772.177.068,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.635.406.960.761,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.279.176.638.488,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	356.230.322.273,00
	Jumlah Belanja	6.917.008.137.900,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-562.808.066.721,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	811.725.080.073,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	640.554.747.273,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	171.170.332.800,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	248.917.013.352,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	248.917.013.352,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	248.917.013.352,00
	Pembiayaan Netto	562.808.066.721,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Pj. GUBERNUR BALI,


S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN II

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI



PROVINSI BALI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	2.387.339.935.224,00	605.269.541.267,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.406.400.000,00	1.406.018.583.360,00	428.727.883.186,00	0,00	0,00	1.834.746.466.546,00
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.406.400.000,00	1.402.956.695.500,00	428.727.883.186,00	0,00	0,00	1.831.684.578.686,00
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	0,00	2.223.412.600,00	0,00	0,00	0,00	2.223.412.600,00
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	0,00	838.475.260,00	0,00	0,00	0,00	838.475.260,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	272.914.251.750, 00	607.676.034.860, 00	54.236.276.544,00	0,00	0,00	661.912.311.404,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	272.914.251.750, 00	280.853.433.176, 00	18.837.000,00	0,00	0,00	280.872.270.176, 00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	0,00	3.748.577.920,00	231.475.800,00	0,00	0,00	3.980.053.720,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa	0,00	5.803.377.106,00	1.178.535.444,00	0,00	0,00	6.981.912.550,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa	0,00	2.545.651.820,00	0,00	0,00	0,00	2.545.651.820,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	0,00	2.625.062.160,00	20.974.900,00	0,00	0,00	2.646.037.060,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Bali Mandara	0,00	194.352.159.596, 00	36.732.070.000,00	0,00	0,00	231.084.229.596,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	Rumah Sakit Jiwa	0,00	36.821.236.942,00	2.421.053.500,00	0,00	0,00	39.242.290.442,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	0,00	71.874.000.000,00	12.551.000.000,00	0,00	0,00	84.425.000.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	0,00	7.857.188.740,00	116.000.000,00	0,00	0,00	7.973.188.740,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	0,00	553.221.700,00	88.241.100,00	0,00	0,00	641.462.800,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	0,00	642.125.700,00	878.088.800,00	0,00	0,00	1.520.214.500,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31.640.200.000,00	258.136.443.414,00	111.708.665.837,00	0,00	0,00	369.845.109.251,00
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	0,00	1.740.393.980,00	33.170.300,00	0,00	0,00	1.773.564.280,00
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0002	UPTD Pengelolaan Air Minum	0,00	27.429.877.464,00	1.626.100.000,00	0,00	0,00	29.055.977.464,00
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0003	UPTD Pengelolaan Air Limbah	0,00	10.765.383.160,00	300.000.000,00	0,00	0,00	11.065.383.160,00
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	31.640.200.000,00	218.200.788.810,00	109.749.395.537,00	0,00	0,00	327.950.184.347,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	8.925.823.704,00	0,00	0,00	0,00	8.925.823.704,00
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	8.925.823.704,00	0,00	0,00	0,00	8.925.823.704,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	77.792.697.266,00	3.990.446.100,00	0,00	0,00	81.783.143.366,00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	49.053.667.583,00	398.016.500,00	0,00	0,00	49.451.684.083,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	24.104.013.369,00	2.168.774.000,00	0,00	0,00	26.272.787.369,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	0,00	4.635.016.314,00	1.423.655.600,00	0,00	0,00	6.058.671.914,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	9.600.000,00	28.790.352.620,00	6.606.269.600,00	0,00	0,00	35.396.622.220,00
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.600.000,00	24.953.345.700,00	3.536.819.600,00	0,00	0,00	28.490.165.300,00
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	UPTD Pelayanan Sosial	0,00	3.837.006.920,00	3.069.450.000,00	0,00	0,00	6.906.456.920,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	855.896.297.274,00	118.575.147.320,00	0,00	0,00	974.471.444.594,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.483.600.000,00	33.603.807.372,00	673.428.500,00	0,00	0,00	34.277.235.872,00
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	0,00	1.016.051.765,00	16.057.700,00	0,00	0,00	1.032.109.465,00
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	0,00	761.657.776,00	568.320.000,00	0,00	0,00	1.329.977.776,00
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	4.483.600.000,00	31.826.097.831,00	89.050.800,00	0,00	0,00	31.915.148.631,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	1.922.638.860,00	19.052.000,00	0,00	0,00	1.941.690.860,00
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0,00	927.231.300,00	0,00	0,00	0,00	927.231.300,00
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	995.407.560,00	19.052.000,00	0,00	0,00	1.014.459.560,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	8.474.729.550,00	0,00	0,00	0,00	8.474.729.550,00
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	7.219.125.880,00	0,00	0,00	0,00	7.219.125.880,00
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	0,00	1.255.603.670,00	0,00	0,00	0,00	1.255.603.670,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	10.795.544.000,00	0,00	0,00	0,00	10.795.544.000,00
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	10.795.544.000,00	0,00	0,00	0,00	10.795.544.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0,00	6.067.331.501,00	243.782.950,00	0,00	0,00	6.311.114.451,00
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	1.108.121.100,00	0,00	0,00	0,00	1.108.121.100,00
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	306.301.673,00	79.295.850,00	0,00	0,00	385.597.523,00
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	UPTD Pengelolaan Sampah	0,00	4.652.908.728,00	164.487.100,00	0,00	0,00	4.817.395.828,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	0,00	911.061.940,00	0,00	0,00	0,00	911.061.940,00
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	911.061.940,00	0,00	0,00	0,00	911.061.940,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	20.325.277.820,00	814.874.400,00	0,00	0,00	21.140.152.220,00
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	20.325.277.820,00	814.874.400,00	0,00	0,00	21.140.152.220,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	332.121.540,00	0,00	0,00	0,00	332.121.540,00
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	332.121.540,00	0,00	0,00	0,00	332.121.540,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	213.600.000,00	35.814.953.245,00	1.775.721.300,00	0,00	0,00	37.590.674.545,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	213.600.000,00	23.122.683.930,00	1.362.096.700,00	0,00	0,00	24.484.780.630,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	0,00	2.305.329.132,00	200.088.300,00	0,00	0,00	2.505.417.432,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	0,00	7.870.104.552,00	59.856.900,00	0,00	0,00	7.929.961.452,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD Perengkapan Jalan	0,00	1.860.365.831,00	66.969.700,00	0,00	0,00	1.927.335.531,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	0,00	656.469.800,00	86.709.700,00	0,00	0,00	743.179.500,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	53.324.467.484,00	114.713.903.270,00	0,00	0,00	168.038.370.754,00
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	43.837.855.120,00	114.713.903.270,00	0,00	0,00	158.551.758.390,00
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0001	UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital	0,00	6.668.918.940,00	0,00	0,00	0,00	6.668.918.940,00
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0002	UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali	0,00	2.817.693.424,00	0,00	0,00	0,00	2.817.693.424,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	25.615.211.130,00	133.808.900,00	0,00	0,00	25.749.020.030,00
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	17.183.020.870,00	133.808.900,00	0,00	0,00	17.316.829.770,00
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	0,00	8.432.190.260,00	0,00	0,00	0,00	8.432.190.260,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.600.000,00	17.324.854.760,00	1.076.000,00	0,00	0,00	17.325.930.760,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.600.000,00	17.324.854.760,00	1.076.000,00	0,00	0,00	17.325.930.760,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	61.736.664.400,00	0,00	0,00	0,00	61.736.664.400,00
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	61.736.664.400,00	0,00	0,00	0,00	61.736.664.400,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	441.297.200,00	0,00	0,00	0,00	441.297.200,00
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	441.297.200,00	0,00	0,00	0,00	441.297.200,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	469.557.380,00	44.500.000,00	0,00	0,00	514.057.380,00
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	469.557.380,00	44.500.000,00	0,00	0,00	514.057.380,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.418.415.000,00	577.565.398.692,00	55.000.000,00	0,00	0,00	577.620.398.692,00
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	1.418.415.000,00	83.358.616.868,00	5.000.000,00	0,00	0,00	83.363.616.868,00
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	UPTD Taman Budaya	0,00	5.568.542.620,00	0,00	0,00	0,00	5.568.542.620,00
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	UPTD Museum Bali	0,00	4.325.129.700,00	0,00	0,00	0,00	4.325.129.700,00
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	0,00	5.507.853.308,00	50.000.000,00	0,00	0,00	5.557.853.308,00
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	0,00	478.805.256.196,00	0,00	0,00	0,00	478.805.256.196,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	527.473.360,00	100.000.000,00	0,00	0,00	627.473.360,00
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0005	Biro Organisasi	0,00	527.473.360,00	100.000.000,00	0,00	0,00	627.473.360,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	643.907.040,00	0,00	0,00	0,00	643.907.040,00
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	Sekretariat Daerah	0,00	643.907.040,00	0,00	0,00	0,00	643.907.040,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	177.216.700.658,00	7.675.133.960,00	0,00	0,00	184.891.834.618,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	50.463.600.000,00	30.009.453.932,00	1.733.490.800,00	0,00	0,00	31.742.944.732,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.463.600.000,00	24.642.088.172,00	792.008.600,00	0,00	0,00	25.434.096.772,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	0,00	2.730.105.469,00	75.684.800,00	0,00	0,00	2.805.790.269,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	0,00	1.083.089.191,00	49.316.100,00	0,00	0,00	1.132.405.291,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	0,00	1.210.736.160,00	722.615.400,00	0,00	0,00	1.933.351.560,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pelabuhan Perikanan	0,00	323.434.940,00	93.865.900,00	0,00	0,00	417.300.840,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	250.000.000.000,00	14.767.698.297,00	347.957.700,00	0,00	0,00	15.115.655.997,00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	250.000.000.000,00	14.767.698.297,00	347.957.700,00	0,00	0,00	15.115.655.997,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	816.484.000,00	68.754.444.219,00	2.565.670.300,00	0,00	0,00	71.320.114.519,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	816.484.000,00	58.296.198.080,00	28.437.300,00	0,00	0,00	58.324.635.380,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0009	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	0,00	630.274.170,00	0,00	0,00	0,00	630.274.170,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	2.894.180.800,00	0,00	0,00	0,00	2.894.180.800,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0,00	3.146.983.901,00	0,00	0,00	0,00	3.146.983.901,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0014	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,00	1.077.101.940,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1.087.101.940,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0015	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	2.709.705.328,00	2.527.233.000,00	0,00	0,00	5.236.938.328,00
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1.210.800.000,00	41.591.263.690,00	2.973.119.060,00	0,00	0,00	44.564.382.750,00
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.210.800.000,00	38.600.429.260,00	1.383.383.300,00	0,00	0,00	39.983.812.560,00
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	0,00	960.672.700,00	380.000.000,00	0,00	0,00	1.340.672.700,00
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	0,00	725.508.960,00	605.418.500,00	0,00	0,00	1.330.927.460,00
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	0,00	467.630.260,00	176.827.910,00	0,00	0,00	644.458.170,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	0,00	436.740.470,00	427.489.350,00	0,00	0,00	864.229.820,00
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	0,00	400.282.040,00	0,00	0,00	0,00	400.282.040,00
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	190.499.500,00	0,00	0,00	0,00	190.499.500,00
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	190.499.500,00	0,00	0,00	0,00	190.499.500,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0,00	19.279.469.080,00	44.223.000,00	0,00	0,00	19.323.692.080,00
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	18.728.522.960,00	44.223.000,00	0,00	0,00	18.772.745.960,00
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	0,00	550.946.120,00	0,00	0,00	0,00	550.946.120,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	26.000.000,00	2.598.987.140,00	10.673.100,00	0,00	0,00	2.609.660.240,00
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.000.000,00	1.587.549.360,00	0,00	0,00	0,00	1.587.549.360,00
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	UPTD Rumah Kreatif	0,00	1.011.437.780,00	10.673.100,00	0,00	0,00	1.022.110.880,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	24.884.800,00	0,00	0,00	0,00	24.884.800,00
3	32	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	24.884.800,00	0,00	0,00	0,00	24.884.800,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	143.638.145.800,00	377.068.474.751,00	9.101.883.036,00	0,00	0,00	386.170.357.787,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	143.638.145.800,00	168.411.612.120,00	3.236.084.836,00	0,00	0,00	171.647.696.956,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	Biro Umum dan Protokol	0,00	59.851.524.148,00	753.253.436,00	0,00	0,00	60.604.777.584,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	Biro Hukum	0,00	5.766.956.020,00	836.307.200,00	0,00	0,00	6.603.263.220,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	Sekretariat Daerah	143.638.145.800,00	59.301.250.742,00	0,00	0,00	0,00	59.301.250.742,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0001	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	39.764.586.260,00	388.707.100,00	0,00	0,00	40.153.293.360,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	Biro Organisasi	0,00	2.166.935.950,00	857.817.100,00	0,00	0,00	3.024.753.050,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	0,00	1.560.359.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	1.960.359.000,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	208.656.862.631,00	5.865.798.200,00	0,00	0,00	214.522.660.831,00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0,00	208.656.862.631,00	5.865.798.200,00	0,00	0,00	214.522.660.831,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	432.582.263.176,00	9.583.242.197,00	62.772.177.068,00	1.635.406.960.761,00	2.140.344.643.202,00
5	01		PERENCANAAN	0,00	21.871.777.384,00	2.859.507.498,00	0,00	0,00	24.731.284.882,00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	21.871.777.384,00	2.859.507.498,00	0,00	0,00	24.731.284.882,00
5	02		KEUANGAN	5.587.288.102.629,00	202.359.296.320,00	5.125.579.499,00	62.772.177.068,00	1.635.406.960.761,00	1.905.664.013.648,00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.297.376.330.000,00	30.326.076.533,00	1.004.069.900,00	62.772.177.068,00	1.635.406.960.761,00	1.729.509.284.262,00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,00	2.933.468.480,00	554.442.000,00	0,00	0,00	3.487.910.480,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	3.289.911.772.629,00	138.055.297.457,00	3.567.067.599,00	0,00	0,00	141.622.365.056,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng	0,00	5.387.969.583,00	0,00	0,00	0,00	5.387.969.583,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana	0,00	2.330.383.092,00	0,00	0,00	0,00	2.330.383.092,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan	0,00	2.436.005.715,00	0,00	0,00	0,00	2.436.005.715,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung	0,00	5.100.606.414,00	0,00	0,00	0,00	5.100.606.414,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar	0,00	5.456.296.906,00	0,00	0,00	0,00	5.456.296.906,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar	0,00	3.399.046.117,00	0,00	0,00	0,00	3.399.046.117,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli	0,00	2.331.983.100,00	0,00	0,00	0,00	2.331.983.100,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung	0,00	2.469.330.011,00	0,00	0,00	0,00	2.469.330.011,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem	0,00	2.132.832.912,00	0,00	0,00	0,00	2.132.832.912,00
5	03		KEPEGAWAIAN	8.607.272.000,00	183.559.991.712,00	760.737.000,00	0,00	0,00	184.320.728.712,00
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.607.272.000,00	176.092.382.932,00	85.200.000,00	0,00	0,00	176.177.582.932,00
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	0,00	1.107.776.780,00	75.537.000,00	0,00	0,00	1.183.313.780,00
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0002	UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,00	6.359.832.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	6.959.832.000,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	1.089.606.560,00	0,00	0,00	0,00	1.089.606.560,00
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.089.606.560,00	0,00	0,00	0,00	1.089.606.560,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	15.300.450.456,00	520.005.200,00	0,00	0,00	15.820.455.656,00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	15.148.450.456,00	520.005.200,00	0,00	0,00	15.668.455.656,00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	152.000.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000.000,00
5	07		PENGLOLAAN PENGHUBUNG	60.000.000,00	8.401.140.744,00	317.413.000,00	0,00	0,00	8.718.553.744,00
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung	60.000.000,00	8.401.140.744,00	317.413.000,00	0,00	0,00	8.718.553.744,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	34.171.632.060,00	1.851.636.188,00	0,00	0,00	36.023.268.248,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	34.171.632.060,00	1.851.636.188,00	0,00	0,00	36.023.268.248,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0,00	34.171.632.060,00	1.851.636.188,00	0,00	0,00	36.023.268.248,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	198.510.828.700,00	328.050.200,00	0,00	0,00	198.838.878.900,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	198.510.828.700,00	328.050.200,00	0,00	0,00	198.838.878.900,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	198.510.828.700,00	328.050.200,00	0,00	0,00	198.838.878.900,00
X			NON URUSAN	0,00	2.855.046.860,00	803.187.200,00	0,00	0,00	3.658.234.060,00
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	0,00	2.855.046.860,00	803.187.200,00	0,00	0,00	3.658.234.060,00
X	XX	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	12.599.100,00	0,00	0,00	0,00	12.599.100,00
X	XX	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	XX	3.25.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	0,00	38.170.000,00	0,00	0,00	0,00	38.170.000,00
X	XX	4.01.2.23.2.24.01.0007	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	0,00	2.641.845.160,00	803.187.200,00	0,00	0,00	3.445.032.360,00
X	XX	5.02.0.00.0.00.02.0001	UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,00	162.432.600,00	0,00	0,00	0,00	162.432.600,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0001	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0002	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0003	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0004	UPTD Benih/Bibit Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0005	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0006	UPTD Pertanian Terpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0007	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0008	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0010	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0006	Biro Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0001	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	04	5.04.0.00.0.00.01.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	6.354.200.071.179,00	4.465.641.178.703,00	753.187.821.368,00	62.772.177.068,00	1.635.406.960.761,00	6.917.008.137.900,00

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN III

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI SKPD, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN



PROVINSI BALI

**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	6.354.200.071.179,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.074.449.341.179,00	
4.1.01	Pajak Daerah	3.239.223.722.629,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	59.213.399.000,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	143.435.645.800,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	632.576.573.750,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.274.042.730.000,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.274.042.730.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.708.000.000,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.708.000.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun		
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.628.635.719,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.202.629.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.568.662.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.843.633.553,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	384.026.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0026 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	346.566.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah		
Indikator Keluaran	: null		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.165.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	392.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0043 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.114.836.090,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.029.484.310,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.267.939.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.660.703.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: null		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.679.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.460.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	779.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.790.430.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	23.134.610.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.874.258.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.916.172.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.919.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang Laboratorium		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.693.944.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru		

Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.631.562.525,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.342.700,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.067.623.277,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.323.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.330.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	595.525.552,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.965.009.411,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang Laboratorium		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	205.252.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.370.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.992.208.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	580.487.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0038 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.550.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: null		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	929.832.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.848.917.220,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: null		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.278.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.049.480.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	67.515.740.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.229.688.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.819.792.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.835.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.640.518.078,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.690.001.694,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.998.600,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0075 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: null		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	276.984.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Indeks Iklim Keamanan SDLB : Indeks Iklim Keamanan SMALB : Indeks Iklim Keamanan SMPLB : Indeks Iklim Kebinekaan SDLB : Indeks Iklim Kebinekaan SMALB : Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB : Indeks Inklusivitas SDLB : Indeks Inklusivitas SMALB : Indeks Inklusivitas SMPLB : Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional : Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional : Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional : Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional : Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.099.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.912.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.375.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.012.889.909,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0010 Pembangunan Kantin Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	320.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	738.005.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0036 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.396.219.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.599.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.980.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: null		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.619.417.920,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.294.900,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.353.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.101.680.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	930.400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.061.008.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.040.672.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.547.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.559.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.918.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.303.048.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	336.645.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.653.600,00	
Program	: 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Minimal Baik		
Kegiatan	: 1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal		
Sub Kegiatan	: 1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.981.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.999.200,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Disdikpora)		
Kegiatan	: 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.632.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: null		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.126.000,00	

Kegiatan	: 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: null		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.050.389.690.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: null		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.942.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.048.600,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.025.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.675.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.809.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.526.250,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.094.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia dan siap digunakan		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.260.790.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: persentase layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: null		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.981.150,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.624.527.920,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.685.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.214.550,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	990.726.258,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.189.500,00	
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0001 UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK		
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.430.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.075.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.059.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.720.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0051 Pengembangan konten digital untuk pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.139.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.059.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.382.000,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen		
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.216.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: null		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.860.300,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	753.642.800,00	

Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.120.000,00	
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0002 UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan		
Program	: 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
Indikator Hasil	: Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal		
Kegiatan	: 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah		
Sub Kegiatan	: 1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.519.900,00	
Kegiatan	: 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan		
Sub Kegiatan	: 1.01.03.1.02.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.049.300,00	
Program	: 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		
Indikator Hasil	: Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan		
Kegiatan	: 1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali		
Sub Kegiatan	: 1.01.06.1.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.049.700,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen		
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.618.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.547.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.330.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	527.549.960,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.810.000,00	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Desa UCI Persentase Faskes yang Terakreditasi Cakupan Kepesertaan JKN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	517.042.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.405.881.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.669.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.459.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.031.339.700,00	
5.1.05	Belanja Hibah	972.335.136,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.494.321.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.790.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.045.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0025 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Puskesmas yang menerapkan e-Kesehatan		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.299.400,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya sesuai Standar Pelayanan, SDM, Alat Kesehatan, Sarana, Prasarana dan Jumlah Faskes yang melakukan penginputan INM dan IKP		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.901.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.409.800,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebutuhan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.460.000,00	
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.043.400,00	
Program	: 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
Indikator Hasil	: Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial		
Kegiatan	: 1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK		
Indikator Keluaran	: Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.518.000,00	
Kegiatan	: 1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		

Indikator Keluaran	: Persentase pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.212.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan desa/kelurahan siaga aktif mandiri		
Kegiatan	: 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.216.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja		
Kegiatan	: 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen LKjIP yang disusun dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.188.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.954.700,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	225.179.064.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.482.800,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.145.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.837.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.163.130.100,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.174.642.840,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.320.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat		
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen kinerja		
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya sarana penunjang administrasi umum		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.024.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.497.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.846.500,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SPJ/ SPM Jasa Layanan Umum kantor		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.243.510.620,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.175.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.500.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesmas		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.805.021.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.978.200,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: jumlah bahan logistik, peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.340.800,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: tersedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta pelayannya umum kantor		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	589.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.956.651.820,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: jumlah kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang di pelihara		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Persentase Kepuasan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.494.260.700,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.562.855.606,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.178.535.444,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.199.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.299.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.698.400,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.581.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.974.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.142.900,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.061.456.560,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.468.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.815.900,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0004 RSUD Bali Mandara		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.732.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.000.000.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa kebersihan kantor, jasa tenaga kesehatan, non kesehatan, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.318.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.033.359.596,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pasien yang dilayani sesuai Standar Pelayanan RS		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	64.000.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.475.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.500.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0005 Rumah Sakit Jiwa		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		

Indikator Keluaran	: Tersedianya sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai rencana		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.425.000.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.114.110.402,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.203.180.040,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah pasien yang dilayani sesuai dengan Standar Pelayanan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.032.800.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.471.146.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	504.021.900,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	492.031.600,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0006 Rumah Sakit Mata Bali Mandara		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan		

Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.425.000.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di BLUD (Dinas Kesehatan) Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Kesehatan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di BLUD		
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Persentase Pasien yang dilayani tuntas		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	29.052.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.821.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.126.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional, dan Pengelolaan Perbekalan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Laporan pengadaan sediaan farmasi, bahan laboratorium, dan alkes yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.311.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.874.157.200,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah produk obat dan bahan obat tradisional yang diproduksi		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.421.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.241.100,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.627.100,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	444.088.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.895.300,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	434.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.110.670.940,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.291.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	872.360.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.000.000,00	
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0001 UPTD Balai Peralatan dan Pengujian		
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
Indikator Hasil	: Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi		
Kegiatan	: 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan		

Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	885.317.240,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Peralatan		
Kegiatan	: 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.971.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.526.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.236.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.850.300,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.799.680,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.010.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.472.560,00	
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0002 UPTD Pengelolaan Air Minum		
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Indikator Hasil	: Persentase cakupan layanan Air Minum Layak		
Kegiatan	: 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh Pelanggan		
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.429.877.464,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.100.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.290.000.000,00	
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0003 UPTD Pengelolaan Air Limbah		
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
Indikator Hasil	: Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah		
Kegiatan	: 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang dikelola dengan baik UPTD.PAL		
Sub Kegiatan	: 1.03.05.1.01.0018 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.660.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.755.723.160,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik		
Kegiatan	: 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang tertangani		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0009 Pembangunan Tanggul Sungai		
Indikator Keluaran	: Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	547.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0096 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		
Indikator Keluaran	: Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.901.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.177.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.994.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.060.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.829.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Kegiatan	: 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.879.040,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.964.125.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.222.893.880,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	510.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	757.965.020,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	491.655.000,00	
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Indikator Hasil	: Persentase cakupan layanan Air Minum Layak		
Kegiatan	: 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kapasitas layanan SPAM		
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.465.483.580,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.009.100,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.000.000.000,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		

Indikator Hasil	: Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak		
Kegiatan	: 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani		
Sub Kegiatan	: 1.03.05.1.01.0013 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.074.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.831.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	
Program	: 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		
Indikator Hasil	: Persentase cakupan pelayanan air minum layak		
Kegiatan	: 1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kapasitas layanan SPAM		
Sub Kegiatan	: 1.03.07.1.01.0031 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	248.681.272,00	
Program	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
Indikator Hasil	: Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik		
Kegiatan	: 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik		
Sub Kegiatan	: 1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.643.100,00	
5.1.05	Belanja Hibah	148.051.139.040,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.700.550.320,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.651.700,00	
5.1.05	Belanja Hibah	600.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.1.01.0010 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.053.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	650.000.000,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
Indikator Hasil	: Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap		
Kegiatan	: 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap		
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.539.980,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.450.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.890.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.500.005.236,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.718.060,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jembatan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.973.794.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	363.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.165.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.756.597.547,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju Standar		

Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.877.780.534,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.357.559.982,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.840.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.304.498.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.326.300,00	
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
Indikator Hasil	: Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat		
Kegiatan	: 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	562.184.660,00	
Kegiatan	: 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.207.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.860.300,00	
Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
Indikator Hasil	: Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang		
Kegiatan	: 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.01.0005 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah publikasi informasi penataan ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.655.200,00	
Kegiatan	: 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.02.0006 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.673.480,00	
Kegiatan	: 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Bali		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.03.0004 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.535.000,00	
Kegiatan	: 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.04.0006 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat		
Indikator Keluaran	: Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.381.980,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.04.0014 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK		
Indikator Keluaran	: Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.449.960,00	
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.572.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.395.580,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi keuangan		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	26.871.550.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.171.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.491.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.009.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	464.820.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.535.600,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	562.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.342.692,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.566.414.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.846.420,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.411.563.084,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi		
Kegiatan	: 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.1.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.217.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.1.01.0008 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.822.600,00	
Kegiatan	: 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah rumah kewenangan provinsi yang dibangun		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.1.03.0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.622.640,00	
Program	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
Indikator Hasil	: Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh		
Kegiatan	: 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
Indikator Keluaran	: Tertanganinya luas kawasan kumuh kewenangan provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.823.028.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
Indikator Keluaran	: Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	940.092.300,00	
Program	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
Indikator Hasil	: Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU		
Kegiatan	: 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		
Indikator Keluaran	: Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman		
Sub Kegiatan	: 1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.198.824.964,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.215.000,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja		
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti		
Kegiatan	: 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0006 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.833.240,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.614.874.259,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.809.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.899.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.115.740,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.245.911.560,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.712.420,00	
Kegiatan	: 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		
Indikator Keluaran	: Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.761.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.878.840,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.964.280,00	
Kegiatan	: 1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.060.200,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	20.077.661.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.272.600,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.980.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.075.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	308.758.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.847.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.993.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.258.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	935.232.100,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.888.394.244,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana		
Kegiatan	: 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.01.0002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.943.300,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.362.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0015 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.287.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.918.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0017 Penyusunan Rencana Kontijensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.148.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0019 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.597.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0021 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.557.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	612.786.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.03.0002 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	616.175.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.03.0004 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	706.779.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	377.641.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0016 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.059.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang dilegalkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.770.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.312.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0020 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.774.000,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.090.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.728.200,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	12.714.782.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur dengan kelengkapan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.400.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.996.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.677.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.220.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.736.100,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah yang terpelihara		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	897.688.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.422.320.540,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah yang terpelihara		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.748.717.372,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.521.316.772,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	658.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.871.785,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.910.000,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0001 UPTD Pengendalian Bencana Daerah		
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana		
Kegiatan	: 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0014 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.034.199.140,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.665.900,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0017 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	787.220.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	870.000.000,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Prosentase administrasi umum kantor yang tersedia sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.740.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.998.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.245.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.750.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah yang terpelihara		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	553.655.600,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.308.053.820,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah yang terpelihara		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.476.654,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.666.000,00	
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS		
Kegiatan	: 1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase lembaga yang meningkat pemahamannya mengenai kebijakan pengelolaan sumber dana sosial		
Sub Kegiatan	: 1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.486.800,00	
Kegiatan	: 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat dan lembaga yang memberikan pendampingan dan bantuan sosial		
Sub Kegiatan	: 1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.523.800,00	
Program	: 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		
Indikator Hasil	: Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani		

Kegiatan	: 1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.06.03.1.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.177.100,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya		
Kegiatan	: 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.624.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.939.600,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	250.000.000,00	
Kegiatan	: 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.452.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.941.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.848.000,00	
Kegiatan	: 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.890.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.500.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.970.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.890.100,00	
Kegiatan	: 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah gelandangan dan pengemis dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.200.000,00	
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan		
Kegiatan	: 1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengangkatan anak yang diproses sesuai prosedur		
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.536.600,00	
Kegiatan	: 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin		
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.391.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.641.100,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Persentase korban bencana yang tertangani		
Kegiatan	: 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah korban bencana yang terfasilitasi		
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.936.700,00	
Program	: 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
Indikator Hasil	: Persentase penanganan Taman Makam Pahlawan sesuai standar		
Kegiatan	: 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara		
Sub Kegiatan	: 1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.258.400,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.832.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.602.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.895.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi keuangan		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	17.751.273.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.952.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan operasional perkantoran		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.528.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.075.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.049.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.648.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.921.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.772.020,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.133.511.380,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.479.744.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.221.011.400,00	
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0001 UPTD Pelayanan Sosial		
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya		
Kegiatan	: 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.891.500,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.406.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.470.000,00	
Kegiatan	: 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		

Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.580.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan operasional perkantoran		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.837.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.954.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.428.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.554.520,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.564.880,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.868.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.069.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.272.400.820,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
Unit Organisasi	: 2.07.3.29.0.00.01.0001 UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata		
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		
Kegiatan	: 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.350.000,00	
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)		
Kegiatan	: 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.276.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.110.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.090.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.026.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.057.700,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.753.369,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.795.128,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.015.288,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.434.980,00	
Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
Unit Organisasi	: 2.07.3.29.0.00.01.0002 UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja		
Program	: 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3		
Kegiatan	: 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku		
Sub Kegiatan	: 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.180.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	568.320.000,00	
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja)		
Kegiatan	: 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.898.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.803.500,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.839.896,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.182.140,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.793.040,00	
Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
Unit Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		

Indikator Hasil	: Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi		
Kegiatan	: 2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.997.600,00	
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Persentase Penyerapan Tenaga Kerja		
Kegiatan	: 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitas bekerja/ berwirausaha		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.117.200,00	
Kegiatan	: 2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		
Indikator Keluaran	: Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.313.800,00	
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
Indikator Hasil	: Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan		
Kegiatan	: 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Perkara Perselisihan yang terselesaikan		
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.566.400,00	

Kegiatan	: 2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan		
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penetapan UMP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.775.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.03.0003 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah penetapan UMK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
Program	: 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos		
Kegiatan	: 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja		
Sub Kegiatan	: 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.300.000,00	
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)		
Kegiatan	: 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselesaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	28.299.312.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang sesuai kebutuhan		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.994.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.968.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.762.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.795.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.637.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.025.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.220.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.288.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	626.571.323,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.495.928,00	

Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.728.560,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.107.799.920,00	
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG		
Kegiatan	: 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pemerintah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi PUG dan PPRG		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.1.01.0008 Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.834.200,00	
Kegiatan	: 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga yang mendapatkan sosialisasi, advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengelola organisasi masyarakat/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.991.500,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: Rasio Perempuan korban kekerasan		
Kegiatan	: 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan		

Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.980.100,00	
Kegiatan	: 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen advokasi, pendampingan, dan penguatan jejaring antar lembaga		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.03.0004 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	
Program	: 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Keluarga		
Kegiatan	: 2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga yang mendapat advokasi dan pendampingan		
Sub Kegiatan	: 2.08.04.1.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.203.500,00	
Program	: 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
Indikator Hasil	: Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah		
Kegiatan	: 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Data Gender dan Anak yang valid dan dimanfaatkan		
Sub Kegiatan	: 2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.996.400,00	
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		

Indikator Hasil	: Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)		
Kegiatan	: 2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA		
Sub Kegiatan	: 2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.830.000,00	
Kegiatan	: 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, KIE, dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		
Sub Kegiatan	: 2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.619.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.146.000,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
Indikator Hasil	: Rasio anak korban kekerasan		
Kegiatan	: 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.630.000,00	
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		

Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0002 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak		
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: Rasio Perempuan korban kekerasan		
Kegiatan	: 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.500.000,00	
Kegiatan	: 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.150.000,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
Indikator Hasil	: Rasio anak korban kekerasan		
Kegiatan	: 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.499.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.020.000,00	
Program	: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan operasional perkantoran		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.052.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.176.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.244.880,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.962.940,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.643.840,00	
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Informasi Harga Pangan Yang Terpublikasi		
Kegiatan	: 2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang menerapkan SOP mutu pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
Indikator Keluaran	: Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	547.694.020,00	
Program	: 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Angka Kecukupan Energi (AKE)		
Kegiatan	: 2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen kerawanan pangan		
Sub Kegiatan	: 2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.888.060,00	
Kegiatan	: 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Cadangan Pangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.410.759.820,00	
Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi		
Kegiatan	: 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diuji		
Sub Kegiatan	: 2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		
Indikator Keluaran	: Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.783.980,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0009 UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan		
Sub Kegiatan	: 2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.769.620,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.761.860,00	
Program	: 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		

Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.180.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.967.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.884.800,00	
Kegiatan	: 2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.988.120,00	
Kegiatan	: 2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.117.290,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.364.280,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.340.000,00	
Bidang Urusan	: 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Program	: 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan		
Kegiatan	: 2.10.05.1.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Bali		
Sub Kegiatan	: 2.10.05.1.01.0003 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000.000,00	
Program	: 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
Indikator Hasil	: Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi		
Kegiatan	: 2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen redistribusi tanah yang terinventarisasi		
Sub Kegiatan	: 2.10.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.003.500,00	
Program	: 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		
Indikator Hasil	: Persentase data informasi pertanahan yang handal		
Kegiatan	: 2.10.10.1.01 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.10.10.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.540.500,00	
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Program	: 2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik		
Kegiatan	: 2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.224.800,00	
Kegiatan	: 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.02.1.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.546.380,00	
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Indeks kualitas air laut Persentase Penurunan Emisi GRK Indeks kualitas udara Indeks kualitas air		
Kegiatan	: 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkuagan Hidup		
Indikator Keluaran	: Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan		

Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.999.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.950.900,00	
Program	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
Indikator Hasil	: Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		
Kegiatan	: 2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi yang disusun		
Sub Kegiatan	: 2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.556.000,00	
Program	: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
Indikator Hasil	: Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan		
Kegiatan	: 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH		
Sub Kegiatan	: 2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.114.700,00	
Program	: 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		
Indikator Hasil	: Persentase pelaksanaan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan MHA terkait PPLH		
Kegiatan	: 2.11.07.1.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		

Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.07.1.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.267.800,00	
Program	: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga		
Kegiatan	: 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa Adat/Desa/Kelurahan yang dibina dan dimonitoring dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dan dalam tata laksana pengelolaan limbah B3		
Sub Kegiatan	: 2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.346.020,00	
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	
Program	: 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		
Kegiatan	: 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan penilaian masyarakat/lembaga/pendidikan dalam PPLH		
Sub Kegiatan	: 2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.710.800,00	
Program	: 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan		
Kegiatan	: 2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang teregistrasi		
Sub Kegiatan	: 2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.404.300,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0006 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan		
Kegiatan	: 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup		
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Kompetensi Laboratorium Menuju Akreditasi		
Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.962.307,00	
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)		
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Laboratorium LH		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.995.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.900,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.644.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.295.850,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.699.466,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0007 UPTD Pengelolaan Sampah		
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional		
Kegiatan	: 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		
Indikator Keluaran	: Persentase Penanganan Sampah di TPA Regional yang terlaksana		
Sub Kegiatan	: 2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.132.670.988,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Pengelolaan Sampah)		
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Pengelolaan Sampah		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.721.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.435.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.013.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.487.100,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.737.840,00	

Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.080.000,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Organisasi	: 2.13.2.12.2.14.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Unit Organisasi	: 2.13.2.12.2.14.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target		
Kegiatan	: 2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.1.01.0004 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.824.320,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
Indikator Hasil	: Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target		
Kegiatan	: 2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.1.01.0004 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.237.620,00	
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Program	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
Indikator Hasil	: Jumlah desa yang mengalami peningkatan PADesa		
Kegiatan	: 2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan		
Sub Kegiatan	: 2.13.03.1.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.543.320,00	
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase desa cepat berkembang		
Kegiatan	: 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa		
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	569.753.420,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0008 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.032.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0016 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.557.000,00	
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
Indikator Hasil	: Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif		
Kegiatan	: 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif		
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	721.081.660,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.871.360,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	642.119.220,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.187.783.060,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.251.400.000,00	
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.429.020,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi keuangan		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	10.194.773.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.726.820,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.763.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.480.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	599.788.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.767.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.816.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah yang terselesaikan		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.340.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.086.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.691.280,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah yang terselesaikan		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.323.389.260,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.660.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
Indikator Hasil	: Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan keluarga berencana		
Kegiatan	: 2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.1.01.0013 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.121.540,00	
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Rasio konektivitas layanan angkutan darat		
Kegiatan	: 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Keselamatan Pengguna Jaringan jalan		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.431.440,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.140.400,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi yang ditindaklanjuti		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.957.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.06.0004 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.651.400,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.10 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.10.0004 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.296.100,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.236.120,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
Indikator Hasil	: Persentase Aksesibilitas Pelayaran		
Kegiatan	: 2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen kajian		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.08.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.047.840,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	600.000.000,00	
Program	: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		
Indikator Hasil	: Persentase lintasan kereta api yang terbangun		
Kegiatan	: 2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		
Sub Kegiatan	: 2.15.05.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.437.140,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Kinerja		
Kegiatan	: 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.423.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.236.300,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen gaji , tunjangan dan administrasi penyediaan perlengkapan kantor		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	17.795.646.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.519.500,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelayanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.489.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.107.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	362.096.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.303.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.822.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.222.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelayanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	920.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelayanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.058.860,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelayanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	733.239.280,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.864.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	942.053.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	

Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pusat Pengendalian LLAJ		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional		
Kegiatan	: 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	566.282.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.436.172.340,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.000.000,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Kinerja		
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.850.812,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.546.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.088.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	719.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.136.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	666.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.034.940,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.780.740,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.480.000,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita		
Kegiatan	: 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.346.483.472,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Kinerja		
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	964.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.026.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.696.900,00	

Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.988.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.022.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah kursi yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.160.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.122.540,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.131.840,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.420.000,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD Perlengkapan Jalan		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik		
Kegiatan	: 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.115.295.070,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.208.721,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Kinerja		
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.839.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.660.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.969.700,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.042.440,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.320.000,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan		
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM		
Kegiatan	: 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.09.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.567.000,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Kinerja		
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.928.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.833.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.548.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.226.400,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.875.800,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah materai tersedia untuk administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase informasi yang disebarluaskan		
Kegiatan	: 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi		
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	956.857.440,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.359.038.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0006 Pelayanan Informasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.385.259.640,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.087.840,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.787.360.740,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.442.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.375.300,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Teknologi Informatika		
Kegiatan	: 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi		
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.306.175.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	922.086.720,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113.984.461.170,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.728.356.240,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	609.000.000,00	
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		

Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DISKOMINFOS)		
Kegiatan	: 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.018.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.139.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.518.500,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	12.985.533.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.713.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	665.000.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.488.840,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.007.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.660.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.522.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.329.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.386.501.960,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.570.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.393.874.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.480.000,00	
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0001 UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital		
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.668.918.940,00	
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0002 UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali		

Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.817.693.424,00	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Program	: 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		
Indikator Hasil	: Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP		
Kegiatan	: 2.17.02.1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan		
Sub Kegiatan	: 2.17.02.1.01.0002 Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.410.700,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	25.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.02.1.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan		
Sub Kegiatan	: 2.17.02.1.02.0003 Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Program	: 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
Indikator Hasil	: Persentase koperasi berkualitas		
Kegiatan	: 2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi		

Sub Kegiatan	: 2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.500,00	
Kegiatan	: 2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi		
Sub Kegiatan	: 2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.363.880,00	
Program	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
Indikator Hasil	: Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta		
Kegiatan	: 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.408.980,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.900,00	
Program	: 2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
Indikator Hasil	: Persentase pertumbuhan wirausaha		
Kegiatan	: 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		

Sub Kegiatan	: 2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	939.685.230,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.500,00	
Program	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
Indikator Hasil	: Persentase UMKM Naik Kelas		
Kegiatan	: 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		
Sub Kegiatan	: 2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.328.560,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.603.800,00	
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)		
Kegiatan	: 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.914.420,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.999.600,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	12.616.431.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.613.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.403.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.576.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.893.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.808.900,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	904.371.360,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	776.574.980,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.951.560,00	
Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		
Program	: 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
Indikator Hasil	: Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi		
Kegiatan	: 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		
Sub Kegiatan	: 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.009.040.280,00	
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)		
Kegiatan	: 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	665.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.725.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.190.060,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.007.140,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.571.080,00	
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Program	: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)		
Kegiatan	: 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Produk Hukum Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kajian Peta Potensi dan Peluang Investasi Berbasis Jenis Usaha		
Sub Kegiatan	: 2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.968.560,00	
Program	: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Investor Yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali		
Kegiatan	: 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi Promosi Penanaman Modal		
Sub Kegiatan	: 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.448.560,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		
Kegiatan	: 2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang Terbit sesuai Kewenangan Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.18.04.1.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.901.400,00	
Kegiatan	: 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang dilayani sesuai Kewenangan Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.186.420,00	
Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Nilai Investasi		
Kegiatan	: 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pemenuhan Komitmen Penanaman Modal		
Sub Kegiatan	: 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.725.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.590.560,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.834.000,00	
Program	: 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan		
Kegiatan	: 2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.084.280,00	
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	12.359.361.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Diklat		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.132.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.014.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.048.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.076.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.472.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.239.007.080,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.440.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.140.000,00	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		

Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan		
Kegiatan	: 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pemuda yang berprestasi		
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.521.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi		
Indikator Keluaran	: null		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.258.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: null		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.941.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.660.200,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi		
Kegiatan	: 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.813.286.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.480.115.800,00	
Kegiatan	: 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.03.0008 Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sektorol Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.881.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	52.650.000.000,00	
Program	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan		
Kegiatan	: 2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
Indikator Keluaran	: Persentase anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka		
Sub Kegiatan	: 2.19.04.1.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		

Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
Indikator Hasil	: Indeks Pembangunan Statistik		
Kegiatan	: 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi		
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.743.840,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral		
Indikator Keluaran	: Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.656.480,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.896.880,00	
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
Indikator Hasil	: Indeks Evalaksan		
Kegiatan	: 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan		
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.399.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.137.340,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.166.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.758.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.000.000,00	
Kegiatan	: 2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun		
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.095.840,00	
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan		
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra		
Kegiatan	: 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan serta Terbinanya Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.815.020,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.798.202.320,00	
Kegiatan	: 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Penghargaan pada Objek/ Lembaga yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.692.175.380,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.028.819.040,00	
Kegiatan	: 2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terbinanya Lembaga Adat Lintas Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.210.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	17.128.600.000,00	
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		
Indikator Hasil	: Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan		
Kegiatan	: 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terbinanya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional serta tata kelola Lembaga Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		

Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.115.790.920,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.121.840,00	
Program	: 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi		
Kegiatan	: 2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		
Indikator Keluaran	: Tersedianya dan terlaksananya Data dan Dokumen Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.497.400,00	
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase Cagar Budaya yang lestari dan terkelola		
Kegiatan	: 2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terinventarisasi dan ditetapkan Cagar Budaya Tingkat Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.357.100,00	
Kegiatan	: 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Dikelolanya Cagar Budaya Peringkat Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.581.820,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.347.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.837.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.433.400,00	
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.447.020,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.938.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi Keuangan		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	21.025.047.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	579.667.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.651.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.323.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.550.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.496.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	704.475.328,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	906.589.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.215.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.455.828.480,00	
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0001 UPTD Taman Budaya		
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra		
Kegiatan	: 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan serta Terbinanya Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.430.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.000.000,00	
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.320.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.998.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.144.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	896.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.088.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.035.773.440,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.225.828.480,00	
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0002 UPTD Museum Bali		
Program	: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Museum Bali		
Kegiatan	: 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum Bali sebagai tempat informasi Budaya Bali		
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	712.879.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.137.220.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.900.000,00	
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.292.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.768.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.714.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.402.500,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.528.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.720.684.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0003 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali		
Program	: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pengunjung Museum		
Kegiatan	: 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Jumlah kunjungan masyarakat pada UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali		
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.061.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.106.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.832.600,00	
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.483.140,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.004.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.672.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: "Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai"		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.774.859.668,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat		
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat		
Program	: 2.22.09 PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI		
Indikator Hasil	: Indeks Membangun Desa Adat		
Kegiatan	: 2.22.09.8.01 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina		
Sub Kegiatan	: 2.22.09.8.01.0001 Pembinaan Pemerintahan Desa Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.036.953.960,00	
5.1.05	Belanja Hibah	463.330.710.756,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.09.8.01.0002 Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Desa Adat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.226.420,00	
Kegiatan	: 2.22.09.8.02 Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses		
Sub Kegiatan	: 2.22.09.8.02.0001 Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.152.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.09.8.02.0002 Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.349.340,00	
Kegiatan	: 2.22.09.8.03 Penyelenggaraan Desa Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil koordinasi parahyangan, pawongan dan palemahan		

Sub Kegiatan	: 2.22.09.8.03.0003 Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.746.420,00	
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas PMA)		
Kegiatan	: 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.660.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.564.600,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di Proses		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	8.853.583.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang di proses		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.007.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.345.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.872.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.940.500,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	756.597.240,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.528.436.760,00	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0005 Biro Organisasi		
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
Indikator Hasil	: Peningkatan Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik		
Kegiatan	: 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.682.140,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.682.140,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.682.040,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0016 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.682.140,00	
Kegiatan	: 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.682.140,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.364.280,00	
Program	: 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		
Indikator Hasil	: Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun		
Kegiatan	: 2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun		
Sub Kegiatan	: 2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.330.940,00	
Kegiatan	: 2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan		
Sub Kegiatan	: 2.23.03.1.03.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.367.540,00	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		

Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip Nilai Evaluasi Kearsipan		
Kegiatan	: 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Penataan Arsip		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.01.0006 Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Arsip Dinamis		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.192.440,00	
Kegiatan	: 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.757.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.957.100,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		
Indikator Hasil	: Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil		
Kegiatan	: 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.902.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		
Indikator Keluaran	: Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang mengajukan verifikasi teknis kesesuaian ruang		
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan		
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	563.141.320,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null	0,00	
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap		
Kegiatan	: 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Jumlah produksi perikanan tangkap		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.115.200,00	
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.09.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya		
Kegiatan	: 3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang terbit		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.760.000,00	
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku		
Kegiatan	: 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.442.140,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.702.800,00	
Kegiatan	: 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan kepada unit usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.02.0003 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Persentase produksi olahan hasil perikanan Tingkat Konsumsi Ikan		
Kegiatan	: 3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.987.280,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)		
Kegiatan	: 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	20.110.224.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.542.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	636.724.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.767.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.477.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.120.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.284.600,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.536.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	789.220.480,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	665.579.652,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.730.000,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut		
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya		
Kegiatan	: 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		
Indikator Keluaran	: Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.423.299.450,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	784.670.619,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.889.000,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.274.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.293.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.795.800,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik		

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.897.140,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.101.260,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.070.000,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan		
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan		
Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan		

Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.799.371,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.994.000,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)		
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.633.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.316.100,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.600.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.668.640,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.260.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.633.480,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali		
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		
Indikator Hasil	: Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi persen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		
Kegiatan	: 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan		
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		
Indikator Keluaran	: Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.190.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	615.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)		
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.188.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.967.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.998.100,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.115.400,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.029.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	944.371.360,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pelabuhan Perikanan		
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap		
Kegiatan	: 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.899.200,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)		
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.801.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.865.900,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik		

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.552.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.682.140,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
Organisasi	: 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata		
Unit Organisasi	: 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata		
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.01.0005 Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.885.100,00	
Kegiatan	: 3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.802.900,00	
Kegiatan	: 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.592.580,00	
Kegiatan	: 3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Pariwisata yang memperoleh standar		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.04.0009 Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.346.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.04.0013 Kesiadaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata		
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.427.180,00	
Program	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan		
Kegiatan	: 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata		
Sub Kegiatan	: 3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.264.020,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.1.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.866.120,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.1.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.567.720,00	
Program	: 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.164.780,00	
Kegiatan	: 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.131.540,00	
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
Indikator Hasil	: Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM Ekonomi Kreatif yang bersertifikat pelatihan		
Kegiatan	: 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan		
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0004 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.982.140,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.675.620,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.678.160,00	
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.001.420,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.01	Belanja Pegawai	10.708.603.257,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.484.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.529.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	347.957.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.942.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.295.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.462.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.241.603.560,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.492.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	

Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitas Penyaluran Sarana Pertanian		
Kegiatan	: 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.064.060,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	110.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
Indikator Keluaran	: Peningkatan Target Areal Sasaran Komoditas Pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.158.926.020,00	
5.1.05	Belanja Hibah	44.400.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Angka Kelahiran Ternak Unggulan Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	432.980.400,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.535.000.000,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian		
Kegiatan	: 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung Pertanian		

Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.072.324.220,00	
5.1.05	Belanja Hibah	25.755.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.158.900,00	
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
Indikator Hasil	: Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis		
Kegiatan	: 3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah HPR yang mendapatkan pelayanan vaksinasi		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.459.968.560,00	
Kegiatan	: 3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan Ante Mortem dan Post Mortem		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.882.140,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Kelembagaan Petani Berbasis Kawasan dan Produk Unggulan		
Kegiatan	: 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah BPP dan Kelompok Tani Yang Terbina		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.928.560,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.317.920,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.292.320,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	42.879.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.217.300,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.575.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.848.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.437.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.884.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.655.720,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.609.754.960,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	771.642.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.822.200,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0009 UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan		
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
Indikator Hasil	: Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis		
Kegiatan	: 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha PAH dan PSAT yang diuji Jumlah Unit Usaha PAH dan PSAT yang diuji		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.988.820,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.285.350,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0012 UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Terkendalinya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)		
Kegiatan	: 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		
Indikator Keluaran	: Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)		
Sub Kegiatan	: 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.631.980,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	668.575.880,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.05.1.01.0005 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.331.800,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.227.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.548.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.776.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.541.420,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	683.278.520,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0013 UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Populasi Ternak		
Kegiatan	: 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.240.390.545,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.587.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.055.736,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.125.480,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.647.620,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.457.120,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.020.000,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		

Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0014 UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan		
Kegiatan	: 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sertifikat Benih		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.616.260,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.666.620,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.406.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.348.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.609.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.056.180,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.717.140,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.182.140,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	

Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0015 UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura		
Kegiatan	: 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan Benih / Bibit Hortikultura Bermutu Berbentuk Batang Jumlah Penyediaan Benih / Bibit Hortikultura Bermutu Berbentuk Umbi Jumlah Penyediaan Benih Perkebunan Bermutu Berbentuk Biji Jumlah Penyediaan Benih Tanaman Pangan Bermutu Berbentuk Biji/Benih		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0007 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	685.701.640,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0011 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	709.591.320,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.102.060,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0014 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.398.140,00	
Kegiatan	: 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.575.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.674.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.998.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.389.028,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.868.820,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.384.280,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.522.140,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.163.924.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.363.309.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan		
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.334.720,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan kelas kelompok		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		

Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.362.000,00	
Program	: 3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		
Indikator Hasil	: Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan Indeks Kualitas Lahan		
Kegiatan	: 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.28.06.1.01.0002 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.961.240,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)		
Kegiatan	: 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.899.600,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	35.243.812.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.600.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.294.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.940.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.680.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.336.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.043.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	264.978.300,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.908.080,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.048.063.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.925.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.118.405.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.317.820,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0001 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara		
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Utara		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.058.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.685.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	

Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.610.340,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.569.640,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	685.788.520,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0002 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur		
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Timur		

Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.975.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.832.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.580.200,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.318.500,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.143.340,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.247.120,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.900.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	569.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.980.000,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0003 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.748.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.728.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.720.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.398.720,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.369.940,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.827.910,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0004 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat		
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.989.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.299.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.383.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.085.940,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.895.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.053.050,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	427.489.350,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.534.280,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0005 UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai		
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD Tahura Ngurah Rai		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.410.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.202.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.474.600,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.736.440,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.878.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.580.000,00	
Bidang Urusan	: 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
Unit Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
Program	: 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan		
Kegiatan	: 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan		

Sub Kegiatan	: 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
Program	: 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		
Indikator Hasil	: Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan		
Kegiatan	: 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan		
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
Program	: 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		
Indikator Hasil	: Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan		
Kegiatan	: 3.29.05.1.08 Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.08.0005 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.499.500,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
Program	: 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
Kegiatan	: 3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha Ekspor dan Impor yang di Bina		

Sub Kegiatan	: 3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.387.120,00	
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Pasar ber SNI		
Kegiatan	: 3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pasar yang dibina		
Sub Kegiatan	: 3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.426.100,00	
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING		
Indikator Hasil	: Persentase stabilitas harga barang Pokok		
Kegiatan	: 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah		
Sub Kegiatan	: 3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.213.800,00	
Program	: 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
Indikator Hasil	: Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif		
Kegiatan	: 3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat akses pasarnya		
Sub Kegiatan	: 3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.991.600,00	
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		

Indikator Hasil	: Indeks Keberdayaan Konsumen		
Kegiatan	: 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengaduan Konsumen yang Diproses		
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	456.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.01.0002 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.711.340,00	
Kegiatan	: 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaku usaha yang menerapkan Tertib Niaga Persentase Produk yang sesuai dengan ketentuan		
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.874.080,00	
Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
Indikator Hasil	: Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali		
Kegiatan	: 3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Toko yang memasarkan produk lokal Bali		
Sub Kegiatan	: 3.30.07.1.03.0005 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.598.080,00	
Program	: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)		
Kegiatan	: 3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.854.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	14.592.978.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.912.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.993.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.223.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.438.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.233.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	606.469.960,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.194.900,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	822.120.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.785.280,00	
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0002 UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang		
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
Indikator Hasil	: Indeks Keberdayaan Konsumen		
Kegiatan	: 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sertifikat hasil pengujian yang di terbitkan		
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.997.020,00	
Program	: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)		
Kegiatan	: 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.492.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.986.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.729.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.378.560,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.262.140,00	

Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
Program	: 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
Indikator Hasil	: Persentase industri kreatif yang tumbuh		
Kegiatan	: 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Industri yang dibina		
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.681.540,00	
5.1.05	Belanja Hibah	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.489.867.820,00	
Program	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
Indikator Hasil	: Persentase Ketersediaan Data Industri		
Kegiatan	: 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
Indikator Keluaran	: Persentase Data Industri yang terkumpul		
Sub Kegiatan	: 3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0001 UPTD Rumah Kreatif		
Program	: 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
Indikator Hasil	: Persentase industri kreatif yang tumbuh		
Kegiatan	: 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Industri yang dibina		
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	827.213.900,00	
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif)		
Kegiatan	: 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.764.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.673.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
Kegiatan	: 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.372.140,00	
Kegiatan	: 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: umlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.667.140,00	
Bidang Urusan	: 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
Unit Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
Program	: 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		
Indikator Hasil	: Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD		
Kegiatan	: 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target		
Sub Kegiatan	: 3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.884.800,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH		
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0003 Biro Umum dan Protokol		
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.056.020,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.300.120,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.118.900,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	689.399.360,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.406.794.620,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.544.170.576,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.576.965.520,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.664.380,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.011.354.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.567.861.984,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.966.123.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.696.544.050,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.990.221.926,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.500.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	455.948.436,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144.805.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.111.674.012,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.852.441.820,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	789.556.220,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.500.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.13 Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.13.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.114.100,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.14 Fasilitas Keprotokolan		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.853.663.540,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Hukum		
Program	: 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitas dan Koordinasi Hukum yang Diselesaikan dalam Kepastian Hukum		
Kegiatan	: 4.01.05.1.01 Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka Kepastian Hukum		
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.296.793.360,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0002 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.015.760,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.212.640,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0004 Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.802.760,00	
Kegiatan	: 4.01.05.1.02 Fasilitas Bantuan Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bantuan Hukum yang Diselesaikan		
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.02.0001 Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.821.410.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.02.0002 Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.918.860,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.774.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.035.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	836.307.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.463.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.261.420,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	844.478.520,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.990.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	59.053.914.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	247.336.742,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0001 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali		
Kegiatan	: 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Persentase Tugas Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.600.120,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.760.200,00	
Kegiatan	: 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti		

Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0001 Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	413.874.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.979.900,00	
Kegiatan	: 4.01.03.1.03 Fasilitas Kerja Sama Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.941.660,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.596.200,00	
Program	: 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Indikator Hasil	: Persentase tindakan lanjut kebijakan strategis yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual		
Kegiatan	: 4.01.04.1.01 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengembangan Mental Spiritual		
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.573.030.940,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.636.780,00	
5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.833.134.520,00	
5.1.05	Belanja Hibah	26.185.000.000,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.015.500,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.740.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.302.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	388.707.100,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.223.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.018.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tertata		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.172.140,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0005 Biro Organisasi		
Program	: 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		
Indikator Hasil	: Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik		
Kegiatan	: 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		

Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.01.0001 Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.01.0002 Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.682.140,00	
Kegiatan	: 4.01.02.1.02 Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.543.340,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.189.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.491.240,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.189.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.885.100,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.672.140,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.189.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0005 Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.868.540,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.379.400,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi		
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.355.700,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.059.760,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.746.650,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	781.868.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.988.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik.		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	769.583.340,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.060.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0007 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian		
Program	: 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti		
Kegiatan	: 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.787.000,00	
Kegiatan	: 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.002.000,00	
Kegiatan	: 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.790.000,00	
Program	: 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
Indikator Hasil	: Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik		
Kegiatan	: 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.976.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
Kegiatan	: 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.027.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.536.000,00	
Kegiatan	: 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.502.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.094.000,00	

Program	: 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
Kegiatan	: 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku		
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.964.000,00	
Kegiatan	: 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.161.000,00	
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD		
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD		
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD		
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
Indikator Hasil	: Presentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD (SETWAN)		
Kegiatan	: 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.819.843.680,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.805.504.220,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	763.983.680,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran		
Indikator Keluaran	: Persentase Terbentuknya Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Fungsi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.649.331.340,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.662.496.040,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.655.956.040,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.654.204.040,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.655.971.740,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.316.366.560,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.365.501.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.674.489.920,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.011.939.280,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.617.936.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0001 Orientasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.394.876.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.282.039.520,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.288.832.448,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	920.451.180,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.204.342.880,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.636.986.680,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Persentase Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.565.732.420,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.790.335.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.550.940.730,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD dalam Rangka Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	817.141.080,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.08 Fasilitas Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas Pimpinan Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.661.184.220,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.495.880,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0003 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.387.681.800,00	
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (SETWAN)		
Kegiatan	: 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian Perencanaan Terhadap Penganggaran Belanja OPD		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.401.640,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.668.140,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	10.013.782.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.744.940,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.951.640,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Selesai Dengan Baik dan Di Sampaikan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.600.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	903.215.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.358.543.300,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.062.108.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.734.350.920,00	

Kegiatan	: 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.780.798.200,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pelayanan Penunjang Kantor Yang Selesai Dengan Baik Dan Berkualitas		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.996.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.613.306.360,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.610.132.060,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	892.532.650,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	621.080.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Keuangan Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	58.289.304.663,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.537.787.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.761.040,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.16.0002 Fasilitas Fraksi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.530.360,00	

Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.836.260.040,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN		
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku		
Kegiatan	: 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.008.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.682.484.940,00	
Kegiatan	: 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.380.760,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.02.0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.972.800,00	
Kegiatan	: 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.355.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	521.143.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.034.100,00	
Kegiatan	: 5.01.02.1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data SIPD		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.339.240,00	
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah		

Kegiatan	: 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.025.880,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.603.540,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.626.460,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.149.160,00	
Kegiatan	: 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.987.560,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.433.420,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.432.240,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.393.680,00	
Kegiatan	: 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infratraktur dan Kewilayahan		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.906.540,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.334.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.548.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.359.600,00	
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.957.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.060.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.171.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.823.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.819.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.044.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.151.600,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	12.340.448.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.206.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.454.120,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.301.940,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.156.840,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	980.901.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.323.140,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.273.940,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.006.140,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.682.140,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.000.140,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	183.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.812.940,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.670.140,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.282.140,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	558.540.160,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	874.255.504,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.132.140,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.682.140,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.695.006.498,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN		
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.336.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.253.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.487.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	678.738.160,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.071.200,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen SK Gubernur tentang evaluasi kabupaten/kota disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.814.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.576.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.387.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.928.700,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan perbendaharaan disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	601.462.296,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.550.340,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.481.200,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.506.377.057,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.4	BELANJA TRANSFER		
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	356.230.322.273,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	62.772.177.068,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.4	BELANJA TRANSFER		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.279.176.638.488,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan implementasi SIPD		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.801.200,00	

Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Harga yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.211.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.876.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.999.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	782.357.460,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.005.000,00	

Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	19.447.248.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.884.680,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.358.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	982.069.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	569.761.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.486.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.138.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.300.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	738.703.480,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.516.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	943.013.560,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Realisasi PAD dari Pemanfaatan BMD		
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.415.996.700,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.665.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.999.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.881.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.535.980,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	554.442.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
Kegiatan	: 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0001 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.975.900,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.379.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.435.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.995.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.300.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.867.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.045.100,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan		

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	130.819.254.219,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.727.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.624.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.230.570.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.428.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.374.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	775.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	391.973.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.200.044.599,00	

Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.994.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.433.104,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.337.373,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.961.640,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.807.840,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	934.849.220,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.199.436.661,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (1)		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.785.987.740,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.034.709.140,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.042.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.053.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.809.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.068.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.960.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.075.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.677.340,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.465.063,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.980.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (2)		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.784.260,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.196.400,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.665.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.049.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.158.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.365.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.069.061,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.976.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.506.740,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	673.569.731,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.970.400,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (3)		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.003.540,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.785.680,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.491.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.995.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.366.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.996.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.125.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.756.855,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.363.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.350.140,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.021.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.378.300,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (4)		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.405.274.860,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.787.820,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.082.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.672.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.731.650,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.772.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.120.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.230.947,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.178.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.815.340,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	656.857.697,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.570.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (5)		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.868.660.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.785.680,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.819.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.206.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.691.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.212.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.515.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.055.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.882.444,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.116.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.040.880,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	642.616.902,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.752.500,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0006 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (6)		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.953.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	703.836.380,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.677.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.222.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.210.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.072.963,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.670.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.730.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	594.625.474,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.486.100,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0007 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (7)		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.049.960,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	635.702.100,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.601.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.298.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.946.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.370.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.077.200,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.165.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.503.540,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.947.500,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0008 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung		

Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (8)		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.023.040,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	491.103.540,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.697.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.276.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.999.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.620.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.924.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	697.141.131,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.693.600,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0009 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem		

Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (9)		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.685.680,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.773.540,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.062.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.994.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.499.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.647.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.960.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.878.412,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.645.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.213.740,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.692.840,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.246.800,00	
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN		
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		

Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Indeks Profesionalitas ASN Instansi		
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.386.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.617.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.556.420,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.398.420,00	
Kegiatan	: 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis layanan mutasi promosi ASN terlaksana baik		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.396.240,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.205.140,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.113.140,00	
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.943.674.540,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.967.280,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.873.780,00	
Kegiatan	: 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.131.180,00	

Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.360.280,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.990.280,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.694.700,00	
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.980.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.240.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	168.534.554.612,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.918.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.015.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.440.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.191.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.695.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.729.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.070.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.200.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	933.514.020,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	759.807.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.889.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.700.000,00	
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0001 UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai		
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Indeks Profesionalitas ASN Instansi		
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	701.912.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.815.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.166.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pengadaan barang milih daerah penunjang terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.537.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintah terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.774.980,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan barang milik daerah penunjang terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.218.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.890.000,00	
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0002 UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia		

Kegiatan	: 5.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.359.832.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Indikator Hasil	: Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi		
Kegiatan	: 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Data Penyelenggaraan Pengembangan Pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi		
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.764.280,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	467.042.440,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.799.840,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		

Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah		
Unit Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah		
Program	: 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.000.000,00	
Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.02.00 Badan Riset dan Inovasi Daerah		
Unit Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.02.00 Badan Riset dan Inovasi Daerah		
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan		
Kegiatan	: 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.008.149.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0006 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0008 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.299.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.207.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.162.400,00	
Kegiatan	: 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.199.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	892.165.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.499.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.499.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.998.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.075.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0005 Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.999.300,00	
Program	: 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.259.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.011.900,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.056.236.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.951.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.912.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.494.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.180.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.046.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.005.200,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.820.180,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	775.681.916,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.247.602.060,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG		
Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung		
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung		
Program	: 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung		
Kegiatan	: 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		
Indikator Keluaran	: Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung		
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.569.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.416.472,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.725.023.888,00	
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.857.200,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.841.784.000,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.996.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.317.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.580.000,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.243.000,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	920.690.136,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	879.877.176,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.530.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	221.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.498.472,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH		
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat		
Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat		
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
Kegiatan	: 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
Indikator Keluaran	: Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.060.460,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.232.480,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.115.840,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.080.880,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.299.200,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.232.480,00	
Kegiatan	: 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: Persentase hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.232.480,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.264.227.820,00	
Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
Indikator Hasil	: [deleted] Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan		
Kegiatan	: 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.191.320,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.051.842.840,00	
Kegiatan	: 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi		
Indikator Keluaran	: Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.348.120,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.983.200,00	
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Inspektorat)		
Kegiatan	: 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.028.400,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.267.100,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	21.385.658.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi yang terpenuhi		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.998.700,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.418.700,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.177.100,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.644.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.114.400,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.349.948.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.766.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.421.216.188,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang yang terpenuhi		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.332.640,00	

Kegiatan	: 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah yang terpelihara		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.139.679.260,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.244.280,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	392.420.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.408.560,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	35.000.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila		
Kegiatan	: 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
Sub Kegiatan	: 8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	741.921.620,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paskibraka		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.578.883.500,00	
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik		
Kegiatan	: 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
Sub Kegiatan	: 8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	794.619.620,00	
5.1.05	Belanja Hibah	179.355.295.732,00	
Program	: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Ormas yang terdata		
Kegiatan	: 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
Sub Kegiatan	: 8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.457.000,00	
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah		
Kegiatan	: 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		

Indikator Keluaran	: Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
Sub Kegiatan	: 8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.056.560,00	
5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial		
Kegiatan	: 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
Sub Kegiatan	: 8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.364.464.520,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	987.354.000,00	
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.212.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.995.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	8.821.852.164,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.989.100,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.178.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.406.400,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.623.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.996.100,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.330.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase paket pengadaan selesai		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.643.800,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: persentase penyediaan jasa urusan pemerintahan terealisasi		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

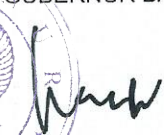
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	861.343.584,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: persentase barang milik daerah terpelihara		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	828.165.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	143.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.490.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: X NON URUSAN		
Bidang Urusan	: X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		

Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Program	: X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.599.100,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Kegiatan	: X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali		
Kegiatan	: X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.170.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0007 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian		
Kegiatan	: X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
Kegiatan	: X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.751.072.160,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	803.187.200,00	
Sub Kegiatan	: X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.957.000,00	
Sub Kegiatan	: X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.196.000,00	
Kegiatan	: X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.250.000,00	
Sub Kegiatan	: X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.870.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		

Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.172.600,00	
Sub Kegiatan	: X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.260.000,00	
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	811.725.080.073,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	640.554.747.273,00	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	171.170.332.800,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	248.917.013.352,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	248.917.013.352,00	

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN IV

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN



REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN

PROVINSI BALI

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	100 Persen							
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 98.00 Indeks 88.00 Indeks 74.59 Nilai 60.23 Nilai							
1	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)									
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	12 Unit	0,00	150.628.635.719,00	0,00	0,00	150.628.635.719,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	0,00	1.202.629.000,00	0,00	0,00	1.202.629.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	0,00	3.568.662.000,00	0,00	0,00	3.568.662.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
4	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	0,00	4.843.633.553,00	0,00	0,00	4.843.633.553,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	384.026.000,00	0,00	0,00	384.026.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
6	1.01.02.1.01.0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA									
			Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	346.566.000,00	0,00	0,00	346.566.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
7	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah									
			[object Object]	[object Object]	0,00	3.165.000.000,00	0,00	0,00	3.165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
8	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	127 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	660.000,00	392.490.000,00	0,00	0,00	393.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
10	1.01.02.1.01.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	90 Unit	1.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
11	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6761 Peserta didik	5.114.836.090,00	1.029.484.310,00	0,00	0,00	6.144.320.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
12	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	910 Peserta Didik	1.267.939.700,00	0,00	0,00	0,00	1.267.939.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
13	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1249 Orang	43.660.703.700,00	0,00	0,00	0,00	43.660.703.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
14	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	70.550.000,00	0,00	0,00	0,00	70.550.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
15	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[object Object]	[object Object]	259.679.200,00	4.239.000.000,00	0,00	0,00	4.498.679.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
16	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	148 Satuan Pendidikan	97.925.040.000,00	74.790.430.000,00	0,00	0,00	172.715.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
17	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	89 Orang	29.999.400,00	0,00	0,00	0,00	29.999.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
18	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	62.919.500,00	0,00	0,00	0,00	62.919.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
19	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium									
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	6 Ruang	0,00	1.693.944.000,00	0,00	0,00	1.693.944.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
20	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	21 Ruang	0,00	8.631.562.525,00	0,00	0,00	8.631.562.525,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
21	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
			Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	124.999.800,00	0,00	0,00	0,00	124.999.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	89 Satuan Pendidikan	108.342.700,00	0,00	0,00	0,00	108.342.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92.88 Indeks 96.98 Indeks 85.39 Indeks 69.50 Nilai 56.75 Nilai 79.00 Persen 90.81 Persen							
23	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)									
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit	0,00	60.067.623.277,00	0,00	0,00	60.067.623.277,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Banjar, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Sukasada, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
24	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa									
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	4 Ruang	3.323.200.000,00	7.330.300.000,00	0,00	0,00	10.653.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
25	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	0,00	595.525.552,00	0,00	0,00	595.525.552,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Pengembangan-SMK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
26	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	0,00	1.965.009.411,00	0,00	0,00	1.965.009.411,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Pengembangan-SMK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
27	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium									
			0	1 0	0,00	205.252.000,00	0,00	0,00	205.252.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Pengembangan-SMK
28	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah									
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	380.000.000,00	3.370.000.000,00	0,00	0,00	3.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Pengembangan-SMK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
29	1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	58 Unit	1.160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
30	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	7909 Peserta didik	5.992.208.800,00	580.487.400,00	0,00	0,00	6.572.696.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
31	1.01.02.1.02.0038	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8 Paket	4.450.000.000,00	5.550.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penggunaan-SMK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
32	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	680 Peserta Didik	929.832.100,00	0,00	0,00	0,00	929.832.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
33	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1325 Orang	35.848.917.220,00	0,00	0,00	0,00	35.848.917.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
34	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	375 Orang	70.550.000,00	0,00	0,00	0,00	70.550.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
35	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	178 Satuan Pendidikan	402.278.200,00	0,00	0,00	0,00	402.278.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penggunaan-SMK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
36	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	177 Satuan Pendidikan	119.565.220.000,00	52.049.480.000,00	0,00	0,00	171.614.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	173 Orang	31.835.000,00	0,00	0,00	0,00	31.835.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
38	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	31.250.000,00	0,00	0,00	0,00	31.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
39	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik									
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	0,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
40	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	0,00	8.640.518.078,00	0,00	0,00	8.640.518.078,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penu gasan-SMK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
41	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah									
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	0,00	4.690.001.694,00	0,00	0,00	4.690.001.694,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penu gasan-SMK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
42	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
			Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang	124.998.600,00	0,00	0,00	0,00	124.998.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah									
			[object Object]	[object Object]	0,00	276.984.000,00	0,00	0,00	276.984.000,00	Kab. Gianyar, Ubud, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penggunaan-SMK
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 92.88 Indeks 92.88 Indeks 98.00 Indeks 92.84 Indeks 88.18 Indeks 92.00 Indeks 98.00 Indeks 89.12 Indeks 73.21 Nilai 76.90 Nilai 77.28 Nilai 61.55 Nilai 66.66 Nilai							
44	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)									
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	23.099.900,00	12.912.640.000,00	0,00	0,00	12.935.739.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
45	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	15.375.400,00	1.012.889.909,00	0,00	0,00	1.028.265.309,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
46	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah									
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	0,00	320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
47	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	1 0	0,00	738.005.200,00	0,00	0,00	738.005.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
48	1.01.02.1.03.0036	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah									
			Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	6 Paket	3.396.219.400,00	0,00	0,00	0,00	3.396.219.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
49	1.01.02.1.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	12 Unit	244.599.600,00	0,00	0,00	0,00	244.599.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
50	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus									
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
51	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	1.050.980.300,00	0,00	0,00	0,00	1.050.980.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
52	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	148 Orang	5.619.417.920,00	0,00	0,00	0,00	5.619.417.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
53	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus									
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	403.294.900,00	225.353.200,00	0,00	0,00	628.648.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
54	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus									
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	14 Satuan Pendidikan	6.032.080.000,00	5.101.680.000,00	0,00	0,00	11.133.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
55	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	84 Orang	15.547.600,00	0,00	0,00	0,00	15.547.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
56	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	14 Dokumen	16.559.300,00	0,00	0,00	0,00	16.559.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
57	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	14.918.900,00	1.303.048.800,00	0,00	0,00	1.317.967.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
58	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	5 Ruang	0,00	336.645.300,00	0,00	0,00	336.645.300,00	Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
59	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	14 Satuan Pendidikan	72.653.600,00	0,00	0,00	0,00	72.653.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Minimal Baik	100 Persen							
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal	66.00 Persen							
60	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Dokumen	34.981.800,00	0,00	0,00	0,00	34.981.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
61	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3 Laporan	39.999.200,00	0,00	0,00	0,00	39.999.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Disdikpora)	81.50 Nilai							
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu	8 Dokumen							
62	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	86.632.400,00	0,00	0,00	0,00	86.632.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
63	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	182.126.000,00	0,00	0,00	0,00	182.126.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	59 Laporan							
64	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7684 Orang/ Bulan	1.050.389.690,00	0,00	0,00	0,00	1.050.389.690,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	102.942.500,00	0,00	0,00	0,00	102.942.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
66	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	28 Dokumen	154.048.600,00	0,00	0,00	0,00	154.048.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	4 Jenis							
67	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	43.025.000,00	0,00	0,00	0,00	43.025.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik	100 Persen							
68	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	43.675.000,00	0,00	0,00	0,00	43.675.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	100 Persen							
69	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47 Paket	157.809.800,00	88.860.000,00	0,00	0,00	246.669.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
70	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.840.000,00	0,00	0,00	0,00	10.840.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
71	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	31.526.250,00	0,00	0,00	0,00	31.526.250,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
72	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	625.094.000,00	0,00	0,00	0,00	625.094.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia dan siap digunakan	100 Persen							
73	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	4.260.790.000,00	0,00	0,00	4.260.790.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen							
74	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.050.981.150,00	0,00	0,00	0,00	1.050.981.150,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
75	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.624.527.920,00	0,00	0,00	0,00	8.624.527.920,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	692.685.000,00	0,00	0,00	0,00	692.685.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
77	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	663.214.550,00	990.726.258,00	0,00	0,00	1.653.940.808,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
78	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	382.189.500,00	0,00	0,00	0,00	382.189.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	71.5 Persen							
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang berprestasi	90 Orang							
79	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	1 Dokumen	91.521.100,00	0,00	0,00	0,00	91.521.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
80	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	100 Persentase	169.258.400,00	0,00	0,00	0,00	169.258.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
81	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi									
			Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	90 Orang	490.941.900,00	0,00	0,00	0,00	490.941.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
82	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi									
			Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	90 Orang	371.660.200,00	0,00	0,00	0,00	371.660.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	50.00 Persen							
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	4 Kejuaraan							
83	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga									
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	250 Orang	1.813.286.000,00	0,00	0,00	0,00	1.813.286.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
84	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	2 Dokumen	5.480.115.800,00	0,00	0,00	0,00	5.480.115.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional	250 Orang							
85	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	169.881.000,00	0,00	0,00	0,00	169.881.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan	59 Organisasi							
86	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait									
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	2 Dokumen	52.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.650.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan	52.5 Persen							
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka	50 Persen							
87	2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi									
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	77.5 Persen							
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK	88 sekolah							
88	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	750 Orang	101.430.000,00	0,00	0,00	0,00	101.430.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
89	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	12 Konten Digital	57.075.000,00	0,00	0,00	0,00	57.075.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
90	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	182 Orang	44.059.000,00	0,00	0,00	0,00	44.059.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
91	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	91 Satuan Pendidikan	535.720.000,00	0,00	0,00	0,00	535.720.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK	56 Sekolah							
92	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	895 Orang	83.370.000,00	0,00	0,00	0,00	83.370.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
93	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital	45.139.000,00	0,00	0,00	0,00	45.139.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
94	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	118 Orang	43.059.000,00	0,00	0,00	0,00	43.059.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
95	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik									
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	59 Satuan Pendidikan	351.382.000,00	0,00	0,00	0,00	351.382.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen	81.5 Nilai							
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen							
96	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	40.216.000,00	0,00	0,00	0,00	40.216.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
97	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.999.500,00	0,00	0,00	0,00	2.999.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
98	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	48.860.300,00	0,00	0,00	0,00	48.860.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 Persen							
99	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	753.642.800,00	0,00	0,00	0,00	753.642.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100 Persen							
100	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	103.340.000,00	0,00	0,00	0,00	103.340.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
101	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
102	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	10.120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.120.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	60 Persen							
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	1 Kurikulum							
103	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah									
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	72 Orang	69.519.900,00	0,00	0,00	0,00	69.519.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan	1 Kurikulum							
104	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus									
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	20 Orang	32.049.300,00	0,00	0,00	0,00	32.049.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan	70.4 Nilai							
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali	87.2 Persen							
105	1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	225 Peserta Didik	76.049.700,00	0,00	0,00	0,00	76.049.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen	81.5 Nilai							
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	100 Persen							
106	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.618.800,00	0,00	0,00	0,00	8.618.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
107	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.547.600,00	0,00	0,00	0,00	6.547.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
108	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	27.330.000,00	0,00	0,00	0,00	27.330.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 Persen							
109	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	527.549.960,00	0,00	0,00	0,00	527.549.960,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100 Persen							
110	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	90.810.000,00	0,00	0,00	0,00	90.810.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kesehatan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Desa UCI Persentase Faskes yang Terakreditasi Cakupan Kepesertaan JKN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	95 Persen 96 Persen 100 Persen 98,2 Persen 88,5 Nilai							
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan	1 dokumen							
111	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana									
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	4380824 Orang	517.042.400,00	0,00	0,00	0,00	517.042.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan
112	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)									
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130000 Orang	2.405.881.900,00	0,00	0,00	0,00	2.405.881.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan
113	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	294.669.000,00	0,00	0,00	0,00	294.669.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
114	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	158.740.000,00	0,00	0,00	0,00	158.740.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
115	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	56.459.900,00	0,00	0,00	0,00	56.459.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
116	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	16.720.000,00	0,00	0,00	0,00	16.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
117	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	2.003.674.836,00	0,00	0,00	0,00	2.003.674.836,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
118	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	26.494.321.600,00	0,00	0,00	0,00	26.494.321.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
119	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	143.790.000,00	0,00	0,00	0,00	143.790.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
120	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	28.700.000,00	0,00	0,00	0,00	28.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
121	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	37.045.000,00	0,00	0,00	0,00	37.045.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
122	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional									
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	40 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Puskesmas yang menerapkan e-Kesehatan	120 puskesmas							
123	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	21.299.400,00	0,00	0,00	0,00	21.299.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya sesuai Standar Pelayanan, SDM, Alat Kesehatan, Sarana, Prasarana dan Jumlah Faskes yang melakukan penginputan INM dan IKP	337 Fasilitas Kesehatan							
124	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	6 Unit	14.901.900,00	0,00	0,00	0,00	14.901.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
125	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	192 Unit	60.409.800,00	0,00	0,00	0,00	60.409.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	75 persen							
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Kebutuhan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	1 dokumen							
126	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	28500 Orang	12.460.000,00	0,00	0,00	0,00	12.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi	90 persen							
127	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	300 Orang	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
128	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	496.043.400,00	0,00	0,00	0,00	496.043.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial	85 persen							
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	100 persen							
129	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK									
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	40 Sarana	73.518.000,00	0,00	0,00	0,00	73.518.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional	100 persen							
130	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional									
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	20 Sarana	76.212.000,00	0,00	0,00	0,00	76.212.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan desa/kelurahan siaga aktif mandiri	66.67 persen							
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan	1 kebijakan							
131	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	108.216.000,00	0,00	0,00	0,00	108.216.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 nilai							
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen							
132	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	200.188.000,00	0,00	0,00	0,00	200.188.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
133	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	18.954.700,00	0,00	0,00	0,00	18.954.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 laporan							
134	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1520 Orang/ Bulan	225.179.064.000,00	0,00	0,00	0,00	225.179.064.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kanganin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
135	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	13.482.800,00	0,00	0,00	0,00	13.482.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 Laporan							
136	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	73.145.400,00	18.837.000,00	0,00	0,00	91.982.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
137	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.163.130.100,00	0,00	0,00	0,00	1.163.130.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun							
138	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	480.000.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kanganin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
139	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.174.642.840,00	0,00	0,00	0,00	20.174.642.840,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporan							
140	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	430.800.000,00	0,00	0,00	0,00	430.800.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
141	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	57.320.200,00	0,00	0,00	0,00	57.320.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
142	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan	100 persentase							
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan	1 Laporan							
143	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	70 Orang	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen kinerja	82 nilai							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana penunjang administrasi umum	100 Persen							
144	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.024.000,00	36.497.600,00	0,00	0,00	43.521.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
145	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	163.846.500,00	0,00	0,00	0,00	163.846.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen SPJ/ SPM Jasa Layanan Umum kantor	1 Tahun							
146	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	363.900.000,00	0,00	0,00	0,00	363.900.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
147	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.243.510.620,00	0,00	0,00	0,00	1.243.510.620,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporan							
148	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	39.175.000,00	0,00	0,00	0,00	39.175.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
149	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	92.500.000,00	0,00	0,00	0,00	92.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesmas	100 persen							
150	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.805.021.800,00	194.978.200,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan dari BLUD
		UPTD Balai Laboratorium Kesehatan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai							
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah bahan logistik, peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 paket							
151	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	408.340.800,00	0,00	0,00	0,00	408.340.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta pelayannya umum kantor	1 Tahun							
152	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	589.000.000,00	0,00	0,00	0,00	589.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
153	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	62 Laporan	1.956.651.820,00	0,00	0,00	0,00	1.956.651.820,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang di pelihara	12 jenis							
154	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	108.100.000,00	0,00	0,00	0,00	108.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
155	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	151.820.000,00	0,00	0,00	0,00	151.820.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
156	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Kepuasan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali	100 persen							
157	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5.057.116.306,00	1.178.535.444,00	0,00	0,00	6.235.651.750,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan dari BLUD
		UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	88.5 nilai							
1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	1219 kunjungan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	15.199.000,00	0,00	0,00	0,00	15.199.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
159	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	17.299.500,00	9.000.000,00	0,00	0,00	26.299.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
160	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	156.698.400,00	0,00	0,00	0,00	156.698.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai							
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporan							
161	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.581.000,00	11.974.900,00	0,00	0,00	19.555.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
162	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	137.142.900,00	0,00	0,00	0,00	137.142.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporan							
163	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	2.061.456.560,00	0,00	0,00	0,00	2.061.456.560,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporan							
164	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
165	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	57.468.900,00	0,00	0,00	0,00	57.468.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
166	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	132.815.900,00	0,00	0,00	0,00	132.815.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		RSUD Bali Mandara									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	88,5 Nilai							
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan							
167	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit	0,00	8.732.070.000,00	0,00	0,00	8.732.070.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
168	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit									
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	0,00	21.000.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai							
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa kebersihan kantor, jasa tenaga kesehatan, non kesehatan, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	1 Tahun							
169	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.318.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.318.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
170	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.033.359.596,00	0,00	0,00	0,00	36.033.359.596,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pasien yang dilayani sesuai Standar Pelayanan RS	70000 pasien							
171	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	153.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan dari BLUD
		Rumah Sakit Jiwa									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	88,5 nilai							
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai rencana	100 Persen							
172	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	77 Unit	0,00	1.425.000.000,00	0,00	0,00	1.425.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai							
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	1 Tahun							
173	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.114.110.402,00	0,00	0,00	0,00	1.114.110.402,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
174	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.203.180.040,00	0,00	0,00	0,00	12.203.180.040,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah pasien yang dilayani sesuai dengan Standar Pelayanan	17000 Kunjungan							
175	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	23.503.946.500,00	996.053.500,00	0,00	0,00	24.500.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	Pendapatan dari BLUD
		Rumah Sakit Mata Bali Mandara									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	88,5 Nilai							
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan							
176	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	0,00	4.425.000.000,00	0,00	0,00	4.425.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di BLUD (Dinas Kesehatan) Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Kesehatan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di BLUD	81,5 Nilai 82 Nilai 81,5 Nilai							
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pasien yang dilayani tuntas	99 persen							
177	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	71.874.000.000,00	8.126.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan dari BLUD
		UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional, dan Pengelolaan Perbekalan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	81,5 nilai							
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan pengadaan sediaan farmasi, bahan laboratorium, dan alkes yang diadakan	1 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen	215.311.500,00	0,00	0,00	0,00	215.311.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
179	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	3.874.157.200,00	0,00	0,00	0,00	3.874.157.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah produk obat dan bahan obat tradisional yang diproduksi	20 produk							
180	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	7 Dokumen	512.421.700,00	88.241.100,00	0,00	0,00	600.662.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai							
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 Laporan							
181	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	43.627.100,00	444.088.800,00	0,00	0,00	487.715.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
182	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	319.895.300,00	0,00	0,00	0,00	319.895.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 laprantase							
183	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	434.000.000,00	0,00	0,00	434.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 laporan							
184	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65 Laporan	3.110.670.940,00	0,00	0,00	0,00	3.110.670.940,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 laporanase							
185	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	40.800.000,00	0,00	0,00	0,00	40.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
186	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	63.291.800,00	0,00	0,00	0,00	63.291.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
187	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	872.360.600,00	116.000.000,00	0,00	0,00	988.360.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Peralatan dan Pengujian									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	100 %							
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan	100 %							
188	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota									
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	12 Paket Pekerjaan	885.317.240,00	0,00	0,00	0,00	885.317.240,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Peralatan	85 Nilai							
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 %							
189	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.971.200,00	0,00	0,00	0,00	11.971.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
190	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.526.500,00	0,00	0,00	0,00	10.526.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
191	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.236.800,00	0,00	0,00	0,00	5.236.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
193	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
194	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
195	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %							
196	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	0,00	18.320.000,00	0,00	0,00	18.320.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
197	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	14.850.300,00	0,00	0,00	14.850.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani	100 %							
198	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	53.100.000,00	0,00	0,00	0,00	53.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
200	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani	100 %							
201	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	285.799.680,00	0,00	0,00	0,00	285.799.680,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
202	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	18.010.000,00	0,00	0,00	0,00	18.010.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
203	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	332.472.560,00	0,00	0,00	0,00	332.472.560,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengelolaan Air Minum									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak	95.00 %							
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh Pelanggan	40 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	5 Unit	27.429.877.464,00	1.626.100.000,00	0,00	0,00	29.055.977.464,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan dari BLUD
		UPTD Pengelolaan Air Limbah									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah	100 %							
1.03.05.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang dikelola dengan baik UPTD.PAL	1 SPALD							
205	1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
			Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	10.765.383.160,00	300.000.000,00	0,00	0,00	11.065.383.160,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	48.63 %							
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang tertangani	5 Unit							
206	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai									
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,26563 KM	0,00	547.820.000,00	0,00	0,00	547.820.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Sengkidu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
207	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya									
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0.17 KM	22.901.700,00	0,00	0,00	0,00	22.901.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
208	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya									
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	289.177.300,00	0,00	0,00	0,00	289.177.300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
209	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya									
			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	13.994.300,00	0,00	0,00	0,00	13.994.300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
210	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai									
			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	6 Dokumen	349.889.400,00	0,00	0,00	0,00	349.889.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya	14 D.I							
211	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5.269 KM	288.879.040,00	10.964.125.000,00	0,00	0,00	11.253.004.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
212	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	172.972 KM	3.222.893.880,00	0,00	0,00	0,00	3.222.893.880,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
213	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3 Dokumen	758.475.020,00	491.655.000,00	0,00	0,00	1.250.130.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak	95.00 %							
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas layanan SPAM	5 SPAM							
214	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
			Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	2 Dokumen	1.465.483.580,00	0,00	0,00	0,00	1.465.483.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
215	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota									
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	10 Liter/Detik	50.009.100,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	15.050.009.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	90.90 %							
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani	4200 SR							
216	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	150 Rumah Tangga	28.074.300,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.028.074.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
217	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
			Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	2 Dokumen	62.831.900,00	200.000.000,00	0,00	0,00	262.831.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan air minum layak	95.00 %							
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Meningkatnya kapasitas layanan SPAM	5 SPAM							
218	1.03.07.1.01.0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi									
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	230 SR	248.681.272,00	0,00	0,00	0,00	248.681.272,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	75.00 %							
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik	19 Kawasan							
219	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	5 Kawasan	148.170.782.140,00	13.700.550.320,00	0,00	0,00	161.871.332.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
220	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	683.651.700,00	0,00	0,00	0,00	683.651.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
221	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	5 Dokumen	41.053.200,00	650.000.000,00	0,00	0,00	691.053.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	78.67 %							
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	601,92 Km							
222	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	5 Dokumen	351.539.980,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00	1.801.539.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
223	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
224	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.20 KM	4.890.000,00	4.500.005.236,00	0,00	0,00	4.504.895.236,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
225	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan									
			Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	2,15 KM	360.718.060,00	12.200.000.000,00	0,00	0,00	12.560.718.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
226	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan									
			Panjang Jembatan yang Dibangun	15 M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
227	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan									
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	800.61 KM	23.973.794.300,00	363.000.000,00	0,00	0,00	24.336.794.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
228	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan									
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	2.04 KM	36.165.000,00	34.756.597.547,00	0,00	0,00	34.792.762.547,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
229	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar									
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	9.59 KM	0,00	11.877.780.534,00	0,00	0,00	11.877.780.534,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
230	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5 Dokumen	1.357.559.982,00	1.840.000.000,00	0,00	0,00	3.197.559.982,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
231	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokumen	1.304.498.000,00	27.326.300,00	0,00	0,00	1.331.824.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	22.77 %							
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota	6 Kegiatan							
232	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli									
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	190 Orang	562.184.660,00	0,00	0,00	0,00	562.184.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	4 Kegiatan							
233	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota									
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	251.207.300,00	0,00	0,00	0,00	251.207.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
234	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi									
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	16 Lembaga	251.860.300,00	0,00	0,00	0,00	251.860.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang	93.62 %							
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	1 Perda							
235	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	26.655.200,00	0,00	0,00	0,00	26.655.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1 Kegiatan							
236	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota									
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	9 Dokumen	419.673.480,00	0,00	0,00	0,00	419.673.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Bali	1 Dokumen							
237	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang									
			Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Laporan	248.860.000,00	0,00	0,00	0,00	248.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
238	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang									
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	105.535.000,00	0,00	0,00	0,00	105.535.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali	2 Dokumen							
239	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat									
			Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	176.381.980,00	0,00	0,00	0,00	176.381.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
240	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	410.449.960,00	0,00	0,00	0,00	410.449.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85 Nilai							
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	15 Dokumen							
241	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	426.572.700,00	0,00	0,00	0,00	426.572.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
242	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	330.395.580,00	0,00	0,00	0,00	330.395.580,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %							
243	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	178 Orang/ Bulan	26.871.550.000,00	0,00	0,00	0,00	26.871.550.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %							
244	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.171.400,00	0,00	0,00	0,00	24.171.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
245	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	65.491.700,00	0,00	0,00	0,00	65.491.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
246	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	57.500.000,00	0,00	0,00	0,00	57.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
247	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	85.009.600,00	0,00	0,00	0,00	85.009.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
248	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	16.260.000,00	0,00	0,00	0,00	16.260.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
249	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
250	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	464.820.000,00	0,00	0,00	0,00	464.820.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %							
251	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0,00	180.535.600,00	0,00	0,00	180.535.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %							
252	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
253	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	562.000.000,00	0,00	0,00	0,00	562.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
254	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
255	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	318.342.692,00	0,00	0,00	0,00	318.342.692,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %							
256	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	1.566.414.600,00	0,00	0,00	0,00	1.566.414.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
257	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	119 Unit	205.846.420,00	0,00	0,00	0,00	205.846.420,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
258	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1.411.563.084,00	0,00	0,00	0,00	1.411.563.084,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	100 %							
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan	1 Paket							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus									
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	272.217.800,00	0,00	0,00	0,00	272.217.800,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
260	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi									
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	20.822.600,00	0,00	0,00	0,00	20.822.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah kewenangan provinsi yang dibangun	1 Paket							
261	1.04.02.1.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi									
			Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1 Unit Rumah	499.622.640,00	0,00	0,00	0,00	499.622.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	5,94 %							
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tertanganinya luas kawasan kumuh kewenangan provinsi	7,82 %							
262	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	95 Unit Rumah	4.823.028.400,00	0,00	0,00	0,00	4.823.028.400,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
263	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha									
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	1.68 Ha	940.092.300,00	0,00	0,00	0,00	940.092.300,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU	70 %							
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman	2.50 %							
264	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen	129.000.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
265	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1 Lokasi	2.198.824.964,00	0,00	0,00	0,00	2.198.824.964,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
266	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan	42.215.000,00	0,00	0,00	0,00	42.215.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan	9.72 Ha							
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Bali	9.72 Ha							
267	2.10.05.1.01.0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan	10.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi	100 %							
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen redistribusi tanah yang terinventarisasi	1 Dokumen							
268	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	1 Berita Acara	27.003.500,00	0,00	0,00	0,00	27.003.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase data informasi pertanahan yang handal	30 %							
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi	1 Dokumen							
269	2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	268.540.500,00	0,00	0,00	0,00	268.540.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Satuan Polisi Pamong Praja									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100 persen							
1.05.02.1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	190 Pelanggaran							
270	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	77.833.240,00	0,00	0,00	0,00	77.833.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
271	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	18.614.874.259,00	0,00	0,00	0,00	18.614.874.259,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
272	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	149.809.400,00	0,00	0,00	0,00	149.809.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
273	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
			Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	29.899.600,00	0,00	0,00	0,00	29.899.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
274	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	100.115.740,00	0,00	0,00	0,00	100.115.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
275	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan									
			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	190 Kasus	4.245.911.560,00	0,00	0,00	0,00	4.245.911.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
276	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia									
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	131 Orang	242.712.420,00	0,00	0,00	0,00	242.712.420,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	195 Kasus							
277	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 Laporan	24.761.500,00	0,00	0,00	0,00	24.761.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
278	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	1.560.878.840,00	0,00	0,00	0,00	1.560.878.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
279	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	251.964.280,00	0,00	0,00	0,00	251.964.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	4 Orang							
280	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	137.060.200,00	0,00	0,00	0,00	137.060.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.3 Nilai							
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen							
281	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
282	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen							
283	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	20.077.661.000,00	0,00	0,00	0,00	20.077.661.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	2 Paket							
284	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	244.272.600,00	0,00	0,00	0,00	244.272.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis							
285	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.980.600,00	0,00	0,00	0,00	44.980.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
286	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	56.075.800,00	308.758.500,00	0,00	0,00	364.834.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
287	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
288	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	24.847.200,00	0,00	0,00	0,00	24.847.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
289	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	54.993.000,00	0,00	0,00	0,00	54.993.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	2 Paket							
290	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	39.258.000,00	0,00	0,00	39.258.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
291	1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan							
292	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
293	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
294	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	59.390.000,00	0,00	0,00	0,00	59.390.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
295	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	935.232.100,00	0,00	0,00	0,00	935.232.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan							
296	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	42 Unit	1.888.394.244,00	0,00	0,00	0,00	1.888.394.244,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	3 Persen							
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	9 Kabupaten/Kota							
297	1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)									
			Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	360 Orang	201.943.300,00	0,00	0,00	0,00	201.943.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100 Persen							
298	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	487.362.100,00	0,00	0,00	0,00	487.362.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
299	1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana									
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	80 Orang	164.287.200,00	0,00	0,00	0,00	164.287.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
300	1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana									
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	50 Orang	292.918.800,00	0,00	0,00	0,00	292.918.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
301	1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi									
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	138.148.400,00	0,00	0,00	0,00	138.148.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
302	1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	70 Orang	90.597.400,00	0,00	0,00	0,00	90.597.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
303	1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana									
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	118 Unit	25.557.700,00	612.786.000,00	0,00	0,00	638.343.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran	9 Kabupate n/Kota							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	616.175.500,00	0,00	0,00	0,00	616.175.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
305	1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	900 Orang	706.779.000,00	0,00	0,00	0,00	706.779.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	5 Jenis							
306	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi									
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	377.641.100,00	0,00	0,00	0,00	377.641.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
307	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah									
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	53.059.000,00	0,00	0,00	0,00	53.059.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
308	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah									
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	258.770.200,00	0,00	0,00	0,00	258.770.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
309	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana									
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	60.312.200,00	0,00	0,00	0,00	60.312.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	9 kabupaten /kota	115.774.000,00	0,00	0,00	0,00	115.774.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,60 Persen							
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	100 Persen							
311	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	57.090.700,00	0,00	0,00	0,00	57.090.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
312	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	98.728.200,00	0,00	0,00	0,00	98.728.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen							
313	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	12.714.782.000,00	0,00	0,00	0,00	12.714.782.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur dengan kelengkapan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	1 Paket							
314	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	71.400.000,00	0,00	0,00	0,00	71.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen							
315	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.996.000,00	0,00	0,00	0,00	9.996.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
316	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.677.300,00	0,00	0,00	0,00	125.677.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
317	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	82.500.000,00	0,00	0,00	0,00	82.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
318	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	11.220.700,00	0,00	0,00	0,00	11.220.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
319	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
320	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	319.500.000,00	0,00	0,00	0,00	319.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
321	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.736.100,00	0,00	0,00	0,00	4.736.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun							
322	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	897.688.000,00	0,00	0,00	897.688.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen							
323	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.420.000,00	0,00	0,00	0,00	6.420.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
324	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	178.000.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
325	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.422.320.540,00	0,00	0,00	0,00	1.422.320.540,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun							
326	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	1.748.717.372,00	0,00	0,00	0,00	1.748.717.372,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
327	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	51.500.000,00	0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
328	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	3.521.316.772,00	658.300.000,00	0,00	0,00	4.179.616.772,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
329	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.871.785,00	0,00	0,00	0,00	9.871.785,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
330	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	78 Unit	67.910.000,00	0,00	0,00	0,00	67.910.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengendalian Bencana Daerah									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	3 Persen							
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100 Persen							
331	1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalikan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	1.034.199.140,00	0,00	0,00	0,00	1.034.199.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran	9 Kabupaten/Kota							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	243.665.900,00	0,00	0,00	0,00	243.665.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	1 Jenis							
333	1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan									
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	787.220.000,00	870.000.000,00	0,00	0,00	1.657.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,60 Persen							
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum kantor yang tersedia sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	100 Persen							
334	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.740.400,00	0,00	0,00	0,00	16.740.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
335	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.998.800,00	0,00	0,00	0,00	14.998.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
336	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	22.245.600,00	0,00	0,00	0,00	22.245.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
337	1.05.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	42.750.000,00	0,00	0,00	0,00	42.750.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun							
338	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	0,00	553.655.600,00	0,00	0,00	553.655.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen							
339	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
340	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.308.053.820,00	0,00	0,00	0,00	1.308.053.820,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun							
341	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	680.476.654,00	0,00	0,00	0,00	680.476.654,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
342	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
343	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	96 Unit	199.666.000,00	0,00	0,00	0,00	199.666.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS	13.88 Persen							
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase lembaga yang meningkatkan pemahamannya mengenai kebijakan pengelolaan sumber dana sosial	100 persen							
344	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 Dokumen	3.486.800,00	0,00	0,00	0,00	3.486.800,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah masyarakat dan lembaga yang memberikan pendampingan dan bantuan sosial	51 Orang							
345	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	57 Orang	55.523.800,00	0,00	0,00	0,00	55.523.800,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100 Persen							
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal									
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	1.177.100,00	0,00	0,00	0,00	1.177.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya	27.14 persen							
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	215 Orang							
347	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	55 Orang	28.624.600,00	0,00	0,00	0,00	28.624.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal
348	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	30 Orang	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
349	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial									
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	130 Orang	289.939.600,00	0,00	0,00	0,00	289.939.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	688 Orang							
350	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	622 Orang	349.452.600,00	0,00	0,00	0,00	349.452.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal
351	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 Orang	236.941.200,00	0,00	0,00	0,00	236.941.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
352	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	30 Orang	37.848.000,00	0,00	0,00	0,00	37.848.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	424 Orang							
353	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	53.890.000,00	0,00	0,00	0,00	53.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal
354	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial									
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	260 Orang	24.500.800,00	0,00	0,00	0,00	24.500.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
355	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang	44.970.600,00	0,00	0,00	0,00	44.970.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
356	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan									
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	14 Orang	122.890.100,00	0,00	0,00	0,00	122.890.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	220 Orang							
357	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	220 Orang	9.999.400,00	0,00	0,00	0,00	9.999.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal									
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	220 Orang	74.200.000,00	0,00	0,00	0,00	74.200.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	0.16 persen							
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah pengangkatan anak yang diproses sesuai prosedur	20 Orang							
359	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI									
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	20 Orang	7.536.600,00	0,00	0,00	0,00	7.536.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin	140 Keluarga							
360	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	40 Keluarga	5.391.800,00	0,00	0,00	0,00	5.391.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
361	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	100 Keluarga	5.641.100,00	0,00	0,00	0,00	5.641.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100 persen							
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang terfasilitasi	700 Orang							
362	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi									
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	2 Unit	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
363	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 Orang	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
364	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial									
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	650 Orang	257.936.700,00	0,00	0,00	0,00	257.936.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase penanganan Taman Makam Pahlawan sesuai standar	100 persen							
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1 TMP							
365	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi									
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	898 Makam	267.258.400,00	0,00	0,00	0,00	267.258.400,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai							
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	4 Dokumen							
366	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.832.200,00	0,00	0,00	0,00	11.832.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
367	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.602.500,00	0,00	0,00	0,00	3.602.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
368	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	14.895.000,00	0,00	0,00	0,00	14.895.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan	1 Tahun							
369	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/ Bulan	17.751.273.000,00	0,00	0,00	0,00	17.751.273.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang							
370	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	31.952.000,00	0,00	0,00	0,00	31.952.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional perkantoran	1 Tahun							
371	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.528.200,00	0,00	0,00	0,00	7.528.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
372	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	57.075.600,00	0,00	0,00	57.075.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
373	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	96.049.200,00	0,00	0,00	0,00	96.049.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
374	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.648.600,00	0,00	0,00	0,00	5.648.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
376	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	136.921.000,00	0,00	0,00	0,00	136.921.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran	1 Tahun							
377	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
378	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	471.772.020,00	0,00	0,00	0,00	471.772.020,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun							
379	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	1.133.511.380,00	0,00	0,00	0,00	1.133.511.380,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
380	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	3.479.744.000,00	0,00	0,00	3.479.744.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	1.221.011.400,00	0,00	0,00	0,00	1.221.011.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG	100 Persen							
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi PUG dan PPRG	30 Lembaga							
382	2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi									
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	30 Orang	10.834.200,00	0,00	0,00	0,00	10.834.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapatkan sosialisasi, advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuanBidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	10 Lembaga							
383	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi									
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	100 Orang	14.991.500,00	0,00	0,00	0,00	14.991.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan korban kekerasan	12.10 Nilai							
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan	3 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	19.980.100,00	0,00	0,00	0,00	19.980.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen advokasi, pendampingan, dan penguatan jejaring antar lembaga	1 Laporan							
385	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	72.89 Nilai							
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapat advokasi dan pendampingan	5 Lembaga							
386	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	45 Orang	9.203.500,00	0,00	0,00	0,00	9.203.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah	28 Persen							
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Data Gender dan Anak yang valid dan dimanfaatkan	1 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi									
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	9.996.400,00	0,00	0,00	0,00	9.996.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)	75.95 Nilai							
	2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA	20 Lembaga							
388	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi									
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	20 perangkat daerah	10.830.000,00	0,00	0,00	0,00	10.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, KIE, dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	5 Dokumen							
389	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi									
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	200 Orang	650.619.600,00	0,00	0,00	0,00	650.619.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
390	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota									
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	3 Kegiatan	91.146.000,00	0,00	0,00	0,00	91.146.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan	1.32 Nilai							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak	1 Lembaga							
391	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan									
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	20 Orang	9.630.000,00	0,00	0,00	0,00	9.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Sosial									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya	27.14 persen							
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	520 orang							
392	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan									
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	45 Orang	71.891.500,00	0,00	0,00	0,00	71.891.500,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
393	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	45 Orang	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	Insentif Fiskal
394	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang									
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	45 Orang	89.750.000,00	0,00	0,00	0,00	89.750.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
395	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	45 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari									
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	45 Orang	74.406.700,00	0,00	0,00	0,00	74.406.700,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
397	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	45 Orang	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
398	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	45 Orang	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	125 Orang							
399	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	90 Orang	565.000.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000.000,00	Kab. Buleleng, Banjar, Banjar Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Insentif Fiskal
400	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	90 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Buleleng, Banjar, Banjar Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
401	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari									
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	90 Orang	149.580.300,00	0,00	0,00	0,00	149.580.300,00	Kab. Buleleng, Banjar, Banjar Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
402	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	90 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	Kab. Buleleng, Banjar, Banjar Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
403	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan									
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	Kab. Buleleng, Banjar, Banjar Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai							
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional perkantoran	1 tahun							
404	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.837.600,00	0,00	0,00	0,00	9.837.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
405	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	159.954.300,00	0,00	0,00	0,00	159.954.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
406	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	17.428.000,00	0,00	0,00	0,00	17.428.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran	1 Tahun							
407	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	201.100.000,00	0,00	0,00	0,00	201.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
408	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	320.554.520,00	0,00	0,00	0,00	320.554.520,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun							
409	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	273.564.880,00	0,00	0,00	0,00	273.564.880,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
410	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	25.868.300,00	3.069.450.000,00	0,00	0,00	3.095.318.300,00	Kab. Buleleng, Banjar, Banjar Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
411	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.272.400.820,00	0,00	0,00	0,00	1.272.400.820,00	Kab. Buleleng, Banjar, Banjar Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan korban kekerasan	12.10 Nilai							
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan	4 Dokumen							
412	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	101.500.000,00	0,00	0,00	0,00	101.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar	1 Tahun							
413	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	30 Orang	7.680.000,00	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
414	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	10 Layanan	243.150.000,00	0,00	0,00	0,00	243.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan	1.34 Nilai							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga	1 Dokumen							
415	2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	4.499.900,00	0,00	0,00	0,00	4.499.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
416	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan									
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	46 Orang	69.020.000,00	0,00	0,00	0,00	69.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai							
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional perkantoran	1 Tahun							
417	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
418	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0,00	19.052.000,00	0,00	0,00	19.052.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
419	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	15.176.000,00	0,00	0,00	0,00	15.176.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran	1 Tahun							
420	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun							
421	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	160.244.880,00	0,00	0,00	0,00	160.244.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
422	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38.962.940,00	0,00	0,00	0,00	38.962.940,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
423	2.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	348.643.840,00	0,00	0,00	0,00	348.643.840,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata									
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	70 Persen							
2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	32 Orang							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi									
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	32 Orang	336.350.000,00	0,00	0,00	0,00	336.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)	86.80 Nilai							
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen							
425	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.276.000,00	0,00	0,00	0,00	3.276.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
426	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.110.400,00	0,00	0,00	0,00	6.110.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
427	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
428	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.090.600,00	0,00	0,00	0,00	1.090.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
429	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
430	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	12.026.000,00	0,00	0,00	0,00	12.026.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen							
431	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	16.057.700,00	0,00	0,00	16.057.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen							
432	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
433	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	216.753.369,00	0,00	0,00	0,00	216.753.369,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen							
434	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	80.795.128,00	0,00	0,00	0,00	80.795.128,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
435	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	36.015.288,00	0,00	0,00	0,00	36.015.288,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
436	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	285.434.980,00	0,00	0,00	0,00	285.434.980,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3	100 Persen							
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	85 Perusahaan							
437	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan									
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	85 Perusahaan	203.180.000,00	568.320.000,00	0,00	0,00	771.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD, Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja)	86.80 Nilai							
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen							
438	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.400,00	0,00	0,00	0,00	5.000.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
439	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.898.800,00	0,00	0,00	0,00	7.898.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
440	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
441	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.803.500,00	0,00	0,00	0,00	2.803.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen							
442	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
443	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
444	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	102.839.896,00	0,00	0,00	0,00	102.839.896,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen							
445	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	127.182.140,00	0,00	0,00	0,00	127.182.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
446	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
447	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	269.793.040,00	0,00	0,00	0,00	269.793.040,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral									
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	30 Persen							
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	44 Orang							
448	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	44 Dokumen	44.997.600,00	0,00	0,00	0,00	44.997.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	30 Persen							
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitasi bekerja/ berwirausaha	40 Orang							
449	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja									
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	133.117.200,00	0,00	0,00	0,00	133.117.200,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	180 Orang							
450	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)									
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	180 Orang	36.313.800,00	0,00	0,00	0,00	36.313.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	10.44 Persen							
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100 Persen							
451	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	8 Perkara	5.566.400,00	0,00	0,00	0,00	5.566.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan	2 Kep Gub							
452	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)									
			Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	25.775.000,00	0,00	0,00	0,00	25.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
453	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah penetapan UMK	1 Surat Keputusan	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos	100 Persen							
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja	70 Perusahaan							
454	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan									
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	70 Perusahaan	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)	86.80 Nilai							
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselesaikan Tepat Waktu	100 Persen							
455	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/ Bulan	28.299.312.000,00	0,00	0,00	0,00	28.299.312.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen							
456	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	14.994.200,00	0,00	0,00	0,00	14.994.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
457	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	34.968.200,00	5.762.800,00	0,00	0,00	40.731.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	64.800.000,00	0,00	0,00	0,00	64.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
459	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	27.795.100,00	0,00	0,00	0,00	27.795.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
460	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.637.600,00	0,00	0,00	0,00	8.637.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
461	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.025.000,00	0,00	0,00	0,00	5.025.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
462	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	158.220.000,00	0,00	0,00	0,00	158.220.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen							
463	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	83.288.000,00	0,00	0,00	83.288.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen							
464	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
465	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	396.000.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
466	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	626.571.323,00	0,00	0,00	0,00	626.571.323,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen							
467	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	640.495.928,00	0,00	0,00	0,00	640.495.928,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
468	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	170.728.560,00	0,00	0,00	0,00	170.728.560,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
469	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72 Unit	1.107.799.920,00	0,00	0,00	0,00	1.107.799.920,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	62.50 Persen							
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	62.50 Persen							
470	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	58.00 Persen							
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan	15 Dokumen							
471	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut									
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	15 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	70 MW							
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah	4 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi									
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	174.499.500,00	0,00	0,00	0,00	174.499.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD	100 Persen							
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target	100 Persen							
473	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi									
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	24.884.800,00	0,00	0,00	0,00	24.884.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP EI mencapai target	100 Persen							
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	100 Persen							
474	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	1 Dokumen	483.824.320,00	0,00	0,00	0,00	483.824.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	100 Persen							
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	79 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
475	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	427.237.620,00	0,00	0,00	0,00	427.237.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah desa yang mengalami peningkatan PADesa	27 Desa							
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan	4.25 Persen							
476	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	320.543.320,00	0,00	0,00	0,00	320.543.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa cepat berkembang	84.90 Persen							
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	84.90 Persen							
477	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	569.753.420,00	0,00	0,00	0,00	569.753.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
478	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	574.032.600,00	0,00	0,00	0,00	574.032.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
479	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	127.557.000,00	0,00	0,00	0,00	127.557.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	99.53 Persen							
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	100 Persen							
480	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1000 Unit	721.081.660,00	0,00	0,00	0,00	721.081.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
481	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	489.871.360,00	0,00	0,00	0,00	489.871.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
482	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	642.119.220,00	0,00	0,00	0,00	642.119.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
483	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	3.439.183.060,00	0,00	0,00	0,00	3.439.183.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.75 Nilai							
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	0.12 Persen							
484	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
485	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	292.429.020,00	0,00	0,00	0,00	292.429.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 Persen							
486	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/ Bulan	10.194.773.000,00	0,00	0,00	0,00	10.194.773.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
487	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	130.726.820,00	0,00	0,00	0,00	130.726.820,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	12 Bulan							
488	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.763.400,00	0,00	0,00	0,00	7.763.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
489	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	14.480.400,00	599.788.400,00	0,00	0,00	614.268.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
490	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	75.500.000,00	0,00	0,00	0,00	75.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
491	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.767.000,00	0,00	0,00	0,00	7.767.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
492	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
493	2.13.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	14.550.000,00	0,00	0,00	0,00	14.550.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
494	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	363.816.000,00	0,00	0,00	0,00	363.816.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100 Persen							
495	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	207.340.000,00	200.086.000,00	0,00	0,00	407.426.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	182.400.000,00	0,00	0,00	0,00	182.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
497	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	509.691.280,00	0,00	0,00	0,00	509.691.280,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100 Persen							
498	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 Unit	1.323.389.260,00	0,00	0,00	0,00	1.323.389.260,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
499	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	89.660.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	104.660.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan keluarga berencana	4 Sektor							
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali	1351 Orang							
500	2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	332.121.540,00	0,00	0,00	0,00	332.121.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Perhubungan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas layanan angkutan darat	0,86 Rasio							
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Keselamatan Pengguna Jaringan jalan	2 Laporan							
501	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi									
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	341.431.440,00	0,00	0,00	0,00	341.431.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
502	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi									
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	109.140.400,00	0,00	0,00	0,00	109.140.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi yang ditindaklanjuti	13 Laporan							
503	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	8 Laporan	26.957.700,00	0,00	0,00	0,00	26.957.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
504	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	8 Laporan	26.651.400,00	0,00	0,00	0,00	26.651.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan							
505	2.15.02.1.10.0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	156.296.100,00	0,00	0,00	0,00	156.296.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan							
506	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	10 Unit	384.236.120,00	0,00	0,00	0,00	384.236.120,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Aksesibilitas Pelayaran	75 Persen							
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen kajian	1 Dokumen							
507	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	271.047.840,00	600.000.000,00	0,00	0,00	871.047.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase lintasan kereta api yang terbangun	25 Persen							
	2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen							
508	2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian									
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	272.437.140,00	200.000.000,00	0,00	0,00	472.437.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,85 Persen							
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen							
509	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	21.423.600,00	0,00	0,00	0,00	21.423.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
510	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	16.236.300,00	0,00	0,00	0,00	16.236.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen gaji , tunjangan dan administrasi penyediaan perlengkapan kantor	2 Dokumen							
511	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/ Bulan	17.795.646.000,00	0,00	0,00	0,00	17.795.646.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
512	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	19.519.500,00	0,00	0,00	0,00	19.519.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	6 Dokumen							
513	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.489.000,00	0,00	0,00	0,00	6.489.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
514	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.107.800,00	362.096.700,00	0,00	0,00	376.204.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
515	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
516	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.303.300,00	0,00	0,00	0,00	7.303.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
517	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.822.250,00	0,00	0,00	0,00	10.822.250,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
518	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	305.222.000,00	0,00	0,00	0,00	305.222.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	2 Dokumen							
519	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	920.000.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
520	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3 Dokumen							
521	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
522	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
523	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	368.058.860,00	0,00	0,00	0,00	368.058.860,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3 Dokumen							
524	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	733.239.280,00	0,00	0,00	0,00	733.239.280,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
525	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	47.864.400,00	0,00	0,00	0,00	47.864.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
526	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	942.053.500,00	200.000.000,00	0,00	0,00	1.142.053.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		UPTD Pusat Pengendalian LLAJ									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	65 Persen							
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit							
527	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit	566.282.000,00	0,00	0,00	0,00	566.282.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	6 Laporan							
528	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi									
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1.436.172.340,00	124.000.000,00	0,00	0,00	1.560.172.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,85 Persen							
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.850.812,00	0,00	0,00	0,00	3.850.812,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
530	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.546.700,00	76.088.300,00	0,00	0,00	83.635.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
531	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	719.600,00	0,00	0,00	0,00	719.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
532	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	34.136.000,00	0,00	0,00	0,00	34.136.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan							
533	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	666.000,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
534	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
535	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	41.034.940,00	0,00	0,00	0,00	41.034.940,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit							
536	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	195.780.740,00	0,00	0,00	0,00	195.780.740,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
537	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	18.480.000,00	0,00	0,00	0,00	18.480.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	82,5 Persen							
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita	7332 RIT							
538	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Unit	7.346.483.472,00	0,00	0,00	0,00	7.346.483.472,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,85 Persen							
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	1 Tahun							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
539	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	964.400,00	0,00	0,00	0,00	964.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
540	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.026.300,00	50.696.900,00	0,00	0,00	58.723.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
541	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
542	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.850.000,00	0,00	0,00	0,00	9.850.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
543	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.988.000,00	0,00	0,00	0,00	2.988.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
544	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	45.022.000,00	0,00	0,00	0,00	45.022.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kursi yang disediakan	10 Unit							
545	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	9.160.000,00	0,00	0,00	9.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	1 Laporan							
546	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
547	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	32.700.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
548	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	39.122.540,00	0,00	0,00	0,00	39.122.540,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia	24 Unit							
549	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	347.131.840,00	0,00	0,00	0,00	347.131.840,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
550	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	12.420.000,00	0,00	0,00	0,00	12.420.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Perlengkapan Jalan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik	38,58 Persen							
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	387 Unit 760 Unit							
551	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi									
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	387 Unit	1.115.295.070,00	0,00	0,00	0,00	1.115.295.070,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
552	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	760 Unit	575.208.721,00	0,00	0,00	0,00	575.208.721,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,85 Persen							
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen							
553	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.839.600,00	0,00	0,00	0,00	3.839.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
554	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	16.660.000,00	0,00	0,00	0,00	16.660.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	19 Unit							
555	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	0,00	66.969.700,00	0,00	0,00	66.969.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit							
556	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	141.042.440,00	0,00	0,00	0,00	141.042.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
557	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.320.000,00	0,00	0,00	0,00	8.320.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50 Persen							
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	19 Laporan							
558	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional									
			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	19 Laporan	139.567.000,00	0,00	0,00	0,00	139.567.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,85 Persen							
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.928.400,00	63.833.900,00	0,00	0,00	67.762.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
560	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
561	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.548.000,00	0,00	0,00	0,00	1.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
562	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	406.226.400,00	0,00	0,00	0,00	406.226.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan	13 Unit							
563	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	22.875.800,00	0,00	0,00	22.875.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah materai tersedia untuk administrasi perkantoran	150 Lembar							
564	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia	10 Unit							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
565	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	98.500.000,00	0,00	0,00	0,00	98.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
566	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi yang disebarluaskan	93.40 persen							
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	82.00 Indeks							
567	2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	120 Dokumen	956.857.440,00	70.000.000,00	0,00	0,00	1.026.857.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
568	2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	30000 Dokumen	5.359.038.200,00	0,00	0,00	0,00	5.359.038.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
569	2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	96 Dokumen	1.385.259.640,00	0,00	0,00	0,00	1.385.259.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
570	2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	2.537.087.840,00	0,00	0,00	0,00	2.537.087.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
571	2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	4 Dokumen	1.787.360.740,00	50.442.100,00	0,00	0,00	1.837.802.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
572	2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas									
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	20000 Dokumen	335.375.300,00	0,00	0,00	0,00	335.375.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Teknologi Informatika	91,00 Persen							
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	100 Persen							
573	2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	2 Dokumen	1.306.175.700,00	0,00	0,00	0,00	1.306.175.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
574	2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah									
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	922.086.720,00	113.984.461.170,00	0,00	0,00	114.906.547.890,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
575	2.16.03.1.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	11.728.356.240,00	609.000.000,00	0,00	0,00	12.337.356.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DISKOMINFOS)	82.75 Nilai							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 Dokumen							
576	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	18.018.000,00	0,00	0,00	0,00	18.018.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
577	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.139.800,00	0,00	0,00	0,00	5.139.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
578	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	6.518.500,00	0,00	0,00	0,00	6.518.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 Dokumen							
579	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ Bulan	12.985.533.000,00	0,00	0,00	0,00	12.985.533.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
580	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	702.713.000,00	0,00	0,00	0,00	702.713.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 Bulan							
581	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.488.840,00	0,00	0,00	0,00	4.488.840,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	40.007.200,00	0,00	0,00	0,00	40.007.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
583	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	87.500.000,00	0,00	0,00	0,00	87.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
584	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.660.900,00	0,00	0,00	0,00	13.660.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
585	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13505 Dokumen	31.522.200,00	0,00	0,00	0,00	31.522.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
586	2.16.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	[object Object]
587	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	121.329.000,00	0,00	0,00	0,00	121.329.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	3 Paket							
588	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	[object Object]
589	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	[object Object]
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 Bulan							
590	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
591	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
592	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	674 Unit							
593	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	1.386.501.960,00	0,00	0,00	0,00	1.386.501.960,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
594	2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	489 Unit	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
595	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit	99.570.000,00	0,00	0,00	0,00	99.570.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
596	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1.393.874.900,00	0,00	0,00	0,00	1.393.874.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
597	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit	84.480.000,00	0,00	0,00	0,00	84.480.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	4.00 nilai							
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi	11 Sektor							
598	2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	150.743.840,00	0,00	0,00	0,00	150.743.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
599	2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral									
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	164.656.480,00	0,00	0,00	0,00	164.656.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
600	2.20.02.1.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah									
			Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	125.896.880,00	0,00	0,00	0,00	125.896.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Evalaksan	75.00 nilai							
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	29 OPD							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
601	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen	20.399.300,00	16.500.000,00	0,00	0,00	36.899.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
602	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	168.137.340,00	0,00	0,00	0,00	168.137.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
603	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	81.166.900,00	0,00	0,00	0,00	81.166.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
604	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	29 Perangkat Daerah	70.758.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	98.758.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	29 OPD							
605	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	29 Perangkat Daerah	129.095.840,00	0,00	0,00	0,00	129.095.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-	-							
606	2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik									
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	28 Unit	6.668.918.940,00	0,00	0,00	0,00	6.668.918.940,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-							
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-	-							
607	2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah									
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2.817.693.424,00	0,00	0,00	0,00	2.817.693.424,00	Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP	3.00 Persen							
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	10 Unit Usaha							
608	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	10 Unit Usaha	218.410.700,00	0,00	0,00	0,00	218.410.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	1 Unit Usaha							
609	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Unit Usaha	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	7.00 Persen							
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	47 Unit Usaha							
610	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi									
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	47 Unit Usaha	49.999.500,00	0,00	0,00	0,00	49.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	45 Unit Usaha							
611	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	45 Unit Usaha	125.363.880,00	0,00	0,00	0,00	125.363.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	3.20 Persen							
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	146 Unit Usaha							
612	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	76 Unit Usaha	148.408.980,00	0,00	0,00	0,00	148.408.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
613	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	70 Unit Usaha	49.999.900,00	0,00	0,00	0,00	49.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha	6.00 Persen							
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	200 Unit Usaha							
614	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	225 Unit Usaha	939.685.230,00	0,00	0,00	0,00	939.685.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-PK2UKM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
615	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan									
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	100 Orang	49.999.500,00	0,00	0,00	0,00	49.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas	3.00 Persen							
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	125 Unit Usaha							
616	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi									
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	219.328.560,00	0,00	0,00	0,00	219.328.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
617	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM									
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	225 Orang	263.603.800,00	0,00	0,00	0,00	263.603.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-PK2UKM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82.31 Nilai							
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen							
618	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	122.914.420,00	0,00	0,00	0,00	122.914.420,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
619	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.999.600,00	0,00	0,00	0,00	5.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen							
620	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/ Bulan	12.616.431.000,00	0,00	0,00	0,00	12.616.431.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen							
621	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen							
622	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.613.000,00	0,00	0,00	0,00	10.613.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
623	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.403.000,00	0,00	0,00	0,00	41.403.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
624	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
625	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.576.900,00	0,00	0,00	0,00	11.576.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
626	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
627	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	55.893.000,00	0,00	0,00	0,00	55.893.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen							
628	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	133.808.900,00	0,00	0,00	133.808.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen							
629	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
630	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	259.000.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
631	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	904.371.360,00	0,00	0,00	0,00	904.371.360,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen							
632	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	776.574.980,00	0,00	0,00	0,00	776.574.980,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
633	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
634	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	161.951.560,00	0,00	0,00	0,00	161.951.560,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi	25.00 Persen							
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	400 Orang							
635	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2033 Orang	8.009.040.280,00	0,00	0,00	0,00	8.009.040.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-PK2UKM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82.31 Nilai							
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen							
636	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	665.800,00	0,00	0,00	0,00	665.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
637	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.725.900,00	0,00	0,00	0,00	2.725.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
638	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
639	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
640	2.17.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
641	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen							
642	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
643	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	48.500.000,00	0,00	0,00	0,00	48.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
644	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	158.190.060,00	0,00	0,00	0,00	158.190.060,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen							
645	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	94.007.140,00	0,00	0,00	0,00	94.007.140,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
646	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
647	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	79.571.080,00	0,00	0,00	0,00	79.571.080,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)								
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)	12350 Proyek									
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya Produk Hukum Daerah	1 Dokumen									
648	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal											
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]		
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Kajian Peta Potensi dan Peluang Investasi Berbasis Jenis Usaha	2 Dokumen									
649	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi											
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	2 Dokumen	480.968.560,00	0,00	0,00	0,00	480.968.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor Yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali	33 Persen									
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Publikasi Promosi Penanaman Modal	2 Dokumen									
650	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi											
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	285.448.560,00	0,00	0,00	0,00	285.448.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
651	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 persen							
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang Terbit sesuai Kewenangan Provinsi	100 persen							
652	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	400 Pelaku Usaha	458.901.400,00	0,00	0,00	0,00	458.901.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang dilayani sesuai Kewenangan Provinsi	100 Persen							
653	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	155.186.420,00	0,00	0,00	0,00	155.186.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	11,5 Triliun							
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pemenuhan Komitmen Penanaman Modal	91 Persen							
654	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal									
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan usaha	297.725.000,00	0,00	0,00	0,00	297.725.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
655	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya									
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	321 Kegiatan usaha	299.590.560,00	0,00	0,00	0,00	299.590.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
656	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	325 Pelaku Usaha	545.834.000,00	0,00	0,00	0,00	545.834.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	100 Persen							
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi	2 Dokumen							
657	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	106.084.280,00	0,00	0,00	0,00	106.084.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78.5 Nilai							
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	5 Dokumen							
658	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	44 Dokumen							
659	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ Bulan	12.359.361.000,00	0,00	0,00	0,00	12.359.361.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Diklat	40 Orang							
660	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen							
661	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.132.600,00	0,00	0,00	0,00	54.132.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
662	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	72.500.000,00	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
663	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.014.600,00	0,00	0,00	0,00	15.014.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
664	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	214.048.000,00	0,00	0,00	0,00	214.048.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	10 Unit							
665	2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	1.076.000,00	0,00	0,00	1.076.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen							
666	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.472.000,00	0,00	0,00	0,00	2.472.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
667	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
668	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.239.007.080,00	0,00	0,00	0,00	1.239.007.080,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	20 Unit							
669	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	549.440.700,00	0,00	0,00	0,00	549.440.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
670	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	39.140.000,00	0,00	0,00	0,00	39.140.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	X	NON URUSAN									
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78.5 Nilai							
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen							
671	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.599.100,00	0,00	0,00	0,00	12.599.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kebudayaan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5 Persen							
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan serta Terbinanya Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	2040 Objek							
672	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	20 Objek	550.815.020,00	0,00	0,00	0,00	550.815.020,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
673	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2000 Orang	27.798.202.320,00	0,00	0,00	0,00	27.798.202.320,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Penghargaan pada Objek/ Lembaga yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan	311 Objek/ Sertifikat							
674	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya									
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	300 Objek	8.692.175.380,00	0,00	0,00	0,00	8.692.175.380,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
675	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan									
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	11 Sertifikat	1.028.819.040,00	0,00	0,00	0,00	1.028.819.040,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbinanya Lembaga Adat Lintas Kabupaten/Kota	184 Organisa/lembaga							
676	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	184 Unit	17.594.810.000,00	0,00	0,00	0,00	17.594.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5 Persen							
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional serta tata kelola Lembaga Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas daerah Kabupaten/Kota	250 Orang/ Sertifikat							
677	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	135 Orang	1.115.790.920,00	0,00	0,00	0,00	1.115.790.920,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
678	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	200 Sertifikat	252.121.840,00	0,00	0,00	0,00	252.121.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5 Persen							
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Tersedianya dan terlaksananya Data dan Dokumen Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	2 Dokumen							
679	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah									
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	2 Dokumen	47.497.400,00	0,00	0,00	0,00	47.497.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang lestari dan terkelola	0,2 Persen							
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terinventarisasi dan ditetapkan nya Cagar Budaya Tingkat Provinsi	5 Objek							
680	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	281.357.100,00	0,00	0,00	0,00	281.357.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Dikelolanya Cagar Budaya Peringkat Provinsi	211 Objek							
681	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	1 Objek	152.581.820,00	0,00	0,00	0,00	152.581.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
682	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	30 Objek	48.347.000,00	0,00	0,00	0,00	48.347.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 Objek	25.837.000,00	0,00	0,00	0,00	25.837.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
684	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya									
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	180 Orang	37.433.400,00	0,00	0,00	0,00	37.433.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Poin							
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	10 Dokumen/Laporan							
685	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	139.447.020,00	0,00	0,00	0,00	139.447.020,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
686	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.938.000,00	0,00	0,00	0,00	4.938.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Keuangan	100 Persen							
687	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/Bulan	21.025.047.000,00	0,00	0,00	0,00	21.025.047.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
688	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	579.667.900,00	0,00	0,00	0,00	579.667.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	2.22.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 Dokumen	2.651.000,00	0,00	0,00	0,00	2.651.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100 Persen							
690	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30.323.200,00	0,00	0,00	0,00	30.323.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
691	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
692	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
693	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
694	2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
695	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	111.550.000,00	0,00	0,00	0,00	111.550.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen							
696	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.496.000,00	0,00	0,00	0,00	5.496.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
697	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
698	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	101.000.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
699	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	704.475.328,00	5.000.000,00	0,00	0,00	709.475.328,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
700	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	906.589.700,00	0,00	0,00	0,00	906.589.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
701	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	24.215.000,00	0,00	0,00	0,00	24.215.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
702	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.455.828.480,00	0,00	0,00	0,00	1.455.828.480,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Taman Budaya									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5 Persen							
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan serta Terbinanya Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	2000 Orang							
703	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2000 Orang	1.430.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
704	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	4 Unit	570.000.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Poin							
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen							
705	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
706	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	56.320.700,00	0,00	0,00	0,00	56.320.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
707	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	5.460.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
708	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.340.000,00	0,00	0,00	0,00	8.340.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
709	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	40.998.000,00	0,00	0,00	0,00	40.998.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen							
710	2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	43.144.000,00	0,00	0,00	0,00	43.144.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen							
711	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	896.000.000,00	0,00	0,00	0,00	896.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
712	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	90.088.000,00	0,00	0,00	0,00	90.088.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
713	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.035.773.440,00	0,00	0,00	0,00	1.035.773.440,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
714	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	76.600.000,00	0,00	0,00	0,00	76.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
715	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	19.990.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
716	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	1.225.828.480,00	0,00	0,00	0,00	1.225.828.480,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Museum Bali									
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Museum Bali	75 Persen							
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum Bali sebagai tempat informasi Budaya Bali	25000 Orang							
717	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu									
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	700 Unit	712.879.800,00	0,00	0,00	0,00	712.879.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
718	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum									
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10 Unit	1.137.220.200,00	0,00	0,00	0,00	1.137.220.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
719	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	4 Unit	149.900.000,00	0,00	0,00	0,00	149.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Poin							
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen							
720	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	70.292.200,00	0,00	0,00	0,00	70.292.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
721	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	106.050.000,00	0,00	0,00	0,00	106.050.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
722	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
723	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.768.500,00	0,00	0,00	0,00	5.768.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
724	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.714.000,00	0,00	0,00	0,00	14.714.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen							
725	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	12.402.500,00	0,00	0,00	0,00	12.402.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen							
726	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
727	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	206.850.000,00	0,00	0,00	0,00	206.850.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
728	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	47.528.500,00	0,00	0,00	0,00	47.528.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
729	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.720.684.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720.684.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen							
730	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	74.990.000,00	0,00	0,00	0,00	74.990.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
731	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	39.950.000,00	0,00	0,00	0,00	39.950.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
732	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan Pengunjung Museum	75 Persen							
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Meningkatnya Jumlah kunjungan masyarakat pada UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	2500 Orang							
733	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu									
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	33 Unit	600.061.300,00	0,00	0,00	0,00	600.061.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
734	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum									
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10 Unit	1.125.106.100,00	0,00	0,00	0,00	1.125.106.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
735	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	8 Unit	274.832.600,00	0,00	0,00	0,00	274.832.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Poin							
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen							
736	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.999.500,00	0,00	0,00	0,00	34.999.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
737	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	42.483.140,00	0,00	0,00	0,00	42.483.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
738	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	43.475.000,00	0,00	0,00	0,00	43.475.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
739	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
740	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.004.000,00	0,00	0,00	0,00	5.004.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
741	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	14.672.000,00	0,00	0,00	0,00	14.672.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai"	100 Persen							
742	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen							
743	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
744	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
745	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	49.970.000,00	0,00	0,00	0,00	49.970.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
746	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.774.859.668,00	0,00	0,00	0,00	2.774.859.668,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen							
747	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	148.930.000,00	0,00	0,00	0,00	148.930.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
748	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	14.760.000,00	0,00	0,00	0,00	14.760.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
749	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pemajuan Masyarakat Adat									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	2.22.09	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Indeks Membangun Desa Adat	0.7090 Nilai							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.22.09.8.01	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina	600 Desa Adat							
750	2.22.09.8.01.0001	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat									
			Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya	600 Desa	465.367.664.716,00	0,00	0,00	0,00	465.367.664.716,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
751	2.22.09.8.01.0002	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat									
			Jumlah Produk Hukum Desa Adat	300 Dokumen	431.226.420,00	0,00	0,00	0,00	431.226.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.09.8.02	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	245 Dokumen							
752	2.22.09.8.02.0001	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat									
			Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	200 Desa	198.152.000,00	0,00	0,00	0,00	198.152.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
753	2.22.09.8.02.0002	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat									
			Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	50 Desa	462.349.340,00	0,00	0,00	0,00	462.349.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.09.8.03	Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah laporan hasil koordinasi parahyangan, pawongan dan palemahan	4 Dokumen							
754	2.22.09.8.03.0003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	4 Laporan	379.746.420,00	0,00	0,00	0,00	379.746.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas PMA)	80.80 Nilai							
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	19.660.200,00	0,00	0,00	0,00	19.660.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
756	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.564.600,00	0,00	0,00	0,00	6.564.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di Proses	52 Dokumen							
757	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/ Bulan	8.853.583.000,00	0,00	0,00	0,00	8.853.583.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang di proses	847 Dokumen							
758	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.007.200,00	0,00	0,00	0,00	9.007.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
759	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34.345.800,00	0,00	0,00	0,00	34.345.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
760	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	29.110.000,00	0,00	0,00	0,00	29.110.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
761	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	422.872.000,00	0,00	0,00	0,00	422.872.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai	15 Unit							
762	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai	35 Laporan							
763	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	305.940.500,00	0,00	0,00	0,00	305.940.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	35 Laporan							
764	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	756.597.240,00	0,00	0,00	0,00	756.597.240,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
765	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	1.528.436.760,00	0,00	0,00	0,00	1.528.436.760,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kelautan dan Perikanan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	44 Persen							
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	102575.33 Ha							
766	3.25.02.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
			Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	96.902.200,00	0,00	0,00	0,00	96.902.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
767	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat									
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	57862.83 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
768	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku Usaha yang mengajukan verifikasi teknis kesesuaian ruang	15 Pelaku Usaha							
769	3.25.02.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi									
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	4 Kelompok							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
770	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	563.141.320,00	0,00	0,00	0,00	563.141.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
771	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
772	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
			Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
773	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan									
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 Persen							
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	103696.10 Ton							
774	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
775	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap									
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	4 Unit	416.115.200,00	0,00	0,00	0,00	416.115.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	8000 Ton							
776	3.25.03.1.09.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT									
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	30 Rekomendasi	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 Persen							
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang terbit	150 Sertifikat							
777	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan									
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	32645.10 Ton							
778	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut									
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	45.240.000,00	0,00	0,00	0,00	45.240.000,00	Kab. Jembrana, Melaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
779	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	6 Dokumen	8.760.000,00	0,00	0,00	0,00	8.760.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	2 Persen							
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	30 Pelaku Usaha							
780	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	67.442.140,00	0,00	0,00	0,00	67.442.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
781	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
782	3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
783	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)									
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	40 Kelompok	494.702.800,00	0,00	0,00	0,00	494.702.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan kepada unit usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan	20 Unit Usaha							
784	3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi olahan hasil perikanan Tingkat Konsumsi Ikan	2 Persen 48.68 Kg/Ka pita/Tahun							
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha	25 Unit Usaha							
785	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	25 Unit Usaha							
786	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar									
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	25 Unit Usaha	390.987.280,00	0,00	0,00	0,00	390.987.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai							
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen							
787	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
788	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
789	3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
790	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
791	3.25.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	60 Dokumen							
792	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/Bulan	20.110.224.000,00	0,00	0,00	0,00	20.110.224.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen							
793	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.542.400,00	0,00	0,00	0,00	10.542.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
794	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	0,00	636.724.000,00	0,00	0,00	636.724.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
795	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	169.767.300,00	0,00	0,00	0,00	169.767.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
796	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	18.477.400,00	0,00	0,00	0,00	18.477.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
797	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	127.120.000,00	0,00	0,00	0,00	127.120.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen							
798	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3.000.000,00	155.284.600,00	0,00	0,00	158.284.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen							
799	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
800	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	126.536.000,00	0,00	0,00	0,00	126.536.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen							
801	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	789.220.480,00	0,00	0,00	0,00	789.220.480,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
802	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	665.579.652,00	0,00	0,00	0,00	665.579.652,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
803	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	528.730.000,00	0,00	0,00	0,00	528.730.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	X	NON URUSAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai							
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen							
804	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 Persen							
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	1250000 Ekor							
805	3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	1.423.299.450,00	0,00	0,00	0,00	1.423.299.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
806	3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	784.670.619,00	44.889.000,00	0,00	0,00	829.559.619,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai							
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen							
807	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.274.000,00	0,00	0,00	0,00	5.274.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
808	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.293.000,00	0,00	0,00	0,00	5.293.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
809	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
810	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen							
811	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	30.795.800,00	0,00	0,00	30.795.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen							
812	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
813	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen							
814	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	114.897.140,00	0,00	0,00	0,00	114.897.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
815	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	263.101.260,00	0,00	0,00	0,00	263.101.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
816	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2 Persen							
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	2500 Reko mendasi							
817	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar									
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	222.799.371,00	0,00	0,00	0,00	222.799.371,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
818	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing									
			Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	7 Unit Usaha	29.994.000,00	0,00	0,00	0,00	29.994.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai							
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen							
819	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
820	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.633.200,00	0,00	0,00	0,00	20.633.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
821	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
822	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen							
823	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	49.316.100,00	0,00	0,00	49.316.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen							
824	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
825	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	108.600.000,00	0,00	0,00	0,00	108.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
826	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	117.668.640,00	0,00	0,00	0,00	117.668.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
827	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	50.260.500,00	0,00	0,00	0,00	50.260.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
828	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.633.480,00	0,00	0,00	0,00	500.633.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
829	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi persen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	71 Persen							
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	4 Kawasan							
830	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	44712.5 Ha	101.190.000,00	615.500.000,00	0,00	0,00	716.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
831	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai							
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen							
832	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.188.600,00	0,00	0,00	0,00	5.188.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
833	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.967.100,00	0,00	0,00	0,00	4.967.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
834	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.998.100,00	0,00	0,00	0,00	1.998.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen							
835	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	107.115.400,00	0,00	0,00	107.115.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen							
836	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
837	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen							
838	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	151.029.000,00	0,00	0,00	0,00	151.029.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
839	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	944.371.360,00	0,00	0,00	0,00	944.371.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
840	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	X	NON URUSAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai							
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen							
841	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.170.000,00	0,00	0,00	0,00	38.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelabuhan Perikanan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 Persen							
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	8000 Ton							
842	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	50 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
843	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan									
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan	55.899.200,00	0,00	0,00	0,00	55.899.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai							
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen							
844	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
845	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	19.801.600,00	0,00	0,00	0,00	19.801.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
846	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
847	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen							
848	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	93.865.900,00	0,00	0,00	93.865.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen							
849	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
850	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen							
851	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	107.552.000,00	0,00	0,00	0,00	107.552.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
852	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	97.682.140,00	0,00	0,00	0,00	97.682.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
853	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Dinas Pariwisata									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-							
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	-	-							
854	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi									
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	1 Lokasi	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Buleleng, Sukasada, Ambengan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi									
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1 Dokumen	42.885.100,00	0,00	0,00	0,00	42.885.100,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-	-							
856	3.26.02.1.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi									
			Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	31.802.900,00	0,00	0,00	0,00	31.802.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-							
857	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	380.592.580,00	0,00	0,00	0,00	380.592.580,00	Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang memperoleh standar	25 Usaha							
858	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)									
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	10 Unit Usaha	15.346.700,00	0,00	0,00	0,00	15.346.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
859	3.26.02.1.04.0013	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata									
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	9 Laporan	98.427.180,00	0,00	0,00	0,00	98.427.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	12,50 Persen							
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	2800000 Orang							
860	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri									
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	162.264.020,00	0,00	0,00	0,00	162.264.020,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
861	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata									
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	140.866.120,00	0,00	0,00	0,00	140.866.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
862	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri									
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	157.567.720,00	0,00	0,00	0,00	157.567.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-							
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	-	-							
863	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	45 Laporan	113.164.780,00	0,00	0,00	0,00	113.164.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-							
864	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah									
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	82.131.540,00	0,00	0,00	0,00	82.131.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM Ekonomi Kreatif yang bersertifikat pelatihan	46 Persen							
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan	230 Orang							
865	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	35 Orang	86.982.140,00	0,00	0,00	0,00	86.982.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
866	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata									
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	100 Orang	153.675.620,00	0,00	0,00	0,00	153.675.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
867	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif									
			Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	20 Orang	192.678.160,00	0,00	0,00	0,00	192.678.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
868	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	138.001.420,00	0,00	0,00	0,00	138.001.420,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
869	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	[object Object]
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan	80 Dokumen							
870	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	10.708.603.257,00	0,00	0,00	0,00	10.708.603.257,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
871	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.484.700,00	0,00	0,00	0,00	10.484.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
872	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.529.600,00	347.957.700,00	0,00	0,00	381.487.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
873	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	67.500.000,00	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
874	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.942.200,00	0,00	0,00	0,00	9.942.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
875	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	[object Object]
876	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	175.295.000,00	0,00	0,00	0,00	175.295.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
877	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	[object Object]
878	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	93.462.000,00	0,00	0,00	0,00	93.462.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
879	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	1.241.603.560,00	0,00	0,00	0,00	1.241.603.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
880	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	512.492.000,00	0,00	0,00	0,00	512.492.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
881	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	[object Object]
882	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	18.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Informasi Harga Pangan Yang Terpublikasi	89 Persen							
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelompok yang menerapkan SOP mutu pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	16 Kelompok							
883	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	547.694.020,00	0,00	0,00	0,00	547.694.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2.675 kkal/kapita/hari							
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kerawanan pangan	1 Dokumen							
884	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota									
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	162.888.060,00	0,00	0,00	0,00	162.888.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Cadangan Pangan Daerah	1 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
885	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	6.410.759.820,00	0,00	0,00	0,00	6.410.759.820,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	95,8 Persen							
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diuji	1 Dokumen							
886	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan									
			Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	1 Dokumen	97.783.980,00	0,00	0,00	0,00	97.783.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Penyaluran Sarana Pertanian	90 Persen							
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
887	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian									
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	2.829.064.060,00	0,00	0,00	0,00	2.829.064.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Peningkatan Target Areal Sasaran Komoditas Pertanian	3 Laporan							
888	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan									
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	3 laporan	2.203.326.020,00	0,00	0,00	0,00	2.203.326.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Angka Kelahiran Ternak Unggulan Daerah	60000 Ekor							
889	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	2.967.980.400,00	0,00	0,00	0,00	2.967.980.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian	15 Persen							
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung Pertanian	2 Jenis							
890	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian									
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1.098.079.220,00	0,00	0,00	0,00	1.098.079.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
891	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	248.158.900,00	0,00	0,00	0,00	248.158.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	5 Persen							
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah HPR yang mendapatkan pelayanan vaksinasi	119380 Ekor							
892	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	1.459.968.560,00	0,00	0,00	0,00	1.459.968.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah pengawasan Ante Mortem dan Post Mortem	8 RPH							
893	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya									
			Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	3 Kasus	47.882.140,00	0,00	0,00	0,00	47.882.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani Berbasis Kawasan dan Produk Unggulan	40 Persen							
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP dan Kelompok Tani Yang Terbina	102 Kelompok Tani / Unit							
894	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani									
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	102 Kelompok	166.928.560,00	0,00	0,00	0,00	166.928.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.50 Nilai							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen							
895	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	326.317.920,00	0,00	0,00	0,00	326.317.920,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
896	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	332.292.320,00	0,00	0,00	0,00	332.292.320,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen							
897	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	275 Orang/ Bulan	42.879.400.000,00	0,00	0,00	0,00	42.879.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
898	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	399.217.300,00	0,00	0,00	0,00	399.217.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun							
899	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.575.000,00	0,00	0,00	0,00	13.575.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
900	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.848.000,00	28.437.300,00	0,00	0,00	52.285.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
901	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
902	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
903	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	13.884.000,00	0,00	0,00	0,00	13.884.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan							
904	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	318.000.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
905	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	318.655.720,00	0,00	0,00	0,00	318.655.720,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
906	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	58 Unit	1.609.754.960,00	0,00	0,00	0,00	1.609.754.960,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
907	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	771.642.800,00	0,00	0,00	0,00	771.642.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
908	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	380 Unit	204.822.200,00	0,00	0,00	0,00	204.822.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Produk Bersertifikat Organik Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	0,87 Persen 95,8 Persen							
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Yang Tersertifikasi dan Teregistrasi	20 Produk							
909	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan									
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	8 Sertifikat	460.769.620,00	0,00	0,00	0,00	460.769.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
910	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	12 Dokumen	187.761.860,00	0,00	0,00	0,00	187.761.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,50 Nilai							
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun							
911	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.180.500,00	0,00	0,00	0,00	4.180.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
912	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.967.200,00	0,00	0,00	0,00	14.967.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
913	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.884.800,00	0,00	0,00	0,00	32.884.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
914	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	139.230.000,00	0,00	0,00	0,00	139.230.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
915	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	117.988.120,00	0,00	0,00	0,00	117.988.120,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
916	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	178.117.290,00	0,00	0,00	0,00	178.117.290,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
917	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	80.364.280,00	0,00	0,00	0,00	80.364.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
918	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	73 Unit	39.340.000,00	0,00	0,00	0,00	39.340.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	5 Persen							
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha PAH dan PSAT yang diuji Jumlah Unit Usaha PAH dan PSAT yang diuji	1000 Unit 75 Dokumen							
919	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit									
			Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1000 Unit	292.988.820,00	0,00	0,00	0,00	292.988.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
920	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner									
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	75 Dokumen	337.285.350,00	0,00	0,00	0,00	337.285.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Terkendalnya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	82.91 Persen							
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	9 Kabupaten/Kota							
921	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	4 Ha	541.631.980,00	0,00	0,00	0,00	541.631.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
922	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2 Ha	668.575.880,00	0,00	0,00	0,00	668.575.880,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
923	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan									
			Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	403.331.800,00	0,00	0,00	0,00	403.331.800,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.50 Nilai							
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun							
924	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.227.000,00	0,00	0,00	0,00	1.227.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
925	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.548.200,00	0,00	0,00	0,00	6.548.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
926	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
927	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	149.360.000,00	0,00	0,00	0,00	149.360.000,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
928	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	191.776.000,00	0,00	0,00	0,00	191.776.000,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
929	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	78 Unit	195.541.420,00	0,00	0,00	0,00	195.541.420,00	Kab. Buleleng, Seririt, Seririt Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
930	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	683.278.520,00	0,00	0,00	0,00	683.278.520,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
931	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	148 Unit	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	2.910.000,00	Kab. Gianyar, Sukawati, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	0,81 Persen							
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	100000 Dosis							
932	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 laporan	2.240.390.545,00	0,00	0,00	0,00	2.240.390.545,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.50 Nilai							
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun							
933	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.587.400,00	0,00	0,00	0,00	12.587.400,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
934	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.055.736,00	0,00	0,00	0,00	16.055.736,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
935	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
936	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.200.000,00	0,00	0,00	0,00	49.200.000,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
937	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	274.125.480,00	0,00	0,00	0,00	274.125.480,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
938	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	208.647.620,00	0,00	0,00	0,00	208.647.620,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
939	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	306.457.120,00	0,00	0,00	0,00	306.457.120,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
940	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	0,60 Persen 0,60 Persen 0,60 Persen							
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3 Jenis							
941	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih									
			Jumlah Sertifikat Benih	75 Sertifikat	368.616.260,00	0,00	0,00	0,00	368.616.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
942	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan									
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	97 laporan	374.666.620,00	10.000.000,00	0,00	0,00	384.666.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,50 Nilai							
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun							
943	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.406.400,00	0,00	0,00	0,00	1.406.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
944	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.348.200,00	0,00	0,00	0,00	3.348.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
945	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
946	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	77.609.000,00	0,00	0,00	0,00	77.609.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
947	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	76.056.180,00	0,00	0,00	0,00	76.056.180,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
948	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33 Unit	107.717.140,00	0,00	0,00	0,00	107.717.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
949	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	40.182.140,00	0,00	0,00	0,00	40.182.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
950	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	0,60 Persen 0,60 Persen 0,60 Persen							
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Penyediaan Benih / Bibit Hortikultura Bermutu Berbentuk Batang Jumlah Penyediaan Benih / Bibit Hortikultura Bermutu Berbentuk Umbi Jumlah Penyediaan Benih Perkebunan Bermutu Berbentuk Biji Jumlah Penyediaan Benih Tanaman Pangan Bermutu Berbentuk Biji/Benih	5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan							
951	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang									
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	44.000 Batang	685.701.640,00	0,00	0,00	0,00	685.701.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
952	3.27.02.1.02.0011	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji									
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	900.000 Gram	709.591.320,00	0,00	0,00	0,00	709.591.320,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
953	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih									
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	3 Ton	430.102.060,00	0,00	0,00	0,00	430.102.060,00	Kab. Buleleng, Gerokgak, Banyupoh Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
954	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi									
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	0,75 Ton	275.398.140,00	0,00	0,00	0,00	275.398.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada	1 Laporan							
955	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme									
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,50 Nilai							
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun							
956	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.575.900,00	0,00	0,00	0,00	1.575.900,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
957	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.674.000,00	0,00	0,00	0,00	4.674.000,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
958	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.998.000,00	0,00	0,00	0,00	29.998.000,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
959	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	105.389.028,00	0,00	0,00	0,00	105.389.028,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
960	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	113.868.820,00	0,00	0,00	0,00	113.868.820,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
961	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	127.384.280,00	0,00	0,00	0,00	127.384.280,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
962	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	165.522.140,00	2.527.233.000,00	0,00	0,00	2.692.755.140,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
963	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup									
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik	100 Persen							
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi yang dilaksanakan	100 Persen							
964	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	114.224.800,00	0,00	0,00	0,00	114.224.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi yang dilaksanakan	100 Persen							
965	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD									
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	206.546.380,00	0,00	0,00	0,00	206.546.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air laut Persentase Penurunan Emisi GRK Indeks kualitas udara Indeks kualitas air	69.90 Nilai 12.37 Persen 88.59 Nilai 63.05 Nilai							
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	100 Persen							
966	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	32.999.400,00	0,00	0,00	0,00	32.999.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
967	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	288.950.900,00	0,00	0,00	0,00	288.950.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100 Persen							
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi yang disusun	100 Persen							
968	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	99.556.000,00	0,00	0,00	0,00	99.556.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan	68 Persen							
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	100 Persen							
969	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10 Badan Usaha	14.114.700,00	0,00	0,00	0,00	14.114.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pelaksanaan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan MHA terkait PPLH	100 Persen							
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang dilaksanakan	100 Persen							
970	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH									
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	19.267.800,00	0,00	0,00	0,00	19.267.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	71 Persen 28 Persen							
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa Adat/Desa/Kelurahan yang dibina dan dimonitoring dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dan dalam tata laksana pengelolaan limbah B3	9 Kab/Kota							
971	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup									
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	275.346.020,00	0,00	0,00	0,00	275.346.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	30 Persen							
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan penilaian masyarakat/lembaga/pendidikan dalam PPLH	100 Persen							
972	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20 Entitas	34.710.800,00	0,00	0,00	0,00	34.710.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan	100 Persen							
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang teregistrasi	100 Persen							
973	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi									
			Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	22.404.300,00	0,00	0,00	0,00	22.404.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3.06 Persen							
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	100 Persen							
974	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	184.334.720,00	0,00	0,00	0,00	184.334.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan kelas kelompok	2.82 Persen							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	100 Persen							
975	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan									
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	25 Orang	52.362.000,00	0,00	0,00	0,00	52.362.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan Indeks Kualitas Lahan	6.61 Persen 41.66 Nilai							
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Persen							
976	3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS									
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	70.961.240,00	0,00	0,00	0,00	70.961.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)	A Nilai							
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasae Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100 Persen							
977	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	35.899.600,00	0,00	0,00	0,00	35.899.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100 Persen							
978	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang/ Bulan	35.243.812.000,00	0,00	0,00	0,00	35.243.812.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
979	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	41.600.000,00	0,00	0,00	0,00	41.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100 Persen							
980	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.294.100,00	0,00	0,00	0,00	16.294.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
981	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.940.900,00	0,00	0,00	0,00	45.940.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
982	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	92.500.000,00	0,00	0,00	0,00	92.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
983	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.680.900,00	0,00	0,00	0,00	14.680.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
984	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	61.950.000,00	0,00	0,00	0,00	61.950.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
985	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	178.336.000,00	0,00	0,00	0,00	178.336.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100 Persen							
986	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	35.043.300,00	264.978.300,00	0,00	0,00	300.021.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan	100 Persen							
987	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	172.500.000,00	0,00	0,00	0,00	172.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
988	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	375.908.080,00	0,00	0,00	0,00	375.908.080,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100 Persen							
989	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	1.048.063.600,00	0,00	0,00	0,00	1.048.063.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
990	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	362.925.000,00	1.118.405.000,00	0,00	0,00	1.481.330.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
991	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	567.317.820,00	0,00	0,00	0,00	567.317.820,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara									
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
3.28.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Utara)	A Nilai							
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen							
992	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.058.300,00	0,00	0,00	0,00	3.058.300,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
993	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.685.900,00	0,00	0,00	0,00	6.685.900,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
994	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
995	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12.960.000,00	0,00	0,00	0,00	12.960.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen							
996	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
997	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	39.610.340,00	0,00	0,00	0,00	39.610.340,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen							
998	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	149.569.640,00	0,00	0,00	0,00	149.569.640,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
999	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	380.000.000,00	0,00	0,00	380.000.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1000	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	685.788.520,00	0,00	0,00	0,00	685.788.520,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Timur)	A Nilai							
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen							
1001	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.975.600,00	0,00	0,00	0,00	2.975.600,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1002	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.832.700,00	0,00	0,00	0,00	12.832.700,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1003	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.250.000,00	0,00	0,00	0,00	35.250.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1004	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.580.200,00	0,00	0,00	0,00	3.580.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen							
1005	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	36.318.500,00	0,00	0,00	36.318.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen							
1006	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1007	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40.143.340,00	0,00	0,00	0,00	40.143.340,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen							
1008	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	485.247.120,00	0,00	0,00	0,00	485.247.120,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1009	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	120.900.000,00	569.100.000,00	0,00	0,00	690.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1010	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	9.980.000,00	0,00	0,00	0,00	9.980.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Selatan)	A Nilai							
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen							
1011	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1012	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.748.500,00	0,00	0,00	0,00	12.748.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1013	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1014	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.728.100,00	0,00	0,00	0,00	2.728.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1015	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1016	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	18.720.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen							
1017	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1018	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	118.398.720,00	0,00	0,00	0,00	118.398.720,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen							
1019	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	256.369.940,00	0,00	0,00	0,00	256.369.940,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1020	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	176.827.910,00	0,00	0,00	176.827.910,00	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1021	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Barat)	A Nilai							
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen							
1022	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.989.200,00	0,00	0,00	0,00	2.989.200,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1023	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.299.400,00	0,00	0,00	0,00	10.299.400,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1024	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1025	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.383.600,00	0,00	0,00	0,00	2.383.600,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1026	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen							
1027	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	22.800.000,00	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1028	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40.085.940,00	0,00	0,00	0,00	40.085.940,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen							
1029	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	175.895.000,00	0,00	0,00	0,00	175.895.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1030	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	58.053.050,00	427.489.350,00	0,00	0,00	485.542.400,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1031	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	84.534.280,00	0,00	0,00	0,00	84.534.280,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Tahura Ngurah Rai)	A Nilai							
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD Tahura Ngurah Rai	100 Persen							
1032	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.410.400,00	0,00	0,00	0,00	2.410.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1033	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.202.600,00	0,00	0,00	0,00	11.202.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1034	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1035	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.474.600,00	0,00	0,00	0,00	2.474.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai	100 Persen							
1036	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	226.736.440,00	0,00	0,00	0,00	226.736.440,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai	100 Persen							
1037	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	126.878.000,00	0,00	0,00	0,00	126.878.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1038	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	15.580.000,00	0,00	0,00	0,00	15.580.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	94.46 Persen							
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Kompetensi Laboratorium Menuju Akreditasi	26 Persen							
1039	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi									
			Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	59.962.307,00	0,00	0,00	0,00	59.962.307,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)	A Nilai							
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Laboratorium LH	100 Persen							
1040	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.995.500,00	0,00	0,00	0,00	7.995.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1041	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.999.900,00	0,00	0,00	0,00	1.999.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH	100 Persen							
1042	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.644.500,00	79.295.850,00	0,00	0,00	99.940.350,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH	100 Persen							
1043	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	215.699.466,00	0,00	0,00	0,00	215.699.466,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengelolaan Sampah									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100 Persen							
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Penanganan Sampah di TPA Regional yang terlaksana	100 Persen							
1044	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional									
			Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	1 Unit	4.132.670.988,00	93.000.000,00	0,00	0,00	4.225.670.988,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Pengelolaan Sampah)	A Nilai							
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Pengelolaan Sampah	100 Persen							
1045	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.721.000,00	0,00	0,00	0,00	7.721.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1046	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.435.800,00	0,00	0,00	0,00	14.435.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1047	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1048	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.013.100,00	0,00	0,00	0,00	4.013.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1049	2.11.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah	100 Persen							
1050	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	71.487.100,00	0,00	0,00	71.487.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah	100 Persen							
1051	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	323.737.840,00	0,00	0,00	0,00	323.737.840,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1052	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	119.080.000,00	0,00	0,00	0,00	119.080.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00 Indeks							
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor dan Impor yang di Bina	75 Pelaku Usaha							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1053	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA									
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	14000 Dokumen	322.387.120,00	0,00	0,00	0,00	322.387.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	1 Pasar							
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang dibina	2 Pasar							
1054	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	2 Laporan	111.426.100,00	0,00	0,00	0,00	111.426.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang Pokok	<7 Persen							
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	12 Kali							
1055	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	49.213.800,00	0,00	0,00	0,00	49.213.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	55 Persen							
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat akses pasarnya	10 Pelaku Usaha							
1056	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	25 Pelaku Usaha	49.991.600,00	0,00	0,00	0,00	49.991.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	49,70 Indeks							
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Konsumen yang Diproses	100 %							
1057	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen									
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	456.000.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1058	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen									
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	3 LPKSM	42.711.340,00	0,00	0,00	0,00	42.711.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku usaha yang menerapkan Tertib Niaga Persentase Produk yang sesuai dengan ketentuan	50 % 50 %							
1059	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	45 Laporan	111.874.080,00	0,00	0,00	0,00	111.874.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	30 Persen							
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Toko yang memasarkan produk lokal Bali	100 Toko							
1060	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer	5 Laporan	272.598.080,00	0,00	0,00	0,00	272.598.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)	82,40							
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen							
1061	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	64.854.000,00	0,00	0,00	0,00	64.854.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan							
1062	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/ Bulan	14.592.978.000,00	0,00	0,00	0,00	14.592.978.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Sub Kegiatan							
1063	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.912.300,00	0,00	0,00	0,00	14.912.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1064	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	71.993.800,00	44.223.000,00	0,00	0,00	116.216.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1065	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	102.500.000,00	0,00	0,00	0,00	102.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1066	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.438.900,00	0,00	0,00	0,00	14.438.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1067	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	5.840.000,00	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1068	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	302.233.000,00	0,00	0,00	0,00	302.233.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Sub Kegiatan							
1069	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	340.000.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1070	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	606.469.960,00	0,00	0,00	0,00	606.469.960,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1071	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	227.194.900,00	0,00	0,00	0,00	227.194.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Sub Kegiatan							
1072	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	822.120.700,00	0,00	0,00	0,00	822.120.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1073	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	146.785.280,00	0,00	0,00	0,00	146.785.280,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	1,5 Persen							
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1,5 %							
1074	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4 Dokumen	97.681.540,00	0,00	0,00	0,00	97.681.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1075	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	1.489.867.820,00	0,00	0,00	0,00	1.489.867.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Data Industri	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Data Industri yang terkumpul	100 %							
1076	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	270 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		UPTD Rumah Kreatif									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	1,5 Persen							
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1,5 %							
1077	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	827.213.900,00	0,00	0,00	0,00	827.213.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif)	82,40							
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4 Sub Kegiatan							
1078	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	22.764.600,00	10.673.100,00	0,00	0,00	33.437.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1079	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1080	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1081	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan							
1082	3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	49.372.140,00	0,00	0,00	0,00	49.372.140,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan							
1083	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	101.667.140,00	0,00	0,00	0,00	101.667.140,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	49,70 Indeks							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang di terbitkan	45 Sertifikat							
1084	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	45 Dokumen	232.997.020,00	0,00	0,00	0,00	232.997.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	82,40							
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	5 Sub Kegiatan							
1085	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.492.800,00	0,00	0,00	0,00	1.492.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1086	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	19.986.600,00	0,00	0,00	0,00	19.986.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1087	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1088	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1089	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	5.729.000,00	0,00	0,00	0,00	5.729.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	2 Sub Kegiatan							
1090	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1091	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	159.378.560,00	0,00	0,00	0,00	159.378.560,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Sub Kegiatan							
1092	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	102.262.140,00	0,00	0,00	0,00	102.262.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Umum dan Protokol									
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01		SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen							
1093	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	580.056.020,00	0,00	0,00	0,00	580.056.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen							
1094	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	700.300.120,00	0,00	0,00	0,00	700.300.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen							
1095	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	393.118.900,00	0,00	0,00	0,00	393.118.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen							
1096	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	689.399.360,00	0,00	0,00	0,00	689.399.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1097	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.406.794.620,00	0,00	0,00	0,00	1.406.794.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1098	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.544.170.576,00	0,00	0,00	0,00	4.544.170.576,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1099	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.576.965.520,00	0,00	0,00	0,00	5.576.965.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1100	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	540.664.380,00	0,00	0,00	0,00	540.664.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
1101	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.011.354.000,00	0,00	0,00	0,00	2.011.354.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1102	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.567.861.984,00	0,00	0,00	0,00	7.567.861.984,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1103	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.966.123.000,00	0,00	0,00	0,00	4.966.123.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen							
1104	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141 Unit	5.696.544.050,00	0,00	0,00	0,00	5.696.544.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1105	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	3.990.221.926,00	647.253.436,00	0,00	0,00	4.637.475.362,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100 Persen							
1106	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	6.111.674.012,00	0,00	0,00	0,00	6.111.674.012,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen							
1107	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47 Paket	11.852.441.820,00	106.000.000,00	0,00	0,00	11.958.441.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1108	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	789.556.220,00	0,00	0,00	0,00	789.556.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1109	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	159.500.000,00	0,00	0,00	0,00	159.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 Persen							
1110	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	421.114.100,00	0,00	0,00	0,00	421.114.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1111	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	1.853.663.540,00	0,00	0,00	0,00	1.853.663.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Hukum									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Diselesaikan dalam Kepastian Hukum	100 Persen							
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka Kepastian Hukum	1195 Dokumen							
1112	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan									
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen	1.296.793.360,00	0,00	0,00	0,00	1.296.793.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1113	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan									
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000 Dokumen	162.015.760,00	0,00	0,00	0,00	162.015.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1114	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya									
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	255.212.640,00	0,00	0,00	0,00	255.212.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1115	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota									
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	100 Dokumen	451.802.760,00	0,00	0,00	0,00	451.802.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang Diselesaikan	55 Kasus							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum									
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	45 Kasus	1.821.410.700,00	0,00	0,00	0,00	1.821.410.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1117	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM									
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	10 Kasus	240.918.860,00	0,00	0,00	0,00	240.918.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,5 Nilai							
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	4 Paket							
1118	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.774.200,00	0,00	0,00	0,00	15.774.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1119	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	106.035.300,00	836.307.200,00	0,00	0,00	942.342.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1120	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.999.500,00	0,00	0,00	0,00	14.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1121	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.463.000,00	0,00	0,00	0,00	99.463.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	27 Unit							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1122	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	403.261.420,00	0,00	0,00	0,00	403.261.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1123	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	844.478.520,00	0,00	0,00	0,00	844.478.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1124	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1125	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	49.990.000,00	0,00	0,00	0,00	49.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Sekretariat Daerah									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip Nilai Evaluasi Kearsipan	100 Persen 63 Nilai							
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terwujudnya Penataan Arsip	100 Persen							
1126	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis									
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis	1000 Arsip	338.192.440,00	0,00	0,00	0,00	338.192.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	21 Persen							
1127	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN									
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	400 Pengguna	40.757.500,00	0,00	0,00	0,00	40.757.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1128	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi									
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	45 Laporan	264.957.100,00	0,00	0,00	0,00	264.957.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen							
1129	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	298 Orang/Bulan	59.053.914.000,00	0,00	0,00	0,00	59.053.914.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen							
1130	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	247.336.742,00	0,00	0,00	0,00	247.336.742,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali	70 %							
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Tugas Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti	100 %							
1131	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	11 Dokumen	403.600.120,00	0,00	0,00	0,00	403.600.120,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1132	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen	186.760.200,00	0,00	0,00	0,00	186.760.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100 %							
1133	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen	413.874.600,00	0,00	0,00	0,00	413.874.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1134	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	2 Dokumen	53.979.900,00	0,00	0,00	0,00	53.979.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-							
1135	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah									
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	255.941.660,00	0,00	0,00	0,00	255.941.660,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1136	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama									
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	370.596.200,00	0,00	0,00	0,00	370.596.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase tindak lanjut kebijakan strategis yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	100 %							
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Pengembangan Mental Spiritual	100 %							
1137	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	5.573.030.940,00	0,00	0,00	0,00	5.573.030.940,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1138	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual									
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	6 Lembaga	632.636.780,00	0,00	0,00	0,00	632.636.780,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 %							
1139	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	30.018.134.520,00	0,00	0,00	0,00	30.018.134.520,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai							
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
1140	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	426.015.500,00	0,00	0,00	0,00	426.015.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	100 %							
1141	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.740.500,00	0,00	0,00	0,00	13.740.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1142	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	16.302.200,00	388.707.100,00	0,00	0,00	405.009.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1143	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.223.000,00	0,00	0,00	0,00	23.223.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1144	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	330.018.000,00	0,00	0,00	0,00	330.018.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertata	100 %							
1145	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	915.172.140,00	0,00	0,00	0,00	915.172.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1146	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	86.560.000,00	0,00	0,00	0,00	86.560.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1147	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Organisasi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Peningkatan Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik	60 %							
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	22,35 %							
1148	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan									
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	80 Perpustakaan	67.682.140,00	0,00	0,00	0,00	67.682.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1149	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka									
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	37.682.140,00	100.000.000,00	0,00	0,00	137.682.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1150	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik									
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	64.682.040,00	0,00	0,00	0,00	64.682.040,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1151	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan									
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	67.682.140,00	0,00	0,00	0,00	67.682.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	37 %							
1152	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	62.682.140,00	0,00	0,00	0,00	62.682.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1153	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	15 Perpustakaan	125.364.280,00	0,00	0,00	0,00	125.364.280,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	4,20 %							
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun	300 Eksemplar							
1154	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam									
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300 Eksemplar	50.330.940,00	0,00	0,00	0,00	50.330.940,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	10 Naskah							
1155	2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan									
			Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	10 Eksemplar	51.367.540,00	0,00	0,00	0,00	51.367.540,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	87 %							
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	87 %							
1156	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1157	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1158	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	29 Dokumen	187.682.140,00	0,00	0,00	0,00	187.682.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik	87 %							
1159	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	105.543.340,00	15.189.700,00	0,00	0,00	120.733.040,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1160	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja									
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	152.491.240,00	15.189.700,00	0,00	0,00	167.680.940,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1161	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	19.885.100,00	0,00	0,00	0,00	19.885.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1162	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	94.672.140,00	15.189.700,00	0,00	0,00	109.861.840,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1163	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	126.868.540,00	30.379.400,00	0,00	0,00	157.247.940,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi	85 Nilai							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan	1 Dokumen							
1164	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.355.700,00	0,00	0,00	0,00	4.355.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 %							
1165	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	17.059.760,00	0,00	0,00	0,00	17.059.760,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1166	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	123.746.650,00	781.868.600,00	0,00	0,00	905.615.250,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1167	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	274.988.000,00	0,00	0,00	0,00	274.988.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik.	1 Laporan							
1168	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	769.583.340,00	0,00	0,00	0,00	769.583.340,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1169	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	90.060.000,00	0,00	0,00	0,00	90.060.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	83 % 5,5 % 100 %							
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 12 Bulan							
1170	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	574.787.000,00	0,00	0,00	0,00	574.787.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	100 %							
1171	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen	431.002.000,00	0,00	0,00	0,00	431.002.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	100 %							
1172	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	106.790.000,00	0,00	0,00	0,00	106.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik	90 %							
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %							
1173	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1174	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	64.976.000,00	0,00	0,00	0,00	64.976.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1175	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 %							
1176	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	12 Laporan	50.027.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	450.027.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1177	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	49.536.000,00	0,00	0,00	0,00	49.536.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Level							
1178	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang	103.502.000,00	0,00	0,00	0,00	103.502.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1179	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	17.520.000,00	0,00	0,00	0,00	17.520.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1180	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	29.094.000,00	0,00	0,00	0,00	29.094.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	87 %							
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %							
1181	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	39.964.000,00	0,00	0,00	0,00	39.964.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %							
1182	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Laporan	42.161.000,00	0,00	0,00	0,00	42.161.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	X	NON URUSAN									
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1183	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1184	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.751.072.160,00	803.187.200,00	0,00	0,00	2.554.259.360,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1185	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	56.957.000,00	0,00	0,00	0,00	56.957.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1186	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	217.196.000,00	0,00	0,00	0,00	217.196.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1187	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit	473.250.000,00	0,00	0,00	0,00	473.250.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1188	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	291 Unit	129.870.000,00	0,00	0,00	0,00	129.870.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Sekretariat DPRD									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02	SEKRETARIAT DPRD									
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD (SETWAN)	100 Persen							
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD	100 Persen							
1189	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1.819.843.680,00	0,00	0,00	0,00	1.819.843.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1190	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	21 Dokumen	14.805.504.220,00	0,00	0,00	0,00	14.805.504.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1191	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1192	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	763.983.680,00	0,00	0,00	0,00	763.983.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terbentuknya Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Fungsi DPRD	100 Persen							
1193	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1.649.331.340,00	0,00	0,00	0,00	1.649.331.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1194	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1.662.496.040,00	0,00	0,00	0,00	1.662.496.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1195	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1.655.956.040,00	0,00	0,00	0,00	1.655.956.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1196	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1.654.204.040,00	0,00	0,00	0,00	1.654.204.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1197	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1.655.971.740,00	0,00	0,00	0,00	1.655.971.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen							
1198	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	8.316.366.560,00	0,00	0,00	0,00	8.316.366.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1199	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	7.365.501.500,00	0,00	0,00	0,00	7.365.501.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1200	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat									
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	7.674.489.920,00	0,00	0,00	0,00	7.674.489.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1201	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	8.011.939.280,00	0,00	0,00	0,00	8.011.939.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1202	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah									
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1.617.936.000,00	0,00	0,00	0,00	1.617.936.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen							
1203	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1.394.876.900,00	0,00	0,00	0,00	1.394.876.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1204	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	4.282.039.520,00	0,00	0,00	0,00	4.282.039.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1205	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli									
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	18 Orang	3.288.832.448,00	0,00	0,00	0,00	3.288.832.448,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1206	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi									
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	920.451.180,00	0,00	0,00	0,00	920.451.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1207	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD									
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	2.204.342.880,00	0,00	0,00	0,00	2.204.342.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1208	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	60 Dokumen	3.636.986.680,00	0,00	0,00	0,00	3.636.986.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen							
1209	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	3.565.732.420,00	0,00	0,00	0,00	3.565.732.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1210	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD									
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	1.790.335.400,00	0,00	0,00	0,00	1.790.335.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1211	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	23.550.940.730,00	0,00	0,00	0,00	23.550.940.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD dalam Rangka Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen							
1212	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	817.141.080,00	0,00	0,00	0,00	817.141.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen							
1213	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10 Dokumen	9.661.184.220,00	0,00	0,00	0,00	9.661.184.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1214	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	180 Laporan	450.495.880,00	0,00	0,00	0,00	450.495.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1215	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 Dokumen	3.387.681.800,00	0,00	0,00	0,00	3.387.681.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (SETWAN)	85 Persen							
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan Terhadap Penganggaran Belanja OPD	100 Persen							
1216	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	482.401.640,00	0,00	0,00	0,00	482.401.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1217	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	144.668.140,00	0,00	0,00	0,00	144.668.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen							
1218	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/ Bulan	10.013.782.000,00	0,00	0,00	0,00	10.013.782.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1219	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	136.744.940,00	0,00	0,00	0,00	136.744.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1220	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	135.951.640,00	0,00	0,00	0,00	135.951.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Selesai Dengan Baik dan Di Sampaikan Tepat Waktu	100 Persen							
1221	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	169.600.400,00	0,00	0,00	0,00	169.600.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1222	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	903.215.800,00	0,00	0,00	0,00	903.215.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1223	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.358.543.300,00	0,00	0,00	0,00	1.358.543.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1224	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	135.240.000,00	0,00	0,00	0,00	135.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1225	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.062.108.000,00	0,00	0,00	0,00	1.062.108.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1226	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4.734.350.920,00	0,00	0,00	0,00	4.734.350.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen							
1227	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	5.780.798.200,00	0,00	0,00	5.780.798.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pelayanan Penunjang Kantor Yang Selesai Dengan Baik Dan Berkualitas	100 Persen							
1228	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.996.000,00	0,00	0,00	0,00	9.996.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1229	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1230	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.613.306.360,00	0,00	0,00	0,00	1.613.306.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	100 Persen							
1231	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	61 Unit	3.610.132.060,00	0,00	0,00	0,00	3.610.132.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1232	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	892.532.650,00	85.000.000,00	0,00	0,00	977.532.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1233	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	621.080.000,00	0,00	0,00	0,00	621.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen							
1234	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 Orang/ Bulan	58.289.304.663,00	0,00	0,00	0,00	58.289.304.663,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1235	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	385 Paket	2.537.787.500,00	0,00	0,00	0,00	2.537.787.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1236	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	287.761.040,00	0,00	0,00	0,00	287.761.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen							
1237	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	30 Laporan	177.530.360,00	0,00	0,00	0,00	177.530.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1238	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48 Laporan	2.836.260.040,00	0,00	0,00	0,00	2.836.260.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.01	PERENCANAAN									
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	100 persen							
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2 Dokumen							
1239	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik									
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	84.999.900,00	0,00	0,00	0,00	84.999.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1240	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi									
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	194.008.300,00	0,00	0,00	0,00	194.008.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1241	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	1.682.484.940,00	0,00	0,00	0,00	1.682.484.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	7 Dokumen							
1242	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen	430.380.760,00	0,00	0,00	0,00	430.380.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1243	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi									
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	21.972.800,00	0,00	0,00	0,00	21.972.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	40 Dokumen							
1244	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	274.355.700,00	0,00	0,00	0,00	274.355.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1245	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	521.143.400,00	0,00	0,00	0,00	521.143.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1246	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	27 Dokumen	205.034.100,00	0,00	0,00	0,00	205.034.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data SIPD	1 Dokumen							
1247	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah									
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	67.339.240,00	0,00	0,00	0,00	67.339.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen							
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen							
1248	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	157.025.880,00	0,00	0,00	0,00	157.025.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1249	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	7 Laporan	99.603.540,00	0,00	0,00	0,00	99.603.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1250	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	268.626.460,00	0,00	0,00	0,00	268.626.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1251	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	235.149.160,00	0,00	0,00	0,00	235.149.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	4 Dokumen							
1252	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	255.987.560,00	0,00	0,00	0,00	255.987.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1253	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	255.433.420,00	0,00	0,00	0,00	255.433.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1254	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	95.432.240,00	0,00	0,00	0,00	95.432.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1255	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	198.393.680,00	0,00	0,00	0,00	198.393.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen							
1256	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	297.906.540,00	0,00	0,00	0,00	297.906.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1257	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	71.334.800,00	0,00	0,00	0,00	71.334.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1258	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	259.548.800,00	0,00	0,00	0,00	259.548.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1259	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	73.359.600,00	0,00	0,00	0,00	73.359.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	87,13 Nilai							
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen							
1260	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	205.957.800,00	0,00	0,00	0,00	205.957.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1261	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.060.100,00	0,00	0,00	0,00	7.060.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1262	5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.171.800,00	0,00	0,00	0,00	6.171.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1263	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.823.500,00	0,00	0,00	0,00	7.823.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1264	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.819.500,00	0,00	0,00	0,00	1.819.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1265	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.044.000,00	0,00	0,00	0,00	2.044.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1266	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4.151.600,00	0,00	0,00	0,00	4.151.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Jenis							
1267	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan	12.340.448.000,00	0,00	0,00	0,00	12.340.448.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1268	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	540 Dokumen	198.206.700,00	0,00	0,00	0,00	198.206.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1269	5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen	129.454.120,00	0,00	0,00	0,00	129.454.120,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	54 Jenis							
1270	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.301.940,00	0,00	0,00	0,00	59.301.940,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1271	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	87.156.840,00	980.901.000,00	0,00	0,00	1.068.057.840,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1272	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	123.323.140,00	0,00	0,00	0,00	123.323.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1273	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	67.273.940,00	0,00	0,00	0,00	67.273.940,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1274	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	65.006.140,00	0,00	0,00	0,00	65.006.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1275	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	103.682.140,00	0,00	0,00	0,00	103.682.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1276	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	559.000.140,00	0,00	0,00	0,00	559.000.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	4 Jenis							
1277	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	0,00	183.600.000,00	0,00	0,00	183.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1278	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	46.812.940,00	0,00	0,00	0,00	46.812.940,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Laporan							
1279	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	40.670.140,00	0,00	0,00	0,00	40.670.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1280	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	337.282.140,00	0,00	0,00	0,00	337.282.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1281	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	558.540.160,00	0,00	0,00	0,00	558.540.160,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	238 Unit							
1282	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	874.255.504,00	0,00	0,00	0,00	874.255.504,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1283	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	201 Unit	173.132.140,00	0,00	0,00	0,00	173.132.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1284	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	123.682.140,00	1.695.006.498,00	0,00	0,00	1.818.688.638,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-							
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu	72 dokumen							
1285	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1286	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	22.336.000,00	0,00	0,00	0,00	22.336.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1287	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD									
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	347.253.700,00	0,00	0,00	0,00	347.253.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1288	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	80.487.400,00	0,00	0,00	0,00	80.487.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1289	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	678.738.160,00	0,00	0,00	0,00	678.738.160,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1290	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	446.071.200,00	0,00	0,00	0,00	446.071.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK Gubernur tentang evaluasi kabupaten/kota disusun tepat waktu	27 SK							
1291	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	9 Laporan	202.814.400,00	0,00	0,00	0,00	202.814.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1292	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	9 Laporan	176.576.600,00	0,00	0,00	0,00	176.576.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1293	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	9 Laporan	205.387.300,00	0,00	0,00	0,00	205.387.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1294	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	2 Dokumen	193.928.700,00	0,00	0,00	0,00	193.928.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah laporan perbendaharaan disusun tepat waktu	6 dokumen							
1295	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)									
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	601.462.296,00	0,00	0,00	0,00	601.462.296,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD disusun tepat waktu	2 dokumen							
1296	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	365.550.340,00	0,00	0,00	0,00	365.550.340,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1297	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi									
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	98.481.200,00	0,00	0,00	0,00	98.481.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu	4 dokumen							
1298	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	2.506.377.057,00	0,00	0,00	0,00	2.506.377.057,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1299	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan									
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	356.230.322.273,00	356.230.322.273,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1300	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	0,00	0,00	62.772.177.068,00	0,00	62.772.177.068,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1301	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	1.279.176.638.488,00	1.279.176.638.488,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan implementasi SIPD	12 dokumen							
1302	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	146.801.200,00	0,00	0,00	0,00	146.801.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-							
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu	1 dokumen							
1303	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	113.211.800,00	0,00	0,00	0,00	113.211.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1304	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	43.876.100,00	0,00	0,00	0,00	43.876.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1305	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	349.999.400,00	0,00	0,00	0,00	349.999.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1306	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	782.357.460,00	0,00	0,00	0,00	782.357.460,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	9 dokumen							
1307	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	37.005.000,00	0,00	0,00	0,00	37.005.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	2244 dokumen							
1308	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/ Bulan	19.447.248.000,00	0,00	0,00	0,00	19.447.248.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1309	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2200 Dokumen	423.884.680,00	0,00	0,00	0,00	423.884.680,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1 Tahun							
1310	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.358.800,00	0,00	0,00	0,00	17.358.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1311	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	982.069.900,00	0,00	0,00	982.069.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1312	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	569.761.700,00	0,00	0,00	0,00	569.761.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1313	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.486.500,00	0,00	0,00	0,00	11.486.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1314	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1315	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	86.250.000,00	0,00	0,00	0,00	86.250.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1316	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	227.138.000,00	0,00	0,00	0,00	227.138.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	1 Tahun							
1317	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1318	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	285.300.000,00	0,00	0,00	0,00	285.300.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	1 Tahun							
1319	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	738.703.480,00	0,00	0,00	0,00	738.703.480,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1320	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1321	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	130.516.500,00	0,00	0,00	0,00	130.516.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1322	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	943.013.560,00	22.000.000,00	0,00	0,00	965.013.560,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-							
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Realisasi PAD dari Pemanfaatan BMD	43 Persen							
1323	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6 Laporan	2.415.996.700,00	0,00	0,00	0,00	2.415.996.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1 Tahun							
1324	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.665.600,00	0,00	0,00	0,00	41.665.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1325	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.999.200,00	0,00	0,00	0,00	8.999.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1326	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1327	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1328	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	88.881.000,00	0,00	0,00	0,00	88.881.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	1 Tahun							
1329	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1330	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	1 Tahun							
1331	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	305.535.980,00	554.442.000,00	0,00	0,00	859.977.980,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	X	NON URUSAN									
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	1 Tahun							
1332	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	147.172.600,00	0,00	0,00	0,00	147.172.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1333	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15.260.000,00	0,00	0,00	0,00	15.260.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		Badan Pendapatan Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 Persen							
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina	100 Persen							
1334	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	2 Laporan	14.975.900,00	0,00	0,00	0,00	14.975.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 Persen							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 Persen							
1335	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	305.379.600,00	0,00	0,00	0,00	305.379.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1336	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	216.435.400,00	0,00	0,00	0,00	216.435.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1337	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1338	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	243.995.900,00	0,00	0,00	0,00	243.995.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1339	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	45.300.000,00	0,00	0,00	0,00	45.300.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88 Nilai Sakip							
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	100 Persen							
1340	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	18.867.600,00	0,00	0,00	0,00	18.867.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1341	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	19.045.100,00	0,00	0,00	0,00	19.045.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	100 Persen							
1342	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	402 Orang/ Bulan	130.819.254.219,00	0,00	0,00	0,00	130.819.254.219,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1343	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen							
1344	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.727.000,00	0,00	0,00	0,00	7.727.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1345	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	147.624.100,00	0,00	0,00	0,00	147.624.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1346	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1347	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1.230.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.570.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1348	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.428.800,00	0,00	0,00	0,00	2.428.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1349	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1350	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	471.374.000,00	0,00	0,00	0,00	471.374.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1351	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	[object Object]
1352	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	0,00	775.050.000,00	0,00	0,00	775.050.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1353	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	409 Unit	0,00	2.592.017.599,00	0,00	0,00	2.592.017.599,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen							
1354	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.994.000,00	0,00	0,00	0,00	2.994.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1355	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	387.433.104,00	0,00	0,00	0,00	387.433.104,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1356	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	448.337.373,00	0,00	0,00	0,00	448.337.373,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1357	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	115.961.640,00	0,00	0,00	0,00	115.961.640,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1358	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	749.807.840,00	0,00	0,00	0,00	749.807.840,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1359	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	934.849.220,00	0,00	0,00	0,00	934.849.220,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1360	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	390.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	590.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1361	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	1.199.436.661,00	0,00	0,00	0,00	1.199.436.661,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 Persen							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (1)	100 Persen							
1362	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	1.785.987.740,00	0,00	0,00	0,00	1.785.987.740,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1363	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	5000 Dokumen SSPD	2.034.709.140,00	0,00	0,00	0,00	2.034.709.140,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen							
1364	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3.042.000,00	0,00	0,00	0,00	3.042.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1365	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	111.053.500,00	0,00	0,00	0,00	111.053.500,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1366	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1367	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	11.809.000,00	0,00	0,00	0,00	11.809.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1368	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.068.800,00	0,00	0,00	0,00	5.068.800,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1369	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1370	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	96.960.000,00	0,00	0,00	0,00	96.960.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen							
1371	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1372	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	264.000.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1373	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1374	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	48.075.000,00	0,00	0,00	0,00	48.075.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1375	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	189.677.340,00	0,00	0,00	0,00	189.677.340,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1376	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	31.850.000,00	0,00	0,00	0,00	31.850.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1377	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	546.465.063,00	0,00	0,00	0,00	546.465.063,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1378	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	22.980.000,00	0,00	0,00	0,00	22.980.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 Persen							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (2)	100 Persen							
1379	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	425.784.260,00	0,00	0,00	0,00	425.784.260,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1380	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	14518 Dokumen SSPD	471.196.400,00	0,00	0,00	0,00	471.196.400,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen							
1381	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.665.600,00	0,00	0,00	0,00	3.665.600,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1382	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	110.049.200,00	0,00	0,00	0,00	110.049.200,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1383	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1384	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.158.100,00	0,00	0,00	0,00	14.158.100,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1385	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1386	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	13.365.000,00	0,00	0,00	0,00	13.365.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen							
1387	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1388	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	179.000.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1389	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	190.069.061,00	0,00	0,00	0,00	190.069.061,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1390	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	47.976.600,00	0,00	0,00	0,00	47.976.600,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1391	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	147.506.740,00	0,00	0,00	0,00	147.506.740,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1392	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	11.680.000,00	0,00	0,00	0,00	11.680.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1393	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	673.569.731,00	0,00	0,00	0,00	673.569.731,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1394	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	12.970.400,00	0,00	0,00	0,00	12.970.400,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 Persen							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (3)	100 Persen							
1395	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	498.003.540,00	0,00	0,00	0,00	498.003.540,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1396	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12620 Dokumen SSPD	549.785.680,00	0,00	0,00	0,00	549.785.680,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen							
1397	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.491.500,00	0,00	0,00	0,00	8.491.500,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1398	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	129.995.800,00	0,00	0,00	0,00	129.995.800,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1399	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1400	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.366.700,00	0,00	0,00	0,00	6.366.700,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1401	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1074 Dokumen	2.996.000,00	0,00	0,00	0,00	2.996.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1402	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1403	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	19.125.000,00	0,00	0,00	0,00	19.125.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen							
1404	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1405	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	203.000.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1406	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	293.756.855,00	0,00	0,00	0,00	293.756.855,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1407	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.363.000,00	0,00	0,00	0,00	44.363.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1408	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	223.350.140,00	0,00	0,00	0,00	223.350.140,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1409	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	19.880.000,00	0,00	0,00	0,00	19.880.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1410	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	380.021.200,00	0,00	0,00	0,00	380.021.200,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1411	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Unit	25.378.300,00	0,00	0,00	0,00	25.378.300,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 Persen							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (4)	100 Persen							
1412	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	2.405.274.860,00	0,00	0,00	0,00	2.405.274.860,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1413	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	288 Dokumen SSPD	749.787.820,00	0,00	0,00	0,00	749.787.820,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen							
1414	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.082.000,00	0,00	0,00	0,00	5.082.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1415	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	129.672.800,00	0,00	0,00	0,00	129.672.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1416	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1417	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	22.731.650,00	0,00	0,00	0,00	22.731.650,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1418	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	5.772.500,00	0,00	0,00	0,00	5.772.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1419	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1420	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	18.120.000,00	0,00	0,00	0,00	18.120.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen							
1421	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1422	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	378.000.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1423	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	437.230.947,00	0,00	0,00	0,00	437.230.947,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1424	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.178.800,00	0,00	0,00	0,00	24.178.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1425	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	179.815.340,00	0,00	0,00	0,00	179.815.340,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1426	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	19.920.000,00	0,00	0,00	0,00	19.920.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1427	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	656.857.697,00	0,00	0,00	0,00	656.857.697,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1428	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	30.570.000,00	0,00	0,00	0,00	30.570.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 %							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (5)	100 Persen							
1429	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	2 Laporan	2.868.660.500,00	0,00	0,00	0,00	2.868.660.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1430	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	194053 Dokumen SSPD	526.785.680,00	0,00	0,00	0,00	526.785.680,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen							
1431	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.819.400,00	0,00	0,00	0,00	5.819.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1432	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	102.206.900,00	0,00	0,00	0,00	102.206.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1433	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1434	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	79.691.200,00	0,00	0,00	0,00	79.691.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1435	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.212.000,00	0,00	0,00	0,00	3.212.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1436	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	35.515.000,00	0,00	0,00	0,00	35.515.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1437	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	23.055.000,00	0,00	0,00	0,00	23.055.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen							
1438	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1439	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	487.000.000,00	0,00	0,00	0,00	487.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1440	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	310.882.444,00	0,00	0,00	0,00	310.882.444,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1441	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	49.116.500,00	0,00	0,00	0,00	49.116.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1442	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	161.040.880,00	0,00	0,00	0,00	161.040.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1443	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.950.000,00	0,00	0,00	0,00	10.950.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1444	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	642.616.902,00	0,00	0,00	0,00	642.616.902,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1445	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	122.752.500,00	0,00	0,00	0,00	122.752.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 %							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (6)	100 Persen							
1446	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	1.140.953.500,00	0,00	0,00	0,00	1.140.953.500,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1447	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12176 Dokumen SSPD	703.836.380,00	0,00	0,00	0,00	703.836.380,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen							
1448	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.677.200,00	0,00	0,00	0,00	10.677.200,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1449	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	119.222.500,00	0,00	0,00	0,00	119.222.500,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1450	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1451	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.210.000,00	0,00	0,00	0,00	13.210.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1452	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.400.000,00	0,00	0,00	0,00	12.400.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1453	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen							
1454	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1455	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	238.000.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1456	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	295.072.963,00	0,00	0,00	0,00	295.072.963,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1457	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.970.000,00	0,00	0,00	0,00	38.970.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1458	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	117.670.000,00	0,00	0,00	0,00	117.670.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1459	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	20.730.000,00	0,00	0,00	0,00	20.730.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1460	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	594.625.474,00	0,00	0,00	0,00	594.625.474,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1461	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	50.486.100,00	0,00	0,00	0,00	50.486.100,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 %							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (7)	100 Persen							
1462	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	535.049.960,00	0,00	0,00	0,00	535.049.960,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1463	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	10 Dokumen SSPD	635.702.100,00	0,00	0,00	0,00	635.702.100,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen							
1464	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.601.400,00	0,00	0,00	0,00	10.601.400,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1465	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	106.298.200,00	0,00	0,00	0,00	106.298.200,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1466	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1467	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.946.200,00	0,00	0,00	0,00	3.946.200,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1468	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1469	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	32.370.000,00	0,00	0,00	0,00	32.370.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen							
1470	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1471	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	101.000.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1472	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	285.077.200,00	0,00	0,00	0,00	285.077.200,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1473	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.800.000,00	0,00	0,00	0,00	46.800.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1474	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	97.165.000,00	0,00	0,00	0,00	97.165.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1475	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	14.930.000,00	0,00	0,00	0,00	14.930.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1476	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	422.503.540,00	0,00	0,00	0,00	422.503.540,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1477	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	8.947.500,00	0,00	0,00	0,00	8.947.500,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 %							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (8)	100 Persen							
1478	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	480.023.040,00	0,00	0,00	0,00	480.023.040,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1479	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	10.963 Dokumen SSPD	491.103.540,00	0,00	0,00	0,00	491.103.540,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen							
1480	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.697.000,00	0,00	0,00	0,00	2.697.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1481	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	108.276.900,00	0,00	0,00	0,00	108.276.900,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1482	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1483	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.999.300,00	0,00	0,00	0,00	7.999.300,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1484	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.999.500,00	0,00	0,00	0,00	1.999.500,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1485	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1486	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	59.620.000,00	0,00	0,00	0,00	59.620.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen							
1487	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1488	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1489	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1490	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1491	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	136.924.000,00	0,00	0,00	0,00	136.924.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1492	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	15.660.000,00	0,00	0,00	0,00	15.660.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1493	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	697.141.131,00	0,00	0,00	0,00	697.141.131,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1494	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	18.693.600,00	0,00	0,00	0,00	18.693.600,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 %							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (9)	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1495	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	510.685.680,00	0,00	0,00	0,00	510.685.680,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1496	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	13155 Dokumen SSPD	512.773.540,00	0,00	0,00	0,00	512.773.540,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen							
1497	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.062.800,00	0,00	0,00	0,00	2.062.800,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1498	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	108.994.500,00	0,00	0,00	0,00	108.994.500,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1499	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1500	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.499.300,00	0,00	0,00	0,00	5.499.300,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1501	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	2.647.500,00	0,00	0,00	0,00	2.647.500,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1502	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1503	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.960.000,00	0,00	0,00	0,00	24.960.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen							
1504	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1505	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1506	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	236.878.412,00	0,00	0,00	0,00	236.878.412,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1507	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	52.645.800,00	0,00	0,00	0,00	52.645.800,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1508	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	114.213.740,00	0,00	0,00	0,00	114.213.740,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1509	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	17.040.000,00	0,00	0,00	0,00	17.040.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1510	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	353.692.840,00	0,00	0,00	0,00	353.692.840,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1511	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	11.246.800,00	0,00	0,00	0,00	11.246.800,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.03	KEPEGAWAIAN									
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansi	59,00 Nilai							
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana	4 Jenis							
1512	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	10.386.500,00	0,00	0,00	0,00	10.386.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1513	5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	720.617.200,00	0,00	0,00	0,00	720.617.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1514	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian									
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	156.556.420,00	0,00	0,00	0,00	156.556.420,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1515	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	142.398.420,00	0,00	0,00	0,00	142.398.420,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah jenis layanan mutasi promosi ASN terlaksana baik	3 Jenis							
1516	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	82.396.240,00	0,00	0,00	0,00	82.396.240,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1517	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12 Laporan	125.205.140,00	0,00	0,00	0,00	125.205.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1518	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	174.113.140,00	0,00	0,00	0,00	174.113.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan	3 Jenis							
1519	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1.943.674.540,00	0,00	0,00	0,00	1.943.674.540,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1520	5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	113.967.280,00	0,00	0,00	0,00	113.967.280,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1521	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	12 Dokumen	163.873.780,00	0,00	0,00	0,00	163.873.780,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana	4 Jenis							
1522	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	134.131.180,00	0,00	0,00	0,00	134.131.180,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1523	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	800 Orang	344.360.280,00	0,00	0,00	0,00	344.360.280,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1524	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN									
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1200 Orang	141.990.280,00	0,00	0,00	0,00	141.990.280,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1525	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	30.694.700,00	0,00	0,00	0,00	30.694.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86 Nilai							
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	7 Jenis							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1526	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1527	5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	[object Object]
1528	5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1529	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	231.200,00	0,00	0,00	0,00	231.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1530	5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	231.200,00	0,00	0,00	0,00	231.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1531	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	83.980.500,00	0,00	0,00	0,00	83.980.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1532	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	29.240.000,00	0,00	0,00	0,00	29.240.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	3 Jenis							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1533	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/Bulan	168.534.554.612,00	0,00	0,00	0,00	168.534.554.612,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	1 Jenis							
1534	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	283.918.000,00	0,00	0,00	0,00	283.918.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	6 Layanan							
1535	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.015.000,00	0,00	0,00	0,00	15.015.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1536	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	158.440.900,00	0,00	0,00	0,00	158.440.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1537	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	99.191.000,00	0,00	0,00	0,00	99.191.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1538	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.695.000,00	0,00	0,00	0,00	8.695.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1539	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	756 Dokumen	3.729.600,00	0,00	0,00	0,00	3.729.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1540	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	466.070.000,00	0,00	0,00	0,00	466.070.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah terlaksana	1 Layanan							
1541	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	35.200.000,00	0,00	0,00	35.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	3 Jenis							
1542	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1543	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	253.600.000,00	0,00	0,00	0,00	253.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1544	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	933.514.020,00	0,00	0,00	0,00	933.514.020,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana	4 jenis							
1545	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	759.807.600,00	0,00	0,00	0,00	759.807.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1546	5.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	34.889.200,00	0,00	0,00	0,00	34.889.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1547	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1548	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	136.700.000,00	0,00	0,00	0,00	136.700.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi	100 persen							
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah dokumen Data Penyelenggaraan Pengembangan Pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi	4 dokumen							
1549	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional									
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	3 Dokumen	364.764.280,00	0,00	0,00	0,00	364.764.280,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1550	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota									
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	100 Orang	467.042.440,00	0,00	0,00	0,00	467.042.440,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1551	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	20 Dokumen	257.799.840,00	0,00	0,00	0,00	257.799.840,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.03	KEPEGAWAIAN									
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansi	59.00 Nilai							
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN	1 Jenis							
1552	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center									
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	701.912.600,00	50.000.000,00	0,00	0,00	751.912.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86 Nilai							
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	2 Jenis							
1553	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.815.200,00	0,00	0,00	0,00	11.815.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1554	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	40.166.000,00	0,00	0,00	0,00	40.166.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milih daerah penunjang terlaksana	1 Layanan							
1555	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	25.537.000,00	0,00	0,00	25.537.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintah terlaksana	1 Jenis							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1556	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	263.774.980,00	0,00	0,00	0,00	263.774.980,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan barang milik daerah penunjang terlaksana	2 Layanan							
1557	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	78.218.000,00	0,00	0,00	0,00	78.218.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1558	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	11.890.000,00	0,00	0,00	0,00	11.890.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia									
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.03	KEPEGAWAIAN									
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86 Nilai							
	5.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	100 Persen							
1559	5.03.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	6.359.832.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	6.959.832.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Riset dan Inovasi Daerah									
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79 Nilai							
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan							
1560	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	152.000.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Badan Riset dan Inovasi Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	100 Persen							
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	13 Laporan							
1561	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5 Laporan	1.008.149.000,00	0,00	0,00	0,00	1.008.149.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1562	5.05.02.1.01.0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	[object Object]
1563	5.05.02.1.01.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1 Laporan	244.299.900,00	0,00	0,00	0,00	244.299.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1564	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan									
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	6 Dokumen	287.207.600,00	0,00	0,00	0,00	287.207.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1565	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan									
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	1 Rekomendasi	49.162.400,00	0,00	0,00	0,00	49.162.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 Persen							
1566	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	[object Object]
1567	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	[object Object]
1568	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	[object Object]
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	10 Dokumen							
1569	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	[object Object]
1570	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	5 Dokumen	378.199.800,00	0,00	0,00	0,00	378.199.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1571	5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	[object Object]
1572	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	892.165.000,00	0,00	0,00	0,00	892.165.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1573	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	22.499.000,00	0,00	0,00	0,00	22.499.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1574	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	22.499.000,00	0,00	0,00	0,00	22.499.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1575	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	[object Object]
1576	5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	[object Object]
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3 Laporan							
1577	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	99.998.900,00	0,00	0,00	0,00	99.998.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1578	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan									
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	53.075.900,00	0,00	0,00	0,00	53.075.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1579	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	134.999.300,00	0,00	0,00	0,00	134.999.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79 Nilai							
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Dokumen							
1580	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	35.259.000,00	0,00	0,00	0,00	35.259.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1581	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	11.011.900,00	0,00	0,00	0,00	11.011.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46 Orang/ Bulan							
1582	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/ Bulan	9.056.236.000,00	0,00	0,00	0,00	9.056.236.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1583	5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1584	5.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	[object Object]
1585	5.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	[object Object]
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	1 Dokumen 1 Laporan 12 Paket 100 Persen							
1586	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.951.000,00	0,00	0,00	0,00	21.951.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1587	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	198.912.300,00	0,00	0,00	0,00	198.912.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1588	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	107.494.000,00	0,00	0,00	0,00	107.494.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1589	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.180.300,00	0,00	0,00	0,00	24.180.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1590	5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1591	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	132.046.000,00	0,00	0,00	0,00	132.046.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit							
1592	5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	[object Object]
1593	5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.000.000,00	20.005.200,00	0,00	0,00	23.005.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan							
1594	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1595	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	324.820.180,00	0,00	0,00	0,00	324.820.180,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit							
1596	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	775.681.916,00	0,00	0,00	0,00	775.681.916,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1597	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.247.602.060,00	500.000.000,00	0,00	0,00	1.747.602.060,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Penghubung									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG									
	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung	90 indeks							
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 indeks							
1598	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat									
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	12 Laporan	45.569.400,00	0,00	0,00	0,00	45.569.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1599	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya									
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	12 Laporan	242.416.472,00	0,00	0,00	0,00	242.416.472,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1600	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Laporan	2.725.023.888,00	0,00	0,00	0,00	2.725.023.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai							
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100 persen							
1601	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.857.200,00	0,00	0,00	0,00	4.857.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100 persen							
1602	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ Bulan	2.841.784.000,00	0,00	0,00	0,00	2.841.784.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1603	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.999.600,00	0,00	0,00	0,00	9.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1604	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	49.996.800,00	0,00	0,00	0,00	49.996.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1605	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1606	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.317.600,00	0,00	0,00	0,00	7.317.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1607	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	73.580.000,00	0,00	0,00	0,00	73.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1608	5.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	33 Unit	2.000.000,00	96.243.000,00	0,00	0,00	98.243.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1609	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1610	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1611	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	920.690.136,00	0,00	0,00	0,00	920.690.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1612	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	879.877.176,00	0,00	0,00	0,00	879.877.176,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1613	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	128.530.000,00	221.170.000,00	0,00	0,00	349.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1614	5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	94.498.472,00	0,00	0,00	0,00	94.498.472,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Inspektorat									
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH									
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 Persen							
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal	100 Persen							
1615	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan	450.060.460,00	0,00	0,00	0,00	450.060.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1616	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	250.232.480,00	0,00	0,00	0,00	250.232.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1617	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja									
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	45 Laporan	199.999.900,00	0,00	0,00	0,00	199.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1618	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan									
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	300.115.840,00	0,00	0,00	0,00	300.115.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1619	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	58 Laporan	900.080.880,00	0,00	0,00	0,00	900.080.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1620	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal									
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	406.299.200,00	0,00	0,00	0,00	406.299.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1621	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	58 Dokumen	500.232.480,00	0,00	0,00	0,00	500.232.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 Persen							
1622	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah									
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	150.232.480,00	0,00	0,00	0,00	150.232.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1623	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	1.264.227.820,00	0,00	0,00	0,00	1.264.227.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	[deleted] Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan	100 Persen							
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan	100 Persen							
1624	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan									
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	54 Rekomendasi	539.191.320,00	0,00	0,00	0,00	539.191.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1625	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan									
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	1.051.842.840,00	0,00	0,00	0,00	1.051.842.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan	100 Persen							
1626	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12 Perangkat Daerah	550.348.120,00	0,00	0,00	0,00	550.348.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1627	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33 Perangkat Daerah	299.999.500,00	0,00	0,00	0,00	299.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1628	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1629	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	149.983.200,00	0,00	0,00	0,00	149.983.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Inspektorat)	87 Persen							
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	100 Persen							
1630	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	68.028.400,00	0,00	0,00	0,00	68.028.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1631	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	43.267.100,00	0,00	0,00	0,00	43.267.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen							
1632	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/ Bulan	21.385.658.000,00	0,00	0,00	0,00	21.385.658.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	100 Persen							
1633	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.998.700,00	0,00	0,00	0,00	49.998.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1634	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	114.418.700,00	0,00	0,00	0,00	114.418.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1635	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	167.177.100,00	0,00	0,00	0,00	167.177.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1636	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.644.000,00	0,00	0,00	0,00	25.644.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1637	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	44.114.400,00	0,00	0,00	0,00	44.114.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1638	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1639	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.349.948.000,00	0,00	0,00	0,00	1.349.948.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100 Persen							
1640	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	72 Unit	49.766.400,00	1.421.216.188,00	0,00	0,00	1.470.982.588,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi	100 Persen							
1641	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1642	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	275.000.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1643	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	306.332.640,00	0,00	0,00	0,00	306.332.640,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1644	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	2.139.679.260,00	0,00	0,00	0,00	2.139.679.260,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1645	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	92.244.280,00	395.420.000,00	0,00	0,00	487.664.280,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1646	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	262.408.560,00	35.000.000,00	0,00	0,00	297.408.560,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	90 %							
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %							
1647	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	741.921.620,00	0,00	0,00	0,00	741.921.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1648	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paskibraka	36 Orang	3.578.883.500,00	0,00	0,00	0,00	3.578.883.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	80 %							
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 %							
1649	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	180.149.915.352,00	0,00	0,00	0,00	180.149.915.352,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terdata	80 %							
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %							
1650	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	118.457.000,00	0,00	0,00	0,00	118.457.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	80 %							
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %							
1651	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	553.056.560,00	0,00	0,00	0,00	553.056.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial	90 %							
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %							
1652	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40 Orang	1.364.464.520,00	0,00	0,00	0,00	1.364.464.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1653	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12 Dokumen	987.354.000,00	0,00	0,00	0,00	987.354.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai							
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	8 Dokumen							
1654	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	34.212.800,00	0,00	0,00	0,00	34.212.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1655	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.995.000,00	0,00	0,00	0,00	14.995.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %							
1656	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/ Bulan	8.821.852.164,00	0,00	0,00	0,00	8.821.852.164,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %							
1657	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.989.100,00	0,00	0,00	0,00	14.989.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1658	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	19.178.600,00	59.406.400,00	0,00	0,00	78.585.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1659	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1660	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	34.623.800,00	0,00	0,00	0,00	34.623.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1661	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.996.100,00	0,00	0,00	0,00	4.996.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1662	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	138.330.000,00	0,00	0,00	0,00	138.330.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase paket pengadaan selesai	100 %							
1663	8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	125.643.800,00	0,00	0,00	125.643.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa urusan pemerintahan terealisasi	100 %							
1664	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	6.960.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1665	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1666	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	861.343.584,00	0,00	0,00	0,00	861.343.584,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah terpelihara	100 %							
1667	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	828.165.000,00	0,00	0,00	0,00	828.165.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1668	8.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1669	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	25.640.000,00	0,00	0,00	0,00	25.640.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1670	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	143.000.000,00	0,00	0,00	143.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1671	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	14.490.000,00	0,00	0,00	0,00	14.490.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	

Pj. GUBERNUR BALI



S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN V

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA



PROVINSI BALI
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1				PELAYANAN UMUM					
1	01	1	01	Pendidikan	1.064.864.042.630,00	5.340.376.258,00	0,00	0,00	1.070.204.418.888,00
1	01	1	02	Kesehatan	569.808.642.424,00	18.556.965.444,00	0,00	0,00	588.365.607.868,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.417.114.516,00	213.705.900,00	0,00	0,00	33.630.820.416,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	46.702.465.287,00	2.507.660.100,00	0,00	0,00	49.210.125.387,00
1	01	1	06	Sosial	23.350.364.920,00	6.606.269.600,00	0,00	0,00	29.956.634.520,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	32.796.407.372,00	105.108.500,00	0,00	0,00	32.901.515.872,00
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	569.557.660,00	19.052.000,00	0,00	0,00	588.609.660,00
1	01	2	09	Pangan	607.072.190,00	0,00	0,00	0,00	607.072.190,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	766.577.106,00	150.782.950,00	0,00	0,00	917.360.056,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	911.061.940,00	0,00	0,00	0,00	911.061.940,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.325.277.820,00	814.874.400,00	0,00	0,00	21.140.152.220,00
1	01	2	15	Perhubungan	23.047.746.502,00	851.721.300,00	0,00	0,00	23.899.467.802,00
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	17.520.257.300,00	0,00	0,00	0,00	17.520.257.300,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.521.370.800,00	133.808.900,00	0,00	0,00	15.655.179.700,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	14.695.115.980,00	1.076.000,00	0,00	0,00	14.696.191.980,00
1	01	2	20	Statistik	441.297.200,00	0,00	0,00	0,00	441.297.200,00
1	01	2	22	Kebudayaan	47.100.471.556,00	55.000.000,00	0,00	0,00	47.155.471.556,00
1	01	2	24	Kearsipan	643.907.040,00	0,00	0,00	0,00	643.907.040,00
1	01	3	25	Kelautan dan Perikanan	25.298.710.352,00	1.073.101.800,00	0,00	0,00	26.371.812.152,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	01	3	26	Pariwisata	13.009.313.737,00	347.957.700,00	0,00	0,00	13.357.271.437,00
1	01	3	27	Pertanian	50.346.775.944,00	2.555.670.300,00	0,00	0,00	52.902.446.244,00
1	01	3	28	Kehutanan	41.283.605.730,00	2.973.119.060,00	0,00	0,00	44.256.724.790,00
1	01	3	30	Perdagangan	17.630.269.940,00	44.223.000,00	0,00	0,00	17.674.492.940,00
1	01	3	31	Perindustrian	184.223.880,00	10.673.100,00	0,00	0,00	194.896.980,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	164.183.458.040,00	3.236.084.836,00	0,00	0,00	167.419.542.876,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	208.656.862.631,00	5.865.798.200,00	0,00	0,00	214.522.660.831,00
1	01	5	01	Perencanaan	21.871.777.384,00	2.859.507.498,00	0,00	0,00	24.731.284.882,00
1	01	5	02	Keuangan	202.359.296.320,00	5.125.579.499,00	62.772.177.068,00	1.635.406.960.761,00	1.905.664.013.648,00
1	01	5	03	Kepegawaian	183.559.991.712,00	760.737.000,00	0,00	0,00	184.320.728.712,00
1	01	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	1.089.606.560,00	0,00	0,00	0,00	1.089.606.560,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	15.300.450.456,00	520.005.200,00	0,00	0,00	15.820.455.656,00
1	01	5	07	Penghubung	8.401.140.744,00	317.413.000,00	0,00	0,00	8.718.553.744,00
1	01	6	01	Inspektorat	34.171.632.060,00	1.851.636.188,00	0,00	0,00	36.023.268.248,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	198.510.828.700,00	328.050.200,00	0,00	0,00	198.838.878.900,00
1	01	X	XX	Non Urusan	2.855.046.860,00	803.187.200,00	0,00	0,00	3.658.234.060,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	31.090.231.979,00	1.482.786.000,00	0,00	0,00	32.573.017.979,00
2	03	1	06	Sosial	264.416.700,00	0,00	0,00	0,00	264.416.700,00
2	03	4	01	Sekretariat Daerah	4.228.154.080,00	0,00	0,00	0,00	4.228.154.080,00
3				EKONOMI					
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	183.281.432.502,00	93.368.859.937,00	0,00	0,00	276.650.292.439,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	807.400.000,00	568.320.000,00	0,00	0,00	1.375.720.000,00
3	04	2	09	Pangan	7.867.657.360,00	0,00	0,00	0,00	7.867.657.360,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
3	04	2	15	Perhubungan	12.767.206.743,00	924.000.000,00	0,00	0,00	13.691.206.743,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	35.804.210.184,00	114.713.903.270,00	0,00	0,00	150.518.113.454,00
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.093.840.330,00	0,00	0,00	0,00	10.093.840.330,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	2.629.738.780,00	0,00	0,00	0,00	2.629.738.780,00
3	04	2	21	Persandian	469.557.380,00	44.500.000,00	0,00	0,00	514.057.380,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	4.710.743.580,00	660.389.000,00	0,00	0,00	5.371.132.580,00
3	04	3	27	Pertanian	18.407.668.275,00	10.000.000,00	0,00	0,00	18.417.668.275,00
3	04	3	28	Kehutanan	236.696.720,00	0,00	0,00	0,00	236.696.720,00
3	04	3	29	Energi dan Sumber Daya Mineral	190.499.500,00	0,00	0,00	0,00	190.499.500,00
3	04	3	30	Perdagangan	1.649.199.140,00	0,00	0,00	0,00	1.649.199.140,00
3	04	3	31	Perindustrian	2.414.763.260,00	0,00	0,00	0,00	2.414.763.260,00
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.243.844.980,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	13.743.844.980,00
4	05	2	10	Pertanahan	10.795.544.000,00	0,00	0,00	0,00	10.795.544.000,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	5.300.754.395,00	93.000.000,00	0,00	0,00	5.393.754.395,00
4	05	3	28	Kehutanan	70.961.240,00	0,00	0,00	0,00	70.961.240,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.194.051.416,00	16.626.100.000,00	0,00	0,00	45.820.151.416,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.925.823.704,00	0,00	0,00	0,00	8.925.823.704,00
6				KESEHATAN					
6	07	1	02	Kesehatan	37.867.392.436,00	35.679.311.100,00	0,00	0,00	73.546.703.536,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	332.121.540,00	0,00	0,00	0,00	332.121.540,00
7				PARIWISATA					
7	08	3	26	Pariwisata	1.563.088.240,00	0,00	0,00	0,00	1.563.088.240,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
8				PENDIDIKAN					
8	10	1	01	Pendidikan	341.154.540.730,00	423.387.506.928,00	0,00	0,00	764.542.047.658,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	61.736.664.400,00	0,00	0,00	0,00	61.736.664.400,00
8	10	2	22	Kebudayaan	530.464.927.136,00	0,00	0,00	0,00	530.464.927.136,00
8	10	2	23	Perpustakaan	527.473.360,00	100.000.000,00	0,00	0,00	627.473.360,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL					
9	11	1	06	Sosial	5.175.571.000,00	0,00	0,00	0,00	5.175.571.000,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.353.081.200,00	0,00	0,00	0,00	1.353.081.200,00
9	11	3	32	Transmigrasi	24.884.800,00	0,00	0,00	0,00	24.884.800,00
				TOTAL	4.465.445.882.383,00	753.187.821.368,00	62.772.177.068,00	1.635.406.960.761,00	6.916.812.841.580,00

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN VI

REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM



PROVINSI BALI
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN ANGGARAN 2024

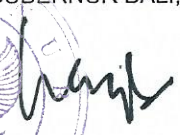
No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			
1.	Pendidikan Menengah	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	39.999.200,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	34.981.800,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.999.800,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	44.059.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.631.562.525,00
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	150.628.635.719,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	4.498.679.200,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	101.430.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	393.150.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	70.550.000,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	57.075.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	6.144.320.400,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	43.660.703.700,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.843.633.553,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	62.919.500,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.998.600,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	43.059.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.640.518.078,00
		Pembangunan Ruang Praktik Siswa	10.653.500.000,00
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	60.067.623.277,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	402.278.200,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	929.832.100,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	83.370.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10.000.000.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	70.550.000,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	45.139.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	6.572.696.200,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	35.848.917.220,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
		Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	1.200.000.000,00
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	4.690.001.694,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	31.250.000,00
Total			358.740.432.766,00
2.	Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Kelas Baru	336.645.300,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	12.935.739.900,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	628.648.100,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	0,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.619.417.920,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	16.559.300,00
Total			19.537.010.520,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			378.277.443.286,00
B SPM Bidang Kesehatan			
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencanadan/atau berpotensi bencana provinsi.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	517.042.400,00
Total			517.042.400,00
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.405.881.900,00
Total			2.405.881.900,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			2.922.924.300,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	29.055.977.464,00
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.050.009.100,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.465.483.580,00
Total			45.571.470.144,00
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	11.065.383.160,00
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.028.074.300,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	262.831.900,00
Total			12.356.289.360,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			57.927.759.504,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Relokasi	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	499.622.640,00
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	20.822.600,00
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	272.217.800,00
Total			792.663.040,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			792.663.040,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	18.614.874.259,00
		Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	242.712.420,00
		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	29.899.600,00
Total			18.887.486.279,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			18.887.486.279,00
F SPM Bidang Sosial			
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	289.939.600,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.000.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	28.624.600,00
Total			2.318.564.200,00
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	120.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	74.406.700,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	236.941.200,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.318.000,00
		Pengasuhan	71.891.500,00
		Penyediaan Makanan	749.452.600,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.000.000,00
		Penyediaan Sandang	89.750.000,00
Total			1.402.760.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	149.580.300,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	24.500.800,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	52.170.600,00
		Pemulasaraan	158.890.100,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	618.890.000,00
Total			1.024.031.800,00
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Pemulangan ke Daerah Asal	74.200.000,00
		Penyediaan Permakanan	9.999.400,00
Total			84.199.400,00
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	257.936.700,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.240.000,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.240.000,00
Total			264.416.700,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			5.093.972.100,00

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN VII

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD



PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	1.070.204.418.888,00
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,00	764.289.447.758,00
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0,00	101.569.200,00
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0,00	74.981.000,00
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	0,00	76.049.700,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	588.365.607.868,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	72.734.054.136,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	554.703.400,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0,00	149.730.000,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	108.216.000,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	33.630.820.416,00
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0,00	16.949.810.640,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	45.571.470.144,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	12.356.289.360,00
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0,00	248.681.272,00
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0,00	163.246.037.360,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0,00	94.503.874.939,00
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	1.950.569.500,00
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0,00	1.387.555.620,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0,00	792.663.040,00
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	5.763.120.700,00
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	2.370.039.964,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	49.210.125.387,00
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	25.435.821.039,00
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	7.137.196.940,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	29.956.634.520,00
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	0,00	59.010.600,00
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	0,00	1.177.100,00
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	0,00	4.829.555.400,00
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0,00	18.569.500,00
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0,00	264.416.700,00
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	0,00	267.258.400,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	32.901.515.872,00
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0,00	381.347.600,00
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	0,00	169.431.000,00
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	0,00	33.141.400,00
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	0,00	791.800.000,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	588.609.660,00
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	25.825.700,00
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,00	472.310.100,00
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,00	9.203.500,00
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	9.996.400,00
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0,00	752.595.600,00
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0,00	83.149.900,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	607.072.190,00
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0,00	547.694.020,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0,00	6.573.647.880,00
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0,00	746.315.460,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	0,00	10.500.000.000,00
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	0,00	27.003.500,00
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	0,00	268.540.500,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	917.360.056,00
2	11	02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	0,00	320.771.180,00
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	381.912.607,00
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0,00	99.556.000,00
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0,00	14.114.700,00
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	0,00	19.267.800,00
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0,00	275.346.020,00
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0,00	34.710.800,00
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	22.404.300,00
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0,00	4.225.670.988,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0,00	483.824.320,00
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	0,00	427.237.620,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	14.256.010.580,00
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	0,00	320.543.320,00
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	0,00	1.271.343.020,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	5.292.255.300,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	0,00	332.121.540,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	23.899.467.802,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	0,00	12.208.154.763,00
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0,00	1.010.614.840,00
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	0,00	472.437.140,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	17.520.257.300,00
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	0,00	12.481.421.260,00
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	0,00	138.036.692.194,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	15.655.179.700,00
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	0,00	238.410.700,00
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0,00	175.363.380,00
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0,00	8.009.040.280,00
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	468.000.000,00	198.408.880,00
2	17	07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0,00	989.684.730,00
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0,00	482.932.360,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	14.696.191.980,00
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0,00	480.968.560,00
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0,00	285.448.560,00
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0,00	614.087.820,00
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0,00	1.143.149.560,00
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0,00	106.084.280,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	0,00	1.123.381.600,00
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	0,00	60.113.282.800,00
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	0,00	500.000.000,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	0,00	441.297.200,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	0,00	514.057.380,00

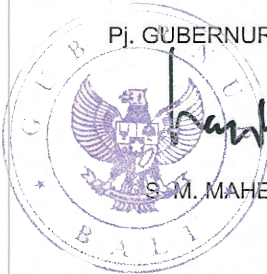
KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	47.155.471.556,00
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	0,00	57.664.821.760,00
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	0,00	1.367.912.760,00
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	0,00	47.497.400,00
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	0,00	545.556.320,00
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0,00	4.000.000.000,00
2	22	09	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	422.452.064.646,00	466.839.138.896,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0,00	525.774.880,00
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0,00	101.698.480,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	0,00	643.907.040,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	26.371.812.152,00
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	0,00	1.376.733.520,00
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0,00	481.614.400,00
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	0,00	2.306.859.069,00
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	562.144.940,00
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0,00	643.780.651,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	13.357.271.437,00
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	0,00	669.054.460,00
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0,00	460.697.860,00
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	0,00	195.296.320,00
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0,00	433.335.920,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	52.902.446.244,00
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	13.152.837.065,00
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	1.346.238.120,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0,00	2.138.124.870,00
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0,00	1.613.539.660,00
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	0,00	166.928.560,00
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		
3	28	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	44.256.724.790,00
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	0,00	184.334.720,00
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	52.362.000,00
3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	0,00	70.961.240,00
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0,00	8.000.000,00
3	29	03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0,00	8.000.000,00
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	0,00	174.499.500,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	17.674.492.940,00
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	0,00	322.387.120,00
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	0,00	111.426.100,00
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	0,00	49.213.800,00
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0,00	49.991.600,00
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0,00	843.582.440,00
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0,00	272.598.080,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	194.896.980,00
3	31	02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0,00	2.414.763.260,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0,00	24.884.800,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	126.587.537.956,00
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	0,00	963.091.000,00
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	0,00	1.684.752.680,00
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	36.223.802.240,00
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	0,00	4.228.154.080,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0,00	1.112.579.000,00
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	765.655.000,00
4	01	08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0,00	82.125.000,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	96.918.095.653,00
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	0,00	117.604.565.178,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	01		PERENCANAAN		
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	18.981.764.062,00
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	6.327.594.514,00	3.481.719.140,00
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.847.735.070,00	2.267.801.680,00
5	02		KEUANGAN		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	179.383.478.646,00
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0,00	1.704.292.879.282,00
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0,00	3.705.441.460,00
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	18.282.214.260,00
5	03		KEPEGAWAIAN		
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	179.284.451.012,00
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	5.036.277.700,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	1.089.606.560,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	12.628.199.856,00
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	3.192.255.800,00
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG		
5	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	5.705.543.984,00
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	0,00	3.013.009.760,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	28.310.421.728,00
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0,00	4.421.481.540,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0,00	3.291.364.980,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	11.344.826.348,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,00	4.320.805.120,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0,00	180.149.915.352,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	118.457.000,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	553.056.560,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	2.351.818.520,00
X			NON URUSAN		
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	3.658.234.060,00

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN VIII

SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DENGAN PPAS DENGAN RANCANGAN APBD



PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PRIORITAS
DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA DENGAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.334.722.386.877,00	1.334.722.386.877,00	1.893.421.243.086,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.274.584.543.677,00	1.274.584.543.677,00	1.831.684.578.686,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.274.584.543.677,00	1.274.584.543.677,00	1.831.684.578.686,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	325.051.856.418,00	325.051.856.418,00	763.028.213.758,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	189.069.426.292,00	189.069.426.292,00	405.341.733.197,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01 0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	122.000.000.000,00	122.000.000.000,00	150.628.635.719,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01 0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	0,00	1.202.629.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01 0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	3.568.662.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01 0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	4.843.633.553,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01 0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	0,00	384.026.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01 0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	0,00	0,00	346.566.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01 0036	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	3.165.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01 0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.266.324.400,00	1.266.324.400,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01 0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00	0,00	393.150.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01 0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	1.800.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01 0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	8.339.250.000,00	8.339.250.000,00	6.144.320.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01 0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.270.000.000,00	1.270.000.000,00	1.267.939.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01 0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	53.163.853.792,00	53.163.853.792,00	43.660.703.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01 0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	125.000.000,00	125.000.000,00	70.550.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	149.999.400,00	149.999.400,00	4.498.679.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	0,00	0,00	172.715.470.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	29.999.400,00	29.999.400,00	29.999.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	99.999.800,00	99.999.800,00	62.919.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	0,00	0,00	1.693.944.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00	8.631.562.525,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.999.800,00	124.999.800,00	124.999.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	249.999.700,00	249.999.700,00	108.342.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	124.592.187.118,00	124.592.187.118,00	318.831.471.332,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	62.500.000.000,00	62.500.000.000,00	60.067.623.277,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	0,00	0,00	10.653.500.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	595.525.552,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	0,00	1.965.009.411,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	0,00	0,00	205.252.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	3.750.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.160.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	11.521.196.200,00	11.521.196.200,00	6.572.696.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	0,00	10.000.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	929.832.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	46.870.991.118,00	46.870.991.118,00	35.848.917.220,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	125.000.000,00	125.000.000,00	70.550.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	300.000.000,00	300.000.000,00	402.278.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	0,00	171.614.700.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	50.000.000,00	50.000.000,00	31.835.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	31.250.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	0,00	0,00	1.200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00	8.640.518.078,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	4.690.001.694,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.999.800,00	124.999.800,00	124.998.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	276.984.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	11.390.243.008,00	11.390.243.008,00	38.855.009.229,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,00	0,00	12.935.739.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	1.028.265.309,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0010	Pembangunan Kantin Sekolah	0,00	0,00	320.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	738.005.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	3.396.220.000,00	3.396.220.000,00	3.396.219.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	429.560.000,00	429.560.000,00	244.599.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	512.250.000,00	512.250.000,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.087.180.800,00	1.087.180.800,00	1.050.980.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.602.213.808,00	5.602.213.808,00	5.619.417.920,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	210.079.200,00	210.079.200,00	628.648.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	0,00	0,00	11.133.760.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	16.547.600,00	16.547.600,00	15.547.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	17.559.600,00	17.559.600,00	16.559.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	1.317.967.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00	336.645.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	118.632.000,00	118.632.000,00	72.653.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	74.998.800,00	74.998.800,00	74.981.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	74.998.800,00	74.998.800,00	74.981.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	34.999.300,00	34.999.300,00	34.981.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	39.999.500,00	39.999.500,00	39.999.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	949.457.688.459,00	949.457.688.459,00	1.068.581.383.928,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.000.000,00	140.000.000,00	268.758.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.000.000,00	95.000.000,00	86.632.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.000.000,00	45.000.000,00	182.126.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	922.100.582.241,00	922.100.582.241,00	1.050.646.681.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	921.839.383.341,00	921.839.383.341,00	1.050.389.690.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	102.942.500,00	102.942.500,00	102.942.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	158.256.400,00	158.256.400,00	154.048.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.025.000,00	43.025.000,00	43.025.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	43.025.000,00	43.025.000,00	43.025.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.675.000,00	43.675.000,00	43.675.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	43.675.000,00	43.675.000,00	43.675.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.013.806.250,00	1.013.806.250,00	914.130.050,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	544.956.000,00	544.956.000,00	246.669.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.840.000,00	10.840.000,00	10.840.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.526.250,00	31.526.250,00	31.526.250,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	426.484.000,00	426.484.000,00	625.094.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.660.790.000,00	14.660.790.000,00	4.260.790.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.660.790.000,00	14.660.790.000,00	4.260.790.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.836.834.918,00	9.836.834.918,00	9.675.509.070,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.050.981.150,00	1.050.981.150,00	1.050.981.150,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.785.853.768,00	8.785.853.768,00	8.624.527.920,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.618.975.050,00	1.618.975.050,00	2.728.815.308,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	540.910.000,00	540.910.000,00	692.685.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	695.875.550,00	695.875.550,00	1.653.940.808,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	382.189.500,00	382.189.500,00	382.189.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	60.137.843.200,00	60.137.843.200,00	61.736.664.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	60.137.843.200,00	60.137.843.200,00	61.736.664.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.499.999.100,00	1.499.999.100,00	1.123.381.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1.499.999.100,00	1.499.999.100,00	1.123.381.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	199.999.600,00	199.999.600,00	91.521.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	299.999.800,00	299.999.800,00	169.258.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	499.999.800,00	499.999.800,00	490.941.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	499.999.900,00	499.999.900,00	371.660.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	58.137.844.100,00	58.137.844.100,00	60.113.282.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	7.787.844.100,00	7.787.844.100,00	7.293.401.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.813.286.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	5.287.844.100,00	5.287.844.100,00	5.480.115.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	300.000.000,00	300.000.000,00	169.881.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.03	0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	300.000.000,00	300.000.000,00	169.881.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	50.050.000.000,00	50.050.000.000,00	52.650.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	50.050.000.000,00	50.050.000.000,00	52.650.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	1.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001						UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	2.606.105.320,00	2.606.105.320,00	2.223.412.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.606.105.320,00	2.606.105.320,00	2.223.412.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.606.105.320,00	2.606.105.320,00	2.223.412.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.605.354.000,00	1.605.354.000,00	1.261.234.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	917.726.000,00	917.726.000,00	738.284.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	103.520.000,00	103.520.000,00	101.430.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	211.851.000,00	211.851.000,00	57.075.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	61.705.000,00	61.705.000,00	44.059.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	540.650.000,00	540.650.000,00	535.720.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	687.628.000,00	687.628.000,00	522.950.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	83.400.000,00	83.400.000,00	83.370.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	186.636.000,00	186.636.000,00	45.139.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	61.705.000,00	61.705.000,00	43.059.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.02	0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	355.887.000,00	355.887.000,00	351.382.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.000.751.320,00	1.000.751.320,00	962.178.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.973.400,00	132.973.400,00	92.075.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.988.900,00	59.988.900,00	40.216.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.999.500,00	2.999.500,00	2.999.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.985.000,00	69.985.000,00	48.860.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	751.317.920,00	751.317.920,00	753.642.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	751.317.920,00	751.317.920,00	753.642.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.460.000,00	116.460.000,00	116.460.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.340.000,00	103.340.000,00	103.340.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.120.000,00	10.120.000,00	10.120.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0002						UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	1.005.756.340,00	1.005.756.340,00	838.475.260,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	227.999.300,00	227.999.300,00	101.569.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	194.999.900,00	194.999.900,00	69.519.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	03	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	194.999.900,00	194.999.900,00	69.519.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	32.999.400,00	32.999.400,00	32.049.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	03	1.02	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	32.999.400,00	32.999.400,00	32.049.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	76.999.700,00	76.999.700,00	76.049.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	76.999.700,00	76.999.700,00	76.049.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	06	1.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	76.999.700,00	76.999.700,00	76.049.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	700.757.340,00	700.757.340,00	660.856.360,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.458.900,00	46.458.900,00	42.496.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.623.300,00	8.623.300,00	8.618.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.547.600,00	6.547.600,00	6.547.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.288.000,00	31.288.000,00	27.330.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.488.440,00	563.488.440,00	527.549.960,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	563.488.440,00	563.488.440,00	527.549.960,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.810.000,00	90.810.000,00	90.810.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.810.000,00	90.810.000,00	90.810.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kesehatan	263.856.257.811,00	263.818.691.915,00	280.872.270.176,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	263.856.257.811,00	263.818.691.915,00	280.872.270.176,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	25.995.690.836,00	25.995.690.836,00	32.263.655.736,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	25.790.461.636,00	25.790.461.636,00	32.167.044.636,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	150.918.200,00	150.918.200,00	517.042.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	117.726.000,00	117.726.000,00	2.405.881.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	175.310.600,00	175.310.600,00	294.669.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	173.309.800,00	173.309.800,00	158.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100.000.000,00	100.000.000,00	56.459.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	43.412.700,00	43.412.700,00	16.720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.442.389.936,00	1.442.389.936,00	2.003.674.836,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23.382.187.500,00	23.382.187.500,00	26.494.321.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	0,00	143.790.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	92.560.700,00	92.560.700,00	28.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	96.396.200,00	96.396.200,00	37.045.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	16.250.000,00	16.250.000,00	10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	40.159.600,00	40.159.600,00	21.299.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	40.159.600,00	40.159.600,00	21.299.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	165.069.600,00	165.069.600,00	75.311.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	31.766.700,00	31.766.700,00	14.901.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	133.302.900,00	133.302.900,00	60.409.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	525.220.800,00	525.220.800,00	521.103.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	41.969.500,00	41.969.500,00	12.460.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	41.969.500,00	41.969.500,00	12.460.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	483.251.300,00	483.251.300,00	508.643.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	102.093.500,00	102.093.500,00	12.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	381.157.800,00	381.157.800,00	496.043.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	240.786.600,00	240.786.600,00	149.730.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	103.190.100,00	103.190.100,00	73.518.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	103.190.100,00	103.190.100,00	73.518.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	137.596.500,00	137.596.500,00	76.212.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	137.596.500,00	137.596.500,00	76.212.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	146.025.000,00	146.025.000,00	108.216.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	146.025.000,00	146.025.000,00	108.216.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	146.025.000,00	146.025.000,00	108.216.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	236.948.534.575,00	236.910.968.679,00	247.829.565.040,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	286.665.900,00	286.665.900,00	219.142.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	243.691.800,00	243.691.800,00	200.188.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.974.100,00	42.974.100,00	18.954.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	216.813.760.595,00	216.813.760.595,00	225.192.546.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	216.757.232.395,00	216.757.232.395,00	225.179.064.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.528.200,00	56.528.200,00	13.482.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.192.993.600,00	1.192.993.600,00	1.255.112.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	227.692.200,00	227.692.200,00	91.982.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	965.301.400,00	965.301.400,00	1.163.130.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.077.264.280,00	18.039.698.384,00	20.654.642.840,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.597.264.280,00	17.559.698.384,00	20.174.642.840,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.850.200,00	577.850.200,00	508.120.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	457.800.000,00	457.800.000,00	430.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.050.200,00	100.050.200,00	57.320.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001						UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	4.613.004.168,00	4.613.004.168,00	3.980.053.720,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	249.382.900,00	249.382.900,00	33.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	249.382.900,00	249.382.900,00	33.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	249.382.900,00	249.382.900,00	33.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.363.621.268,00	4.363.621.268,00	3.946.453.720,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	606.301.700,00	606.301.700,00	207.368.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	437.171.000,00	437.171.000,00	43.521.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169.130.700,00	169.130.700,00	163.846.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.603.574.568,00	1.603.574.568,00	1.607.410.620,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	363.900.000,00	363.900.000,00	363.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.239.674.568,00	1.239.674.568,00	1.243.510.620,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.745.000,00	153.745.000,00	131.675.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.175.000,00	39.175.000,00	39.175.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.570.000,00	114.570.000,00	92.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002						UPTD Balai Laboratorium Kesehatan	9.893.657.094,00	9.893.657.094,00	9.527.564.370,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	702.664.600,00	702.664.600,00	408.340.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	702.664.600,00	702.664.600,00	408.340.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.560.280.744,00	2.560.280.744,00	2.545.651.820,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	589.000.000,00	589.000.000,00	589.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.971.280.744,00	1.971.280.744,00	1.956.651.820,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.060.000,00	395.060.000,00	337.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.100.000,00	108.100.000,00	108.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	198.960.000,00	198.960.000,00	151.820.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.000.000,00	88.000.000,00	78.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	6.235.651.750,00	6.235.651.750,00	6.235.651.750,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.235.651.750,00	6.235.651.750,00	6.235.651.750,00
1.02.0.00.0.00.01.0003						UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	2.952.664.124,00	2.928.935.020,00	2.646.037.060,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	230.655.900,00	230.655.900,00	198.196.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	230.655.900,00	230.655.900,00	198.196.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.200.000,00	15.200.000,00	15.199.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	58.756.500,00	58.756.500,00	26.299.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	156.699.400,00	156.699.400,00	156.698.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.722.008.224,00	2.698.279.120,00	2.447.840.160,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	317.976.700,00	321.681.700,00	156.698.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.896.800,00	168.896.800,00	19.555.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.079.900,00	152.784.900,00	137.142.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.049.306.824,00	2.086.872.720,00	2.061.456.560,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.049.306.824,00	2.086.872.720,00	2.061.456.560,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.724.700,00	289.724.700,00	229.684.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.400.000,00	57.400.000,00	39.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.288.900,00	71.288.900,00	57.468.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	226.035.800,00	161.035.800,00	132.815.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0004						RSUD Bali Mandara	222.341.698.500,00	222.341.698.500,00	231.084.229.596,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	29.732.070.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	29.732.070.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0,00	0,00	8.732.070.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	201.341.698.500,00	201.341.698.500,00	201.352.159.596,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.341.698.500,00	41.341.698.500,00	41.352.159.596,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.806.240.000,00	6.806.240.000,00	5.318.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.535.458.500,00	34.535.458.500,00	36.033.359.596,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005						Rumah Sakit Jiwa	36.756.079.426,00	36.756.079.426,00	39.242.290.442,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	0,00	1.425.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0,00	0,00	1.425.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0,00	0,00	1.425.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	36.756.079.426,00	36.756.079.426,00	37.817.290.442,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.256.079.426,00	12.256.079.426,00	13.317.290.442,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.114.110.402,00	1.114.110.402,00	1.114.110.402,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.141.969.024,00	11.141.969.024,00	12.203.180.040,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006						Rumah Sakit Mata Bali Mandara	72.000.000.000,00	72.000.000.000,00	84.425.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	0,00	4.425.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0,00	0,00	4.425.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0,00	0,00	4.425.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	72.000.000.000,00	72.000.000.000,00	80.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	72.000.000.000,00	72.000.000.000,00	80.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	72.000.000.000,00	72.000.000.000,00	80.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007						UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional, dan Pengelolaan Perbekalan	22.703.491.184,00	22.703.491.184,00	10.134.866.040,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.557.939.800,00	1.557.939.800,00	4.690.131.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	957.277.000,00	957.277.000,00	4.089.468.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	91.500.000,00	91.500.000,00	215.311.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	865.777.000,00	865.777.000,00	3.874.157.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	600.662.800,00	600.662.800,00	600.662.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	600.662.800,00	600.662.800,00	600.662.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.145.551.384,00	21.145.551.384,00	5.444.734.540,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.137.856.600,00	1.137.856.600,00	807.611.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	775.233.300,00	775.233.300,00	487.715.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	362.623.300,00	362.623.300,00	319.895.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.700.000.000,00	15.700.000.000,00	434.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.700.000.000,00	15.700.000.000,00	434.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.104.974.984,00	3.104.974.984,00	3.110.670.940,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.104.974.984,00	3.104.974.984,00	3.110.670.940,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.202.719.800,00	1.202.719.800,00	1.092.452.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.571.600,00	85.571.600,00	63.291.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.076.348.200,00	1.076.348.200,00	988.360.600,00
1.03.1.04.0.00.01.0001						UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	3.963.027.250,00	3.963.027.250,00	1.773.564.280,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.963.027.250,00	3.963.027.250,00	1.773.564.280,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.896.852.218,00	2.896.852.218,00	885.317.240,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	2.896.852.218,00	2.896.852.218,00	885.317.240,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	2.896.852.218,00	2.896.852.218,00	885.317.240,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.066.175.032,00	1.066.175.032,00	888.247.040,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.792.900,00	99.792.900,00	84.494.500,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.971.200,00	11.971.200,00	11.971.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.614.900,00	19.614.900,00	10.526.500,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.236.800,00	5.236.800,00	5.236.800,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.970.000,00	11.970.000,00	5.760.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.168.700,00	172.168.700,00	33.170.300,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	157.318.400,00	157.318.400,00	18.320.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.850.300,00	14.850.300,00	14.850.300,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.300.000,00	134.300.000,00	134.300.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.100.000,00	53.100.000,00	53.100.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	659.913.432,00	659.913.432,00	636.282.240,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.895.848,00	309.895.848,00	285.799.680,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.010.000,00	18.010.000,00	18.010.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	332.007.584,00	332.007.584,00	332.472.560,00
1.03.1.04.0.00.01.0002						UPTD Pengelolaan Air Minum	29.018.411.568,00	29.018.411.568,00	29.055.977.464,00
1.03.1.04.0.00.01.0002	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	29.018.411.568,00	29.018.411.568,00	29.055.977.464,00
1.03.1.04.0.00.01.0002	1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	29.018.411.568,00	29.018.411.568,00	29.055.977.464,00
1.03.1.04.0.00.01.0002	1	03	03	1.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	29.018.411.568,00	29.018.411.568,00	29.055.977.464,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.0.00.01.0003						UPTD Pengelolaan Air Limbah	11.064.918.400,00	11.064.918.400,00	11.065.383.160,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.064.918.400,00	11.064.918.400,00	11.065.383.160,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	11.064.918.400,00	11.064.918.400,00	11.065.383.160,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	05	1.01	0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	11.064.918.400,00	11.064.918.400,00	11.065.383.160,00
1.03.1.04.2.10.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	326.919.539.328,00	326.919.539.328,00	347.671.552.051,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.757.070.276,00	8.757.070.276,00	16.949.810.640,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.439.385.324,00	2.439.385.324,00	1.223.782.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0009	Pembangunan Tanggul Sungai	0,00	0,00	547.820.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1.465.830.524,00	1.465.830.524,00	22.901.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	304.315.300,00	304.315.300,00	289.177.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	127.473.000,00	127.473.000,00	13.994.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	541.766.500,00	541.766.500,00	349.889.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.317.684.952,00	6.317.684.952,00	15.726.027.940,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.644.116.788,00	1.644.116.788,00	11.253.004.040,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.645.687.292,00	3.645.687.292,00	3.222.893.880,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.027.880.872,00	1.027.880.872,00	1.250.130.020,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	16.685.430.452,00	16.685.430.452,00	16.515.492.680,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	16.685.430.452,00	16.685.430.452,00	16.515.492.680,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.613.794.952,00	1.613.794.952,00	1.465.483.580,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.071.635.500,00	15.071.635.500,00	15.050.009.100,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.293.344.600,00	1.293.344.600,00	1.290.906.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.293.344.600,00	1.293.344.600,00	1.290.906.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.029.463.900,00	1.029.463.900,00	1.028.074.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	263.880.700,00	263.880.700,00	262.831.900,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	248.681.272,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	0,00	0,00	248.681.272,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	1.01	0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	0,00	0,00	248.681.272,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	191.986.821.717,00	191.986.821.717,00	163.246.037.360,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	191.986.821.717,00	191.986.821.717,00	163.246.037.360,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	190.404.216.117,00	190.404.216.117,00	161.871.332.460,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	757.605.600,00	757.605.600,00	683.651.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	825.000.000,00	825.000.000,00	691.053.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	55.178.233.658,00	55.178.233.658,00	94.503.874.939,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	55.178.233.658,00	55.178.233.658,00	94.503.874.939,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	1.228.582.200,00	1.228.582.200,00	1.801.539.980,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	4.504.930.236,00	4.504.930.236,00	4.504.895.236,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	14.640.858.300,00	14.640.858.300,00	12.560.718.060,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0032	Pembangunan Jembatan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	24.340.043.440,00	24.340.043.440,00	24.336.794.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	6.010.245.000,00	6.010.245.000,00	34.792.762.547,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	0,00	0,00	11.877.780.534,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.798.530.482,00	2.798.530.482,00	3.197.559.982,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.455.044.000,00	1.455.044.000,00	1.331.824.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.499.014.344,00	1.499.014.344,00	1.065.252.260,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	892.811.484,00	892.811.484,00	562.184.660,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	892.811.484,00	892.811.484,00	562.184.660,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	606.202.860,00	606.202.860,00	503.067.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	299.325.280,00	299.325.280,00	251.207.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	306.877.580,00	306.877.580,00	251.860.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.017.356.120,00	2.017.356.120,00	1.387.555.620,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	82.459.600,00	82.459.600,00	26.655.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.01	0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	82.459.600,00	82.459.600,00	26.655.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	731.335.564,00	731.335.564,00	419.673.480,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02	0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	731.335.564,00	731.335.564,00	419.673.480,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	551.464.980,00	551.464.980,00	354.395.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03	0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	401.000.680,00	401.000.680,00	248.860.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	150.464.300,00	150.464.300,00	105.535.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	652.095.976,00	652.095.976,00	586.831.940,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	237.354.992,00	237.354.992,00	176.381.980,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	414.740.984,00	414.740.984,00	410.449.960,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.502.268.161,00	33.502.268.161,00	32.742.573.376,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	827.466.232,00	827.466.232,00	756.968.280,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	453.212.460,00	453.212.460,00	426.572.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	374.253.772,00	374.253.772,00	330.395.580,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.010.004.009,00	27.010.004.009,00	26.871.550.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.010.004.009,00	27.010.004.009,00	26.871.550.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	782.540.300,00	782.540.300,00	765.752.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.171.400,00	24.171.400,00	24.171.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.549.300,00	65.549.300,00	65.491.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.500.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.009.600,00	85.009.600,00	85.009.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	32.520.000,00	32.520.000,00	16.260.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	465.290.000,00	465.290.000,00	464.820.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	207.861.900,00	207.861.900,00	180.535.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	207.861.900,00	207.861.900,00	180.535.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.093.826.448,00	1.093.826.448,00	983.942.692,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	572.000.000,00	572.000.000,00	562.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.226.448,00	318.226.448,00	318.342.692,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.580.569.272,00	3.580.569.272,00	3.183.824.104,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.965.833.380,00	1.965.833.380,00	1.566.414.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	205.497.688,00	205.497.688,00	205.846.420,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.409.238.204,00	1.409.238.204,00	1.411.563.084,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.191.810.000,00	5.191.810.000,00	8.925.823.704,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	936.229.356,00	936.229.356,00	792.663.040,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	318.926.480,00	318.926.480,00	293.040.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	297.293.580,00	297.293.580,00	272.217.800,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01	0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	21.632.900,00	21.632.900,00	20.822.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	617.302.876,00	617.302.876,00	499.622.640,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	617.302.876,00	617.302.876,00	499.622.640,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.860.525.100,00	1.860.525.100,00	5.763.120.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.860.525.100,00	1.860.525.100,00	5.763.120.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	371.650.000,00	371.650.000,00	4.823.028.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.488.875.100,00	1.488.875.100,00	940.092.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.395.055.544,00	2.395.055.544,00	2.370.039.964,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	2.395.055.544,00	2.395.055.544,00	2.370.039.964,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	237.340.000,00	237.340.000,00	129.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	2.115.500.544,00	2.115.500.544,00	2.198.824.964,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	42.215.000,00	42.215.000,00	42.215.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.808.190.000,00	10.808.190.000,00	10.795.544.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	10.808.190.000,00	10.808.190.000,00	10.795.544.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	05	1.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	05	1.01	0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	32.817.000,00	32.817.000,00	27.003.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	06	1.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	32.817.000,00	32.817.000,00	27.003.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	06	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	32.817.000,00	32.817.000,00	27.003.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	275.373.000,00	275.373.000,00	268.540.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	275.373.000,00	275.373.000,00	268.540.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	275.373.000,00	275.373.000,00	268.540.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000						Satuan Polisi Pamong Praja	46.009.093.066,00	46.009.093.066,00	49.451.684.083,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	46.009.093.066,00	46.009.093.066,00	49.451.684.083,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	46.009.093.066,00	46.009.093.066,00	49.451.684.083,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.577.298.276,00	21.577.298.276,00	25.435.821.039,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	21.177.321.384,00	21.177.321.384,00	23.461.156.219,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	79.999.796,00	79.999.796,00	77.833.240,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	16.860.000.000,00	16.860.000.000,00	18.614.874.259,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	149.999.400,00	149.999.400,00	149.809.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	29.899.600,00	29.899.600,00	29.899.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	99.999.496,00	99.999.496,00	100.115.740,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.782.291.504,00	3.782.291.504,00	4.245.911.560,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	175.131.588,00	175.131.588,00	242.712.420,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	259.977.392,00	259.977.392,00	1.837.604.620,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	29.983.300,00	29.983.300,00	24.761.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	49.994.300,00	49.994.300,00	1.560.878.840,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	179.999.792,00	179.999.792,00	251.964.280,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	139.999.500,00	139.999.500,00	137.060.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	139.999.500,00	139.999.500,00	137.060.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.431.794.790,00	24.431.794.790,00	24.015.863.044,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.000.149.146,00	21.000.149.146,00	20.077.661.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.000.149.146,00	21.000.149.146,00	20.077.661.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199.682.500,00	199.682.500,00	244.272.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	199.682.500,00	199.682.500,00	244.272.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	534.160.300,00	534.160.300,00	549.655.100,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.980.600,00	44.980.600,00	44.980.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	349.337.100,00	349.337.100,00	364.834.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.847.600,00	24.847.600,00	24.847.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.995.000,00	54.995.000,00	54.993.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.492.000,00	90.492.000,00	89.258.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	40.492.000,00	40.492.000,00	39.258.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.138.310.844,00	1.138.310.844,00	1.147.622.100,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.390.000,00	59.390.000,00	59.390.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	925.920.844,00	925.920.844,00	935.232.100,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.888.394.244,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.888.394.244,00
1.05.0.00.0.00.04.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.188.974.608,00	28.188.974.608,00	26.272.787.369,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.438.737.900,00	4.438.737.900,00	4.202.111.900,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	246.895.300,00	246.895.300,00	201.943.300,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.01	0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	246.895.300,00	246.895.300,00	201.943.300,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.877.051.300,00	1.877.051.300,00	1.811.657.600,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	493.938.100,00	493.938.100,00	487.362.100,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	171.999.600,00	171.999.600,00	164.287.200,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	292.918.800,00	292.918.800,00	292.918.800,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0017	Penyusunan Rencana Kontijensi	149.668.400,00	149.668.400,00	138.148.400,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	96.762.400,00	96.762.400,00	90.597.400,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	671.764.000,00	671.764.000,00	638.343.700,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.345.235.200,00	1.345.235.200,00	1.322.954.500,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.03	0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	638.455.800,00	638.455.800,00	616.175.500,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.03	0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	706.779.400,00	706.779.400,00	706.779.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	969.556.100,00	969.556.100,00	865.556.500,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	467.028.400,00	467.028.400,00	377.641.100,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	53.059.000,00	53.059.000,00	53.059.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	258.772.100,00	258.772.100,00	258.770.200,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	72.222.200,00	72.222.200,00	60.312.200,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	118.474.400,00	118.474.400,00	115.774.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.750.236.708,00	23.750.236.708,00	22.070.675.469,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	184.163.100,00	184.163.100,00	155.818.900,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.640.700,00	65.640.700,00	57.090.700,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	118.522.400,00	118.522.400,00	98.728.200,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.128.410.708,00	14.128.410.708,00	12.714.782.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.128.410.708,00	14.128.410.708,00	12.714.782.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.400.000,00	71.400.000,00	71.400.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	71.400.000,00	71.400.000,00	71.400.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	696.746.900,00	696.746.900,00	566.630.100,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.996.000,00	9.996.000,00	9.996.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.678.300,00	125.678.300,00	125.677.300,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.220.700,00	11.220.700,00	11.220.700,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.995.000,00	23.995.000,00	13.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399.862.000,00	399.862.000,00	319.500.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	43.494.900,00	43.494.900,00	4.736.100,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	999.994.500,00	999.994.500,00	897.688.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	999.994.500,00	999.994.500,00	897.688.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.602.568.856,00	1.602.568.856,00	1.606.740.540,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.420.000,00	6.420.000,00	6.420.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.000.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.418.148.856,00	1.418.148.856,00	1.422.320.540,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.066.952.644,00	6.066.952.644,00	6.057.615.929,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.748.717.372,00	1.748.717.372,00	1.748.717.372,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	51.500.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.179.616.772,00	4.179.616.772,00	4.179.616.772,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.988.400,00	9.988.400,00	9.871.785,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.630.100,00	68.630.100,00	67.910.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001						UPTD Pengendalian Bencana Daerah	8.625.665.050,00	8.625.665.050,00	6.058.671.914,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.060.357.440,00	3.060.357.440,00	2.935.085.040,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.029.589.440,00	1.029.589.440,00	1.034.199.140,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.02	0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.029.589.440,00	1.029.589.440,00	1.034.199.140,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	373.520.000,00	373.520.000,00	243.665.900,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	373.520.000,00	373.520.000,00	243.665.900,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.657.248.000,00	1.657.248.000,00	1.657.220.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.04	0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.657.248.000,00	1.657.248.000,00	1.657.220.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.565.307.610,00	5.565.307.610,00	3.123.586.874,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.984.800,00	113.984.800,00	96.734.800,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.740.400,00	16.740.400,00	16.740.400,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.998.800,00	14.998.800,00	14.998.800,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.245.600,00	22.245.600,00	22.245.600,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000,00	60.000.000,00	42.750.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	554.500.000,00	554.500.000,00	553.655.600,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	554.500.000,00	554.500.000,00	553.655.600,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.816.133.036,00	3.816.133.036,00	1.548.053.820,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.576.133.036,00	3.576.133.036,00	1.308.053.820,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.080.689.774,00	1.080.689.774,00	925.142.654,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	835.879.774,00	835.879.774,00	680.476.654,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.810.000,00	199.810.000,00	199.666.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	31.290.379.535,00	31.290.379.535,00	29.417.396.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	30.345.966.835,00	30.345.966.835,00	28.490.165.300,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	59.140.800,00	59.140.800,00	59.010.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.530.000,00	3.530.000,00	3.486.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3.530.000,00	3.530.000,00	3.486.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	55.610.800,00	55.610.800,00	55.523.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	55.610.800,00	55.610.800,00	55.523.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	2.198.900,00	2.198.900,00	1.177.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	2.198.900,00	2.198.900,00	1.177.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	2.198.900,00	2.198.900,00	1.177.100,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.306.069.100,00	3.306.069.100,00	3.273.256.900,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	2.318.700.000,00	2.318.700.000,00	2.318.564.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	28.700.000,00	28.700.000,00	28.624.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	290.000.000,00	290.000.000,00	289.939.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	632.242.300,00	632.242.300,00	624.241.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	349.540.000,00	349.540.000,00	349.452.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	237.502.300,00	237.502.300,00	236.941.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	45.200.000,00	45.200.000,00	37.848.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	270.726.800,00	270.726.800,00	246.251.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	56.650.000,00	56.650.000,00	53.890.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	25.000.000,00	25.000.000,00	24.500.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	65.840.600,00	65.840.600,00	44.970.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	123.236.200,00	123.236.200,00	122.890.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	84.400.000,00	84.400.000,00	84.199.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan	10.000.000,00	10.000.000,00	9.999.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	74.400.000,00	74.400.000,00	74.200.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	21.458.000,00	21.458.000,00	18.569.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	9.000.000,00	9.000.000,00	7.536.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	9.000.000,00	9.000.000,00	7.536.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	12.458.000,00	12.458.000,00	11.032.900,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.814.900,00	6.814.900,00	5.391.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.643.100,00	5.643.100,00	5.641.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	262.497.800,00	262.497.800,00	264.416.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	262.497.800,00	262.497.800,00	264.416.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2.280.000,00	2.280.000,00	3.240.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	2.280.000,00	2.280.000,00	3.240.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	257.937.800,00	257.937.800,00	257.936.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	272.163.300,00	272.163.300,00	267.258.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	272.163.300,00	272.163.300,00	267.258.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	272.163.300,00	272.163.300,00	267.258.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.422.438.935,00	26.422.438.935,00	24.606.476.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.044.600,00	32.044.600,00	30.329.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.222.200,00	9.222.200,00	11.832.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.602.500,00	3.602.500,00	3.602.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.219.900,00	19.219.900,00	14.895.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.523.163.815,00	19.523.163.815,00	17.751.273.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.523.163.815,00	19.523.163.815,00	17.751.273.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	31.952.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.500.000,00	13.500.000,00	31.952.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.737.600,00	314.737.600,00	306.882.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.652.200,00	9.652.200,00	7.528.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.926.600,00	57.926.600,00	57.075.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.924.200,00	100.924.200,00	96.049.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.648.600,00	5.648.600,00	5.648.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.926.000,00	136.926.000,00	136.921.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.997.040,00	369.997.040,00	651.772.020,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.997.040,00	189.997.040,00	471.772.020,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.168.995.880,00	6.168.995.880,00	5.834.266.780,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.148.658.232,00	1.148.658.232,00	1.133.511.380,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.742.705.272,00	3.742.705.272,00	3.479.744.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.277.632.376,00	1.277.632.376,00	1.221.011.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	944.412.700,00	944.412.700,00	927.231.300,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	944.412.700,00	944.412.700,00	927.231.300,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	25.834.200,00	25.834.200,00	25.825.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	10.836.500,00	10.836.500,00	10.834.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.01	0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	10.836.500,00	10.836.500,00	10.834.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	14.997.700,00	14.997.700,00	14.991.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.02	0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	14.997.700,00	14.997.700,00	14.991.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	119.998.200,00	119.998.200,00	119.980.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	19.998.200,00	19.998.200,00	19.980.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	19.998.200,00	19.998.200,00	19.980.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.03	0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	14.999.900,00	14.999.900,00	9.203.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	14.999.900,00	14.999.900,00	9.203.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	04	1.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	14.999.900,00	14.999.900,00	9.203.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	9.997.100,00	9.997.100,00	9.996.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	9.997.100,00	9.997.100,00	9.996.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	9.997.100,00	9.997.100,00	9.996.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	763.583.700,00	763.583.700,00	752.595.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	14.990.900,00	14.990.900,00	10.830.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.01	0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	14.990.900,00	14.990.900,00	10.830.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	748.592.800,00	748.592.800,00	741.765.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	653.093.200,00	653.093.200,00	650.619.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.02	0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	95.499.600,00	95.499.600,00	91.146.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	9.999.600,00	9.999.600,00	9.630.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.999.600,00	9.999.600,00	9.630.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	1.03	0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	9.999.600,00	9.999.600,00	9.630.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001						UPTD Pelayanan Sosial	6.831.075.104,00	6.831.075.104,00	6.906.456.920,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.831.075.104,00	6.831.075.104,00	6.906.456.920,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.831.075.104,00	6.831.075.104,00	6.906.456.920,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.561.709.068,00	1.561.709.068,00	1.556.298.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	783.528.768,00	783.528.768,00	778.518.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	59.546.000,00	59.546.000,00	71.891.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	89.750.000,00	89.750.000,00	89.750.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	47.912.100,00	47.912.100,00	74.406.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	158.840.668,00	158.840.668,00	120.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	17.480.000,00	17.480.000,00	12.470.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	778.180.300,00	778.180.300,00	777.780.300,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	565.000.000,00	565.000.000,00	565.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	60.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	109.580.300,00	109.580.300,00	149.580.300,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	7.600.000,00	7.600.000,00	7.200.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.269.366.036,00	5.269.366.036,00	5.350.158.420,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.779.900,00	185.779.900,00	187.219.900,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.837.600,00	9.837.600,00	9.837.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.954.300,00	159.954.300,00	159.954.300,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.988.000,00	15.988.000,00	17.428.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.197.400,00	220.197.400,00	521.654.520,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.100.000,00	201.100.000,00	201.100.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.097.400,00	19.097.400,00	320.554.520,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.863.388.736,00	4.863.388.736,00	4.641.284.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	273.332.392,00	273.332.392,00	273.564.880,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.395.845.468,00	3.395.845.468,00	3.095.318.300,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.194.210.876,00	1.194.210.876,00	1.272.400.820,00
1.06.2.08.0.00.06.0002						UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	609.407.784,00	609.407.784,00	1.014.459.560,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0002	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	609.407.784,00	609.407.784,00	1.014.459.560,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	609.407.784,00	609.407.784,00	1.014.459.560,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	15.960.000,00	15.960.000,00	352.330.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	101.500.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	0,00	0,00	101.500.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.960.000,00	15.960.000,00	250.830.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03	1.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.980.000,00	7.980.000,00	7.680.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	7.980.000,00	7.980.000,00	243.150.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	7.999.900,00	7.999.900,00	73.519.900,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.999.900,00	7.999.900,00	73.519.900,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	07	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	7.999.900,00	7.999.900,00	4.499.900,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	07	1.03	0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	0,00	0,00	69.020.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	585.447.884,00	585.447.884,00	588.609.660,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.968.800,00	33.968.800,00	35.758.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.962.800,00	19.962.800,00	19.052.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.476.000,00	12.476.000,00	15.176.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	546.479.084,00	546.479.084,00	547.851.660,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.117.592,00	159.117.592,00	160.244.880,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.846.696,00	38.846.696,00	38.962.940,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	348.514.796,00	348.514.796,00	348.643.840,00
2.07.3.29.0.00.01.0001						UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	1.017.961.272,00	1.017.961.272,00	1.032.109.465,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.017.961.272,00	1.017.961.272,00	1.032.109.465,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	341.600.000,00	341.600.000,00	336.350.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	341.600.000,00	341.600.000,00	336.350.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	341.600.000,00	341.600.000,00	336.350.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	676.361.272,00	676.361.272,00	695.759.465,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.566.900,00	38.566.900,00	36.703.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.276.000,00	3.276.000,00	3.276.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.974.300,00	7.974.300,00	6.110.400,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.090.600,00	1.090.600,00	1.090.600,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.026.000,00	12.026.000,00	12.026.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.057.700,00	16.057.700,00	16.057.700,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.057.700,00	16.057.700,00	16.057.700,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.304.984,00	220.304.984,00	240.753.369,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.304.984,00	196.304.984,00	216.753.369,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.431.688,00	401.431.688,00	402.245.396,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.361.024,00	118.361.024,00	80.795.128,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.015.288,00	36.015.288,00	36.015.288,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	247.055.376,00	247.055.376,00	285.434.980,00
2.07.3.29.0.00.01.0002						UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	698.319.164,00	698.319.164,00	1.329.977.776,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	151.500.000,00	151.500.000,00	771.500.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	151.500.000,00	151.500.000,00	771.500.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	151.500.000,00	151.500.000,00	771.500.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	546.819.164,00	546.819.164,00	558.477.776,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.803.900,00	35.803.900,00	30.702.700,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.400,00	5.000.400,00	5.000.400,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	7.898.800,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.803.500,00	2.803.500,00	2.803.500,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.243.792,00	99.243.792,00	115.799.896,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000,00	960.000,00	960.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.283.792,00	86.283.792,00	102.839.896,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.771.472,00	411.771.472,00	411.975.180,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.065.896,00	127.065.896,00	127.182.140,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	269.705.576,00	269.705.576,00	269.793.040,00
2.07.3.29.3.32.01.0000						Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	31.158.630.020,00	31.158.630.020,00	32.130.532.931,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	44.997.600,00	44.997.600,00	44.997.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	44.997.600,00	44.997.600,00	44.997.600,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	44.997.600,00	44.997.600,00	44.997.600,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	179.974.000,00	179.974.000,00	169.431.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	139.974.000,00	139.974.000,00	133.117.200,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	139.974.000,00	139.974.000,00	133.117.200,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	40.000.000,00	40.000.000,00	36.313.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	40.000.000,00	40.000.000,00	36.313.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	54.479.000,00	54.479.000,00	33.141.400,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	6.527.000,00	6.527.000,00	5.566.400,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	6.527.000,00	6.527.000,00	5.566.400,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)	47.952.000,00	47.952.000,00	27.575.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	46.152.000,00	46.152.000,00	25.775.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.03	0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	27.500.000,00	27.500.000,00	20.300.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	27.500.000,00	27.500.000,00	20.300.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	27.500.000,00	27.500.000,00	20.300.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.624.179.920,00	30.624.179.920,00	31.647.278.631,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.275.729.312,00	27.275.729.312,00	28.299.312.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.275.729.312,00	27.275.729.312,00	28.299.312.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.781.800,00	325.781.800,00	320.202.900,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.994.200,00	14.994.200,00	14.994.200,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.947.500,00	45.947.500,00	40.731.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.800.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.795.100,00	27.795.100,00	27.795.100,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000,00	9.000.000,00	8.637.600,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.025.000,00	5.025.000,00	5.025.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.220.000,00	158.220.000,00	158.220.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.411.800,00	116.411.800,00	83.288.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	116.411.800,00	116.411.800,00	83.288.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	992.887.064,00	992.887.064,00	1.025.451.323,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	396.000.000,00	396.000.000,00	396.000.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	594.007.064,00	594.007.064,00	626.571.323,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.913.369.944,00	1.913.369.944,00	1.919.024.408,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	659.127.168,00	659.127.168,00	640.495.928,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.263.584,00	170.263.584,00	170.728.560,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.083.979.192,00	1.083.979.192,00	1.107.799.920,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	227.499.500,00	227.499.500,00	215.384.300,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	202.499.500,00	202.499.500,00	190.499.500,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	186.499.500,00	186.499.500,00	174.499.500,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05	1.08		Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	186.499.500,00	186.499.500,00	174.499.500,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05	1.08	0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	186.499.500,00	186.499.500,00	174.499.500,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	25.000.000,00	25.000.000,00	24.884.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	25.000.000,00	25.000.000,00	24.884.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	25.000.000,00	25.000.000,00	24.884.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32	03	1.01	0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	25.000.000,00	25.000.000,00	24.884.800,00
2.13.2.12.2.14.01.0000						Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24.887.880.677,00	24.887.880.677,00	22.383.335.700,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24.887.880.677,00	24.887.880.677,00	22.383.335.700,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	910.364.476,00	910.364.476,00	911.061.940,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	483.475.588,00	483.475.588,00	483.824.320,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	483.475.588,00	483.475.588,00	483.824.320,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02	1.01	0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	483.475.588,00	483.475.588,00	483.824.320,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	426.888.888,00	426.888.888,00	427.237.620,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	426.888.888,00	426.888.888,00	427.237.620,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03	1.01	0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	426.888.888,00	426.888.888,00	427.237.620,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	23.166.810.325,00	23.166.810.325,00	21.140.152.220,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	320.194.588,00	320.194.588,00	320.543.320,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	320.194.588,00	320.194.588,00	320.543.320,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03	1.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	320.194.588,00	320.194.588,00	320.543.320,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.488.121.384,00	1.488.121.384,00	1.271.343.020,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.488.121.384,00	1.488.121.384,00	1.271.343.020,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01	0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	770.037.604,00	770.037.604,00	569.753.420,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	578.084.080,00	578.084.080,00	574.032.600,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01	0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	139.999.700,00	139.999.700,00	127.557.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.769.930.420,00	4.769.930.420,00	5.292.255.300,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.769.930.420,00	4.769.930.420,00	5.292.255.300,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	720.616.684,00	720.616.684,00	721.081.660,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	489.406.384,00	489.406.384,00	489.871.360,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	641.770.488,00	641.770.488,00	642.119.220,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.918.136.864,00	2.918.136.864,00	3.439.183.060,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.588.563.933,00	16.588.563.933,00	14.256.010.580,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	311.580.288,00	311.580.288,00	311.929.020,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	292.080.288,00	292.080.288,00	292.429.020,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.785.659.237,00	12.785.659.237,00	10.325.499.820,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.655.281.149,00	12.655.281.149,00	10.194.773.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.378.088,00	130.378.088,00	130.726.820,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.091.143.700,00	1.091.143.700,00	1.091.015.200,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.765.400,00	7.765.400,00	7.763.400,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	614.274.000,00	614.274.000,00	614.268.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.500.000,00	75.500.000,00	75.500.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.767.300,00	7.767.300,00	7.767.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.550.000,00	14.550.000,00	14.550.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.937.000,00	363.937.000,00	363.816.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	207.340.000,00	207.340.000,00	407.426.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	207.340.000,00	207.340.000,00	407.426.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	690.697.052,00	690.697.052,00	692.091.280,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.400.000,00	182.400.000,00	182.400.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	508.297.052,00	508.297.052,00	509.691.280,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.502.143.656,00	1.502.143.656,00	1.428.049.260,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.397.483.656,00	1.397.483.656,00	1.323.389.260,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.660.000,00	104.660.000,00	104.660.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	810.705.876,00	810.705.876,00	332.121.540,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	810.705.876,00	810.705.876,00	332.121.540,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	810.705.876,00	810.705.876,00	332.121.540,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03	1.01	0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	810.705.876,00	810.705.876,00	332.121.540,00
2.15.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perhubungan	26.830.889.350,00	27.548.162.952,00	24.484.780.630,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	26.830.889.350,00	27.548.162.952,00	24.484.780.630,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.521.611.467,00	2.272.178.069,00	1.044.713.160,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	534.487.073,00	1.285.053.675,00	450.571.840,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	361.160.462,00	1.111.727.064,00	341.431.440,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	173.326.611,00	173.326.611,00	109.140.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	86.665.026,00	86.665.026,00	53.609.100,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	43.333.512,00	43.333.512,00	26.957.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	43.331.514,00	43.331.514,00	26.651.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	489.472.800,00	489.472.800,00	156.296.100,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.10	0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	489.472.800,00	489.472.800,00	156.296.100,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	410.986.568,00	410.986.568,00	384.236.120,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	410.986.568,00	410.986.568,00	384.236.120,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	905.389.976,00	905.389.976,00	871.047.840,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	905.389.976,00	905.389.976,00	871.047.840,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	905.389.976,00	905.389.976,00	871.047.840,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	497.408.576,00	497.408.576,00	472.437.140,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	497.408.576,00	497.408.576,00	472.437.140,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	497.408.576,00	497.408.576,00	472.437.140,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.906.479.331,00	23.873.186.331,00	22.096.582.490,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.679.800,00	61.386.800,00	37.659.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.727.400,00	39.963.400,00	21.423.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.952.400,00	21.423.400,00	16.236.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.696.021.383,00	18.696.021.383,00	17.815.165.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.667.614.283,00	18.667.614.283,00	17.795.646.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.407.100,00	28.407.100,00	19.519.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.346.716.500,00	1.346.716.500,00	786.041.050,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.489.000,00	6.489.000,00	6.489.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	916.029.700,00	916.029.700,00	376.204.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.303.300,00	7.303.300,00	7.303.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.202.500,00	25.202.500,00	10.822.250,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	311.692.000,00	311.692.000,00	305.222.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	627.681.000,00	627.681.000,00	920.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.036.000,00	325.036.000,00	920.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	302.645.000,00	302.645.000,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.323.164,00	616.323.164,00	614.558.860,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	245.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	369.823.164,00	369.823.164,00	368.058.860,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.525.057.484,00	2.525.057.484,00	1.923.157.180,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.005.963.584,00	1.005.963.584,00	733.239.280,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.774.400,00	68.774.400,00	47.864.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.450.319.500,00	1.450.319.500,00	1.142.053.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0001						UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	2.557.882.088,00	1.840.729.160,00	2.505.417.432,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.229.161.384,00	1.504.048.456,00	2.126.454.340,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	588.507.600,00	588.507.600,00	566.282.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02	1.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	588.507.600,00	588.507.600,00	566.282.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.640.653.784,00	915.540.856,00	1.560.172.340,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02	1.05	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.640.653.784,00	915.540.856,00	1.560.172.340,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	328.720.704,00	336.680.704,00	378.963.092,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.179.712,00	136.179.712,00	122.341.412,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.850.812,00	3.850.812,00	3.850.812,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.693.300,00	90.693.300,00	83.635.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	719.600,00	719.600,00	719.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.916.000,00	40.916.000,00	34.136.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.116.496,00	43.776.496,00	42.360.940,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.197.800,00	2.197.800,00	666.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	660.000,00	660.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.918.696,00	40.918.696,00	41.034.940,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.424.496,00	156.724.496,00	214.260.740,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.134.496,00	138.134.496,00	195.780.740,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.290.000,00	18.590.000,00	18.480.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002						UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	8.490.561.152,00	8.490.561.152,00	7.929.961.452,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.871.705.480,00	7.871.705.480,00	7.346.483.472,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7.871.705.480,00	7.871.705.480,00	7.346.483.472,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7.871.705.480,00	7.871.705.480,00	7.346.483.472,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	618.855.672,00	618.855.672,00	583.477.980,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.469.000,00	188.469.000,00	142.547.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	964.400,00	964.400,00	964.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.215.000,00	99.215.000,00	58.723.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.600,00	14.999.600,00	9.850.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.988.000,00	2.988.000,00	2.988.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.302.000,00	45.302.000,00	45.022.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.740.000,00	13.740.000,00	9.160.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	13.740.000,00	13.740.000,00	9.160.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.102.296,00	57.102.296,00	72.218.540,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	396.000,00	396.000,00	396.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.700.000,00	17.700.000,00	32.700.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.006.296,00	39.006.296,00	39.122.540,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359.544.376,00	359.544.376,00	359.551.840,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	346.434.376,00	346.434.376,00	347.131.840,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.110.000,00	13.110.000,00	12.420.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003						UPTD Perlengkapan Jalan	2.049.428.864,00	2.049.428.864,00	1.927.335.531,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.734.999.168,00	1.734.999.168,00	1.690.503.791,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.734.999.168,00	1.734.999.168,00	1.690.503.791,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.134.999.684,00	1.134.999.684,00	1.115.295.070,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02	1.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	599.999.484,00	599.999.484,00	575.208.721,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	314.429.696,00	314.429.696,00	236.831.740,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.232.000,00	35.232.000,00	20.499.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.091.800,00	6.091.800,00	3.839.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.140.200,00	29.140.200,00	16.660.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	129.951.500,00	129.951.500,00	66.969.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.951.500,00	129.951.500,00	66.969.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.246.196,00	149.246.196,00	149.362.440,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.926.196,00	140.926.196,00	141.042.440,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.320.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004						UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	1.116.139.460,00	1.116.009.460,00	743.179.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	461.270.000,00	461.140.000,00	139.567.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	461.270.000,00	461.140.000,00	139.567.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	03	1.09	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	461.270.000,00	461.140.000,00	139.567.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	654.869.460,00	654.869.460,00	603.612.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	496.372.060,00	496.372.060,00	476.236.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.272.100,00	85.272.100,00	67.762.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.496.000,00	2.496.000,00	700.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.540.000,00	3.540.000,00	1.548.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	405.063.960,00	405.063.960,00	406.226.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.797.400,00	37.797.400,00	22.875.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	37.797.400,00	37.797.400,00	22.875.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	600.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	1.800.000,00	600.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.900.000,00	118.900.000,00	103.900.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.500.000,00	113.500.000,00	98.500.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000						Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	44.441.727.772,00	44.441.727.772,00	159.507.112.970,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	43.359.508.369,00	43.359.508.369,00	158.551.758.390,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	12.802.691.140,00	12.802.691.140,00	12.481.421.260,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	12.802.691.140,00	12.802.691.140,00	12.481.421.260,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.467.999.376,00	1.467.999.376,00	1.026.857.440,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.878.999.480,00	3.878.999.480,00	5.359.038.200,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	1.794.599.976,00	1.794.599.976,00	1.385.259.640,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	3.128.899.232,00	3.128.899.232,00	2.537.087.840,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.578.099.576,00	1.578.099.576,00	1.837.802.840,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	954.093.500,00	954.093.500,00	335.375.300,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	12.540.941.584,00	12.540.941.584,00	128.550.079.830,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	12.540.941.584,00	12.540.941.584,00	128.550.079.830,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	0,00	0,00	1.306.175.700,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.185.841.588,00	1.185.841.588,00	114.906.547.890,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	11.355.099.996,00	11.355.099.996,00	12.337.356.240,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.015.875.645,00	18.015.875.645,00	17.520.257.300,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.832.200,00	30.832.200,00	29.676.300,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.286.700,00	19.286.700,00	18.018.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.074.000,00	5.074.000,00	5.139.800,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.471.500,00	6.471.500,00	6.518.500,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.908.322.059,00	13.908.322.059,00	13.688.246.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.715.947.459,00	13.715.947.459,00	12.985.533.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192.374.600,00	192.374.600,00	702.713.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	367.162.690,00	367.162.690,00	298.508.140,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.488.840,00	4.488.840,00	4.488.840,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.999.700,00	79.999.700,00	40.007.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.500.000,00	87.500.000,00	87.500.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.660.900,00	13.660.900,00	13.660.900,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.526.250,00	31.526.250,00	31.522.200,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.987.000,00	149.987.000,00	121.329.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533.000.000,00	533.000.000,00	533.000.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.176.558.696,00	3.176.558.696,00	2.970.826.860,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.520.880.544,00	1.520.880.544,00	1.386.501.960,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.860.000,00	99.860.000,00	99.570.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.464.938.152,00	1.464.938.152,00	1.393.874.900,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.480.000,00	84.480.000,00	84.480.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	504.219.880,00	504.219.880,00	441.297.200,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	504.219.880,00	504.219.880,00	441.297.200,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	504.219.880,00	504.219.880,00	441.297.200,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	176.570.396,00	176.570.396,00	150.743.840,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	179.814.092,00	179.814.092,00	164.656.480,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	147.835.392,00	147.835.392,00	125.896.880,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	577.999.523,00	577.999.523,00	514.057.380,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	577.999.523,00	577.999.523,00	514.057.380,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	441.702.627,00	441.702.627,00	384.961.540,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	37.431.231,00	37.431.231,00	36.899.300,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	181.474.096,00	181.474.096,00	168.137.340,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	81.767.300,00	81.767.300,00	81.166.900,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	141.030.000,00	141.030.000,00	98.758.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	136.296.896,00	136.296.896,00	129.095.840,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	136.296.896,00	136.296.896,00	129.095.840,00
2.16.2.20.2.21.02.0001						UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital	0,00	0,00	6.668.918.940,00
2.16.2.20.2.21.02.0001	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	6.668.918.940,00
2.16.2.20.2.21.02.0001	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	0,00	0,00	6.668.918.940,00
2.16.2.20.2.21.02.0001	2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	6.668.918.940,00
2.16.2.20.2.21.02.0001	2	16	03	1.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	0,00	0,00	6.668.918.940,00
2.16.2.20.2.21.02.0002						UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali	0,00	0,00	2.817.693.424,00
2.16.2.20.2.21.02.0002	2	16	03	1.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	2.817.693.424,00
2.17.0.00.0.00.01.0000						Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.280.215.888,00	20.280.215.888,00	17.316.829.770,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	20.280.215.888,00	20.280.215.888,00	17.316.829.770,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	237.829.480,00	237.829.480,00	238.410.700,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	217.829.480,00	217.829.480,00	218.410.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.01	0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	217.829.480,00	217.829.480,00	218.410.700,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.02	0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	175.131.792,00	175.131.792,00	175.363.380,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	49.999.500,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	50.000.000,00	50.000.000,00	49.999.500,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	125.131.792,00	125.131.792,00	125.363.880,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	125.131.792,00	125.131.792,00	125.363.880,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	225.131.792,00	225.131.792,00	198.408.880,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	225.131.792,00	225.131.792,00	198.408.880,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	175.131.792,00	175.131.792,00	148.408.980,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	49.999.900,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	475.658.960,00	475.658.960,00	989.684.730,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	475.658.960,00	475.658.960,00	989.684.730,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	425.658.960,00	425.658.960,00	939.685.230,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	50.000.000,00	50.000.000,00	49.999.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	212.697.688,00	212.697.688,00	482.932.360,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	212.697.688,00	212.697.688,00	482.932.360,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	182.697.688,00	182.697.688,00	219.328.560,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	30.000.000,00	30.000.000,00	263.603.800,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.953.766.176,00	18.953.766.176,00	15.232.029.720,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.000.000,00	91.000.000,00	128.914.020,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	122.914.420,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	5.999.600,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.168.705.429,00	14.168.705.429,00	12.616.431.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.168.705.429,00	14.168.705.429,00	12.616.431.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.631.704,00	239.631.704,00	178.985.900,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.613.000,00	10.613.000,00	10.613.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.505.500,00	54.505.500,00	41.403.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	55.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.729.100,00	16.729.100,00	11.576.900,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.284.104,00	73.284.104,00	55.893.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	408.806.887,00	408.806.887,00	133.808.900,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	408.806.887,00	408.806.887,00	133.808.900,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.222.147.400,00	1.222.147.400,00	1.165.363.360,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	1.992.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280.000.000,00	280.000.000,00	259.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	939.147.400,00	939.147.400,00	904.371.360,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.803.474.756,00	2.803.474.756,00	988.526.540,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	825.761.272,00	825.761.272,00	776.574.980,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.927.713.484,00	1.927.713.484,00	161.951.560,00
2.17.0.00.0.00.01.0001						UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	994.601.968,00	994.601.968,00	8.432.190.260,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	135.131.792,00	135.131.792,00	8.009.040.280,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	135.131.792,00	135.131.792,00	8.009.040.280,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	135.131.792,00	135.131.792,00	8.009.040.280,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	859.470.176,00	859.470.176,00	423.149.980,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.892.300,00	39.892.300,00	39.891.700,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	666.400,00	666.400,00	665.800,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.725.900,00	2.725.900,00	2.725.900,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.229.084,00	207.229.084,00	207.690.060,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.729.084,00	157.729.084,00	158.190.060,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	612.348.792,00	612.348.792,00	175.568.220,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.900.000,00	95.900.000,00	94.007.140,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.850.000,00	2.850.000,00	1.990.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	513.598.792,00	513.598.792,00	79.571.080,00
2.18.0.00.0.00.01.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.467.325.355,00	17.467.325.355,00	17.338.529.860,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	17.442.326.955,00	17.442.326.955,00	17.325.930.760,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	350.263.584,00	350.263.584,00	480.968.560,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	150.263.584,00	150.263.584,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	150.263.584,00	150.263.584,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	200.000.000,00	200.000.000,00	480.968.560,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	200.000.000,00	200.000.000,00	480.968.560,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	300.263.584,00	300.263.584,00	285.448.560,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	300.263.584,00	300.263.584,00	285.448.560,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	225.263.584,00	225.263.584,00	285.448.560,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	638.356.548,00	638.356.548,00	614.087.820,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	457.738.960,00	457.738.960,00	458.901.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	457.738.960,00	457.738.960,00	458.901.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	180.617.588,00	180.617.588,00	155.186.420,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	180.617.588,00	180.617.588,00	155.186.420,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	207.956.584,00	207.956.584,00	1.143.149.560,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	207.956.584,00	207.956.584,00	1.143.149.560,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal	0,00	0,00	297.725.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	207.956.584,00	207.956.584,00	299.590.560,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	0,00	0,00	545.834.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	175.131.792,00	175.131.792,00	106.084.280,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	175.131.792,00	175.131.792,00	106.084.280,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	175.131.792,00	175.131.792,00	106.084.280,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.770.354.863,00	15.770.354.863,00	14.696.191.980,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.558.224.471,00	13.558.224.471,00	12.359.361.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.558.224.471,00	13.558.224.471,00	12.359.361.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.604.200,00	307.604.200,00	355.695.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.999.400,00	39.999.400,00	54.132.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.500.000,00	72.500.000,00	72.500.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.992.800,00	19.992.800,00	15.014.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.112.000,00	175.112.000,00	214.048.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	1.076.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	1.076.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.506.476.712,00	1.506.476.712,00	1.391.479.080,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	2.472.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.000.000,00	178.000.000,00	150.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.326.484.712,00	1.326.484.712,00	1.239.007.080,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.049.480,00	398.049.480,00	588.580.700,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	373.179.480,00	373.179.480,00	549.440.700,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.870.000,00	24.870.000,00	39.140.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	X					NON URUSAN	24.998.400,00	24.998.400,00	12.599.100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	24.998.400,00	24.998.400,00	12.599.100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.998.400,00	24.998.400,00	12.599.100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.998.400,00	24.998.400,00	12.599.100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	X	XX	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.998.400,00	24.998.400,00	12.599.100,00
2.22.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kebudayaan	83.628.317.216,00	83.624.582.116,00	83.363.616.868,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	83.628.317.216,00	83.624.582.116,00	83.363.616.868,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	83.628.317.216,00	83.624.582.116,00	83.363.616.868,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	53.637.370.088,00	53.743.050.988,00	55.664.821.760,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	28.158.075.176,00	28.658.049.776,00	28.349.017.340,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	375.395.272,00	875.369.872,00	550.815.020,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	27.782.679.904,00	27.782.679.904,00	27.798.202.320,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	17.310.036.652,00	16.860.037.252,00	9.720.994.420,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	15.502.207.672,00	15.052.208.272,00	8.692.175.380,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1.807.828.980,00	1.807.828.980,00	1.028.819.040,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.169.258.260,00	8.224.963.960,00	17.594.810.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	8.169.258.260,00	8.224.963.960,00	17.594.810.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.460.180.580,00	1.016.152.980,00	1.367.912.760,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.460.180.580,00	1.016.152.980,00	1.367.912.760,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	596.429.100,00	596.429.100,00	1.115.790.920,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	863.751.480,00	419.723.880,00	252.121.840,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	49.999.600,00	49.999.600,00	47.497.400,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	49.999.600,00	49.999.600,00	47.497.400,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	49.999.600,00	49.999.600,00	47.497.400,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	562.961.272,00	562.961.272,00	545.556.320,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	287.829.480,00	287.829.480,00	281.357.100,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	287.829.480,00	287.829.480,00	281.357.100,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	275.131.792,00	275.131.792,00	264.199.220,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	125.131.792,00	125.131.792,00	152.581.820,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	50.000.000,00	50.000.000,00	48.347.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	50.000.000,00	50.000.000,00	25.837.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	50.000.000,00	50.000.000,00	37.433.400,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.917.805.676,00	28.252.417.276,00	25.737.828.628,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.697.288,00	172.697.288,00	144.385.020,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	162.697.288,00	162.697.288,00	139.447.020,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	4.938.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.668.377.828,00	23.668.377.828,00	21.607.365.900,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.182.587.076,00	23.182.587.076,00	21.025.047.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	475.790.752,00	475.790.752,00	579.667.900,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	2.651.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.354.400,00	399.684.400,00	283.473.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.048.400,00	36.048.400,00	30.323.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.996.000,00	9.996.000,00	5.600.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.310.000,00	208.640.000,00	111.550.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.356.409.528,00	1.502.691.128,00	1.315.971.328,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.496.000,00	5.496.000,00	5.496.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	116.000.000,00	101.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	750.913.528,00	881.195.128,00	709.475.328,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.508.966.632,00	2.508.966.632,00	2.386.633.180,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	825.059.376,00	825.059.376,00	906.589.700,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.535.000,00	31.535.000,00	24.215.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.652.372.256,00	1.652.372.256,00	1.455.828.480,00
2.22.0.00.0.00.01.0001						UPTD Taman Budaya	3.571.809.468,00	3.571.809.468,00	5.568.542.620,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	2.000.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	2.000.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0,00	0,00	1.430.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	02	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	0,00	0,00	570.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.571.809.468,00	3.571.809.468,00	3.568.542.620,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.783.400,00	164.783.400,00	181.118.700,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84.999.200,00	84.999.200,00	70.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.500.000,00	47.500.000,00	56.320.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.920.800,00	8.920.800,00	5.460.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.377.400,00	8.377.400,00	8.340.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.986.000,00	14.986.000,00	40.998.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.989.600,00	49.989.600,00	43.144.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.989.600,00	49.989.600,00	43.144.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.034.535.484,00	2.034.535.484,00	2.021.861.440,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	896.000.000,00	896.000.000,00	896.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.125.000,00	24.125.000,00	90.088.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.114.410.484,00	1.114.410.484,00	1.035.773.440,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.322.500.984,00	1.322.500.984,00	1.322.418.480,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.800.000,00	158.800.000,00	76.600.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.290.000,00	24.290.000,00	19.990.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.139.410.984,00	1.139.410.984,00	1.225.828.480,00
2.22.0.00.0.00.01.0002						UPTD Museum Bali	2.380.504.860,00	2.380.504.860,00	4.325.129.700,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0,00	0,00	2.000.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	0,00	0,00	2.000.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	0,00	0,00	712.879.800,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	0,00	0,00	1.137.220.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	0,00	0,00	149.900.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.380.504.860,00	2.380.504.860,00	2.325.129.700,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.713.940,00	226.713.940,00	200.324.700,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	94.994.400,00	94.994.400,00	70.292.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.050.000,00	106.050.000,00	106.050.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.999.400,00	4.999.400,00	3.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.768.500,00	5.768.500,00	5.768.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.901.640,00	14.901.640,00	14.714.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.986.800,00	24.986.800,00	12.402.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.986.800,00	24.986.800,00	12.402.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.398.800,00	288.398.800,00	1.977.462.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.552.000,00	6.552.000,00	2.400.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206.850.000,00	206.850.000,00	206.850.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.999.200,00	49.999.200,00	47.528.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.997.600,00	24.997.600,00	1.720.684.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.840.405.320,00	1.840.405.320,00	134.940.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.990.000,00	74.990.000,00	74.990.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.950.000,00	49.950.000,00	39.950.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.715.465.320,00	1.715.465.320,00	20.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003						UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	3.303.127.936,00	3.303.127.936,00	5.557.853.308,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0,00	0,00	2.000.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	0,00	0,00	2.000.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	0,00	0,00	600.061.300,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	0,00	0,00	1.125.106.100,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	0,00	0,00	274.832.600,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.303.127.936,00	3.303.127.936,00	3.557.853.308,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.624.000,00	158.624.000,00	143.133.640,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.999.500,00	34.999.500,00	34.999.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.998.500,00	49.998.500,00	42.483.140,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.950.000,00	48.950.000,00	43.475.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.004.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.672.000,00	14.672.000,00	14.672.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.905.813.936,00	2.905.813.936,00	3.176.029.668,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.970.000,00	49.970.000,00	49.970.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.504.343.936,00	2.504.343.936,00	2.774.859.668,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.690.000,00	188.690.000,00	188.690.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.930.000,00	148.930.000,00	148.930.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.760.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.22.0.00.0.00.05.0000						Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	482.218.721.241,00	482.218.721.241,00	478.805.256.196,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	468.305.912.624,00	468.305.912.624,00	466.839.138.896,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	467.480.253.764,00	467.480.253.764,00	465.798.891.136,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.01	0001	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	467.167.556.076,00	467.167.556.076,00	465.367.664.716,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.01	0002	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	312.697.688,00	312.697.688,00	431.226.420,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	525.395.276,00	525.395.276,00	660.501.340,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.02	0001	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	150.000.000,00	150.000.000,00	198.152.000,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.02	0002	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	375.395.276,00	375.395.276,00	462.349.340,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.03		Penyelenggaraan Desa Adat	300.263.584,00	300.263.584,00	379.746.420,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.03	0003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	300.263.584,00	300.263.584,00	379.746.420,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.912.808.617,00	13.912.808.617,00	11.966.117.300,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.224.800,00	23.224.800,00	26.224.800,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.160.200,00	18.160.200,00	19.660.200,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.064.600,00	5.064.600,00	6.564.600,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.875.000.785,00	10.875.000.785,00	8.853.583.000,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.875.000.785,00	10.875.000.785,00	8.853.583.000,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	580.682.900,00	580.682.900,00	495.335.000,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.432.900,00	6.432.900,00	9.007.200,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.303.800,00	34.303.800,00	34.345.800,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.438.200,00	16.438.200,00	29.110.000,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	523.508.000,00	523.508.000,00	422.872.000,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.918.000,00	95.918.000,00	0,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.918.000,00	95.918.000,00	0,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.778.300,00	305.778.300,00	305.940.500,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	305.778.300,00	305.778.300,00	305.940.500,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.032.203.832,00	2.032.203.832,00	2.285.034.000,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	603.139.776,00	603.139.776,00	756.597.240,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.429.064.056,00	1.429.064.056,00	1.528.436.760,00
3.25.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kelautan dan Perikanan	24.567.023.921,00	24.567.023.921,00	25.434.096.772,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	24.560.183.921,00	24.560.183.921,00	25.434.096.772,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	24.560.183.921,00	24.560.183.921,00	25.434.096.772,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	192.697.488,00	192.697.488,00	660.043.520,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	59.999.800,00	59.999.800,00	96.902.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	59.999.800,00	59.999.800,00	96.902.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	132.697.688,00	132.697.688,00	563.141.320,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	132.697.688,00	132.697.688,00	563.141.320,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	328.697.688,00	328.697.688,00	425.715.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	308.697.688,00	308.697.688,00	416.115.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	308.697.688,00	308.697.688,00	416.115.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	20.000.000,00	20.000.000,00	9.600.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.09	0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	20.000.000,00	20.000.000,00	9.600.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	65.000.000,00	65.000.000,00	54.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.01	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	65.000.000,00	65.000.000,00	54.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	50.000.000,00	50.000.000,00	45.240.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	8.760.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	87.478.696,00	87.478.696,00	562.144.940,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	87.478.696,00	87.478.696,00	562.144.940,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	67.528.696,00	67.528.696,00	67.442.140,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	19.950.000,00	19.950.000,00	494.702.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.02	0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	145.130.892,00	145.130.892,00	390.987.280,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.01	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	145.130.892,00	145.130.892,00	390.987.280,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	145.130.892,00	145.130.892,00	390.987.280,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.741.179.157,00	23.741.179.157,00	23.341.205.832,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.500.001.173,00	20.500.001.173,00	20.110.224.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.500.001.173,00	20.500.001.173,00	20.110.224.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	906.173.500,00	906.173.500,00	962.631.100,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.565.200,00	10.565.200,00	10.542.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	598.987.800,00	598.987.800,00	636.724.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.990.800,00	108.990.800,00	169.767.300,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.509.700,00	26.509.700,00	18.477.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.120.000,00	161.120.000,00	127.120.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	182.022.000,00	182.022.000,00	158.284.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	182.022.000,00	182.022.000,00	158.284.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.540.000,00	129.540.000,00	126.536.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.540.000,00	126.540.000,00	126.536.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.016.602.484,00	2.016.602.484,00	1.983.530.132,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	788.974.868,00	788.974.868,00	789.220.480,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	708.897.616,00	708.897.616,00	665.579.652,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	518.730.000,00	518.730.000,00	528.730.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	X					NON URUSAN	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	X	XX	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0001						UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	881.159.468,00	881.138.668,00	2.805.790.269,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	881.159.468,00	881.138.668,00	2.805.790.269,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	881.159.468,00	881.138.668,00	2.805.790.269,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	267.931.592,00	283.430.592,00	2.252.859.069,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	267.931.592,00	283.430.592,00	2.252.859.069,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.06	0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	107.277.600,00	107.266.600,00	1.423.299.450,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.06	0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	160.653.992,00	176.163.992,00	829.559.619,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	613.227.876,00	597.708.076,00	552.931.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.769.200,00	49.769.200,00	43.067.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.955.400,00	9.955.400,00	5.274.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.318.800,00	5.318.800,00	5.293.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.088.000,00	30.795.800,00	30.795.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.088.000,00	30.795.800,00	30.795.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.052.600,00	96.960.000,00	96.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000,00	960.000,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.092.600,00	96.000.000,00	96.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.318.076,00	420.183.076,00	383.068.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.681.792,00	152.546.792,00	114.897.140,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	262.636.284,00	262.636.284,00	263.101.260,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.070.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002						UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	1.132.457.368,00	1.132.457.368,00	1.132.405.291,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	252.883.500,00	252.883.500,00	252.793.371,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	252.883.500,00	252.883.500,00	252.793.371,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06	1.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	222.884.500,00	222.884.500,00	222.799.371,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06	1.02	0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	29.999.000,00	29.999.000,00	29.994.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	879.573.868,00	879.573.868,00	879.611.920,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.141.700,00	51.141.700,00	53.133.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.052.000,00	6.052.000,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.589.800,00	10.589.800,00	20.633.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.999.900,00	1.999.900,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.569.500,00	49.569.500,00	49.316.100,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.569.500,00	49.569.500,00	49.316.100,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.592.000,00	110.592.000,00	108.600.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.600.000,00	108.600.000,00	108.600.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.270.668,00	668.270.668,00	668.562.620,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193.556.792,00	193.556.792,00	117.668.640,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.460.000,00	50.460.000,00	50.260.500,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	424.253.876,00	424.253.876,00	500.633.480,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0003						UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali	1.342.043.604,00	1.342.043.604,00	1.991.521.560,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	69.999.500,00	69.999.500,00	716.690.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	69.999.500,00	69.999.500,00	716.690.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	69.999.500,00	69.999.500,00	716.690.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.233.874.104,00	1.233.874.104,00	1.236.661.560,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.984.600,00	17.984.600,00	12.153.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.986.800,00	9.986.800,00	5.188.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.999.100,00	5.999.100,00	4.967.100,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.998.700,00	1.998.700,00	1.998.100,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	107.115.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	107.115.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.992.000,00	11.992.000,00	21.992.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.153.897.504,00	1.153.897.504,00	1.095.400.360,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.210.900,00	81.210.900,00	151.029.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	962.686.804,00	962.686.804,00	944.371.360,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.999.800,00	109.999.800,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	X					NON URUSAN	38.170.000,00	38.170.000,00	38.170.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	38.170.000,00	38.170.000,00	38.170.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.170.000,00	38.170.000,00	38.170.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.170.000,00	38.170.000,00	38.170.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0003	X	XX	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.170.000,00	38.170.000,00	38.170.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004						UPTD Pelabuhan Perikanan	429.285.296,00	429.285.296,00	417.300.840,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	429.285.296,00	429.285.296,00	417.300.840,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	429.285.296,00	429.285.296,00	417.300.840,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	53.747.600,00	53.747.600,00	55.899.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	53.747.600,00	53.747.600,00	55.899.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	39.999.600,00	39.999.600,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	13.748.000,00	13.748.000,00	55.899.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	375.537.696,00	375.537.696,00	361.401.640,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.485.800,00	54.485.800,00	52.301.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.969.400,00	9.969.400,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	19.801.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.517.000,00	36.517.000,00	32.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.999.400,00	1.999.400,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.182.500,00	47.182.500,00	93.865.900,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.182.500,00	47.182.500,00	93.865.900,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.992.000,00	11.992.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.877.396,00	261.877.396,00	205.234.140,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.881.500,00	65.881.500,00	107.552.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.995.896,00	99.995.896,00	97.682.140,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pariwisata	21.600.026.440,00	21.600.026.440,00	15.115.655.997,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	21.600.026.440,00	21.600.026.440,00	15.115.655.997,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	630.189.960,00	630.189.960,00	669.054.460,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	46.329.100,00	46.329.100,00	142.885.100,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.01	0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	0,00	0,00	100.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	46.329.100,00	46.329.100,00	42.885.100,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	31.803.400,00	31.803.400,00	31.802.900,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	31.803.400,00	31.803.400,00	31.802.900,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	438.515.168,00	438.515.168,00	380.592.580,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	438.515.168,00	438.515.168,00	380.592.580,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	113.542.292,00	113.542.292,00	113.773.880,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04	0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	15.347.100,00	15.347.100,00	15.346.700,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04	0013	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	98.195.192,00	98.195.192,00	98.427.180,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	502.858.360,00	502.858.360,00	460.697.860,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	502.858.360,00	502.858.360,00	460.697.860,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	161.915.788,00	161.915.788,00	162.264.020,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	183.723.284,00	183.723.284,00	140.866.120,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	157.219.288,00	157.219.288,00	157.567.720,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	232.514.584,00	232.514.584,00	195.296.320,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	112.932.792,00	112.932.792,00	113.164.780,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	112.932.792,00	112.932.792,00	113.164.780,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	119.581.792,00	119.581.792,00	82.131.540,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	119.581.792,00	119.581.792,00	82.131.540,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	547.495.356,00	547.495.356,00	433.335.920,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	547.495.356,00	547.495.356,00	433.335.920,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	193.587.184,00	193.587.184,00	86.982.140,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	191.263.384,00	191.263.384,00	153.675.620,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	162.644.788,00	162.644.788,00	192.678.160,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.686.968.180,00	19.686.968.180,00	13.357.271.437,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.318.988,00	139.318.988,00	138.001.420,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.697.196,00	63.697.196,00	138.001.420,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.621.792,00	75.621.792,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.637.884.920,00	11.637.884.920,00	10.708.603.257,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.637.884.920,00	11.637.884.920,00	10.708.603.257,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.699.369.200,00	1.699.369.200,00	644.709.200,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.484.700,00	10.484.700,00	10.484.700,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.390.879.800,00	1.390.879.800,00	381.487.300,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.700,00	9.999.700,00	9.942.200,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.505.000,00	220.505.000,00	175.295.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.304.200,00	228.304.200,00	1.335.065.560,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	189.204.000,00	189.204.000,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	0,00	93.462.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.100.200,00	39.100.200,00	1.241.603.560,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.982.090.872,00	5.982.090.872,00	530.892.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	510.016.700,00	510.016.700,00	512.492.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.437.764.172,00	5.437.764.172,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.310.000,00	34.310.000,00	18.400.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000						Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	63.311.787.608,00	62.339.229.090,00	65.543.761.260,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.335.591.188,00	1.328.390.988,00	7.219.125.880,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.335.591.188,00	1.328.390.988,00	7.219.125.880,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	534.536.952,00	534.536.952,00	547.694.020,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	534.536.952,00	534.536.952,00	547.694.020,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03	1.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	534.536.952,00	534.536.952,00	547.694.020,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	654.356.548,00	647.156.348,00	6.573.647.880,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	221.829.380,00	221.829.380,00	162.888.060,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	221.829.380,00	221.829.380,00	162.888.060,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	432.527.168,00	425.326.968,00	6.410.759.820,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	432.527.168,00	425.326.968,00	6.410.759.820,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	146.697.688,00	146.697.688,00	97.783.980,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	146.697.688,00	146.697.688,00	97.783.980,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	146.697.688,00	146.697.688,00	97.783.980,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	61.976.196.420,00	61.010.838.102,00	58.324.635.380,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	61.976.196.420,00	61.010.838.102,00	58.324.635.380,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	9.906.747.256,00	9.906.747.256,00	8.000.370.480,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	5.387.377.184,00	5.387.377.184,00	2.829.064.060,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	5.387.377.184,00	5.387.377.184,00	2.829.064.060,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.243.711.112,00	2.243.711.112,00	2.203.326.020,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	2.243.711.112,00	2.243.711.112,00	2.203.326.020,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.275.658.960,00	2.275.658.960,00	2.967.980.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.04	0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.275.658.960,00	2.275.658.960,00	2.967.980.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.391.925.964,00	1.391.925.964,00	1.346.238.120,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	1.391.925.964,00	1.391.925.964,00	1.346.238.120,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.139.410.984,00	1.139.410.984,00	1.098.079.220,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	252.514.980,00	252.514.980,00	248.158.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.474.829.480,00	1.474.829.480,00	1.507.850.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.422.263.584,00	1.422.263.584,00	1.459.968.560,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.01	0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.422.263.584,00	1.422.263.584,00	1.459.968.560,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.05		Kesejahteraan Hewan	52.565.896,00	52.565.896,00	47.882.140,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.05	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	52.565.896,00	52.565.896,00	47.882.140,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	178.463.584,00	178.463.584,00	166.928.560,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	178.463.584,00	178.463.584,00	166.928.560,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	178.463.584,00	178.463.584,00	166.928.560,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	49.024.230.136,00	48.058.871.818,00	47.303.247.520,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	650.115.336,00	660.755.336,00	658.610.240,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	327.172.968,00	327.172.968,00	326.317.920,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	322.942.368,00	333.582.368,00	332.292.320,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.044.383.468,00	44.070.658.650,00	43.278.617.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.643.724.508,00	43.669.999.690,00	42.879.400.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	400.658.960,00	400.658.960,00	399.217.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.315.100,00	109.315.100,00	143.144.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.234.800,00	16.234.800,00	13.575.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.296.300,00	16.296.300,00	52.285.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.500.000,00	57.500.000,00	58.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.884.000,00	13.884.000,00	13.884.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	635.725.768,00	635.725.768,00	636.655.720,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	318.000.000,00	318.000.000,00	318.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	317.725.768,00	317.725.768,00	318.655.720,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.584.690.464,00	2.582.416.964,00	2.586.219.960,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.600.502.544,00	1.608.127.544,00	1.609.754.960,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	751.317.920,00	769.317.920,00	771.642.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	232.870.000,00	204.971.500,00	204.822.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0009						UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	1.721.148.998,00	1.917.708.898,00	1.885.877.840,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.186.386.134,00	1.288.480.334,00	1.255.603.670,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.186.386.134,00	1.288.480.334,00	1.255.603.670,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	621.397.452,00	687.823.752,00	648.531.480,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	621.397.452,00	687.823.752,00	648.531.480,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	445.046.268,00	500.526.668,00	460.769.620,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	176.351.184,00	187.297.084,00	187.761.860,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	564.988.682,00	600.656.582,00	607.072.190,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.428.700,00	46.428.700,00	52.032.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.180.500,00	4.180.500,00	4.180.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.748.200,00	9.748.200,00	14.967.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.884.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.203.388,00	256.871.288,00	257.218.120,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.230.000,00	139.230.000,00	139.230.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116.973.388,00	117.641.288,00	117.988.120,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.356.594,00	297.356.594,00	297.821.570,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177.884.802,00	177.884.802,00	178.117.290,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.131.792,00	80.131.792,00	80.364.280,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.340.000,00	39.340.000,00	39.340.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	534.762.864,00	629.228.564,00	630.274.170,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	534.762.864,00	629.228.564,00	630.274.170,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	534.762.864,00	629.228.564,00	630.274.170,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	534.762.864,00	629.228.564,00	630.274.170,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3	27	04	1.03	0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	253.698.380,00	292.407.880,00	292.988.820,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	281.064.484,00	336.820.684,00	337.285.350,00
3.27.2.09.0.00.01.0012						UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.917.423.436,00	2.922.423.436,00	2.894.180.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.648.572.240,00	1.648.572.240,00	1.613.539.660,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.648.572.240,00	1.648.572.240,00	1.613.539.660,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	542.237.052,00	542.237.052,00	541.631.980,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	666.599.932,00	666.599.932,00	668.575.880,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	05	1.01	0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	439.735.256,00	439.735.256,00	403.331.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.268.851.196,00	1.273.851.196,00	1.280.641.140,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.007.500,00	56.007.500,00	57.775.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.780.500,00	4.780.500,00	6.548.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.554.780,00	350.554.780,00	341.136.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.360.000,00	159.360.000,00	149.360.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.194.780,00	191.194.780,00	191.776.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	862.288.916,00	867.288.916,00	881.729.940,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	183.192.788,00	183.192.788,00	195.541.420,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	676.186.128,00	681.186.128,00	683.278.520,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.910.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0013						UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.340.984.934,00	3.104.983.068,00	3.146.983.901,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.390.771.194,00	2.199.802.504,00	2.240.390.545,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.390.771.194,00	2.199.802.504,00	2.240.390.545,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.390.771.194,00	2.199.802.504,00	2.240.390.545,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	950.213.740,00	905.180.564,00	906.593.356,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.401.275,00	61.822.736,00	61.143.136,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.648.004,00	14.646.600,00	12.587.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.678.271,00	14.676.136,00	16.055.736,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.075.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.177.209,00	322.511.772,00	323.325.480,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.200.000,00	49.200.000,00	49.200.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	276.977.209,00	273.311.772,00	274.125.480,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558.635.256,00	520.846.056,00	522.124.740,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.315.888,00	208.298.888,00	208.647.620,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.527.168,00	305.527.168,00	306.457.120,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.792.200,00	7.020.000,00	7.020.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0014						UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,00	0,00	1.087.101.940,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	0,00	753.282.880,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	0,00	0,00	753.282.880,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	0,00	0,00	368.616.260,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	0,00	0,00	384.666.620,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	0,00	333.819.060,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	0,00	29.754.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	1.406.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	3.348.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	0,00	25.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	153.665.180,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	0,00	77.609.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	76.056.180,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	150.399.280,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	107.717.140,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	40.182.140,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	2.500.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0015						UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	0,00	5.236.938.328,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	0,00	2.158.793.160,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	0,00	0,00	2.100.793.160,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.02	0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	0,00	0,00	685.701.640,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.02	0011	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	0,00	0,00	709.591.320,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.02	0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	0,00	0,00	430.102.060,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.02	0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	0,00	0,00	275.398.140,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	0,00	0,00	58.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.03	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	0,00	0,00	58.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	0,00	3.078.145.168,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	0,00	36.247.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	1.575.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	4.674.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	0,00	29.998.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	219.257.848,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	0,00	105.389.028,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	113.868.820,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	2.822.639.420,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	127.384.280,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	2.692.755.140,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	2.500.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000						Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	41.328.802.244,00	41.328.802.244,00	41.091.933.660,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.012.822.580,00	1.012.822.580,00	1.108.121.100,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.012.822.580,00	1.012.822.580,00	1.108.121.100,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	370.127.092,00	370.127.092,00	320.771.180,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	119.996.300,00	119.996.300,00	114.224.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	119.996.300,00	119.996.300,00	114.224.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	250.130.792,00	250.130.792,00	206.546.380,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	250.130.792,00	250.130.792,00	206.546.380,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	132.999.700,00	132.999.700,00	321.950.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkuhan Hidup	132.999.700,00	132.999.700,00	321.950.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	32.999.900,00	32.999.900,00	32.999.400,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	99.999.800,00	99.999.800,00	288.950.900,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	100.000.000,00	100.000.000,00	99.556.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	99.556.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100.000.000,00	100.000.000,00	99.556.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	39.999.100,00	39.999.100,00	14.114.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	39.999.100,00	39.999.100,00	14.114.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	06	1.01	0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	39.999.100,00	39.999.100,00	14.114.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	19.999.700,00	19.999.700,00	19.267.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	07	1.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	19.999.700,00	19.999.700,00	19.267.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	07	1.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	19.999.700,00	19.999.700,00	19.267.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	279.697.688,00	279.697.688,00	275.346.020,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	279.697.688,00	279.697.688,00	275.346.020,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08	1.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	279.697.688,00	279.697.688,00	275.346.020,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	44.999.400,00	44.999.400,00	34.710.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	44.999.400,00	44.999.400,00	34.710.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	44.999.400,00	44.999.400,00	34.710.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	24.999.900,00	24.999.900,00	22.404.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	24.999.900,00	24.999.900,00	22.404.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	10	1.01	0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	24.999.900,00	24.999.900,00	22.404.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	40.315.979.664,00	40.315.979.664,00	39.983.812.560,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	40.315.979.664,00	40.315.979.664,00	39.983.812.560,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	150.131.592,00	150.131.592,00	184.334.720,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	150.131.592,00	150.131.592,00	184.334.720,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	150.131.592,00	150.131.592,00	184.334.720,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	60.000.000,00	60.000.000,00	52.362.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	60.000.000,00	60.000.000,00	52.362.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	60.000.000,00	60.000.000,00	52.362.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	77.565.896,00	77.565.896,00	70.961.240,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	77.565.896,00	77.565.896,00	70.961.240,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06	1.01	0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	77.565.896,00	77.565.896,00	70.961.240,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.028.282.176,00	40.028.282.176,00	39.676.154.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.899.600,00	35.899.600,00	35.899.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.899.600,00	35.899.600,00	35.899.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.642.881.576,00	35.642.881.576,00	35.285.412.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.601.281.576,00	35.601.281.576,00	35.243.812.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.600.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	397.192.000,00	397.192.000,00	409.701.900,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.296.200,00	16.296.200,00	16.294.100,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.782.800,00	32.782.800,00	45.940.900,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.500.000,00	92.500.000,00	92.500.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.681.000,00	14.681.000,00	14.680.900,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.950.000,00	61.950.000,00	61.950.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.982.000,00	178.982.000,00	178.336.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.092.500,00	300.092.500,00	300.021.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.092.500,00	300.092.500,00	300.021.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	547.597.472,00	547.597.472,00	548.408.080,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.500.000,00	172.500.000,00	172.500.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	375.097.472,00	375.097.472,00	375.908.080,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.104.619.028,00	3.104.619.028,00	3.096.711.420,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.047.482.380,00	1.047.482.380,00	1.048.063.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.481.330.000,00	1.481.330.000,00	1.481.330.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	575.806.648,00	575.806.648,00	567.317.820,00
3.28.2.11.0.00.01.0001						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	2.365.990.132,00	2.365.990.132,00	1.340.672.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.044.200,00	56.044.200,00	55.704.200,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.058.300,00	3.058.300,00	3.058.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.685.900,00	6.685.900,00	6.685.900,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.300.000,00	13.300.000,00	12.960.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.494.096,00	69.494.096,00	69.610.340,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.494.096,00	39.494.096,00	39.610.340,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.240.451.836,00	2.240.451.836,00	1.215.358.160,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.453.396,00	149.453.396,00	149.569.640,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	380.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	570.998.440,00	570.998.440,00	685.788.520,00
3.28.2.11.0.00.01.0002						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	5.496.271.264,00	5.496.271.264,00	1.330.927.460,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.638.500,00	54.638.500,00	54.638.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.975.600,00	2.975.600,00	2.975.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.832.700,00	12.832.700,00	12.832.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.250.000,00	35.250.000,00	35.250.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.580.200,00	3.580.200,00	3.580.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.318.500,00	36.318.500,00	36.318.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.318.500,00	36.318.500,00	36.318.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.627.096,00	54.627.096,00	54.743.340,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.027.096,00	40.027.096,00	40.143.340,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.350.687.168,00	5.350.687.168,00	1.185.227.120,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	484.317.168,00	484.317.168,00	485.247.120,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.856.390.000,00	4.856.390.000,00	690.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.980.000,00	9.980.000,00	9.980.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0003						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	1.007.970.908,00	1.007.970.908,00	644.458.170,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.151.600,00	75.151.600,00	74.871.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.748.500,00	12.748.500,00	12.748.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.728.100,00	2.728.100,00	2.728.100,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.000.000,00	19.000.000,00	18.720.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.049.988,00	126.049.988,00	126.398.720,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.049.988,00	118.049.988,00	118.398.720,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	806.769.320,00	806.769.320,00	443.187.850,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	256.265.896,00	256.265.896,00	256.369.940,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	540.513.424,00	540.513.424,00	176.827.910,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	3.726.660.369,00	3.726.660.369,00	864.229.820,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.772.200,00	55.772.200,00	55.372.200,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.989.200,00	2.989.200,00	2.989.200,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.299.400,00	10.299.400,00	10.299.400,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.383.600,00	2.383.600,00	2.383.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.600.000,00	7.600.000,00	7.200.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.769.696,00	62.769.696,00	62.885.940,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.800.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.969.696,00	39.969.696,00	40.085.940,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.608.118.473,00	3.608.118.473,00	745.971.680,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.896.792,00	175.896.792,00	175.895.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.347.429.889,00	3.347.429.889,00	485.542.400,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.791.792,00	84.791.792,00	84.534.280,00
3.28.2.11.0.00.01.0005						UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	411.002.196,00	411.002.196,00	400.282.040,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.314.000,00	41.314.000,00	31.087.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.410.400,00	2.410.400,00	2.410.400,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.429.000,00	21.429.000,00	11.202.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.474.600,00	2.474.600,00	2.474.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.620.196,00	226.620.196,00	226.736.440,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.620.196,00	226.620.196,00	226.736.440,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.068.000,00	143.068.000,00	142.458.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.878.000,00	126.878.000,00	126.878.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.190.000,00	16.190.000,00	15.580.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0006						UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	423.293.500,00	423.293.500,00	385.597.523,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	423.293.500,00	423.293.500,00	385.597.523,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	423.293.500,00	423.293.500,00	385.597.523,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	59.993.100,00	59.993.100,00	59.962.307,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkuhan Hidup	59.993.100,00	59.993.100,00	59.962.307,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	03	1.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	59.993.100,00	59.993.100,00	59.962.307,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	363.300.400,00	363.300.400,00	325.635.216,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.995.400,00	9.995.400,00	9.995.400,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.995.500,00	7.995.500,00	7.995.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.999.900,00	1.999.900,00	1.999.900,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.948.000,00	99.948.000,00	99.940.350,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.948.000,00	99.948.000,00	99.940.350,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.357.000,00	253.357.000,00	215.699.466,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	253.357.000,00	253.357.000,00	215.699.466,00
3.28.2.11.0.00.01.0007						UPTD Pengelolaan Sampah	4.856.559.980,00	4.856.559.980,00	4.817.395.828,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.261.092.004,00	4.261.092.004,00	4.225.670.988,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	4.261.092.004,00	4.261.092.004,00	4.225.670.988,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	11	1.01	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	4.261.092.004,00	4.261.092.004,00	4.225.670.988,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	595.467.976,00	595.467.976,00	591.724.840,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.860.500,00	81.860.500,00	77.419.900,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.721.000,00	7.721.000,00	7.721.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.875.800,00	18.875.800,00	14.435.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.500.000,00	44.500.000,00	40.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.013.700,00	4.013.700,00	4.013.100,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.750.000,00	6.750.000,00	11.250.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.487.100,00	71.487.100,00	71.487.100,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	71.487.100,00	71.487.100,00	71.487.100,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.120.376,00	442.120.376,00	442.817.840,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.040.376,00	323.040.376,00	323.737.840,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.080.000,00	119.080.000,00	119.080.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000						Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.292.448.212,00	23.292.448.012,00	20.360.295.320,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	23.292.448.212,00	23.292.448.012,00	20.360.295.320,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	20.779.092.064,00	20.779.091.864,00	18.772.745.960,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	321.625.968,00	321.625.968,00	322.387.120,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	321.625.968,00	321.625.968,00	322.387.120,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	321.625.968,00	321.625.968,00	322.387.120,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	111.478.100,00	111.478.100,00	111.426.100,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	111.478.100,00	111.478.100,00	111.426.100,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	1.01	0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	111.478.100,00	111.478.100,00	111.426.100,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	50.000.000,00	50.000.000,00	49.213.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	50.000.000,00	50.000.000,00	49.213.800,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	49.213.800,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	50.000.000,00	50.000.000,00	49.991.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	49.991.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	1.01	0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	50.000.000,00	50.000.000,00	49.991.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	610.302.988,00	610.302.988,00	610.585.420,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	498.595.896,00	498.595.896,00	498.711.340,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	456.000.000,00	456.000.000,00	456.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01	0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	42.595.896,00	42.595.896,00	42.711.340,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	111.707.092,00	111.707.092,00	111.874.080,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	111.707.092,00	111.707.092,00	111.874.080,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	234.558.476,00	234.558.476,00	272.598.080,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	234.558.476,00	234.558.476,00	272.598.080,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	1.03	0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	234.558.476,00	234.558.476,00	272.598.080,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.401.126.532,00	19.401.126.332,00	17.356.543.840,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.216.400,00	92.216.400,00	64.854.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.216.400,00	92.216.400,00	64.854.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.627.431.612,00	16.627.431.612,00	14.592.978.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.627.431.612,00	16.627.431.612,00	14.592.978.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	551.328.000,00	572.327.800,00	556.141.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.997.300,00	14.997.300,00	14.912.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.008.800,00	126.008.600,00	116.216.800,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.500.000,00	102.500.000,00	102.500.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.123.900,00	20.123.900,00	14.438.900,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.858.000,00	302.858.000,00	302.233.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.141.058.248,00	1.141.058.248,00	1.173.664.860,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	567.616.648,00	567.616.648,00	606.469.960,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.441.600,00	233.441.600,00	227.194.900,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	989.092.272,00	968.092.272,00	968.905.980,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	842.539.480,00	821.539.480,00	822.120.700,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	146.552.792,00	146.552.792,00	146.785.280,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.513.356.148,00	2.513.356.148,00	1.587.549.360,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.513.356.148,00	2.513.356.148,00	1.587.549.360,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2.513.356.148,00	2.513.356.148,00	1.587.549.360,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	62.565.396,00	62.565.396,00	97.681.540,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.450.790.752,00	2.450.790.752,00	1.489.867.820,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	1.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0001						UPTD Rumah Kreatif	1.024.068.692,00	1.024.068.692,00	1.022.110.880,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	827.214.200,00	827.214.200,00	827.213.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	827.214.200,00	827.214.200,00	827.213.900,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	827.214.200,00	827.214.200,00	827.213.900,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	196.854.492,00	196.854.492,00	194.896.980,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.097.700,00	44.097.700,00	43.857.700,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.437.700,00	33.437.700,00	33.437.700,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.560.000,00	4.560.000,00	4.320.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.205.896,00	51.205.896,00	49.372.140,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.205.896,00	51.205.896,00	49.372.140,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.550.896,00	101.550.896,00	101.667.140,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.550.896,00	101.550.896,00	101.667.140,00
3.31.3.30.0.00.02.0002						UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	550.707.368,00	550.707.368,00	550.946.120,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	550.707.368,00	550.707.368,00	550.946.120,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	232.648.288,00	232.648.288,00	232.997.020,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	232.648.288,00	232.648.288,00	232.997.020,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	06	1.02	0005	Pengembangan Layanan Pengujian	232.648.288,00	232.648.288,00	232.997.020,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	318.059.080,00	318.059.080,00	317.949.100,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.309.600,00	44.309.600,00	44.308.400,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.492.800,00	1.492.800,00	1.492.800,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.987.800,00	19.987.800,00	19.986.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.729.000,00	5.729.000,00	5.729.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.603.584,00	171.603.584,00	171.378.560,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.603.584,00	159.603.584,00	159.378.560,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.145.896,00	102.145.896,00	102.262.140,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.145.896,00	102.145.896,00	102.262.140,00
4.01.0.00.0.00.01.0003						Biro Umum dan Protokol	97.252.852.649,00	97.252.852.649,00	60.604.777.584,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	97.252.852.649,00	97.252.852.649,00	60.604.777.584,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	97.252.852.649,00	97.252.852.649,00	60.604.777.584,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	97.252.852.649,00	97.252.852.649,00	60.604.777.584,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	692.753.436,00	692.753.436,00	580.056.020,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	692.753.436,00	692.753.436,00	580.056.020,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	735.773.624,00	735.773.624,00	700.300.120,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	735.773.624,00	735.773.624,00	700.300.120,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	504.654.848,00	504.654.848,00	393.118.900,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	504.654.848,00	504.654.848,00	393.118.900,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.586.573.884,00	18.586.573.884,00	12.757.994.456,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	668.934.884,00	668.934.884,00	689.399.360,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.098.378.516,00	2.098.378.516,00	1.406.794.620,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.431.628.680,00	5.431.628.680,00	4.544.170.576,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.773.211.760,00	9.773.211.760,00	5.576.965.520,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	614.420.044,00	614.420.044,00	540.664.380,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.073.459.304,00	18.073.459.304,00	14.545.338.984,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.011.354.800,00	2.011.354.800,00	2.011.354.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.252.364.188,00	11.252.364.188,00	7.567.861.984,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.809.740.316,00	4.809.740.316,00	4.966.123.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.689.612.022,00	9.689.612.022,00	10.334.019.412,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.609.282.870,00	6.609.282.870,00	5.696.544.050,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.080.329.152,00	3.080.329.152,00	4.637.475.362,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26.527.797.711,00	26.527.797.711,00	6.111.674.012,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26.527.797.711,00	26.527.797.711,00	6.111.674.012,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	19.770.472.524,00	19.770.472.524,00	12.907.498.040,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12.940.201.440,00	12.940.201.440,00	11.958.441.820,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	6.520.771.084,00	6.520.771.084,00	789.556.220,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	309.500.000,00	309.500.000,00	159.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	521.914.100,00	521.914.100,00	421.114.100,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	521.914.100,00	521.914.100,00	421.114.100,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	2.149.841.196,00	2.149.841.196,00	1.853.663.540,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2.149.841.196,00	2.149.841.196,00	1.853.663.540,00
4.01.0.00.0.00.01.0004						Biro Hukum	7.066.309.000,00	7.066.309.000,00	6.603.263.220,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.322.337.276,00	4.322.337.276,00	4.228.154.080,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2.133.618.708,00	2.133.618.708,00	2.165.824.520,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1.276.798.884,00	1.276.798.884,00	1.296.793.360,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	161.550.784,00	161.550.784,00	162.015.760,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	238.508.176,00	238.508.176,00	255.212.640,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	456.760.864,00	456.760.864,00	451.802.760,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	2.188.718.568,00	2.188.718.568,00	2.062.329.560,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.963.263.584,00	1.963.263.584,00	1.821.410.700,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	225.454.984,00	225.454.984,00	240.918.860,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.743.971.724,00	2.743.971.724,00	2.375.109.140,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.518.834.700,00	1.518.834.700,00	1.072.579.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.995.400,00	14.995.400,00	15.774.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.349.999.800,00	1.349.999.800,00	942.342.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.500,00	14.999.500,00	14.999.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.840.000,00	138.840.000,00	99.463.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.225.137.024,00	1.225.137.024,00	1.302.529.940,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	491.346.792,00	491.346.792,00	403.261.420,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	678.820.232,00	678.820.232,00	844.478.520,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	4.800.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.970.000,00	49.970.000,00	49.990.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000						Sekretariat Daerah	64.752.543.252,00	64.752.543.252,00	59.945.157.782,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	570.197.764,00	570.197.764,00	643.907.040,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	570.197.764,00	570.197.764,00	643.907.040,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	570.197.764,00	570.197.764,00	643.907.040,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	262.363.484,00	262.363.484,00	338.192.440,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.01	0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	262.363.484,00	262.363.484,00	338.192.440,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	307.834.280,00	307.834.280,00	305.714.600,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	40.757.900,00	40.757.900,00	40.757.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	267.076.380,00	267.076.380,00	264.957.100,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	64.182.345.488,00	64.182.345.488,00	59.301.250.742,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	64.182.345.488,00	64.182.345.488,00	59.301.250.742,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	64.182.345.488,00	64.182.345.488,00	59.301.250.742,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.934.996.428,00	63.934.996.428,00	59.053.914.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63.934.996.428,00	63.934.996.428,00	59.053.914.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	247.349.060,00	247.349.060,00	247.336.742,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	247.349.060,00	247.349.060,00	247.336.742,00
4.01.2.23.2.24.01.0001						Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	27.122.915.892,00	27.122.915.892,00	40.153.293.360,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.767.153.456,00	1.767.153.456,00	1.684.752.680,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	652.248.772,00	652.248.772,00	590.360.320,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.01	0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	462.334.572,00	462.334.572,00	403.600.120,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	189.914.200,00	189.914.200,00	186.760.200,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	365.000.000,00	365.000.000,00	467.854.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	190.000.000,00	190.000.000,00	413.874.600,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	175.000.000,00	175.000.000,00	53.979.900,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	749.904.684,00	749.904.684,00	626.537.860,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	349.905.184,00	349.905.184,00	255.941.660,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	399.999.500,00	399.999.500,00	370.596.200,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	23.170.956.972,00	23.170.956.972,00	36.223.802.240,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	6.529.234.304,00	6.529.234.304,00	6.205.667.720,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	5.886.099.532,00	5.886.099.532,00	5.573.030.940,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	643.134.772,00	643.134.772,00	632.636.780,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	16.641.722.668,00	16.641.722.668,00	30.018.134.520,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	16.641.722.668,00	16.641.722.668,00	30.018.134.520,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.184.805.464,00	2.184.805.464,00	2.244.738.440,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	387.287.464,00	387.287.464,00	426.015.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	387.287.464,00	387.287.464,00	426.015.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	788.223.000,00	788.223.000,00	771.990.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.836.100,00	13.836.100,00	13.740.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	419.287.900,00	419.287.900,00	405.009.300,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.500,00	24.999.500,00	23.223.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.099.500,00	330.099.500,00	330.018.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.009.295.000,00	1.009.295.000,00	1.046.732.140,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	877.495.000,00	877.495.000,00	915.172.140,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.800.000,00	86.800.000,00	86.560.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0005						Biro Organisasi	3.605.298.830,00	3.605.298.830,00	3.652.226.410,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	628.093.064,00	628.093.064,00	627.473.360,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	628.093.064,00	628.093.064,00	627.473.360,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	524.961.272,00	524.961.272,00	525.774.880,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	337.263.584,00	337.263.584,00	337.728.460,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	67.565.896,00	67.565.896,00	67.682.140,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	137.565.896,00	137.565.896,00	137.682.140,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	64.565.896,00	64.565.896,00	64.682.040,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.01	0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	67.565.896,00	67.565.896,00	67.682.140,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	187.697.688,00	187.697.688,00	188.046.420,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	62.565.896,00	62.565.896,00	62.682.140,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	125.131.792,00	125.131.792,00	125.364.280,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	103.131.792,00	103.131.792,00	101.698.480,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	51.565.896,00	51.565.896,00	50.330.940,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	03	1.01	0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	51.565.896,00	51.565.896,00	50.330.940,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	51.565.896,00	51.565.896,00	51.367.540,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	03	1.03	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	51.565.896,00	51.565.896,00	51.367.540,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2.977.205.766,00	2.977.205.766,00	3.024.753.050,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	2.977.205.766,00	2.977.205.766,00	3.024.753.050,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	952.683.288,00	952.683.288,00	963.091.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	387.565.896,00	387.565.896,00	387.682.140,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	187.565.896,00	187.565.896,00	187.682.140,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	565.117.392,00	565.117.392,00	575.408.860,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	187.562.196,00	187.562.196,00	120.733.040,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	129.999.400,00	129.999.400,00	167.680.940,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	19.990.100,00	19.990.100,00	19.885.100,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	74.999.800,00	74.999.800,00	109.861.840,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	152.565.896,00	152.565.896,00	157.247.940,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.024.522.478,00	2.024.522.478,00	2.061.662.050,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.355.700,00	4.355.700,00	4.355.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.355.700,00	4.355.700,00	4.355.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	998.796.610,00	998.796.610,00	1.197.663.010,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.059.760,00	17.059.760,00	17.059.760,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	706.748.850,00	706.748.850,00	905.615.250,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.988.000,00	274.988.000,00	274.988.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.021.370.168,00	1.021.370.168,00	859.643.340,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	871.410.168,00	871.410.168,00	769.583.340,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.960.000,00	149.960.000,00	90.060.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007						Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	4.194.833.960,00	4.194.833.960,00	5.405.391.360,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	478.892.200,00	478.892.200,00	1.112.579.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	74.814.000,00	74.814.000,00	574.787.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	74.814.000,00	74.814.000,00	574.787.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	332.339.200,00	332.339.200,00	431.002.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	332.339.200,00	332.339.200,00	431.002.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	71.739.000,00	71.739.000,00	106.790.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	71.739.000,00	71.739.000,00	106.790.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	490.315.000,00	490.315.000,00	765.655.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	124.784.000,00	124.784.000,00	115.976.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	24.760.000,00	24.760.000,00	24.600.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	75.344.000,00	75.344.000,00	64.976.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	24.680.000,00	24.680.000,00	26.400.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	99.598.000,00	99.598.000,00	499.563.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	50.061.000,00	50.061.000,00	450.027.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	49.537.000,00	49.537.000,00	49.536.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	265.933.000,00	265.933.000,00	150.116.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	153.442.000,00	153.442.000,00	103.502.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	24.960.000,00	24.960.000,00	17.520.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	87.531.000,00	87.531.000,00	29.094.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	75.025.000,00	75.025.000,00	82.125.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	25.100.000,00	25.100.000,00	39.964.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	25.100.000,00	25.100.000,00	39.964.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	49.925.000,00	49.925.000,00	42.161.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	49.925.000,00	49.925.000,00	42.161.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	X					NON URUSAN	3.150.601.760,00	3.150.601.760,00	3.445.032.360,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	3.150.601.760,00	3.150.601.760,00	3.445.032.360,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.150.601.760,00	3.150.601.760,00	3.445.032.360,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	X	XX	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.561.332.160,00	2.561.332.160,00	2.828.412.360,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	X	XX	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.319.833.160,00	2.319.833.160,00	2.554.259.360,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	X	XX	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.367.000,00	46.367.000,00	56.957.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	X	XX	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.132.000,00	195.132.000,00	217.196.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.769.600,00	575.769.600,00	603.120.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	X	XX	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	473.199.600,00	473.199.600,00	473.250.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	X	XX	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.570.000,00	102.570.000,00	129.870.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000						Sekretariat DPRD	267.885.919.555,00	267.885.919.555,00	214.522.660.831,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	267.885.919.555,00	267.885.919.555,00	214.522.660.831,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	267.885.919.555,00	267.885.919.555,00	214.522.660.831,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	138.753.925.966,00	138.753.925.966,00	117.604.565.178,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	40.784.304.372,00	40.784.304.372,00	17.389.331.580,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.810.067.792,00	1.810.067.792,00	1.819.843.680,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	13.723.847.588,00	13.723.847.588,00	14.805.504.220,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	24.690.057.800,00	24.690.057.800,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	560.331.192,00	560.331.192,00	763.983.680,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	8.272.638.980,00	8.272.638.980,00	8.277.959.200,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	1.649.215.796,00	1.649.215.796,00	1.649.331.340,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.655.855.796,00	1.655.855.796,00	1.662.496.040,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD	1.655.855.796,00	1.655.855.796,00	1.655.956.040,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD	1.655.855.796,00	1.655.855.796,00	1.654.204.040,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.655.855.796,00	1.655.855.796,00	1.655.971.740,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	32.432.250.698,00	32.432.250.698,00	32.986.233.260,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	7.852.262.514,00	7.852.262.514,00	8.316.366.560,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	7.624.688.500,00	7.624.688.500,00	7.365.501.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	7.041.840.492,00	7.041.840.492,00	7.674.489.920,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	8.295.079.192,00	8.295.079.192,00	8.011.939.280,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.618.380.000,00	1.618.380.000,00	1.617.936.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	13.090.139.752,00	13.090.139.752,00	15.727.529.608,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0001	Orientasi DPRD	1.010.513.200,00	1.010.513.200,00	1.394.876.900,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.310.547.588,00	2.310.547.588,00	4.282.039.520,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3.240.820.700,00	3.240.820.700,00	3.288.832.448,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	900.635.900,00	900.635.900,00	920.451.180,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.995.487.992,00	1.995.487.992,00	2.204.342.880,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	3.632.134.372,00	3.632.134.372,00	3.636.986.680,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	36.936.713.180,00	36.936.713.180,00	28.907.008.550,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	821.919.592,00	821.919.592,00	3.565.732.420,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.748.545.900,00	1.748.545.900,00	1.790.335.400,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses	34.366.247.688,00	34.366.247.688,00	23.550.940.730,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	817.247.392,00	817.247.392,00	817.141.080,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	817.247.392,00	817.247.392,00	817.141.080,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	6.420.631.592,00	6.420.631.592,00	13.499.361.900,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.613.340.600,00	2.613.340.600,00	9.661.184.220,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	434.783.192,00	434.783.192,00	450.495.880,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3.372.507.800,00	3.372.507.800,00	3.387.681.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	129.131.993.589,00	129.131.993.589,00	96.918.095.653,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	356.878.192,00	356.878.192,00	627.069.780,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	212.199.796,00	212.199.796,00	482.401.640,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	144.678.396,00	144.678.396,00	144.668.140,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.774.524.081,00	58.774.524.081,00	10.286.478.580,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.501.715.489,00	58.501.715.489,00	10.013.782.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136.827.996,00	136.827.996,00	136.744.940,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	135.980.596,00	135.980.596,00	135.951.640,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.730.029.788,00	6.730.029.788,00	8.363.058.420,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	169.600.400,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	468.036.300,00	468.036.300,00	903.215.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.300.500.000,00	1.300.500.000,00	1.358.543.300,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	109.798.500,00	109.798.500,00	135.240.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	561.425.800,00	561.425.800,00	1.062.108.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.290.269.188,00	4.290.269.188,00	4.734.350.920,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	5.780.798.200,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	5.780.798.200,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.914.588,00	83.914.588,00	2.523.302.360,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.996.000,00	9.996.000,00	9.996.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	0,00	900.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.918.588,00	73.918.588,00	1.613.306.360,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.325.681.300,00	1.325.681.300,00	5.208.744.710,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.325.681.300,00	1.325.681.300,00	3.610.132.060,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	977.532.650,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	621.080.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	60.183.273.424,00	60.183.273.424,00	61.114.853.203,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	59.646.050.828,00	59.646.050.828,00	58.289.304.663,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	372.442.000,00	372.442.000,00	2.537.787.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	164.780.596,00	164.780.596,00	287.761.040,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	1.677.692.216,00	1.677.692.216,00	3.013.790.400,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	213.995.080,00	213.995.080,00	177.530.360,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.463.697.136,00	1.463.697.136,00	2.836.260.040,00
5.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28.485.902.928,00	28.485.902.928,00	24.731.284.882,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	28.485.902.928,00	28.485.902.928,00	24.731.284.882,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	28.485.902.928,00	28.485.902.928,00	24.731.284.882,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.248.270.636,00	4.248.270.636,00	3.481.719.140,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.199.877.676,00	2.199.877.676,00	1.961.493.140,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	84.999.900,00	84.999.900,00	84.999.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	194.008.300,00	194.008.300,00	194.008.300,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.920.869.476,00	1.920.869.476,00	1.682.484.940,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	617.234.984,00	617.234.984,00	452.353.560,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	595.262.184,00	595.262.184,00	430.380.760,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	21.972.800,00	21.972.800,00	21.972.800,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.198.934.980,00	1.198.934.980,00	1.000.533.200,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	390.555.700,00	390.555.700,00	274.355.700,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	576.644.780,00	576.644.780,00	521.143.400,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	231.734.500,00	231.734.500,00	205.034.100,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	232.222.996,00	232.222.996,00	67.339.240,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	232.222.996,00	232.222.996,00	67.339.240,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.500.570.864,00	2.500.570.864,00	2.267.801.680,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	824.373.352,00	824.373.352,00	760.405.040,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	156.793.492,00	156.793.492,00	157.025.880,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	137.142.892,00	137.142.892,00	99.603.540,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	268.161.584,00	268.161.584,00	268.626.460,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	262.275.384,00	262.275.384,00	235.149.160,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	941.313.456,00	941.313.456,00	805.246.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	255.522.584,00	255.522.584,00	255.987.560,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	292.650.584,00	292.650.584,00	255.433.420,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	95.321.096,00	95.321.096,00	95.432.240,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	297.819.192,00	297.819.192,00	198.393.680,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	734.884.056,00	734.884.056,00	702.149.740,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	305.836.676,00	305.836.676,00	297.906.540,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	80.427.800,00	80.427.800,00	71.334.800,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	266.633.580,00	266.633.580,00	259.548.800,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	81.986.000,00	81.986.000,00	73.359.600,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.737.061.428,00	21.737.061.428,00	18.981.764.062,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	375.098.480,00	375.098.480,00	235.028.300,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	241.192.580,00	241.192.580,00	205.957.800,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	13.360.100,00	13.360.100,00	7.060.100,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.360.100,00	13.360.100,00	6.171.800,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.548.500,00	12.548.500,00	7.823.500,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.071.600,00	10.071.600,00	1.819.500,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.004.000,00	41.004.000,00	2.044.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.561.600,00	43.561.600,00	4.151.600,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.350.204.436,00	15.350.204.436,00	12.668.108.820,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.018.973.568,00	15.018.973.568,00	12.340.448.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197.625.480,00	197.625.480,00	198.206.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	133.605.388,00	133.605.388,00	129.454.120,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.316.586.172,00	1.316.586.172,00	2.045.645.280,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.499.496,00	47.499.496,00	59.301.940,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	341.491.396,00	341.491.396,00	1.068.057.840,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.577.096,00	105.577.096,00	123.323.140,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.542.596,00	49.542.596,00	67.273.940,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	75.004.796,00	75.004.796,00	65.006.140,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	103.565.896,00	103.565.896,00	103.682.140,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	593.904.896,00	593.904.896,00	559.000.140,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	246.661.896,00	246.661.896,00	230.412.940,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	199.650.000,00	199.650.000,00	183.600.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.011.896,00	47.011.896,00	46.812.940,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	970.590.932,00	970.590.932,00	936.492.440,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.553.896,00	40.553.896,00	40.670.140,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.165.896,00	337.165.896,00	337.282.140,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	592.871.140,00	592.871.140,00	558.540.160,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.477.919.512,00	3.477.919.512,00	2.866.076.282,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	776.592.664,00	776.592.664,00	874.255.504,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168.215.896,00	168.215.896,00	173.132.140,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.533.110.952,00	2.533.110.952,00	1.818.688.638,00
5.02.0.00.0.00.02.0000						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.544.834.608.521,00	1.544.834.608.521,00	1.729.509.284.262,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02				KEUANGAN	1.544.834.608.521,00	1.544.834.608.521,00	1.729.509.284.262,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.518.609.471.396,00	1.518.609.471.396,00	1.704.277.903.382,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.920.977.292,00	1.920.977.292,00	1.601.386.460,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	67.645.600,00	67.645.600,00	26.500.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	58.436.000,00	58.436.000,00	22.336.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	347.253.700,00	347.253.700,00	347.253.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	80.488.400,00	80.488.400,00	80.487.400,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	711.407.696,00	711.407.696,00	678.738.160,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	655.745.896,00	655.745.896,00	446.071.200,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	943.784.200,00	943.784.200,00	778.707.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	170.000.000,00	170.000.000,00	202.814.400,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	129.626.800,00	129.626.800,00	176.576.600,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	144.157.400,00	144.157.400,00	205.387.300,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	500.000.000,00	500.000.000,00	193.928.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	627.000.000,00	627.000.000,00	601.462.296,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	627.000.000,00	627.000.000,00	601.462.296,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	533.949.239,00	533.949.239,00	464.031.540,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	387.884.000,00	387.884.000,00	365.550.340,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	146.065.239,00	146.065.239,00	98.481.200,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.513.514.203.665,00	1.513.514.203.665,00	1.700.685.514.886,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.506.377.057,00	2.506.377.057,00	2.506.377.057,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	271.149.787.266,00	271.149.787.266,00	356.230.322.273,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	62.772.177.068,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.189.858.039.342,00	1.189.858.039.342,00	1.279.176.638.488,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1.069.557.000,00	1.069.557.000,00	146.801.200,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.06	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.069.557.000,00	1.069.557.000,00	146.801.200,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.383.231.400,00	1.383.231.400,00	1.289.444.760,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.383.231.400,00	1.383.231.400,00	1.289.444.760,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga	141.353.800,00	141.353.800,00	113.211.800,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	71.877.600,00	71.877.600,00	43.876.100,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	349.999.400,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	820.000.000,00	820.000.000,00	782.357.460,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.841.905.725,00	24.841.905.725,00	23.941.936.120,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.005.500,00	37.005.500,00	37.005.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.005.500,00	37.005.500,00	37.005.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.981.894.907,00	18.981.894.907,00	19.871.132.680,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.633.263.107,00	18.633.263.107,00	19.447.248.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	348.631.800,00	348.631.800,00	423.884.680,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.668.372.500,00	1.668.372.500,00	1.907.064.900,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.372.500,00	17.372.500,00	17.358.800,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	750.000.000,00	750.000.000,00	982.069.900,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	600.000.000,00	600.000.000,00	569.761.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.000.000,00	23.000.000,00	11.486.500,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.000.000,00	65.000.000,00	86.250.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	227.138.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.300.000,00	288.300.000,00	286.500.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.300.000,00	285.300.000,00	285.300.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.866.332.818,00	3.866.332.818,00	1.840.233.540,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	714.332.818,00	714.332.818,00	738.703.480,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	12.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.000.000,00	140.000.000,00	130.516.500,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	965.013.560,00
5.02.0.00.0.00.02.0001						UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.339.114.100,00	3.339.114.100,00	3.650.343.080,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	2.415.996.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	2.415.996.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	2.415.996.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	576.321.500,00	576.321.500,00	1.071.913.780,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.121.500,00	158.121.500,00	153.735.800,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.670.700,00	41.670.700,00	41.665.600,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.999.800,00	8.999.800,00	8.999.200,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	9.990.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.251.000,00	93.251.000,00	88.881.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.200.000,00	58.200.000,00	58.200.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.000.000,00	360.000.000,00	859.977.980,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	360.000.000,00	360.000.000,00	859.977.980,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	X					NON URUSAN	162.792.600,00	162.792.600,00	162.432.600,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	162.792.600,00	162.792.600,00	162.432.600,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	162.792.600,00	162.792.600,00	162.432.600,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.792.600,00	162.792.600,00	162.432.600,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	X	XX	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.532.600,00	147.532.600,00	147.172.600,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	X	XX	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.260.000,00	15.260.000,00	15.260.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000						Badan Pendapatan Daerah	136.862.495.850,00	136.862.495.850,00	141.622.365.056,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	136.862.495.850,00	136.862.495.850,00	141.622.365.056,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02				KEUANGAN	136.862.495.850,00	136.862.495.850,00	141.622.365.056,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	15.025.800,00	15.025.800,00	14.975.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	15.025.800,00	15.025.800,00	14.975.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	15.025.800,00	15.025.800,00	14.975.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.123.109.800,00	1.123.109.800,00	956.110.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.123.109.800,00	1.123.109.800,00	956.110.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	340.000.000,00	340.000.000,00	305.379.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	302.809.800,00	302.809.800,00	216.435.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	175.000.000,00	175.000.000,00	145.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	260.000.000,00	260.000.000,00	243.995.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	45.300.000,00	45.300.000,00	45.300.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	135.724.360.250,00	135.724.360.250,00	140.651.278.256,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.913.400,00	37.913.400,00	37.912.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.867.800,00	18.867.800,00	18.867.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.045.600,00	19.045.600,00	19.045.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	125.493.431.026,00	125.493.431.026,00	130.819.254.219,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	125.493.431.026,00	125.493.431.026,00	130.819.254.219,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.957.642.300,00	1.957.642.300,00	1.948.223.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.727.000,00	7.727.000,00	7.727.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.891.000,00	233.891.000,00	147.624.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.231.707.500,00	1.231.707.500,00	1.230.570.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.428.800,00	2.428.800,00	2.428.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393.388.000,00	393.388.000,00	471.374.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.999.917.640,00	2.999.917.640,00	3.367.067.599,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	450.000.000,00	450.000.000,00	775.050.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.549.917.640,00	2.549.917.640,00	2.592.017.599,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	945.627.104,00	945.627.104,00	838.764.477,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.994.000,00	2.994.000,00	2.994.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	387.433.104,00	387.433.104,00	387.433.104,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	555.200.000,00	555.200.000,00	448.337.373,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.239.828.780,00	4.239.828.780,00	3.590.055.361,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.845.396,00	115.845.396,00	115.961.640,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	685.345.376,00	685.345.376,00	749.807.840,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	857.043.816,00	857.043.816,00	934.849.220,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	590.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.281.594.192,00	1.281.594.192,00	1.199.436.661,00
5.02.0.00.0.00.03.0001						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng	5.478.495.260,00	5.478.495.260,00	5.387.969.583,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.041.031.912,00	4.041.031.912,00	3.820.696.880,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.041.031.912,00	4.041.031.912,00	3.820.696.880,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.765.255.840,00	1.765.255.840,00	1.785.987.740,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	2.275.776.072,00	2.275.776.072,00	2.034.709.140,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.437.463.348,00	1.437.463.348,00	1.567.272.703,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.607.700,00	230.607.700,00	262.233.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.756.400,00	5.756.400,00	3.042.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.995.000,00	128.995.000,00	111.053.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.937.500,00	11.937.500,00	11.809.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.068.800,00	5.068.800,00	5.068.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	9.300.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.850.000,00	53.850.000,00	96.960.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.992.000,00	421.992.000,00	465.992.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.000.000,00	220.000.000,00	264.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	784.863.648,00	784.863.648,00	839.047.403,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.183.600,00	54.183.600,00	48.075.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.559.296,00	161.559.296,00	189.677.340,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.520.000,00	13.520.000,00	31.850.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	530.790.752,00	530.790.752,00	546.465.063,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.810.000,00	24.810.000,00	22.980.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana	1.973.358.180,00	1.973.358.180,00	2.330.383.092,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	903.792.024,00	903.792.024,00	896.980.660,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	903.792.024,00	903.792.024,00	896.980.660,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	433.758.064,00	433.758.064,00	425.784.260,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	470.033.960,00	470.033.960,00	471.196.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.069.566.156,00	1.069.566.156,00	1.433.402.432,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.672.700,00	159.672.700,00	168.637.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.665.600,00	3.665.600,00	3.665.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.084.000,00	101.084.000,00	110.049.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.158.100,00	14.158.100,00	14.158.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.365.000,00	13.365.000,00	13.365.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.992.000,00	293.992.000,00	371.061.061,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.000.000,00	142.000.000,00	179.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	190.069.061,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615.901.456,00	615.901.456,00	893.703.471,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.846.600,00	28.846.600,00	47.976.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.534.496,00	102.534.496,00	147.506.740,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.530.000,00	3.530.000,00	11.680.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	470.939.960,00	470.939.960,00	673.569.731,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.050.400,00	10.050.400,00	12.970.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0003						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan	2.289.200.115,00	2.289.200.115,00	2.436.005.715,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.018.386.963,00	1.018.386.963,00	1.047.789.220,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.018.386.963,00	1.018.386.963,00	1.047.789.220,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	546.328.003,00	546.328.003,00	498.003.540,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	472.058.960,00	472.058.960,00	549.785.680,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.270.813.152,00	1.270.813.152,00	1.388.216.495,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.718.100,00	190.718.100,00	196.475.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.491.500,00	8.491.500,00	8.491.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.998.900,00	129.998.900,00	129.995.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.366.700,00	6.366.700,00	6.366.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.996.000,00	2.996.000,00	2.996.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.365.000,00	13.365.000,00	19.125.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423.942.000,00	423.942.000,00	498.748.855,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218.950.000,00	218.950.000,00	293.756.855,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	656.153.052,00	656.153.052,00	692.992.640,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.791.000,00	29.791.000,00	44.363.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	217.014.792,00	217.014.792,00	223.350.140,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.110.000,00	5.110.000,00	19.880.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	378.858.960,00	378.858.960,00	380.021.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.378.300,00	25.378.300,00	25.378.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0004						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung	4.610.861.242,00	4.610.861.242,00	5.100.606.414,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.147.855.552,00	3.147.855.552,00	3.155.062.680,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.147.855.552,00	3.147.855.552,00	3.155.062.680,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.174.183.528,00	2.174.183.528,00	2.405.274.860,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	973.672.024,00	973.672.024,00	749.787.820,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.463.005.690,00	1.463.005.690,00	1.945.543.734,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	232.229.950,00	232.229.950,00	216.978.950,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.478.800,00	132.478.800,00	129.672.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.321.650,00	31.321.650,00	22.731.650,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.772.500,00	5.772.500,00	5.772.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.975.000,00	21.975.000,00	18.120.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.492.000,00	430.492.000,00	817.222.947,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.500.000,00	228.500.000,00	378.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	437.230.947,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	800.283.740,00	800.283.740,00	911.341.837,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.985.100,00	22.985.100,00	24.178.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.056.096,00	142.056.096,00	179.815.340,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.920.000,00	19.920.000,00	19.920.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	575.922.544,00	575.922.544,00	656.857.697,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.400.000,00	39.400.000,00	30.570.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar	4.912.966.512,00	4.912.966.512,00	5.456.296.906,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.245.419.368,00	3.245.419.368,00	3.395.446.180,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.245.419.368,00	3.245.419.368,00	3.395.446.180,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.897.508.096,00	2.897.508.096,00	2.868.660.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	347.911.272,00	347.911.272,00	526.785.680,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.667.547.144,00	1.667.547.144,00	2.060.850.726,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	308.283.400,00	308.283.400,00	274.499.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.819.400,00	5.819.400,00	5.819.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.944.000,00	134.944.000,00	102.206.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82.000.000,00	82.000.000,00	79.691.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.212.000,00	3.212.000,00	3.212.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.515.000,00	35.515.000,00	35.515.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.793.000,00	21.793.000,00	23.055.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583.492.000,00	583.492.000,00	799.874.444,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	381.500.000,00	381.500.000,00	487.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	310.882.444,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775.771.744,00	775.771.744,00	986.476.782,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.986.500,00	47.986.500,00	49.116.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.421.992,00	133.421.992,00	161.040.880,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.640.000,00	6.640.000,00	10.950.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.790.752,00	500.790.752,00	642.616.902,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.932.500,00	86.932.500,00	122.752.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0006						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar	3.230.507.676,00	3.230.507.676,00	3.399.046.117,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.978.185.320,00	1.978.185.320,00	1.844.789.880,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.978.185.320,00	1.978.185.320,00	1.844.789.880,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.187.133.296,00	1.187.133.296,00	1.140.953.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	791.052.024,00	791.052.024,00	703.836.380,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.252.322.356,00	1.252.322.356,00	1.554.256.237,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.139.500,00	218.139.500,00	196.709.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.189.700,00	12.189.700,00	10.677.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.139.800,00	139.139.800,00	119.222.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.210.000,00	13.210.000,00	13.210.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.792.000,00	377.792.000,00	535.064.963,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.000.000,00	176.000.000,00	238.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.800.000,00	199.800.000,00	295.072.963,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	656.390.856,00	656.390.856,00	822.481.574,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.246.000,00	31.246.000,00	38.970.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.400.000,00	86.400.000,00	117.670.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.750.000,00	10.750.000,00	20.730.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	493.224.856,00	493.224.856,00	594.625.474,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.770.000,00	34.770.000,00	50.486.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0007						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli	2.076.577.948,00	2.076.577.948,00	2.331.983.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.120.119.192,00	1.120.119.192,00	1.170.752.060,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.120.119.192,00	1.120.119.192,00	1.170.752.060,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	590.552.544,00	590.552.544,00	535.049.960,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	529.566.648,00	529.566.648,00	635.702.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	956.458.756,00	956.458.756,00	1.161.231.040,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.333.400,00	149.333.400,00	182.815.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.088.400,00	7.088.400,00	10.601.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.198.800,00	104.198.800,00	106.298.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.946.200,00	3.946.200,00	3.946.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.500.000,00	4.500.000,00	32.370.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.992.000,00	252.992.000,00	388.069.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	285.077.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	554.133.356,00	554.133.356,00	590.346.040,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.600.000,00	45.600.000,00	46.800.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.991.000,00	71.991.000,00	97.165.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.370.000,00	6.370.000,00	14.930.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	421.224.856,00	421.224.856,00	422.503.540,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.947.500,00	8.947.500,00	8.947.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0008						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung	2.461.015.248,00	2.461.015.248,00	2.469.330.011,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	985.189.712,00	985.189.712,00	971.126.580,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	985.189.712,00	985.189.712,00	971.126.580,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	522.130.752,00	522.130.752,00	480.023.040,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	463.058.960,00	463.058.960,00	491.103.540,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.475.825.536,00	1.475.825.536,00	1.498.203.431,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.895.100,00	193.895.100,00	208.792.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.697.000,00	2.697.000,00	2.697.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.999.000,00	108.999.000,00	108.276.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.999.600,00	7.999.600,00	7.999.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.999.500,00	1.999.500,00	1.999.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.000.000,00	44.000.000,00	59.620.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.792.000,00	381.792.000,00	381.992.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.800.000,00	199.800.000,00	200.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	900.138.436,00	900.138.436,00	907.418.731,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.504.000,00	37.504.000,00	39.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.996.000,00	152.996.000,00	136.924.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	15.660.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	681.054.336,00	681.054.336,00	697.141.131,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.084.100,00	21.084.100,00	18.693.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0009						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem	1.780.119.100,00	1.780.119.100,00	2.132.832.912,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	877.027.024,00	877.027.024,00	1.023.459.220,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	877.027.024,00	877.027.024,00	1.023.459.220,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	539.574.856,00	539.574.856,00	510.685.680,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	337.452.168,00	337.452.168,00	512.773.540,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	903.092.076,00	903.092.076,00	1.109.373.692,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.186.100,00	165.186.100,00	171.664.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.062.800,00	2.062.800,00	2.062.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.995.900,00	108.995.900,00	108.994.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.499.900,00	5.499.900,00	5.499.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.647.500,00	2.647.500,00	2.647.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.480.000,00	18.480.000,00	24.960.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.192.000,00	282.192.000,00	388.870.412,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.000.000,00	103.000.000,00	150.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.200.000,00	177.200.000,00	236.878.412,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.713.976,00	455.713.976,00	548.839.180,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.495.800,00	33.495.800,00	52.645.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.861.896,00	89.861.896,00	114.213.740,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000,00	5.680.000,00	17.040.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	315.429.480,00	315.429.480,00	353.692.840,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.246.800,00	11.246.800,00	11.246.800,00
5.03.5.04.0.00.02.0000						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	39.080.621.739,00	39.080.621.739,00	177.267.189.492,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	37.967.476.655,00	37.967.476.655,00	176.177.582.932,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	9.619.319.352,00	9.619.319.352,00	4.284.365.100,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	6.322.791.212,00	6.322.791.212,00	1.029.958.540,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	10.386.800,00	10.386.800,00	10.386.500,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	5.987.743.440,00	5.987.743.440,00	720.617.200,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	143.597.688,00	143.597.688,00	156.556.420,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	181.063.284,00	181.063.284,00	142.398.420,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	381.525.788,00	381.525.788,00	381.714.520,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	82.439.996,00	82.439.996,00	82.396.240,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	125.088.896,00	125.088.896,00	125.205.140,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	173.996.896,00	173.996.896,00	174.113.140,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	2.258.502.976,00	2.258.502.976,00	2.221.515.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.981.124.192,00	1.981.124.192,00	1.943.674.540,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	113.737.192,00	113.737.192,00	113.967.280,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	163.641.592,00	163.641.592,00	163.873.780,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	656.499.376,00	656.499.376,00	651.176.440,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	133.899.792,00	133.899.792,00	134.131.180,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	350.137.792,00	350.137.792,00	344.360.280,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	141.765.792,00	141.765.792,00	141.990.280,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30.696.000,00	30.696.000,00	30.694.700,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.348.157.303,00	28.348.157.303,00	171.893.217.832,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.719.400,00	122.719.400,00	118.932.900,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	3.900.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.250.000,00	2.250.000,00	1.350.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	231.200,00	231.200,00	231.200,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	231.200,00	231.200,00	231.200,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83.989.000,00	83.989.000,00	83.980.500,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.518.000,00	31.518.000,00	29.240.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.891.065.735,00	24.891.065.735,00	168.534.554.612,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.891.065.735,00	24.891.065.735,00	168.534.554.612,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210.860.000,00	210.860.000,00	283.918.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	210.860.000,00	210.860.000,00	283.918.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	716.324.300,00	716.324.300,00	751.141.500,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.015.000,00	15.015.000,00	15.015.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.451.500,00	158.451.500,00	158.440.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.232.800,00	99.232.800,00	99.191.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.745.000,00	9.745.000,00	8.695.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	3.729.600,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	429.080.000,00	429.080.000,00	466.070.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.661.300,00	53.661.300,00	35.200.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.661.300,00	53.661.300,00	35.200.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.187.068.408,00	1.187.068.408,00	1.188.074.020,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000,00	960.000,00	960.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.600.000,00	253.600.000,00	253.600.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	932.508.408,00	932.508.408,00	933.514.020,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.166.458.160,00	1.166.458.160,00	981.396.800,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	758.645.160,00	758.645.160,00	759.807.600,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	221.113.000,00	221.113.000,00	34.889.200,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.700.000,00	136.700.000,00	136.700.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.113.145.084,00	1.113.145.084,00	1.089.606.560,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.113.145.084,00	1.113.145.084,00	1.089.606.560,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.113.145.084,00	1.113.145.084,00	1.089.606.560,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	335.965.896,00	335.965.896,00	364.764.280,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	469.929.196,00	469.929.196,00	467.042.440,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	307.249.992,00	307.249.992,00	257.799.840,00
5.03.5.04.0.00.02.0001						UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	1.220.695.968,00	1.220.695.968,00	1.183.313.780,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03				KEPEGAWAIAN	1.220.695.968,00	1.220.695.968,00	1.183.313.780,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	702.142.600,00	702.142.600,00	751.912.600,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	702.142.600,00	702.142.600,00	751.912.600,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	702.142.600,00	702.142.600,00	751.912.600,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	518.553.368,00	518.553.368,00	431.401.180,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.381.200,00	52.381.200,00	51.981.200,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.815.200,00	11.815.200,00	11.815.200,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.566.000,00	40.566.000,00	40.166.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.537.000,00	75.537.000,00	25.537.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.537.000,00	75.537.000,00	25.537.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.527.168,00	300.527.168,00	263.774.980,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.527.168,00	300.527.168,00	263.774.980,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.108.000,00	90.108.000,00	90.108.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.218.000,00	78.218.000,00	78.218.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.890.000,00	11.890.000,00	11.890.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0002						UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	6.959.832.000,00	6.959.832.000,00	6.959.832.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0002	5	03	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	6.959.832.000,00	6.959.832.000,00	6.959.832.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0002	5	03	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.959.832.000,00	6.959.832.000,00	6.959.832.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000						Badan Riset dan Inovasi Daerah	152.000.000,00	152.000.000,00	152.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	152.000.000,00	152.000.000,00	152.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	152.000.000,00	152.000.000,00	152.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.000.000,00	152.000.000,00	152.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.000.000,00	152.000.000,00	152.000.000,00
5.05.0.00.0.00.02.00						Badan Riset dan Inovasi Daerah	23.222.352.871,00	23.222.352.871,00	15.668.455.656,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10.138.995.500,00	10.138.995.500,00	3.192.255.800,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	8.513.998.900,00	8.513.998.900,00	1.588.818.900,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	7.860.329.000,00	7.860.329.000,00	1.008.149.000,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.01	0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.01	0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	249.999.900,00	249.999.900,00	244.299.900,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	335.828.600,00	335.828.600,00	287.207.600,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	67.841.400,00	67.841.400,00	49.162.400,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.324.998.200,00	1.324.998.200,00	1.315.362.800,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	380.000.200,00	380.000.200,00	378.199.800,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	900.000.000,00	900.000.000,00	892.165.000,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	22.499.000,00	22.499.000,00	22.499.000,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	22.499.000,00	22.499.000,00	22.499.000,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	299.998.400,00	299.998.400,00	288.074.100,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	99.999.000,00	99.999.000,00	99.998.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	64.999.900,00	64.999.900,00	53.075.900,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	134.999.500,00	134.999.500,00	134.999.300,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.083.357.371,00	13.083.357.371,00	12.476.199.856,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.271.000,00	46.271.000,00	46.270.900,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.259.100,00	35.259.100,00	35.259.000,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.011.900,00	11.011.900,00	11.011.900,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.148.440.607,00	10.148.440.607,00	9.056.236.000,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.148.440.607,00	10.148.440.607,00	9.056.236.000,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	517.537.300,00	517.537.300,00	499.583.600,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.952.700,00	21.952.700,00	21.951.000,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.912.300,00	198.912.300,00	198.912.300,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.495.000,00	107.495.000,00	107.494.000,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.180.300,00	24.180.300,00	24.180.300,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.997.000,00	149.997.000,00	132.046.000,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	23.005.200,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	23.005.200,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.009.272,00	327.009.272,00	327.820.180,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.009.272,00	324.009.272,00	324.820.180,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.019.099.192,00	2.019.099.192,00	2.523.283.976,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	850.000.000,00	850.000.000,00	775.681.916,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.169.099.192,00	1.169.099.192,00	1.747.602.060,00
5.07.0.00.0.00.01.0000						Badan Penghubung	8.678.749.909,00	8.678.749.909,00	8.718.553.744,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07				PENGLOLAAN PENGHUBUNG	8.678.749.909,00	8.678.749.909,00	8.718.553.744,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.013.725.360,00	3.013.725.360,00	3.013.009.760,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3.013.725.360,00	3.013.725.360,00	3.013.009.760,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	45.569.400,00	45.569.400,00	45.569.400,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	242.982.072,00	242.982.072,00	242.416.472,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.725.173.888,00	2.725.173.888,00	2.725.023.888,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.665.024.549,00	5.665.024.549,00	5.705.543.984,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.876.800,00	4.876.800,00	4.857.200,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.876.800,00	4.876.800,00	4.857.200,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.049.762.065,00	3.049.762.065,00	2.841.784.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.049.762.065,00	3.049.762.065,00	2.841.784.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.486.000,00	227.486.000,00	225.894.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.600,00	9.999.600,00	9.999.600,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.996.800,00	49.996.800,00	49.996.800,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.499.600,00	7.499.600,00	7.317.600,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.990.000,00	74.990.000,00	73.580.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.827.900,00	99.827.900,00	98.243.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.827.900,00	99.827.900,00	98.243.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.208.686.136,00	1.208.686.136,00	1.210.690.136,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.996.000,00	9.996.000,00	10.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	278.000.000,00	278.000.000,00	280.000.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	920.690.136,00	920.690.136,00	920.690.136,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.074.385.648,00	1.074.385.648,00	1.324.075.648,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	879.877.176,00	879.877.176,00	879.877.176,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	349.700.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.508.472,00	94.508.472,00	94.498.472,00
6.01.0.00.0.00.01.0000						Inspektorat	37.136.745.394,00	37.136.745.394,00	36.023.268.248,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	37.136.745.394,00	37.136.745.394,00	36.023.268.248,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	37.136.745.394,00	37.136.745.394,00	36.023.268.248,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.514.127.136,00	4.514.127.136,00	4.421.481.540,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.049.847.956,00	3.049.847.956,00	3.007.021.240,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	449.999.884,00	449.999.884,00	450.060.460,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	249.999.992,00	249.999.992,00	250.232.480,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	199.999.900,00	199.999.900,00	199.999.900,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	299.999.596,00	299.999.596,00	300.115.840,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	899.848.892,00	899.848.892,00	900.080.880,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	449.999.700,00	449.999.700,00	406.299.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	499.999.992,00	499.999.992,00	500.232.480,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.464.279.180,00	1.464.279.180,00	1.414.460.300,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	149.999.992,00	149.999.992,00	150.232.480,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.314.279.188,00	1.314.279.188,00	1.264.227.820,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.301.549.952,00	3.301.549.952,00	3.291.364.980,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.601.557.364,00	1.601.557.364,00	1.591.034.160,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	549.999.988,00	549.999.988,00	539.191.320,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	1.051.557.376,00	1.051.557.376,00	1.051.842.840,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	1.699.992.588,00	1.699.992.588,00	1.700.330.820,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	549.999.788,00	549.999.788,00	550.348.120,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	299.999.600,00	299.999.600,00	299.999.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	149.993.200,00	149.993.200,00	149.983.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.321.068.306,00	29.321.068.306,00	28.310.421.728,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000,00	130.000.000,00	111.295.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	68.028.400,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	43.267.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.068.568.090,00	21.068.568.090,00	21.385.658.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.068.568.090,00	21.068.568.090,00	21.385.658.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.839.441.600,00	1.839.441.600,00	1.831.300.900,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.500,00	49.999.500,00	49.998.700,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.473.200,00	118.473.200,00	114.418.700,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169.979.300,00	169.979.300,00	167.177.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.995.600,00	25.995.600,00	25.644.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.996.000,00	44.996.000,00	44.114.400,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.349.998.000,00	1.349.998.000,00	1.349.948.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.660.347.300,00	1.660.347.300,00	1.470.982.588,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.660.347.300,00	1.660.347.300,00	1.470.982.588,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	680.097.876,00	680.097.876,00	586.432.640,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.997.876,00	399.997.876,00	306.332.640,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.942.613.440,00	3.942.613.440,00	2.924.752.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.149.988.064,00	2.149.988.064,00	2.139.679.260,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.486.181.792,00	1.486.181.792,00	487.664.280,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	306.443.584,00	306.443.584,00	297.408.560,00
8.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	200.351.521.521,00	200.351.521.521,00	198.838.878.900,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	200.351.521.521,00	200.351.521.521,00	198.838.878.900,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	200.351.521.521,00	200.351.521.521,00	198.838.878.900,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.512.428.684,00	1.512.428.684,00	4.320.805.120,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.512.428.684,00	1.512.428.684,00	4.320.805.120,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	712.428.684,00	712.428.684,00	741.921.620,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	0012	Pembentukan Paskibraka	800.000.000,00	800.000.000,00	3.578.883.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	178.156.029.440,00	178.156.029.440,00	180.149.915.352,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	178.156.029.440,00	178.156.029.440,00	180.149.915.352,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	178.156.029.440,00	178.156.029.440,00	180.149.915.352,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	50.000.000,00	50.000.000,00	118.457.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	50.000.000,00	50.000.000,00	118.457.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	118.457.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	7.425.091.544,00	7.425.091.544,00	553.056.560,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	7.425.091.544,00	7.425.091.544,00	553.056.560,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7.425.091.544,00	7.425.091.544,00	553.056.560,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.212.429.288,00	1.212.429.288,00	2.351.818.520,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.212.429.288,00	1.212.429.288,00	2.351.818.520,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	212.429.288,00	212.429.288,00	1.364.464.520,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	987.354.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.995.542.565,00	11.995.542.565,00	11.344.826.348,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	49.207.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	34.212.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	14.995.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.926.772.925,00	9.926.772.925,00	8.821.852.164,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.926.772.925,00	9.926.772.925,00	8.821.852.164,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.564.100,00	340.564.100,00	346.524.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.989.100,00	14.989.100,00	14.989.100,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.585.000,00	78.585.000,00	78.585.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	75.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	34.623.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	4.996.100,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.990.000,00	126.990.000,00	138.330.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.796.200,00	137.796.200,00	125.643.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137.796.200,00	137.796.200,00	125.643.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	810.222.440,00	810.222.440,00	978.303.584,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.960.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	693.262.440,00	693.262.440,00	861.343.584,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.186.900,00	730.186.900,00	1.023.295.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	544.600.000,00	544.600.000,00	828.165.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.640.000,00	25.640.000,00	25.640.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	133.456.900,00	133.456.900,00	143.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.490.000,00	14.490.000,00	14.490.000,00
TOTAL							5.958.811.167.446,00	5.958.739.106.536,00	6.917.008.137.900,00

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN IX

SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH



PROVINSI BALI
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.589.325.900,00	612.786.000,00	0,00	0,00	4.202.111.900,00
2	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.149.306.912,00	0,00	0,00	0,00	4.149.306.912,00
3	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14.114.700,00	0,00	0,00	0,00	14.114.700,00
4	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	22.404.300,00	0,00	0,00	0,00	22.404.300,00
5	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	19.267.800,00	0,00	0,00	0,00	19.267.800,00
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	99.556.000,00	0,00	0,00	0,00	99.556.000,00
7	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	32.999.400,00	0,00	0,00	0,00	32.999.400,00
8	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	34.710.800,00	0,00	0,00	0,00	34.710.800,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
9	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	275.346.020,00	0,00	0,00	0,00	275.346.020,00
10	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.481.641.480,00	1.383.383.300,00	0,00	0,00	3.865.024.780,00
11	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	320.771.180,00	0,00	0,00	0,00	320.771.180,00
12	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	436.740.470,00	427.489.350,00	0,00	0,00	864.229.820,00
13	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	467.630.260,00	176.827.910,00	0,00	0,00	644.458.170,00
14	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	725.508.960,00	605.418.500,00	0,00	0,00	1.330.927.460,00
15	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	274.884.180,00	0,00	0,00	0,00	274.884.180,00
16	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	246.339.366,00	79.295.850,00	0,00	0,00	325.635.216,00
17	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	UPTD Pengelolaan Sampah	4.132.670.988,00	93.000.000,00	0,00	0,00	4.225.670.988,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
18	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengelolaan Sampah	520.237.740,00	0,00	0,00	0,00	520.237.740,00
19	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	1.030.885.900,00	870.000.000,00	0,00	0,00	1.900.885.900,00
20	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	952.215.854,00	553.655.600,00	0,00	0,00	1.505.871.454,00
21	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	400.282.040,00	0,00	0,00	0,00	400.282.040,00
22	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
23	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
24	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	12.650.442.960,00	114.593.461.170,00	0,00	0,00	127.243.904.130,00
25	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	11.404.121.720,00	50.442.100,00	0,00	0,00	11.454.563.820,00
26	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.429.339.360,00	0,00	0,00	0,00	3.429.339.360,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
27	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	469.557.380,00	44.500.000,00	0,00	0,00	514.057.380,00
28	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	441.297.200,00	0,00	0,00	0,00	441.297.200,00
29	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	90.906.200,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.290.906.200,00
30	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.515.492.680,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	16.515.492.680,00
31	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.898.856.580,00	0,00	0,00	0,00	3.898.856.580,00
32	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	503.067.600,00	0,00	0,00	0,00	503.067.600,00
33	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	248.681.272,00	0,00	0,00	0,00	248.681.272,00
34	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	520.445.240,00	0,00	0,00	0,00	520.445.240,00
35	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.370.039.964,00	0,00	0,00	0,00	2.370.039.964,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
36	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.539.986.476,00	180.535.600,00	0,00	0,00	5.720.522.076,00
37	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	104.890.000,00	4.500.005.236,00	0,00	0,00	4.604.895.236,00
38	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.387.555.620,00	0,00	0,00	0,00	1.387.555.620,00
39	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000.000,00
40	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	27.003.500,00	0,00	0,00	0,00	27.003.500,00
41	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan	271.047.840,00	600.000.000,00	0,00	0,00	871.047.840,00
42	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Dinas Perhubungan	272.437.140,00	200.000.000,00	0,00	0,00	472.437.140,00
43	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Perhubungan	2.797.416.190,00	562.096.700,00	0,00	0,00	3.359.512.890,00
44	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan	888.417.060,00	0,00	0,00	0,00	888.417.060,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
45	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	885.317.240,00	0,00	0,00	0,00	885.317.240,00
46	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	844.550.240,00	33.170.300,00	0,00	0,00	877.720.540,00
47	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	UPTD Pengelolaan Air Minum	27.429.877.464,00	1.626.100.000,00	0,00	0,00	29.055.977.464,00
48	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	139.567.000,00	0,00	0,00	0,00	139.567.000,00
49	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	516.902.800,00	86.709.700,00	0,00	0,00	603.612.500,00
50	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Perlengkapan Jalan	149.362.440,00	0,00	0,00	0,00	149.362.440,00
51	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	UPTD Perlengkapan Jalan	1.115.295.070,00	0,00	0,00	0,00	1.115.295.070,00
52	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	302.874.792,00	76.088.300,00	0,00	0,00	378.963.092,00
53	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	2.002.454.340,00	124.000.000,00	0,00	0,00	2.126.454.340,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
54	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	490.921.080,00	59.856.900,00	0,00	0,00	550.777.980,00
55	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	7.346.483.472,00	0,00	0,00	0,00	7.346.483.472,00
56	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Pendapatan Daerah	37.912.700,00	0,00	0,00	0,00	37.912.700,00
57	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	219.328.560,00	0,00	0,00	0,00	219.328.560,00
58	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.271.343.020,00	0,00	0,00	0,00	1.271.343.020,00
60	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.853.072.240,00	0,00	0,00	0,00	1.853.072.240,00
61	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	320.543.320,00	0,00	0,00	0,00	320.543.320,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
62	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.039.023.180,00	614.788.400,00	0,00	0,00	3.653.811.580,00
63	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	49.991.600,00	0,00	0,00	0,00	49.991.600,00
65	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	272.598.080,00	0,00	0,00	0,00	272.598.080,00
66	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.607.890.300,00	0,00	0,00	0,00	14.607.890.300,00
67	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	322.387.120,00	0,00	0,00	0,00	322.387.120,00
68	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	456.000.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000.000,00
69	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.573.647.880,00	0,00	0,00	0,00	6.573.647.880,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
70	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	97.783.980,00	0,00	0,00	0,00	97.783.980,00
71	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.507.850.700,00	0,00	0,00	0,00	1.507.850.700,00
72	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	547.694.020,00	0,00	0,00	0,00	547.694.020,00
73	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.996.192.920,00	28.437.300,00	0,00	0,00	4.024.630.220,00
74	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.346.238.120,00	0,00	0,00	0,00	1.346.238.120,00
75	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8.000.370.480,00	0,00	0,00	0,00	8.000.370.480,00
76	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	550.912.168,00	2.527.233.000,00	0,00	0,00	3.078.145.168,00
77	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.158.793.160,00	0,00	0,00	0,00	2.158.793.160,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
78	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	906.593.356,00	0,00	0,00	0,00	906.593.356,00
79	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.240.390.545,00	0,00	0,00	0,00	2.240.390.545,00
80	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	333.819.060,00	0,00	0,00	0,00	333.819.060,00
81	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	743.282.880,00	10.000.000,00	0,00	0,00	753.282.880,00
82	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
83	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.219.955.940,00	0,00	0,00	0,00	1.219.955.940,00
84	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	630.274.170,00	0,00	0,00	0,00	630.274.170,00
85	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	607.072.190,00	0,00	0,00	0,00	607.072.190,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
86	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	UPTD Rumah Kreatif	827.213.900,00	0,00	0,00	0,00	827.213.900,00
87	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.284.365.100,00	0,00	0,00	0,00	4.284.365.100,00
88	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.089.606.560,00	0,00	0,00	0,00	1.089.606.560,00
89	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	171.058.029.832,00	85.200.000,00	0,00	0,00	171.143.229.832,00
90	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.601.386.460,00	0,00	0,00	0,00	1.601.386.460,00
91	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Penghubung	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
92	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.267.801.680,00	0,00	0,00	0,00	2.267.801.680,00
93	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.223.268.404,00	2.859.507.498,00	0,00	0,00	6.082.775.902,00
94	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.481.719.140,00	0,00	0,00	0,00	3.481.719.140,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
95	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Riset dan Inovasi Daerah	293.462.300,00	0,00	0,00	0,00	293.462.300,00
96	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Riset dan Inovasi Daerah	3.051.958.656,00	520.005.200,00	0,00	0,00	3.571.963.856,00
97	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Biro Organisasi	37.682.140,00	100.000.000,00	0,00	0,00	137.682.140,00
98	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Biro Organisasi	387.682.140,00	0,00	0,00	0,00	387.682.140,00
99	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.856.031.340,00	388.707.100,00	0,00	0,00	2.244.738.440,00
100	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Umum dan Protokol	30.223.352.802,00	0,00	0,00	0,00	30.223.352.802,00
101	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	427.237.620,00	0,00	0,00	0,00	427.237.620,00
102	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	483.824.320,00	0,00	0,00	0,00	483.824.320,00
103	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	155.186.420,00	0,00	0,00	0,00	155.186.420,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
104	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	106.084.280,00	0,00	0,00	0,00	106.084.280,00
105	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.134.306.080,00	1.076.000,00	0,00	0,00	2.135.382.080,00
107	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	285.448.560,00	0,00	0,00	0,00	285.448.560,00
108	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Sekretariat Daerah	305.714.600,00	0,00	0,00	0,00	305.714.600,00
109	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sekretariat Daerah	247.336.742,00	0,00	0,00	0,00	247.336.742,00
110	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	115.814.229.778,00	0,00	0,00	0,00	115.814.229.778,00
111	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sekretariat DPRD	18.836.489.000,00	5.780.798.200,00	0,00	0,00	24.617.287.200,00
112	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	6.359.832.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	6.959.832.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
113	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	701.912.600,00	50.000.000,00	0,00	0,00	751.912.600,00
114	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	405.864.180,00	25.537.000,00	0,00	0,00	431.401.180,00
115	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	108.216.000,00	0,00	0,00	0,00	108.216.000,00
116	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	32.263.655.736,00	0,00	0,00	0,00	32.263.655.736,00
117	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	521.103.400,00	0,00	0,00	0,00	521.103.400,00
118	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kesehatan	247.810.728.040,00	18.837.000,00	0,00	0,00	247.829.565.040,00
119	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	149.730.000,00	0,00	0,00	0,00	149.730.000,00
120	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	33.141.400,00	0,00	0,00	0,00	33.141.400,00
121	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	44.997.600,00	0,00	0,00	0,00	44.997.600,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
122	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	24.884.800,00	0,00	0,00	0,00	24.884.800,00
123	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	169.431.000,00	0,00	0,00	0,00	169.431.000,00
124	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00
125	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	1.339.891.423,00	89.050.800,00	0,00	0,00	1.428.942.223,00
126	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
127	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	332.121.540,00	0,00	0,00	0,00	332.121.540,00
128	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	74.981.000,00	0,00	0,00	0,00	74.981.000,00
129	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	105.685.860.330,00	152.238.607.429,00	0,00	0,00	257.924.467.759,00
130	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	7.463.282.800,00	0,00	0,00	0,00	7.463.282.800,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
131	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.123.381.600,00	0,00	0,00	0,00	1.123.381.600,00
132	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
133	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	12.851.317.670,00	1.079.586.258,00	0,00	0,00	13.930.903.928,00
134	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	166.928.560,00	0,00	0,00	0,00	166.928.560,00
135	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	55.523.800,00	0,00	0,00	0,00	55.523.800,00
136	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	10.830.000,00	0,00	0,00	0,00	10.830.000,00
137	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	264.416.700,00	0,00	0,00	0,00	264.416.700,00
138	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	25.825.700,00	0,00	0,00	0,00	25.825.700,00
139	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.996.400,00	0,00	0,00	0,00	9.996.400,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
140	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	267.258.400,00	0,00	0,00	0,00	267.258.400,00
141	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.203.500,00	0,00	0,00	0,00	9.203.500,00
142	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3.288.053.800,00	3.536.819.600,00	0,00	0,00	6.824.873.400,00
143	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	18.569.500,00	0,00	0,00	0,00	18.569.500,00
144	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.630.000,00	0,00	0,00	0,00	9.630.000,00
145	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	119.980.100,00	0,00	0,00	0,00	119.980.100,00
146	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.649.015.100,00	0,00	0,00	0,00	2.649.015.100,00
147	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Bali Mandara	0,00	29.732.070.000,00	0,00	0,00	29.732.070.000,00
148	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	RSUD Bali Mandara	194.352.159.596,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	201.352.159.596,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
149	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Jiwa	0,00	1.425.000.000,00	0,00	0,00	1.425.000.000,00
150	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rumah Sakit Jiwa	24.618.056.902,00	996.053.500,00	0,00	0,00	25.614.110.402,00
151	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	0,00	4.425.000.000,00	0,00	0,00	4.425.000.000,00
152	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	71.874.000.000,00	8.126.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000.000,00
153	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	203.180.000,00	568.320.000,00	0,00	0,00	771.500.000,00
154	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	558.477.776,00	0,00	0,00	0,00	558.477.776,00
155	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan	5.803.377.106,00	1.178.535.444,00	0,00	0,00	6.981.912.550,00
156	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa	2.545.651.820,00	0,00	0,00	0,00	2.545.651.820,00
157	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	336.350.000,00	0,00	0,00	0,00	336.350.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
158	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	679.701.765,00	16.057.700,00	0,00	0,00	695.759.465,00
159	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00
160	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	3.622.477.920,00	231.475.800,00	0,00	0,00	3.853.953.720,00
161	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	76.049.700,00	0,00	0,00	0,00	76.049.700,00
162	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	101.569.200,00	0,00	0,00	0,00	101.569.200,00
163	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	660.856.360,00	0,00	0,00	0,00	660.856.360,00
164	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	1.261.234.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.234.000,00
165	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	858.838.600,00	0,00	0,00	0,00	858.838.600,00
166	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	189.196.900,00	9.000.000,00	0,00	0,00	198.196.900,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
167	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	2.435.865.260,00	11.974.900,00	0,00	0,00	2.447.840.160,00
168	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Labotarium dan Pengujian Obat tradisional	512.421.700,00	88.241.100,00	0,00	0,00	600.662.800,00
169	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Labotarium dan Pengujian Obat tradisional	40.800.000,00	0,00	0,00	0,00	40.800.000,00
170	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelayanan Sosial	2.280.708.420,00	3.069.450.000,00	0,00	0,00	5.350.158.420,00
171	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	UPTD Pelayanan Sosial	1.556.298.500,00	0,00	0,00	0,00	1.556.298.500,00
172	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional, dan Pengelolaan Perbekalan	215.311.500,00	0,00	0,00	0,00	215.311.500,00
173	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional, dan Pengelolaan Perbekalan	426.814.200,00	878.088.800,00	0,00	0,00	1.304.903.000,00
174	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	3.983.031.540,00	116.000.000,00	0,00	0,00	4.099.031.540,00
175	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	569.557.660,00	19.052.000,00	0,00	0,00	588.609.660,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
176	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	73.519.900,00	0,00	0,00	0,00	73.519.900,00
177	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	101.500.000,00	0,00	0,00	0,00	101.500.000,00
178	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Kebudayaan	545.556.320,00	0,00	0,00	0,00	545.556.320,00
179	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Kebudayaan	47.497.400,00	0,00	0,00	0,00	47.497.400,00
180	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan	55.664.821.760,00	0,00	0,00	0,00	55.664.821.760,00
181	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Kebudayaan	252.121.840,00	0,00	0,00	0,00	252.121.840,00
182	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kebudayaan	25.028.353.300,00	0,00	0,00	0,00	25.028.353.300,00
183	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	466.839.138.896,00	0,00	0,00	0,00	466.839.138.896,00
184	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	3.112.534.300,00	0,00	0,00	0,00	3.112.534.300,00
185	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
186	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	643.263.640,00	50.000.000,00	0,00	0,00	693.263.640,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
187	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	UPTD Museum Bali	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
188	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Museum Bali	2.305.129.700,00	0,00	0,00	0,00	2.305.129.700,00
189	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	UPTD Taman Budaya	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
190	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Taman Budaya	3.568.542.620,00	0,00	0,00	0,00	3.568.542.620,00
TOTAL				1.846.087.258.493,00	372.233.332.545,00	0,00	0,00	2.218.320.591.038,00

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN X

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN



PROVINSI BALI
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	1					8		9
Golongan IV/d		16				15		31
Golongan IV/c		15	1			315		331
Golongan IV/b		6	116			1377	2	1501
Golongan IV/a			74	81		1165	36	1356
Golongan III/e								
Golongan III/d			23	391		976	425	1815
Golongan III/c				141		711	338	1190
Golongan III/b				40		540	701	1281
Golongan III/a				6		343	1196	1545
Golongan II/e								
Golongan II/d						38	425	463
Golongan II/c						142	444	586
Golongan II/b							205	205
Golongan II/a							28	28
Golongan I/e								
Golongan I/d							33	33
Golongan I/c							4	4
Golongan I/b							9	9
Golongan I/a								
PPPK							41	41

Pj. GUBERNUR BALI,

S.M. MAHENDRA JAYA

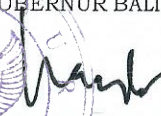
LAMPIRAN XI

DAFTAR PIUTANG DAERAH

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI BALI
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2022	Perkiraan Penambahan Tahun 2023	Perkiraan Pengurangan s/d. Desember 2023	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Piutang Pajak Daerah		49.755.902.471,00	33.600.000.000,00	49.755.902.471,00	33.600.000.000,00
	a. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	2023	141.462.300,00	-	141.462.300,00	-
	b. Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2023	277.695.000,00		277.695.000,00	-
	c. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2023	48.978.753.989,00	33.333.333.333,00	48.978.753.989,00	33.333.333.333,00
	d. Piutang Pajak Air Permukaan	2023	357.991.182,00	266.666.667,00	357.991.182,00	266.666.667,00
	e. Piutang Pajak Rokok	2023	-			-
2	Piutang Retribusi		232.621.000,00			232.621.000,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2023	-			-
4	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	2023	31.338.240.632,47			31.338.240.632,47
5	Piutang Lainnya	2023	40.568.111.707,00			40.568.111.707,00
Jumlah			121.894.875.810,47	33.600.000.000,00	49.755.902.471,00	105.738.973.339,47

Pj. GUBERNUR BALI,

S.M. MAHENDRA JAYA

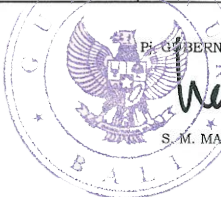
LAMPIRAN XII

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA

PROVINSI BALI
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal Yang telah disertakan sampai Tahun 2023	Penyertaan Modal Tahun 2024	Jumlah modal yang disertaka sampai dengan Tahun 2024	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah Tahun 2024	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali Tahun 2024	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13
1	2004	PT. BPD Bali	- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali - Keputusan Gubernur Bali Nomor 377/01-C/Hk/2021 tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali	Uang	Rp689.912.000.000,00	Rp689.912.000.000,00	Rp0,00	Rp689.912.000.000,00	Rp0,00	Rp141.503.624.600,00	Rp0,00	
2	2010	PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali - Keputusan Gubernur Bali Nomor 377/01-C/Hk/2021 tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali	Uang	Rp135.000.000.000,00	Rp135.000.000.000,00	Rp0,00	Rp135.000.000.000,00	Rp0,00	Rp924.579.900,00	Rp0,00	

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal Yang telah disertakan sampai Tahun 2023	Penyertaan Modal Tahun 2024	Jumlah modal yang disertaka sampai dengan Tahun 2024	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah Tahun 2024	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali Tahun 2024	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13
3	1974	Perusahaan Daerah Provinsi Bali	• Peraturan Daerah Propinsi, Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	Rp15.282.769.658,00	Rp15.282.769.658,00	Rp0,00	Rp15.282.769.658,00	0,00	Rp0,00	Rp0,00	
4	2003	PT. Puri Raharja	• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	Rp8.736.000.000,00	Rp8.736.000.000,00	Rp0,00	Rp8.736.000.000,00	0,00	Rp823.182.000,00	Rp0,00	
5	1990	PT. Asuransi Bangun Askrida	• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Asuransi Bangun Askrida • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Asuransi Bangun Askrida • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	Rp1.150.000.000,00	Rp1.150.000.000,00	Rp0,00	Rp1.150.000.000,00	0,00	Rp184.259.300,00	Rp0,00	
6	2013	PT. Jasamarga Bali Tol	• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00	Rp0,00	Rp100.000.000.000,00	0,00	Rp0,00	Rp0,00	
7	2022	PT. Perseroda Pariwisata Digital	- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Kerti Bali Santhi	Uang	Rp20.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	20.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	
Jumlah					Rp950.080.769.658,00	Rp950.080.769.658,00	Rp0,00	Rp950.080.769.658,00	Rp20.000.000.000,00	Rp143.435.645.800,00	Rp0,00	Rp0,00



GOVERNOR BALI



S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XIII

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI BALI
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun 2022	Perkiraan Penambahan Tahun 2023	Perkiraan Pengurangan Tahun 2023	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Aset Tetap Rusak Berat	Aset Lainnya	37.049.408.706,37	13.316.852.234,37	3.389.314.063,92	46.976.946.876,82
2	Aset Tetap Yang Akan Di Hibahkan	Aset Lainnya	239.827.247.173,00	-	14.071.393.474,00	225.755.853.699,00
3	Aset Lain-Lain Lainnya	Aset Lainnya	14.027.181.614,63	-	927.455.700,00	13.099.725.914,63
	Jumlah		290.903.837.494,00	13.316.852.234,37	18.388.163.237,92	285.832.526.490,45

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XIV

**DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM
DISELESAIKAN DAN DINGGARKAN KEMBALI
DALAM TAHUN YANG DIRENCANAKAN**

1) Tahun Pertama

PROVINSI BALI
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
dst.								
Jumlah								

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

2) Tahun Kedua

PROVINSI BALI
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-2 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-2	Perubahan APBD TA T-2		APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
dst.											
Jumlah											

 Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XV

DAFTAR DANA CADANGAN

PROVINSI BALI
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pj. GUBERNUR BALI,



M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XVI

DAFTAR PINJAMAN DAERAH

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI BALI
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah dari PT. Sarana Multi Infrastruktur	- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Tentang. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah - PMK Nomor 43/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah.	28 Desember 2020	1.493.501.960.600,00	8 Tahun dengan grace period 2 Tahun	0%	Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali	145.788.065.929	-	1.347.713.894.671	-
2											
3											
4											
Jumlah				1.493.501.960.600,00				145.788.065.929		1.347.713.894.671	

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA